



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI  
NOMOR : 43 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai implementasi ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
- Mengingat:
1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan selaku Pencipta Arsip.
8. Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan .
9. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
11. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
12. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
13. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
14. Arsip Statis adalah arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan permanen, yang telah diverifikasi oleh Dinas.
15. Arsiparis adalah pejabat fungsional arsiparis pada Dinas dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten .
16. Pencipta Arsip adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sebagai satu kesatuan yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
17. Unit Pengolah adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab mengolah seluruh arsip aktif yang tercipta berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dilingkungannya.

18. Unit Kearsipan III adalah Unit Kearsipan yang berkedudukan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati .
19. Unit Kearsipan II adalah Unit Kearsipan yang berada pada Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab mengelola seluruh arsip inaktif di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten dan melaksanakan pembinaan kepada unit pengolah di lingkungannya.
20. Unit Kearsipan I adalah Unit Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang berkedudukan di Dinas dan mempunyai tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab dalam pengelolaan arsip inaktif dengan retensi paling kurang 10 (sepuluh) tahun dan pembinaan kearsipan di lingkungan pencipta arsip.
21. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
22. Klasifikasi adalah proses identifikasi katagori-katagori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
23. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kegiatan kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan perorangan.
24. Klasifikasi Akses Arsip adalah katagori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
25. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
26. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.
27. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
28. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang

serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.

29. Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
30. Informasi Yang Dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
31. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
32. Pengguna Internal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten .
33. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten .
34. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otoritas legal pemanfaatan informasi publik.
35. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggungjawab bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi Badan Publik.
36. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. Tersedianya pedoman penggunaan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. Terselenggaranya pelayanan penggunaan arsip secara efektif dan efisien.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis, Pengamanan Arsip Dinamis, serta Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip Dinamis.

BAB II

Bagian Kesatu

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

Pasal 4

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia;
- b. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. setiap pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggungjawab tugas dan kewenangannya; dan
- e. publik dapat mengakses informasi Pemerintah Daerah Kabupaten yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 5

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang termasuk ke dalam kategori arsip biasa/umum/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten, yaitu:

- a. arsip dinamis dari lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan meliputi Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Hubungan Masyarakat, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian

Umum, Bagian Keuangan dan Sarana, Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur;

- b. arsip dinamis dari lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan ; dan
- c. arsip dinamis dari Perangkat Daerah lainnya.

#### Pasal 6

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang termasuk kedalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu:

- a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan seperti personal file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan, rekam medis pegawai;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Unit Layanan Pengadaan seperti dokumen pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal, Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
- d. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bidang keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja; dan
- e. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi urusan kearsipan seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

#### Pasal 7

Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang termasuk kedalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu:

- a. Arsip dinamis yang tercipta dari Bagian Hukum seperti kasus/sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Peraturan Daerah, Peraturan Bupati , dan Keputusan Bupati ; dan
- b. Arsip dinamis yang tercipta dari Bagian Umum seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital, dokumen lainnya

## Pasal 8

Penetapan tingkat klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

## Pengamanan Arsip Dinamis

## Pasal 9

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.
- (2) Pengamanan arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas di simpan pada *filing cabinet*, dan arsip kategori rahasia di simpan pada lemari besi.

## Pasal 10

- (1) Penentuan Pengelola Arsip meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Kearsipan dan Pengelola Arsip Aktif di *Central File* masing masing Unit Pengolah.
- (2) Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di *Records Center* (Pusat Arsip) dalam menetapkan hak akses arsip.
- (3) Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif mempunyai wewenang dan tanggungjawab mengelola arsip di *Central File* dan/atau di *Records Center*.

## Pasal 11

- (1) Pengamanan informasi arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi Penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Records Centre* dan *Central File*.

## Bagian Ketiga

## Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip

## Pasal 12

- (1) Klasifikasi Keamanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi pedoman dalam pengaturan akses arsip dinamis.
- (2) Pengaturan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Pengaturan akses arsip aktif dan arsip inaktif dengan retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun, dimuat dalam Standard Operasional dan Prosedur yang ditetapkan



dengan keputusan pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten masing-masing; dan

- b. Pengaturan akses arsip inaktif dengan retensi paling kurang 10 (sepuluh) tahun dimuat dalam Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Bagian Keempat

#### Pengamanan fisik Arsip dan informasi Dinamis

#### Pasal 13

- (1) Pencipta arsip mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan pengamanan fisik arsip dinamis maupun informasinya sesuai dengan tingkat klasifikasi
- (2) Pengamanan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan dengan memperhatikan media arsip.

Tabel Pengamanan Arsip Dinamis Sesuai Dengan Tingkat Klasifikasi Keamanan

| NO. | TINGKAT<br>KLASIFIKASI<br>KEAMANAN | MEDIA ARSIP  |   |  |  |   |   |
|-----|------------------------------------|--|---|--|--|---|---|
|     |                                    | ARSIP KONVENSIONAL   |   |  | ARSIP ELEKTRONIK   |   |   |
|     |                                    | Arsip  | Pengguna  | Prasarana & Sarana                           | Arsip  | Pengguna  | Prasarana & Sarana  |
| 1.  | Biasa/<br>Terbuka                  | Tidak ada persyaratan dan prosedur khusus.                                     | Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses                  | Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus | <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip   | Pengguna yang berasal dari eksternal dan internal yang mempunyai hak akses  | Tidak memerlukan prasarana dan sarana khusus  |
| 2.  | Terbatas                           | Ada persyaratan dan prosedur dengan memberikan cap "TERBATAS" pada fisik arsip | Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Diperlukan tempat penyimpanan yang aman      | 1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip<br>2. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal | 1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital)<br>2. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual | 1. Autentikasi server<br>2. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasinya khusus<br>3. <i>Firewall</i> dan sistem-sistem serta prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi |

| NO. | TINGKAT<br>KLASIFIKASI<br>KEAMANAN | MEDIA ARSIP  |   |   |  |  |   |
|-----|------------------------------------|--|---|---|--|--|---|
|     |                                    | ARSIP KONVENSIONAL   |   |   | ARSIP ELEKTRONIK   |  |   |
|     |                                    | Arsip  | Pengguna  | Prasarana & Sarana  | Arsip  | Pengguna   | Prasarana & Sarana  |
| 3.  | Rahasia                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "RAHASIA" pada fisik arsip</li> <li>2. Tidak sembarangan meletakkan arsip/ dokumen yang bersifat rahasia</li> </ol> | Dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum | Lokasi aman dengan akses yang terbatas  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip</li> <li>2. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-pihak eksternal</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Hanya staf yang ditunjuk oleh kementerian atau organisasi dan tingkat di atasnya yang dapat mengakses arsip tersebut</li> <li>4. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital)</li> <li>5. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus</li> <li>5. <i>Firewall</i> serta sistem-sistem dan prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi. <i>Firewall</i> adalah sistem untuk melindungi komputer atau jaringan dari akses komputer lain yang tidak memiliki hak untuk mengakses komputer atau jaringan kita</li> </ol> |
| 4.  | Sangat<br>Rahasia                  | Ada persyaratan dan prosedur rahasia dengan memberikan cap "SANGAT RAHASIA" pada fisik arsip   | Dibatasi hanya untuk Penentu Kebijakan, Pengawasan, dan Penegak Hukum                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disimpan dalam zona yang sangat aman, dengan penelusuran jejak akses</li> <li>2. Penerapan kebijakan "Meja harus bersih"</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Back-up</i> secara teratur untuk tujuan pemulihan sistem dalam rangka menjamin autentisitas arsip</li> <li>2. File-file elektronik (termasuk database) harus dilindungi terhadap penggunaan internal atau oleh pihak-</li> </ol>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autentikasi pengguna (nama pengguna/ <i>password</i> atau ID digital)</li> <li>2. Penggunaan untuk <i>log in</i> pada tingkat individual</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autentikasi server</li> <li>2. Langkah-langkah keamanan dengan <i>Operating System</i> khusus atau aplikasi khusus</li> <li>3. <i>Firewall</i> dan sistem-sistem dan prosedur-prosedur deteksi terhadap intrusi.</li> </ol>   |

Bagian Kelima  
Penyampaian fisik Arsip dan informasi Dinamis  
Pasal 14

- (1) Penyampaian fisik arsip dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi
- (2) Penyampaian fisik arsip dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip dinamis dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi

Tabel Prosedur Pengiriman Informasi

| NO. | TINGKAT/<br>DERAJAT<br>KLASIFIKASI | ARSIP KONVENSIONAL  | ARSIP ELEKTRONIK   |
|-----|------------------------------------|---|--|
| 1.  | Biasa/Terbuka                      | Tidak ada persyaratan prosedur khusus.  | Tidak ada prosedur khusus.   |
| 2.  | Terbatas                           | Amplop segel.   | Apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan alamat khusus, <i>password</i> , dan lain-lain.  |
| 3.  | Rahasia                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan warna kertas yang berbeda</li> <li>2. Diberi kode rahasia</li> <li>3. Menggunakan amplop dobel</li> <li>4. Amplop segel, stempel rahasia.</li> <li>5. Konfirmasi tanda terima.</li> <li>6. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email.</li> <li>2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia.</li> <li>3. Menggunakan persandian atau kriptografi.</li> </ol>   |
| 4.  | Sangat Rahasia                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan warna kertas yang berbeda.</li> <li>2. Menggunakan amplop dobel bersegel.</li> <li>3. Audit jejak untuk setiap titik akses (misal: tandatangan).</li> <li>4. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia.</li> </ol>                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email.</li> <li>2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia.</li> <li>3. Menggunakan persandian atau kriptografi</li> <li>4. Harus ada pelacakan akses informasi untuk suatu pesan elektronik atau email.</li> </ol> |

Bagian Keenam  
Penggolongan Hak Akses Arsip Dinamis

Pasal 15

(1) Pengguna yang berhak di lingkungan internal instansi meliputi

- a. Penentu Kebijakan yaitu Bupati , Sekretaris Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah.
- b. Pelaksana kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa.
- c. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal.

(2) Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal instansi meliputi :

- a. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka.
- b. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan eksternal
- c. Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani

Tabel Pengguna yang berhak akses arsip dinamis

| No. | Tingkat Klasifikasi Keamanan dan Akses | Penentu Kebijakan | Pelaksana Kebijakan | Pengawas Internal/ Eksternal | Publik | Penegak Hukum |
|-----|--|-------------------|---------------------|------------------------------|--------|---------------|
| 1.  | Biasa/ Terbuka                         | √                 | √                   | √                            | √      | √             |
| 2.  | Terbatas                               | √                 | -                   | √                            | -      | √             |
| 3.  | Rahasia                                | √                 | -                   | √                            | -      | √             |
| 4.  | Sangat Rahasia                         | √                 | -                   | √                            | -      | √             |

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Kuningan ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 9 September 2019

  
**BUPATI KUNINGAN**  
  
**H. ACEP PURNAMA, SH, MH**

Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN

  
  
**DIAN RACHMAT YANUAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR 43

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 43 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 9 September 2019  
 TENTANG : SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP  
 DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP             |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                          |
|-----|------------|-------------------------|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|--|
|     |            |                         |   | SR                   | R | T | B |            |                    |  |
| 1   | 2          | 3                       |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                                     |
|     | LH         | URUSAN LINGKUNGAN HIDUP |   |                      |   |   |   |            |                    |  |
| 1   | LH.        | 1                       | TATA LINGKUNGAN   |                      |   |   |   |            |                    | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 2   | LH.        | 1                       | Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup                           |                      |   |   |   |            |                    | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 3   | LH.        |                         | Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan |                      |   |   |   |            |                    | Unit pelaksana urusan                  |
| 4   | LH.        |                         | 1 Dokumentasi Inventarisasi   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon | Resiko             | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 5   | LH.        |                         | 2 Pedoman Inventarisasi   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 6   | LH.        |                         | 3 Penetapan Ekoregion   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 7   | LH.        |                         | 4 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional                |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 8   | LH.        |                         | 5 Pedoman Penyusunan RPPLH Kabupaten , RPPLH Kabupaten/Kota                             |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 9   | LH.        | 2                       | Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam   |                      |   |   |   |            |                    |  |
| 10  | LH.        |                         | 1 Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam                                 |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 11  | LH.        |                         | 2 Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 12  | LH.        | 2                       | Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor  |                      |   |   |   |            |                    |  |
| 13  | LH.        |                         | 1 Evaluasi Penerapan  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan                  |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                                    |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |            | HAK AKSES      | DASAR PERTIMBANGAN                     | UNIT PENGOLAH    |
|-----|------------|-------------|------------------------------------|--|----------------------|---|---|------------|----------------|--|------------------|
|     |            |             |                                    |  | SR                   | R | T | B          |                |  |                  |
| 1   | 2          | 3           |                                    |  | 4                    | 5 | 6 | 7          | 8              | 9                                      | 10               |
|     |            |             |                                    |  |                      |   |   |            |                |  | lingkungan hidup |
| 14  | LH.        |             | 2                                  | Perencanaan Lingkungan Hidup   |                      |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |                  |
| 15  | LH.        |             | 3                                  | Ekonomi Lingkungan   |                      |   |   |            |                |  |                  |
| 16  | LH.        |             | 1                                  | Perencanaan Evaluasi Ekonomi   |                      |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |                  |
| 17  | LH.        |             | 2                                  | Perencanaan Internalisasi Lingkungan   |                      |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |                  |
| 18  | LH.        |             | 3                                  | Insentif dan Pendanaan Lingkungan  |                      |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |                  |
| 19  | LH.        |             | 4                                  | Dampak Lingkungan  |                      |   |   |            |                |  |                  |
| 20  | LH.        |             | 1                                  | Bimtek Dampak Lingkungan   |                      |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |                  |
| 21  | LH.        |             | 2                                  | Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan dalam Penilaian dokumen lingkungan   |                      |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |                  |
| 22  | LH.        |             | 3                                  | Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan dalam Pemeriksaan dokumen lingkungan |                      |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |                  |
| 23  | LH.        |             | 4                                  | Evaluasi   |                      |   | √ | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |                  |
| 24  | LH.        |             | 5                                  | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi   |                      |   | √ | Staff      |                | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |                  |
| 25  | LH.        | 2           | PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN |  |                      |   |   |            |                |  |                  |
| 26  | LH.        |             | 1                                  | Pemantauan dan Pengawasan  |                      |   |   |            |                |  |                  |
| 27  | LH.        |             | 1                                  | Industri Kimia   |                      |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |                  |
| 28  | LH.        |             | 2                                  | Industri Logam, Elektronika dan Mesin  |                      |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |                  |
| 29  | LH.        |             | 3                                  | Aneka Industri   |                      |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |                  |
| 30  | LH.        |             | 4                                  | Prasarana dan Jasa   |                      |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |                  |
| 31  | LH.        |             | 5                                  | Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas   |                      |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |                  |
| 32  | LH.        |             | 6                                  | Peternakan dan Perikanan   |                      |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |                  |
| 33  | LH.        |             | 7                                  | Perkebunan   |                      |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |                  |



| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                           | KLASIFIKASI KEAMANAN                        |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                          |
|-----|------------|-------------|---|---------------------------|---|---|---|---|-----------|--------------------|--|
|     |            |             |   |                           | SR  | R | T | B |           |                    |  |
| 1   | 2          | 3           |   |                           | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                                     |
| 34  | LH.        |             |   | 8                         | Kehutanan dan Holtikultura                  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 35  | LH.        |             |   | 9                         | Usaha Skala Kecil                           |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 36  | LH.        |             |   | 10                        | Transportasi Air dan Udara                  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 37  | LH.        |             |   | 11                        | Transportasi Darat                          |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 38  | LH.        |             |   | 12                        | Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 39  | LH.        |             | 2   | Evaluasi dan Pengembangan |   |   |   |   |           |                    |  |
| 40  | LH.        |             |   | 1                         | Industri Kimia                              |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 41  | LH.        |             |   | 2                         | Industri Logam, Elektronika dan Mesin       |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 42  | LH.        |             |   | 3                         | Aneka Industri                              |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 43  | LH.        |             |   | 4                         | Prasarana dan Jasa                          |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 44  | LH.        |             |   | 5                         | Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas        |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 45  | LH.        |             |   | 6                         | Peternakan dan Perikanan                    |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 46  | LH.        |             |   | 7                         | Perkebunan                                  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 47  | LH.        |             |   | 8                         | Kehutanan dan Holtikultura                  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 48  | LH.        |             |   | 9                         | Usaha Skala Kecil                           |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 49  | LH.        |             |   | 10                        | Transportasi Air dan Udara                  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 50  | LH.        |             |   | 11                        | Transportasi Darat                          |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 51  | LH.        |             |   | 12                        | Transportasi Kereta Api dan Kendaraan Berat |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 52  | LH.        | 3           | PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM |                           |   |   |   |   |           |                    |  |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                                |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |  |
|-----|---------------|-------------|---|--|---|---|---|--------------|-----------------------|----------------|--|
|     |               |             |   | SR   | R   | T | B |              |                       |                |  |
| 1   | 2             | 3           |   | 4  | 5   | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10             |  |
| 53  | LH.           |             | 1 | Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan |   |   |   |              |                       |                |  |
| 54  | LH.           |             |   | 1  | Pengembangan Sumber Daya Genetik                              |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 55  | LH.           |             |   | 2  | Pengembangan Keamanan Hayati                                  |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 56  | LH.           |             |   | 3  | Pemanfaatan Sumber Daya Genetik                               |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 57  | LH.           |             |   | 4  | Pengelolaan Sumber Daya Genetik /Pengembangan dan Pemanfaatan |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 58  | LH.           |             |   | 5  | Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Genetik     |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 59  | LH.           |             |   | 6  | Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Hayati                  |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 60  | LH.           |             |   | 7  | Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Hayati                     |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 61  | LH.           |             |   | 8  | Pengendalian Kerusakan Lahan Budidaya                         |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 62  | LH.           |             |   | 9  | Lahan Non Budidaya  |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 63  | LH.           |             | 2 | Kerusakan Ekosistem Perairan Darat                     |   |   |   |              |                       |                |  |
| 64  | LH.           |             |   | 1  | Kerusakan Ekosistem Sungai                                    |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 65  | LH.           |             |   | 2  | Pengelolaan Kualitas Air Sungai                               |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 66  | LH.           |             |   | 3  | Pengendalian Kerusakan Ekosistem Danau                        |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 67  | LH.           |             |   | 4  | Pengelolaan Kualitas Air Danau                                |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 68  | LH.           |             |   | 5  | Kerusakan Ekosistem Rawa gambut                               |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 69  | LH.           |             |   | 6  | Kerusakan Ekosistem Rawa bukan gambut                         |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |
| 70  | LH.           |             | 3 | Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut                |   |   |   |              |                       |                |  |
| 71  | LH.           |             |   | 1  | Pencegahan  |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup |

| No. | KODE KLAS.  | JENIS ARSIP |   |  |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH   |
|-----|-------------|-------------|---|--|---|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|---|
|     |             |             |   |  |   | SR                   | R | T | B |           |                    |   |
| 1   | 2           | 3           |   |  |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10  |
| 72  | LH.         |             |   | 2  | Penanggulangan  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup                |
| 73  | LH.         |             |   | 3  | Pemulihan   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup                |
| 74  | LH.         |             | 4   | Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer |   |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 75  | LH.         |             |   | 1  | Perangkat Mitigasi  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup                |
| 76  | LH.         |             |   | 2  | Laporan inventarisasi GRK nasional                                  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup                |
| 77  | LH.         |             |   | 3  | Data bidang inventarisasi GRK                                       |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup                |
| 78  | LH.         |             |   | 4  | Surat rekomendasi kepada importir terdaftar dan bahan perusak ozon  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup                |
| 79  | LH.         |             |   | 5  | Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan Ozon |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup                |
| 80  | LH.         |             |   | 6  | Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan             |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup                |
| 81  | LH.         |             | 5   | Adaptasi Perubahan Iklim                 |   |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 82  | LH.         |             |   | 1  | Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim                     |                      |   | √ |   | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup                |
| 83  | LH.         |             |   | 2  | Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim                    |                      |   |   | √ |           |                    | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup                |
| 84  | LH.         |             |   | 3  | Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim                |                      |   |   | √ |           |                    | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup                |
| 85  | LH.         |             |   | 4  | Media kliring kerentanan perubahan iklim                            |                      |   |   | √ |           |                    | Unit pelaksana urusan lingkungan hidup                |
|     | <b>PBLS</b> | <b>PBLS</b> | <b>PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH</b> |  |   |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 86  | PBLS        |             | 1   | Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun  |   |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 87  | PBLS        |             |   | 1  | Registrasi  |                      |   | √ |   | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 88  | PBLS        |             |   | 2  | Notifikasi  |                      |   | √ |   | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN                                |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |       |                |   |   |
|-----|------------|-------------|---|---|---|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|-------|----------------|---|---|
|     |            |             |   |   | SR  | R | T | B |           |                    |               |       |                |   |   |
| 1   | 2          | 3           |   |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |       |                |   |   |
| 89  | PBLS       |             |   | 3   | Pemantauan Sektor industri                          |   |   |   |           | √                  |               | Staff | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |   |
| 90  | PBLS       |             |   | 4   | Pemantauan Sektor non industri                      |   |   |   |           | √                  |               | Staff | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |   |
| 91  | PBLS       |             |   | 5   | Evaluasi dan Tindak Lanjut Sektor industri          |   |   |   |           | √                  |               | Staff | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |   |
| 92  | PBLS       |             |   | 6   | Evaluasi dan Tindak Lanjut Sektor non industri      |   |   |   |           | √                  |               | Staff | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |   |
| 93  | PBLS       |             | 2 | Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun |   |   |   |   |           |                    |               |       |                |   |   |
| 94  | PBLS       |             |   | 1   | Pengumpulan dan Pemanfaatan                         |   |   |   |           |                    | √             |       | Staff          | Tidak beresiko  | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 95  | PBLS       |             |   | 2   | Pengangkutan dan Pengolahan                         |   |   |   |           |                    | √             |       | Staff          | Tidak beresiko  | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 96  | PBLS       |             |   | 3   | Penimbunan dan Dumping                              |   |   |   |           | √                  |               |       |                | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |   |
| 97  | PBLS       |             |   | 4   | Notifikasi Limbah Lintas Batas                      |   |   |   |           |                    | √             |       | Staff          | Tidak beresiko  | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 98  | PBLS       |             |   | 5   | Rekomendasi Limbah Lintas Batas                     |   |   |   |           |                    | √             |       | Staff          | Tidak beresiko  | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 99  | PBLS       |             | 3 | Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 |   |   |   |   |           |                    |               |       |                |   |   |
| 100 | PBLS       |             |   | 1   | Pemantauan Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas |   |   |   |           |                    | √             |       | Staff          | Tidak beresiko  | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 101 | PBLS       |             |   | 2   | Pemantauan Manufaktur                               |   |   |   |           |                    | √             |       | Staff          | Tidak beresiko  | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 102 | PBLS       |             |   | 3   | Pemantauan Agroindustri                             |   |   |   |           |                    | √             |       | Staff          | Tidak beresiko  | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |

| No. | KODE KLAS.  | JENIS ARSIP             |   |                               |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH   |
|-----|-------------|-------------------------|---|-------------------------------|--|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|---|
|     |             |                         |   |                               |  | SR                   | R | T | B |           |                    |   |
| 1   | 2           | 3                       |   |                               |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10  |
| 103 | PBLS        |                         |   | 4                             | Pemantauan Prasarana, Jasa, dan Non Institusi                                      |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 104 | PBLS        |                         |   | 5                             | Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 105 | PBLS        |                         |   | 6                             | Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi Manufaktur                               |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 106 | PBLS        |                         |   | 7                             | Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi Agroindustri                             |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 107 | PBLS        |                         |   | 8                             | Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi Prasarana, Jasa, dan Non Institusi       |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 108 | PBLS        |                         | 4 | Pengelolaan Sampah            |  |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 109 | PBLS        |                         |   | 1                             | Pembatasan Sampah  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 110 | PBLS        |                         |   | 2                             | Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 111 | PBLS        |                         |   | 3                             | Pembentukan Dewan Adipura  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 112 | PBLS        |                         |   | 4                             | Penetapan Pemenang Adipura   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
|     | <b>PBLS</b> | <b>HUKUM LINGKUNGAN</b> |   |                               |  |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 113 | PBLS        |                         | 1 | Hukum Administrasi Lingkungan |  |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 114 | PBLS        |                         |   | 1                             | Pengelolaan Pengaduan  |                      |   | √ |   | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 115 | PBLS        |                         |   | 2                             | Pengembangan Pengaduan   |                      |   | √ |   | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 116 | PBLS        |                         |   | 3                             | Penerapan hukum administrasi lingkungan  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan        |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                     |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH   |
|-----|---------------|-------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|---|
|     |               |             |   |                                     |  | SR                      | R | T | B |              |                       |   |
| 1   | 2             | 3           |   |                                     |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10  |
|     |               |             |   |                                     |  |                         |   |   |   |              |                       | sampah  |
| 117 | PBLS          |             |   | 4                                   | Pengembangan hukum administrasi Lingkungan   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 118 | PBLS          |             | 2 | Penyelesaian Sengketa Lingkungan    |  |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 119 | PBLS          |             |   | 1                                   | Administrasi Gugatan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan  |                         | √ |   |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 120 | PBLS          |             |   | 2                                   | Gugatan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan   |                         | √ |   |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 121 | PBLS          |             |   | 3                                   | Kerugian Negara dan Masyarakat Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan                               |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 122 | PBLS          |             |   | 4                                   | Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 123 | PBLS          |             | 3 | Penegakan Hukum Pidana Lingkungan   |  |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 124 | PBLS          |             |   | 1                                   | Administrasi Penyidikan  |                         | √ |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 125 | PBLS          |             |   | 2                                   | Pelaksanaan Penyidikan   |                         | √ |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 126 | PBLS          |             |   | 3                                   | Koordinasi penuntutan  |                         | √ |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 127 | PBLS          |             |   | 4                                   | Evaluasi dan tindak lanjut Kordinasi Penuntutan  |                         | √ |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 128 | PBLS          |             |   | 5                                   | Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah |
| 129 | PBLS          |             | 4 | Perjanjian Internasional Lingkungan |  |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 130 | PBLS          |             |   | 1                                   | Pendapat Hukum Proses Pengesahan   |                         |   | √ |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan        |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |  |                                |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH   |
|-----|------------|-------------|--|--------------------------------|--|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|---|
|     |            |             |  |                                |  | SR                   | R | T | B |           |                    |   |
| 1   | 2          | 3           |  |                                |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10  |
|     |            |             |  |                                | Perjanjian Internasional                                   |                      |   |   |   |           |                    | sampah  |
| 131 | PBLS       |             |  | 2                              | Tindak Lanjut Perjanjian Internasional                     |                      |   | √ |   | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah                   |
| 132 | PBLS       |             |  | 3                              | Evaluasi Perjanjian Internasional Pencemaran               |                      |   | √ |   | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah                   |
| 133 | PBLS       |             |  | 4                              | Evaluasi Perjanjian Internasional Perusakan                |                      |   | √ |   | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengelola B3, limbah dan sampah                   |
|     | <b>KM</b>  |             | <b>KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b> |                                |  |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 134 | KM         |             | 1  | Komunikasi Lingkungan          |  |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 135 | KM         |             |  | 1                              | Program Pengembangan Komunikasi                            |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat |
| 136 | KM         |             |  | 2                              | Evaluasi Pengembangan Komunikasi                           |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat |
| 137 | KM         |             |  | 3                              | Publikasi  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat |
| 138 | KM         |             |  | 4                              | Kampanye   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat |
| 139 | KM         |             | 2  | Penguatan Inisiatif Masyarakat |  |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 140 | KM         |             |  | 1                              | Pengembangan dan Bimbingan Komunitas Pendidikan Lingkungan |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat |
| 141 | KM         |             |  | 2                              | Evaluasi Komunitas Pendidikan Lingkungan                   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat |
| 142 | KM         |             |  | 3                              | Inventarisasi Kearifan Lingkungan                          |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat |
| 143 | KM         |             |  | 4                              | Revitalisasi Kearifan Lingkungan                           |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat |
| 144 | KM         |             | 3  | Peningkatan Peran Masyarakat   |  |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 145 | KM         |             |  | 1                              | Masyarakat Kawasan Permukiman                              |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN                       |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH   |
|-----|------------|-------------|---|---|--|---|---|---|------------|--------------------|---|
|     |            |             |   |   | SR   | R | T | B |            |                    |   |
| 1   | 2          | 3           |   |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10  |
| 146 | KM         |             |   | 2   | Masyarakat Kawasan Rentan                  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat           |
| 147 | KM         |             |   | 3   | Masyarakat Petani                          |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat           |
| 148 | KM         |             |   | 4   | Masyarakat Nelayan                         |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat           |
| 149 | KM         |             | 4 | Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan                         |  |   |   |   |            |                    |   |
| 150 | KM         |             |   | 1   | Organisasi Sosial Dan Masyarakat           |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat           |
| 151 | KM         |             |   | 2   | Organisasi Profesi dan Dunia Usaha         |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat           |
|     |            |             |   | <b>PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS</b> |  |   |   |   |            |                    |   |
| 152 | PS         |             | 1 | Data dan Informasi Lingkungan                                       |  |   |   |   |            |                    |   |
| 153 | PS         |             |   | 1   | Pengumpulan dan Pengolahan Data            |   |   | √ | Tk. Eselon | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 154 | PS         |             |   | 2   | Manajemen Basis Data                       |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 155 | PS         |             |   | 3   | Analisis Data dan Penyajian Informasi      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 156 | PS         |             |   | 4   | Pengelolaan Informasi melalui Perpustakaan |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 157 | PS         |             |   | 5   | Pengembangan Instrumen Layanan Informasi   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 158 | PS         |             |   | 6   | Pengembangan Instrumen Analisis Data       |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 159 | PS         |             |   | 7   | Pengembangan Sistem Jaringan               |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis                                      |



| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                            |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH   |
|-----|------------|-------------|---|----------------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|---|
|     |            |             |   |                            |  | SR                   | R | T | B |            |                    |   |
| 1   | 2          | 3           |   |                            |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10  |
| 160 | PS         |             |   | 8                          | Pemeliharaan Jaringan                                      |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | lingkungan dan peningkatan kapasitas<br>Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 161 | PS         |             | 2 | Kelembagaan Lingkungan     |  |                      |   |   |   |            |                    |   |
| 162 | PS         |             |   | 1                          | Pengembangan Kelembagaan                                   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas   |
| 163 | PS         |             |   | 2                          | Tata Laksana   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas   |
| 164 | PS         |             |   | 3                          | Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas   |
| 165 | PS         |             |   | 4                          | Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten/Kota |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas   |
| 166 | PS         |             | 3 | Standarisasi dan Teknologi |  |                      |   |   |   |            |                    |   |
| 167 | PS         |             |   | 1                          | Standarisasi Perangkat Manajemen Lingkungan                |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas   |
| 168 | PS         |             |   | 2                          | Standarisasi Pengujian Lingkungan                          |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas   |
| 169 | PS         |             |   | 3                          | Standarisasi Kompetensi Keahlian Lingkungan                |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas   |
| 170 | PS         |             |   | 4                          | Standarisasi Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas   |
| 171 | PS         |             |   | 5                          | Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan           |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas   |
| 172 | PS         |             |   | 6                          | Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan                      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas   |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP                |                       |   |                                      | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH   |
|-----|------------|----------------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|---|
|     |            |                            |                       |   |                                      | SR                   | R | T | B |            |                    |   |
| 1   | 2          | 3                          |                       |   |                                      | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10  |
|     |            |                            |                       |   |                                      |                      |   |   |   |            | kapasitas          |   |
| 173 | PS         |                            | 4                     | Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan               |                                      |                      |   |   |   |            |                    |   |
| 174 | PS         |                            |                       | 1   | Pemantauan Kualitas Lingkungan       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 175 | PS         |                            |                       | 2   | Kajian Kualitas Lingkungan           |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 176 | PS         |                            |                       | 3   | Laboratorium Rujukan                 |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 177 | PS         |                            |                       | 4   | Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
|     | <b>PUS</b> | <b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b> |                       |   |                                      |                      |   |   |   |            |                    |   |
| 178 | PUS        | 1                          | DEPOSIT BAHAN PUSTAKA |   |                                      |                      |   |   |   |            |                    |   |
| 179 | PUS        |                            | 1                     | Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam                  |                                      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 180 | PUS        |                            | 2                     | Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman             |                                      |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 181 | PUS        |                            | 3                     | Terbitan Badan Internasional dan Regional                 |                                      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 182 | PUS        |                            | 4                     | Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam |                                      |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 183 | PUS        |                            | 5                     | Bibliografi dan Katalog                                   |                                      |                      |   |   |   |            |                    |   |
| 184 | PUS        |                            |                       | 1   | Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan   |
| 185 | PUS        |                            |                       | 2   | Katalog Induk Nasional (KIN)         |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan   |
| 186 | PUS        |                            |                       | 3   | Katalog Dalam Terbitan (KDT)         |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan   |
| 187 | PUS        |                            | 6                     | Pendaftaran <i>International Standard Book Number</i>     |                                      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan   |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH   |
|-----|------------|-------------|---|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|---|
|     |            |             |   |   | SR                   | R | T | B |            |                    |   |
| 1   | 2          | 3           |   |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10  |
|     |            |             |   | (ISBN)  |                      |   |   |   |            |                    | pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas                       |
| 188 | PUS        |             | 7   | Pendaftaran <i>International Standard Music Number</i> (ISMN) |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 189 | PUS        | 2           | PENGEMBANGAN KOLEKSI DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA |   |                      |   |   |   |            |                    |   |
| 190 | PUS        |             | 1   | Akuisisi  |                      |   |   |   |            |                    |   |
| 191 | PUS        |             |   | 1 Pembelian   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 192 | PUS        |             |   | 2 Hibah   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 193 | PUS        |             |   | 3 Hadiah  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 194 | PUS        |             |   | 4 Tukar Menukar   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 195 | PUS        |             |   | 5 Implementasi Undang-Undang KCKR                             |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 196 | PUS        |             |   | 6 Terbitan Internal   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 197 | PUS        |             |   | 7 Pendistribusian Bahan Pustaka Surplus                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 198 | PUS        |             |   | 8 Inventarisasi Bahan Pustaka (Buku Induk)                    |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 199 | PUS        |             | 2   | Pengolahan Bahan Pustaka                                      |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Tidak beresiko  |
| 200 | PUS        |             | 3   | Pangkalan Data Katalog Koleksi                                |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan   |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                                   | KLASIFIKASI KEAMANAN                                       |  |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |   |
|-----|------------|-------------|-----------------------------------|--|--|---|---|-----------|--------------------|----------------|---|
|     |            |             |                                   | SR   | R  | T | B |           |                    |                |   |
| 1   | 2          | 3           |                                   | 4  | 5  | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |   |
| 201 | PUS        |             | 4                                 | Kajian Pengembangan Bahan Perpustakaan                     |  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan   |
| 202 | PUS        |             | 5                                 | Pedoman Pengolahan Bahan Perpustakaan                      |  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 203 | PUS        | 3           | JASA PERPUSTAKAAAAN DAN INFORMASI |  |  |   |   |           |                    |                |   |
| 204 | PUS        |             | 1                                 | Keanggotaan  |  |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 205 | PUS        |             | 2                                 | Sirkulasi  |  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 206 | PUS        |             | 3                                 | Referensi  |  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 207 | PUS        |             | 4                                 | Alih Aksara, Alih Bahasa, dan Kajian Naskah Nusantara      |  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 208 | PUS        |             | 5                                 | Kerja Sama Perpustakaan                                    |  |   |   |           |                    |                |   |
| 209 | PUS        |             |                                   | 1  | MoU  |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 210 | PUS        |             |                                   | 2  | Perjanjian Kerja Sama                                      |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 211 | PUS        |             |                                   | 3  | Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 212 | PUS        |             | 6                                 | Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan |  |   |   |           |                    |                |   |
| 213 | PUS        |             |                                   | 1  | Pengembangan <i>Situs Web</i>                              |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 214 | PUS        |             |                                   | 2  | Pengembangan Kemas Ulang Informasi Multimedia              |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan           |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                          |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                |   |
|-----|------------|-------------|--------------------------|---|---|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|----------------|----------------|---|
|     |            |             |                          |   |   | SR                   | R | T | B |           |                    |                |                |   |
| 1   | 2          | 3           |                          |   |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |                |   |
|     |            |             |                          |   |   |                      |   |   |   |           |                    | kapasitas      |                |   |
| 215 | PUS        |             |                          | 3   | Pengembangan Program Aplikasi Perpustakaan      |                      |   |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 216 | PUS        |             |                          | 4   | Pengembangan Pangkalan Data Kepustakaan Digital |                      |   |   |   |           | √                  | Tk. Eselon     |                | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 217 | PUS        |             |                          | 5   | Pangkalan Data Layanan Perpustakaan             |                      |   |   |   |           | √                  | Tk. Eselon     |                | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 218 | PUS        | 4           | PRESERVASI BAHAN PUSTAKA |   |   |                      |   |   |   |           |                    |                |                |   |
| 219 | PUS        |             | 1                        | Konservasi  |   |                      |   |   |   |           |                    |                |                |   |
| 220 | PUS        |             |                          | 1   | Perawatan Bahan Pustaka                         |                      |   |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan   |
| 221 | PUS        |             |                          | 2   | Perbaikan Bahan Pustaka                         |                      |   |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan   |
| 222 | PUS        |             |                          | 3   | Penjilidan Bahan Pustaka                        |                      |   |   |   |           | √                  | Tidak beresiko |                | Unit pelaksana urusan   |
| 223 | PUS        |             | 2                        | Reprografi ( Mikrofilm, Reproduksi Foto )           |   |                      |   |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan   |
| 224 | PUS        |             | 3                        | Kurasi Digital                                      |   |                      |   |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 225 | PUS        | 5           | SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN |   |   |                      |   |   |   |           |                    |                |                |   |
| 226 | PUS        |             | 1                        | Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca |   |                      |   |   |   |           |                    |                |                |   |
| 227 | PUS        |             |                          | Pengembangan Perpustakaan                           |   |                      |   |   |   |           |                    |                |                |   |
| 228 | PUS        |             |                          | 1   | Perpustakaan Umum                               |                      |   |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 229 | PUS        |             |                          | 2   | Perpustakaan Khusus                             |                      |   |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 230 | PUS        |             |                          | 3   | Perpustakaan Sekolah                            |                      |   |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan           |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                         |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH   |
|-----|------------|-------------|---|-------------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|---|
|     |            |             |   |                         |  | SR                   | R | T | B |            |                    |   |
| 1   | 2          | 3           |   |                         |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10  |
|     |            |             |   |                         |  |                      |   |   |   |            |                    | kapasitas   |
| 231 | PUS        |             |   | 4                       | Perpustakaan Perguruan Tinggi                  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 232 | PUS        |             | 2 | Pembakuan Perpustakaan  |  |                      |   |   |   |            |                    |   |
| 233 | PUS        |             |   | 1                       | Standar Nasional Perpustakaan Umum             |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 234 | PUS        |             |   | 2                       | Standar Nasional Perpustakaan Khusus           |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 235 | PUS        |             |   | 3                       | Standar Nasional Perpustakaan Sekolah          |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 236 | PUS        |             |   | 4                       | Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 237 | PUS        |             |   | 5                       | Pedoman Perpustakaan Umum                      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 238 | PUS        |             |   | 6                       | Pedoman Perpustakaan Khusus                    |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 239 | PUS        |             |   | 7                       | Pedoman Perpustakaan Sekolah                   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 240 | PUS        |             |   | 8                       | Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi          |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 241 | PUS        |             | 3 | Akreditasi Perpustakaan |  |                      |   |   |   |            |                    |   |
| 242 | PUS        |             |   | 1                       | Permintaan akreditasi                          |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 243 | PUS        |             |   | 2                       | Pemberian akreditasi                           |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan           |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                             |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |   |                |   |
|-----|------------|-------------|---|-----------------------------|---|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|---|----------------|---|
|     |            |             |   |                             |   | SR                   | R | T | B |           |                    |               |   |                |   |
| 1   | 2          | 3           |   |                             |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |   |                |   |
|     |            |             |   |                             |   |                      |   |   |   |           |                    | kapasitas     |   |                |   |
| 244 | PUS        |             |   | 3                           | Pangkalan data perpustakaan yang diakreditasi |                      |   |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |                |   |
| 245 | PUS        |             | 4 | Pangkalan Data Perpustakaan |   |                      |   |   |   |           |                    |               |   |                |   |
| 246 | PUS        |             |   | 1                           | Nomor Pokok Perpustakaan                      |                      |   |   |   |           |                    | √             | Staff   | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 247 | PUS        |             |   | 2                           | Perpustakaan Berbasis Wilayah                 |                      |   |   |   |           |                    | √             | Staff   | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 248 | PUS        |             | 5 | Pengkajian Perpustakaan     |   |                      |   |   |   |           |                    |               |   |                |   |
| 249 | PUS        |             | 6 | Pemasyarakatan Minat Baca   |   |                      |   |   |   |           |                    |               |   |                |   |
| 250 | PUS        |             |   | 1                           | Pedoman Pembudayaan Minat Baca                |                      |   |   |   |           |                    | √             | Staff   | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 251 | PUS        |             |   | 2                           | Kajian Pembudayaan Minat Baca                 |                      |   |   |   |           |                    | √             | Staff   | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 252 | PUS        |             |   | 3                           | Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca         |                      |   |   |   |           |                    | √             | Staff   | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 253 | PUS        |             | 7 | Organisasi Perpustakaan     |   |                      |   |   |   |           |                    |               |   |                |   |
| 254 | PUS        |             |   | 1                           | Forum Perpustakaan Umum                       |                      |   |   |   |           |                    | √             | Staff   | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 255 | PUS        |             |   | 2                           | Forum Perpustakaan Khusus                     |                      |   |   |   |           |                    | √             | Staff   | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 256 | PUS        |             |   | 3                           | Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi           |                      |   |   |   |           |                    | √             | Staff   | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 257 | PUS        |             |   | 4                           | Forum Perpustakaan Sekolah                    |                      |   |   |   |           |                    | √             | Staff   | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                          |   |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |
|-----|---------------|-------------|--------------------------|---|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|--|
|     |               |             |                          |   |   | SR                      | R | T | B |              |                       |  |
| 1   | 2             | 3           |                          |   |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10   |
|     |               |             |                          |   |   |                         |   |   |   |              |                       | kapasitas  |
| 258 | PUS           |             |                          | 5   | Gerakan Masyarakat Minat Baca                       |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 259 | PUS           |             |                          | 6   | Organisasi Perpustakaan Lainnya                     |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 260 | PUS           | 6           | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |   |   |                         |   |   |   |              |                       |  |
| 261 | PUS           |             | 1                        | Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan                  |   |                         |   |   |   |              |                       |  |
| 262 | PUS           |             |                          | 1   | Perencanaan Program Diklat                          |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 263 | PUS           |             |                          | 2   | Sistem dan Metode                                   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 264 | PUS           |             |                          | 3   | Kurikulum/Silabus/Bahan Ajar/Modul                  |                         |   |   | √ |              |                       |  |
| 265 | PUS           |             |                          | 4   | Konsultasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 266 | PUS           |             |                          | 5   | Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan                 |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 267 | PUS           |             | 2                        | Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan |   |                         |   |   |   |              |                       |  |
| 268 | PUS           |             |                          | 1   | Fungsional Pustakawan Tingkat Terampil              |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 269 | PUS           |             |                          | 2   | Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli                  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 270 | PUS           |             |                          | 3   | Teknis Pimpinan Lembaga Perpustakaan                |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 271 | PUS           |             |                          | 4   | Teknis Pustakawan/Pengelola Perpustakaan            |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pembinaan sarana teknis                                      |



| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP             |                         |   |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH   |
|-----|---------------|-------------------------|-------------------------|---|--|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|---|
|     |               |                         |                         |   |  | SR                      | R | T | B |              |                       |   |
| 1   | 2             | 3                       |                         |   |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10  |
| 272 | PUS           |                         |                         | 5                                       | Teknis Pustakawan/Pengelola Perpustakaan     |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | lingkungan dan peningkatan kapasitas<br>Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 273 | PUS           |                         |                         | 6                                       | Evaluasi Pasca Diklat                        |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas   |
| 274 | PUS           | 7                       | PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN |   |  |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 275 | PUS           |                         | 1                       | Sertifikasi Tenaga Perpustakaan         |  |                         | √ |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas   |
| 276 | PUS           |                         | 2                       | Pembinaan Tenaga Perpustakaan           |  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas   |
| 277 | PUS           |                         | 5                       | Penerbitan Jurnal                       |  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas   |
| 278 | PUS           |                         | 6                       | Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan |  |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 279 | PUS           |                         |                         | 1                                       | Tim Penilai Instansi (Perpustakaan Nasional) |                         | √ |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas   |
| 280 | PUS           |                         |                         | 2                                       | Tim Penilai Pusat                            |                         | √ |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas   |
| 281 | PUS           |                         | 7                       | Pemasyarakatan                          |  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        |   |
| 282 | PUS           |                         | 8                       | Evaluasi Tenaga Perpustakaan            |  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        |   |
| 283 | PUS           |                         | 9                       | Pangkalan Data Tenaga Perpustakaan      |  |                         | √ |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas   |
| 284 | PUS           |                         | 10                      | Pangkalan Data Tim Penilai Pustakawan   |  |                         | √ |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas   |
|     | KH            | <b>URUSAN KEHUTANAN</b> |                         |   |  |                         |   |   |   |              |                       |   |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                     | KLASIFIKASI KEAMANAN                           |  |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                                 |                                 |
|-----|------------|-------------|---------------------|--|--|---|---|-----------|--------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
|     |            |             |                     | SR   | R  | T | B |           |                    |                |                                 |                                 |
| 1   | 2          | 3           |                     | 4  | 5  | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |                                 |                                 |
| 285 | KH         | 1           | PENYULUHAN          |  |  |   |   |           |                    |                |                                 |                                 |
| 286 | KH         |             | 1                   | PROGRAM KERJA PENYULUHAN                       |  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |                                 |
| 287 | KH         |             | 2                   | MATERI PENYULUHAN                              |  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |                                 |
| 288 | KH         |             | 3                   | PROGRAM PENYULUHAN KEHUTANAN                   |  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |                                 |
| 289 | KH         |             | 4                   | SARANA PENYULUHAN                              |  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |                                 |
| 290 | KH         |             | 5                   | TENAGA PENYULUHAN                              |  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |                                 |
| 291 | KH         |             | 6                   | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                        |  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |                                 |
| 292 | KH         |             | 7                   | PELAKSANAAN PENYULUHAN                         |  |   |   | √         | Staff              |                | Unit pelaksana urusan kehutanan |                                 |
| 293 | KH         |             | 8                   | DISEMINASI                                     |  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |                                 |
| 294 | KH         |             | 9                   | EVALUASI, DESIMINASI DAN LAPORAN               |  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |                                 |
| 295 | KH         | 2           | PLANOLOGI KEHUTANAN |  |  |   |   |           |                    |                |                                 |                                 |
| 296 | KH         |             | 1                   | PERENCANAAN KAWASAN HUTAN                      |  |   |   |           |                    |                |                                 |                                 |
| 297 | KH         |             |                     | 1  | Perencanaan Makro Kawasan Hutan                  |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                  | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 298 | KH         |             |                     | 2  | Penataan Ruang Kawasan Hutan                     |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                  | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 299 | KH         |             |                     | 3  | Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                  | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 300 | KH         |             | 2                   | PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN      |  |   |   |           |                    |                |                                 |                                 |
| 301 | KH         |             |                     | 1  | Pengukuhan Kawasan Hutan                         |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                  | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 302 | KH         |             |                     | 2  | Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan    |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                  | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 303 | KH         |             |                     | 3  | Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan          |   |   |           | √                  | Tk. Eselon     |                                 | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 304 | KH         |             | 3                   | INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN |  |   |   |           |                    |                |                                 |                                 |
| 305 | KH         |             |                     | 1  | Inventarisasi Sumber Daya Hutan                  |   |   |           | √                  | Tk. Eselon     |                                 | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 306 | KH         |             |                     | 2  | Pemantauan Sumber Daya Hutan                     |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                  | Unit pelaksana urusan kehutanan |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                      |   | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |            |                |                                 |
|-----|------------|-------------|----------------------|---|---|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|------------|----------------|---------------------------------|
|     |            |             |                      |   | SR  | R | T | B |           |                    |               |            |                |                                 |
| 1   | 2          | 3           |                      |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |            |                |                                 |
| 307 | KH         |             |                      | 3   | Pemetaan Sumber Daya Hutan                                    |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 308 | KH         |             |                      | 4   | Jaringan Data Spasial   |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 309 | KH         |             | 4                    | PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN                          |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                                 |
| 310 | KH         |             |                      | 1   | Penggunaan Kawasan Hutan                                      |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 311 | KH         |             |                      | 2   | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 312 | KH         |             |                      | 3   | Informasi Penggunaan Kawasan Hutan                            |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 313 | KH         |             | 5                    | PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN AREAL PEMANFAATAN HUTAN |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                                 |
| 314 | KH         |             |                      | 1   | Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan                         |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 315 | KH         |             |                      | 2   | Penyiapan Areal Pemantapan kawasan Hutan                      |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 316 | KH         |             |                      | 3   | Informasi Wilayah Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kawasan Hutan   |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 317 | KH         | 3           | BINA USAHA KEHUTANAN |   |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                                 |
| 318 | KH         |             | 1                    | HPH / HTI / IUPHHK                                |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                                 |
| 319 | KH         |             |                      | 1   | Data Areal HPH  |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 320 | KH         |             |                      | 2   | SK HPH / HTI / IUPHHK   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 321 | KH         |             |                      | 3   | Kerjasama   |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 322 | KH         |             |                      | 4   | Pembatalan/Penolakan  |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 323 | KH         |             |                      | 5   | Perpanjangan  |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 324 | KH         |             | 2                    | MODAL DAN PERALATAN                               |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                                 |
| 325 | KH         |             |                      | 1   | Investasi Industri  |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 326 | KH         |             |                      | 2   | Peralatan   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 327 | KH         |             |                      | 3   | Tenaga Kerja  |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 328 | KH         |             |                      | 4   | Pemegang Saham  |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan kehutanan |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                  | KLASIFIKASI KEAMANAN                             |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH   |
|-----|------------|-------------|---|------------------|--|---|---|---|-----------|--------------------|---|
|     |            |             |   |                  | SR   | R | T | B |           |                    |   |
| 1   | 2          | 3           |   |                  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10  |
| 329 | KH         |             |   | 5                | Neraca Perusahaan                                |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan   |
| 330 | KH         |             | 3 | RENCANA KARYA    |  |   |   |   |           |                    |   |
| 331 | KH         |             |   | 1                | Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)       |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan   |
| 332 | KH         |             |   | 2                | Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)           |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan   |
| 333 | KH         |             |   | 3                | Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)    |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan   |
| 334 | KH         |             |   | 4                | Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL) |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan   |
| 335 | KH         |             | 4 | PERPANJANGAN HPH |  |   |   |   |           |                    |   |
| 336 | KH         |             | 5 | PRODUKSI         |  |   |   |   |           |                    |   |
| 337 | KH         |             |   | 1                | Target Produksi                                  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 338 | KH         |             |   | 2                | Produksi Kayu                                    |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 339 | KH         |             |   | 3                | Produksi Non Kayu                                |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 340 | KH         |             | 6 | INDUSTRI         |  |   |   |   |           |                    | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 341 | KH         |             |   | 1                | Industri Kayu HPH                                |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 342 | KH         |             |   | 2                | Industri Kayu Non HPH                            |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 343 | KH         |             |   | 3                | Industri Non Kayu                                |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |    | KLASIFIKASI KEAMANAN               |  |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH   |
|-----|------------|-------------|----|------------------------------------|--|---|---|-----------|--------------------|---|
|     |            |             |    | SR                                 | R  | T | B |           |                    |   |
| 1   | 2          | 3           |    | 4                                  | 5  | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10  |
| 344 | KH         |             | 7  | PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI |  |   |   |           |                    | Tidak beresiko  |
| 345 | KH         |             |    | 1                                  | Hutan Tanaman Industri Pulp                    |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 346 | KH         |             |    | 2                                  | Hutan Tanaman Industri Pertukangan             |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas |
| 347 | KH         |             | 8  | PELANGGARAN DAN SANKSI             |  |   |   |           |                    |   |
| 348 | KH         |             |    | 1                                  | Pemblokiran                                    |   |   | √         | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas                   |
| 349 | KH         |             |    | 2                                  | Denda  |   |   | √         | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas                   |
| 350 | KH         |             |    | 3                                  | Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK                |   |   | √         | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan pembinaan saran teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas                   |
| 351 | KH         |             | 9  | PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI         |  |   |   |           |                    |   |
| 352 | KH         |             |    | 1                                  | Pola Pemanfaatan Hutan Produksi                |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan kehutanan   |
| 353 | KH         |             |    | 2                                  | Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi            |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan kehutanan   |
| 354 | KH         |             |    | 3                                  | Informasi Sumber Daya Hutan Produksi           |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan kehutanan   |
| 355 | KH         |             |    | 4                                  | Pengembangan Investasi Usaha                   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan kehutanan   |
| 356 | KH         |             | 10 | PENGEMBANGAN HUTAN ALAM            |  |   |   |           |                    |   |
| 357 | KH         |             |    | 1                                  | Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam               |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan kehutanan   |
| 358 | KH         |             |    | 2                                  | Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam           |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan kehutanan   |
| 359 | KH         |             |    | 3                                  | Produksi Hutan Alam                            |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan kehutanan   |
| 360 | KH         |             |    | 4                                  | Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam |   |   | √         | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan kehutanan   |
| 361 | KH         |             | 11 | PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN         |  |   |   |           |                    |   |
| 362 | KH         |             |    | 1                                  | Hutan Tanaman Industri                         |   |   |           |                    |   |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |    |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN   |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                   |
|-----|---------------|-------------|----|---|---|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------------------------|
|     |               |             |    |   | SR  | R | T | B |              |                       |                                 |
| 1   | 2             | 3           |    |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                              |
| 363 | KH            |             |    | 2   | Hutan Tanaman Rakyat  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 364 | KH            |             |    | 3   | Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 365 | KH            |             |    | 4   | Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman   |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 366 | KH            |             |    | 5   | Pembiayaan Hutan Tanaman  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 367 | KH            |             | 12 | IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN |   |   |   |   |              |                       |                                 |
| 368 | KH            |             |    | 1   | Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi |   |   |   |              |                       |                                 |
| 369 | KH            |             |    | 2   | Peredaran Hasil Hutan   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 370 | KH            |             |    | 3   | Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 371 | KH            |             |    | 4   | Penertiban Peredaran Hasil Hutan  |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 372 | KH            |             | 13 | PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN      |   |   |   |   |              |                       |                                 |
| 373 | KH            |             |    | 1   | Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 374 | KH            |             |    | 2   | Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 375 | KH            |             |    | 3   | Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan  |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 376 | KH            |             | 14 | PEMBINAAN HUTAN                           |   |   |   |   |              |                       |                                 |
| 377 | KH            |             |    | 1   | Pembinaan HPH   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 378 | KH            |             |    | 2   | Pembinaan TPTI  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                             | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN      |                              |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                   |
|-----|---------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|--------------|-----------------------|---------------------------------|
|     |               |             |                             | SR                           | R                            | T | B |              |                       |                                 |
| 1   | 2             | 3           |                             | 4                            | 5                            | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                              |
| 379 | KH            | 4           | STANDARISASI DAN LINGKUNGAN |                              |                              |   |   |              |                       |                                 |
| 380 | KH            |             | 1                           | STANDARISASI                 |                              |   |   |              |                       |                                 |
| 381 | KH            |             |                             | 1                            | Kayu                         |   |   | √            | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 382 | KH            |             |                             | 2                            | Non Kayu                     |   |   | √            | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 383 | KH            |             |                             | 3                            | Produk                       |   |   | √            | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 384 | KH            |             |                             | 4                            | Proses                       |   |   | √            | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 385 | KH            |             | 2                           | SARANA PENGUJIAN HASIL HUTAN |                              |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko                  |
| 386 | KH            |             | 3                           | PENGEMBANGAN                 |                              |   |   |              |                       |                                 |
| 387 | KH            |             |                             | 1                            | Pengembangan Perusahaan      |   |   | √            | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 388 | KH            |             |                             | 2                            | Pengembangan Pemasaran       |   |   |              |                       |                                 |
| 389 | KH            |             | 4                           | PEMASARAN HASIL HUTAN        |                              |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko                  |
| 390 | KH            |             | 5                           | PENGENDALIAN LINGKUNGAN      |                              |   |   |              |                       |                                 |
| 391 | KH            |             |                             | 1                            | Amdal di Dalam Kawasan Hutan |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko                  |
| 392 | KH            |             |                             | 2                            | Amdal di Luar Kawasan Hutan  |   |   | √            | Staff                 | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 393 | KH            |             | 6                           | ANGKUTAN HASIL HUTAN         |                              |   |   |              |                       |                                 |
| 394 | KH            |             |                             | 1                            | Sarana dan Prasarana         |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko                  |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |  | KLASIFIKASI KEAMANAN                  |   |   |   | HAK AKSES             | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                   |
|-----|------------|-------------|--|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
|     |            |             |  | SR                                    | R | T | B |                       |                    |                                 |
| 1   | 2          | 3           |  | 4                                     | 5 | 6 | 7 | 8                     | 9                  | 10                              |
| 395 | KH         |             | 2                                      | Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan  |   |   | √ | Staff                 | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 396 | KH         |             | 7                                      | TATA USAHA HASIL HUTAN                |   |   |   |                       |                    |                                 |
| 397 | KH         |             | 1                                      | Tanda Pengenal Perusahaan             |   |   | √ | Tk. Eselon            |                    | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 398 | KH         |             | 2                                      | Legalitas                             |   |   | √ | Unit pelaksana urusan |                    | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 399 | KH         |             | 3                                      | Palu Tok Kualitas                     |   |   | √ | Staff                 | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 400 | KH         |             | 4                                      | Pass Angkutan                         |   |   | √ | Staff                 | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 401 | KH         |             | 5                                      | Sertifikat Eksport Hasil Hutan        |   |   | √ | Staff                 | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 402 | KH         | 5           | PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM |                                       |   |   |   |                       |                    |                                 |
| 403 | KH         |             | 1                                      | KONSERVASI JENIS DAN GENETIK          |   |   |   |                       |                    |                                 |
| 404 | KH         |             | 1                                      | Flora dan Fauna yang Dilindungi       |   |   | √ | Staff                 | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 405 | KH         |             | 2                                      | Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi |   |   | √ | Staff                 | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 406 | KH         |             | 3                                      | Lembaga Konservasi /Kebun Binatang    |   |   | √ | Staff                 | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 407 | KH         |             | 4                                      | Konvensi Keanekaragaman Hayati        |   |   | √ | Staff                 | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 408 | KH         |             | 2                                      | KAWASAN KONSERVASI                    |   |   |   |                       |                    |                                 |
| 409 | KH         |             | 1                                      | Cagar Alam                            |   |   | √ | Staff                 | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |



| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                          |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                   |
|-----|---------------|-------------|---|-----------------------------------|--|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------------------------|
|     |               |             |   |                                   | SR   | R | T | B |              |                       |                                 |
| 1   | 2             | 3           |   |                                   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                              |
| 410 | KH            |             |   | 2                                 | Suaka Margasatwa                                 |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 411 | KH            |             |   | 3                                 | Taman Wisata                                     |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 412 | KH            |             |   | 4                                 | Taman Buru                                       |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 413 | KH            |             |   | 5                                 | Taman Nasional                                   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 414 | KH            |             |   | 6                                 | Taman Hutan Raya                                 |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 415 | KH            |             |   | 7                                 | Hutan Lindung dan Suaka Alam                     |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 416 | KH            |             |   | 8                                 | Lahan Basah dan Konservasi Laut                  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 417 | KH            |             |   | 9                                 | Gua/Karst  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 418 | KH            |             | 3 | PENGAMANAN HUTAN                  |  |   |   |   |              |                       |                                 |
| 419 | KH            |             |   | 1                                 | Pelanggaran                                      |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 420 | KH            |             |   | 2                                 | Bencana Alam                                     |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 421 | KH            |             |   | 3                                 | Kebakaran Hutan                                  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 422 | KH            |             |   | 4                                 | Sengketa Hutan                                   |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 423 | KH            |             |   | 5                                 | Hama dan Penyakit                                |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 424 | KH            |             | 4 | PENYIDIKAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN |  |   |   |   |              |                       |                                 |
| 425 | KH            |             |   | 1                                 | Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kehutanan |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN                                      |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |            |                |                                 |
|-----|------------|-------------|---|---|---|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|------------|----------------|---------------------------------|
|     |            |             |   |   | SR  | R | T | B |           |                    |               |            |                |                                 |
| 1   | 2          | 3           |   |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |            |                |                                 |
| 426 | KH         |             |   | 2   | Penyidikan dan Perlindungan Wilayah                       |   |   |   | √         |                    |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 427 | KH         |             |   | 3   | Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) |   |   |   |           | √                  |               | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 428 | KH         |             | 5   | PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DAN WISATA ALAM |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                                 |
| 429 | KH         |             |   | 1   | Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam              |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 430 | KH         |             |   | 2   | Pemanfaatan Jasa Lingku                                   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 431 | KH         |             |   | 3   | Pemanfaatan Wisata Alam                                   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 432 | KH         |             | 6   | BINA CINTA ALAM                             |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                                 |
| 433 | KH         |             |   | 1   | Cinta Alam  |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 434 | KH         |             |   | 2   | Kader Konservasi Sumber Daya Alam                         |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 435 | KH         |             |   | 3   | Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA    |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 436 | KH         | 7           | BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL |   |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                                 |
| 437 | KH         |             | 1   | PERBENIHAN                                  |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                                 |
| 438 | KH         |             |   | 1   | Pemuliaan Benih   |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 439 | KH         |             |   | 2   | Kebun Benih   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 440 | KH         |             |   | 3   | Tegakan Benih   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                              |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                   |
|-----|------------|-------------|---|------------------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|---------------------------------|
|     |            |             |   |                              |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                                 |
| 1   | 2          | 3           |   |                              |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                              |
| 441 | KH         |             |   | 4                            | Pengadaan Benih  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 442 | KH         |             |   | 5                            | Pengujian dan Penyimpanan Benih                            |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 443 | KH         |             |   | 6                            | Lalu Lintas Angkutan Benih                                 |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 444 | KH         |             |   | 7                            | Pembibitan   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 445 | KH         |             |   | 8                            | Pengembangan Sumber Benih                                  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 446 | KH         |             |   | 9                            | Pengembangan Usaha Perbenihan                              |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 447 | KH         |             |   | 10                           | Pengendalian Peredaran Benih                               |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 448 | KH         |             | 2 | REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN |  |                      |   |   |   |            |                    |                                 |
| 449 | KH         |             |   | 1                            | Pemolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan                      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 450 | KH         |             |   | 2                            | Rehabilitasi Hutan   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 451 | KH         |             |   | 3                            | Rehabilitasi Lahan   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 452 | KH         |             |   | 4                            | Pengelolaan Hutan Mangrove, Hutan Pantai, Rawa, dan Gambut |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 453 | KH         |             |   | 5                            | Reklamasi Hutan dan Konservasi Tanah                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 454 | KH         |             | 3 | TANAMAN REBOISASI            |  |                      |   |   |   |            |                    |                                 |
| 455 | KH         |             |   | 1                            | Reboisasi Lahan Kritis                                     |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 456 | KH         |             |   | 2                            | Reboisasi Areal HPH  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   | KLASIFIKASI KEAMANAN                   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                                 |
|-----|------------|-------------|---|--|---|---|---|-----------|--------------------|----------------|---------------------------------|
|     |            |             |   | SR                                     | R   | T | B |           |                    |                |                                 |
| 1   | 2          | 3           |   | 4                                      | 5   | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |                                 |
| 457 | KH         |             | 4 | PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) |   |   |   |           |                    |                |                                 |
| 458 | KH         |             |   | 1                                      | Pemolaan Pengelolaan DAS                                |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 459 | KH         |             |   | 2                                      | Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS                |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 460 | KH         |             |   | 3                                      | Teknik Pengelolaan DAS                                  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 461 | KH         |             |   | 4                                      | Evaluasi Pengelolaan DAS                                |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 462 | KH         |             | 5 | PERHUTANAN SOSIAL                      |   |   |   |           |                    |                |                                 |
| 463 | KH         |             |   | 1                                      | Pemolaan  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 464 | KH         |             |   | 2                                      | Pengembangan Hutan Kemasyarakatan                       |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 465 | KH         |             |   | 3                                      | Pengembangan Hutan Desa                                 |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 466 | KH         |             |   | 4                                      | Pengembangan Hutan Hak dan Kemitraan                    |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 467 | KH         |             |   | 5                                      | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                    |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 468 | KH         |             |   | 6                                      | Hasil Hutan Bukan Kayu/Aneka Usaha Kehutanan (HHBK/AUK) |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 469 | KH         |             | 6 | PENGENDALIAN PERLADANGAN               |   |   |   |           |                    |                |                                 |
| 470 | KH         |             |   | 1                                      | Penentuan Lokasi  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 471 | KH         |             |   | 2                                      | Pemupukan Lokasi  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 472 | KH         |             |   | 3                                      | Pengelolaan Tanah                                       |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                                       |                                    |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                   |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|---------------------------------|
|     |            |             |                                       |                                    |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                                 |
| 1   | 2          | 3           |                                       |                                    |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                              |
| 473 | KH         |             |                                       | 4                                  | Pemindahan Penduduk                                      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 474 | KH         |             |                                       | 5                                  | Pembuatan Sarana   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 475 | KH         | 8           | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN |                                    |  |                      |   |   |   |            |                    |                                 |
| 476 | KH         |             | 1                                     | PERENCANAAN PROGRAM PENELITIAN     |  |                      |   |   |   |            |                    |                                 |
| 477 | KH         |             |                                       | 1                                  | Penyusunan rencana anggaran penelitian dan pengembangan  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 478 | KH         |             |                                       | 2                                  | Penyusunan Rencana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan. |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 479 | KH         |             | 2                                     | PELAKSANAAN PENELITIAN             |  |                      |   |   |   |            |                    |                                 |
| 480 | KH         |             |                                       | 1                                  | Ijin Penelitian  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 481 | KH         |             |                                       | 2                                  | Data Mentah Hasil Penelitian                             |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 482 | KH         |             |                                       | 3                                  | Analisa Hasil Penelitian                                 |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 483 | KH         |             |                                       | 4                                  | Laporan Hasil Penelitian                                 |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 484 | KH         |             | 3                                     | MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN |  |                      |   |   |   |            |                    |                                 |
| 485 | KH         |             |                                       | 1                                  | Monitoring Penelitian                                    |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 486 | KH         |             |                                       | 2                                  | Evaluasi Penelitian                                      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 487 | KH         |             |                                       | 3                                  | Rekomendasi  |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 488 | KH         |             | 4                                     | DISEMINASI                         |  |                      |   |   |   |            |                    |                                 |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP             |           |                   | KLASIFIKASI KEAMANAN                         |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                                 |
|-----|------------|-------------------------|-----------|-------------------|--|---|---|---|-----------|--------------------|----------------|---------------------------------|
|     |            |                         |           |                   | SR   | R | T | B |           |                    |                |                                 |
| 1   | 2          | 3                       |           |                   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |                                 |
| 489 | KH         |                         |           | 1                 | Publikasi                                    |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 490 | KH         |                         |           | 2                 | Gelar Teknologi/Seminar/Lokakarya            |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 491 | KH         |                         |           | 3                 | Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 492 | <b>AR</b>  | <b>URUSAN KEARSIPAN</b> |           |                   |  |   |   |   |           |                    |                |                                 |
| 493 | AR         | 1                       | Kebijakan |                   |  |   |   |   |           |                    |                |                                 |
| 494 | AR         |                         | 1         | Peraturan Daerah  |  |   |   |   |           |                    |                |                                 |
| 495 | AR         |                         |           | 1                 | Pengkajian dan Pengusulan                    |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 496 | AR         |                         |           | 2                 | Penyusunan Raperda                           |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 497 | AR         |                         |           | 3                 | Pembahasan Raperda dan Persetujuan Raperda   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 498 | AR         |                         |           | 4                 | Penetapan Perda                              |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 499 | AR         |                         |           | 5                 | Sosialisasi Perda                            |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 500 | AR         |                         | 2         | Tata Naskah Dinas |  |   |   |   |           |                    |                |                                 |
| 501 | AR         |                         |           | 1                 | Pengkajian dan pembahasan Rapergub           |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 502 | AR         |                         |           | 2                 | Pengusulan dan Penetapan Pergub              |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 503 | AR         |                         |           | 3                 | Sosialisasi Pergub tentang                   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 504 | AR         |                         | 3         | Klasifikasi Arsip |  |   |   |   |           |                    |                |                                 |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN  |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                   |
|-----|---------------|-------------|---|---|--|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------------------------|
|     |               |             |   |   | SR   | R | T | B |              |                       |                                 |
| 1   | 2             | 3           |   |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                              |
| 505 | AR            |             |   | 1   | Pengkajian dan pembahasan Rapergub   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 506 | AR            |             |   | 2   | Pengusulan dan Penetapan Pergub  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 507 | AR            |             |   | 3   | Sosialisasi Pergub tentang Tata Naskah Dinas                                   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 508 | AR            |             | 4 | Jadwal Retensi Arsip                                |  |   |   |   |              |                       |                                 |
| 509 | AR            |             |   | 1   | Pengkajian dan pembahasan Rapergub   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 510 | AR            |             |   | 2   | Pengusulan dan Penetapan Pergub  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 511 | AR            |             |   | 3   | Sosialisasi Pergub tentang   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 512 | AR            |             | 5 | Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis |  |   |   |   |              |                       |                                 |
| 513 | AR            |             |   | 1   | Pengkajian dan pembahasan Rapergub   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 514 | AR            |             |   | 2   | Pengusulan dan Penetapan Pergub  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 515 | AR            |             |   | 3   | Sosialisasi Pergub tentang Sistem Kalsifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        |                                 |
| 516 | AR            |             | 6 | Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis                   |  |   |   |   |              |                       |                                 |
| 517 | AR            |             |   | 1   | Pengkajian dan pembahasan Rapergub   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 518 | AR            |             |   | 2   | Pengusulan dan Penetapan Pergub  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 519 | AR            |             |   | 3   | Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis                   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                     | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                                 |
|-----|------------|-------------|---------------------|--|---|---|---|-----------|--------------------|----------------|---------------------------------|
|     |            |             |                     | SR   | R   | T | B |           |                    |                |                                 |
| 1   | 2          | 3           |                     | 4  | 5   | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |                                 |
| 520 | AR         |             | 7                   | Pedoman Pengelolaan Arsip Statis   |   |   |   |           |                    |                |                                 |
| 521 | AR         |             |                     | 1  | Pengkajian dan pembahasan Rapergub                          |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 522 | AR         |             |                     | 2  | Pengusulan dan Penetapan Pergub                             |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 523 | AR         |             |                     | 3  | Sosialisasi Pergub tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Statis |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 524 | AR         |             | 8                   | Penetapan Organisasi Kearsipan   |   |   |   |           |                    |                |                                 |
| 525 | AR         |             |                     | 1  | Unit Pengolah   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 526 | AR         |             |                     | 2  | Unit Kearsipan Perangkat Daerah                             |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 527 | AR         |             |                     | 3  | Unit Kearsipan Pemerintah Daerah                            |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 528 | AR         | 2           | PEMBINAAN KEARSIPAN |  |   |   |   |           |                    |                |                                 |
| 529 | AR         |             | 1                   | Akreditasi Kearsipan : Lembaga Kearsipan, Unit Kearsipan, Lembaga Penyelenggara Kearsipan, |   |   |   |           |                    |                |                                 |
| 530 | AR         |             |                     | 1  | Proses Akreditasi   |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 531 | AR         |             |                     | 2  | Berkas Penetapan Sertifikasi Akreditasi                     |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 532 | AR         |             |                     | 3  | Data Base Akreditasi  |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 533 | AR         |             | 2                   | Sertifikasi Arsiparis  |   |   |   |           |                    |                |                                 |
| 534 | AR         |             |                     | 1  | Proses Sertifikasi Arsiparis                                |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 535 | AR         |             |                     | 2  | Berkas Penetapan Sertifikasi Arsiparis                      |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan kearsipan |



| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                          |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                   |
|-----|---------------|-------------|---|--------------------------|--|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------------------------|
|     |               |             |   |                          |  | SR                      | R | T | B |              |                       |                                 |
| 1   | 2             | 3           |   |                          |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                              |
| 536 | AR            |             |   | 3                        | Data Base Sertifikasi Arsiparis  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 537 | AR            |             | 3 | BINA ARSIPARIS           |  |                         |   |   |   |              |                       |                                 |
| 538 | AR            |             |   | 1                        | Formasi Jabatan Arsiparis  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 539 | AR            |             |   | 2                        | Standar Kompetensi Arsiparis   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 540 | AR            |             |   | 3                        | Bimbingan Konsultasi Arsiparis   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 541 | AR            |             |   | 4                        | Penilaian Arsiparis  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 542 | AR            |             |   | 5                        | Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 543 | AR            |             |   | 6                        | Berkas Penetapan Arsiparis Teladan   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 544 | AR            |             |   | 7                        | Data Base Arsiparis  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 545 | AR            |             | 4 | Bimbingan dan Konsultasi |  |                         |   |   |   |              |                       |                                 |
| 546 | AR            |             |   | 1                        | Penerapan Sistem (Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Akses Keamanan |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 547 | AR            |             |   | 2                        | Penggunaan Sarana dan Prasarana Kearsipan  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 548 | AR            |             |   | 3                        | Unit Kearsipan   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 549 | AR            |             |   | 4                        | Sumberdaya Manusia   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 550 | AR            |             | 5 | SUPERVISI DAN EVALUASI   |  |                         |   |   |   |              |                       |                                 |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                           |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN   |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                   |
|-----|---------------|-------------|---------------------------|--|---|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------------------------|
|     |               |             |                           |  | SR  | R | T | B |              |                       |                                 |
| 1   | 2             | 3           |                           |  | 4   | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                              |
| 551 | AR            |             |                           | 1  | Perencanaan   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 552 | AR            |             |                           | 2  | Pelaksanaan   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 553 | AR            |             |                           | 3  | Laporan hasil supervisi dan Evaluasi                                    |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 554 | AR            |             | 6                         | DATA BASE BIMBINGAN DAN KONSULTASI DAN SUPERVISI |   |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan kehutanan |
| 555 | AR            |             | 7                         | FASILITAS KEARSIPAN                              |   |   |   |   |              |                       |                                 |
| 556 | AR            |             |                           | 1  | SDM Kearsipan   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 557 | AR            |             |                           | 2  | Prasarana dan Sarana  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 558 | AR            |             | 8                         | LEMBAGA/UNIT KEARSIPAN TELADAN                   |   |   |   |   |              |                       |                                 |
| 559 | AR            |             |                           | 1  | Penyelenggaraan   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 560 | AR            |             |                           | 2  | Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 561 | AR            | 3           | PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS |  |   |   |   |   |              |                       |                                 |
| 562 | AR            |             | 1                         | Penciptaan                                       |   |   |   |   |              |                       |                                 |
| 563 | AR            |             |                           | 1  | Pencatatan ( Buku Agenda, Kartu Kendali dan Lembar Pengantar/Ekspedisi) |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 564 | AR            |             |                           | 2  | Pendistribusian   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 565 | AR            |             | 2                         | Penggunaan                                       |   |   |   |   |              | Staff                 |                                 |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN  |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                   |
|-----|---------------|-------------|---|--|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------------------------|
|     |               |             |   | SR   | R | T | B |              |                       |                                 |
| 1   | 2             | 3           |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                              |
| 566 | AR            |             | 1 | Pengklasifikasian Pengamanan dan Akses Arsip   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 567 | AR            |             | 2 | Peminjaman   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 568 | AR            |             | 3 | Pemeliharaan   |   |   |   |              |                       |                                 |
| 569 | AR            |             | 1 | Pemberkasan : Daftar arsip aktif (daftar berkas dan isi berkas)  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 570 | AR            |             | 2 | Penataan Arsip Inaktif : Pengaturan Fisik, Pengolahan Informasi Arsip, Penyusunan daftar arsip inaktif |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 571 | AR            |             | 4 | Penyimpanan  |   |   |   |              |                       |                                 |
| 572 | AR            |             | 3 | Skema penyimpanan arsip aktif dan in aktif   |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 573 | AR            |             | 4 | Pengamanan   |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 574 | AR            |             | 5 | Alih Media   |   |   | √ | Staff        |                       |                                 |
| 575 | AR            |             | 1 | Kebijakan alih media   |   |   |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 576 | AR            |             | 2 | Autentikasi  |   |   |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 577 | AR            |             | 3 | Berita acara   |   |   |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 578 | AR            |             | 4 | Daftar arsip yang alih mediakan  |   |   |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 579 | AR            |             | 6 | Program Arsip vital  |   |   |   |              |                       |                                 |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                           | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN  |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                   |                                 |
|-----|---------------|-------------|---|---------------------------|--|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|     |               |             |   |                           | SR   | R | T | B |              |                       |                                 |                                 |
| 1   | 2             | 3           |   |                           | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                              |                                 |
| 580 | AR            |             |   | 1                         | Identifikasi   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan kearsipan |                                 |
| 581 | AR            |             |   | 2                         | Pelindungan dan pengamanan   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan kearsipan |                                 |
| 582 | AR            |             |   | 3                         | Penyelamatan dan pemulihan   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan kearsipan |                                 |
| 583 | AR            |             | 7 | Autentikasi Arsip Dinamis |  |   |   |   |              |                       |                                 |                                 |
| 584 | AR            |             |   | 1                         | Pembuktian Autentisitas  |   | √ |   |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan kearsipan |                                 |
| 585 | AR            |             |   | 2                         | Pendapat tenaga ahli   |   | √ |   |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan kearsipan |                                 |
| 586 | AR            |             |   | 3                         | Pengujian  |   | √ |   |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan kearsipan |                                 |
| 587 | AR            |             |   | 4                         | Penetapan autentisitas arsip statis/surat pernyataan Pencipta Arsip        |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko                  | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 588 | AR            |             | 9 | Penyusutan                |  |   |   |   |              |                       |                                 |                                 |
| 589 | AR            |             |   | 1                         | Pemindahan Arsip Inaktif (Berita Acara dan Daftar Arsip Yang Dipindahkan ) |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko                  | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 590 | AR            |             |   | 2                         | Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna                                  |   |   |   |              |                       |                                 |                                 |
| 591 | AR            |             |   |                           | - Panitia penilai  |   |   |   |              |                       |                                 |                                 |
| 592 | AR            |             |   |                           | - Penilaian panitia penilai  |   |   |   |              |                       |                                 |                                 |
| 593 | AR            |             |   |                           | - Permintaan persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan)           |   |   |   |              |                       |                                 |                                 |
| 594 | AR            |             |   |                           | - Penetapan arsip yang dimusnahkan   |   |   |   |              |                       |                                 |                                 |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                          |                                     | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN  |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                   |
|-----|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------------------------|
|     |               |             |                          |                                     | SR   | R | T | B |              |                       |                                 |
| 1   | 2             | 3           |                          |                                     | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                              |
| 595 | AR            |             |                          |                                     | - Berita Acara Pemusnahan Arsip  |   |   |   |              |                       |                                 |
| 596 | AR            |             |                          |                                     | - Daftar arsip yang dimusnahkan  |   |   |   |              |                       |                                 |
| 597 | AR            |             |                          | 3                                   | Penyerahan arsip statis :  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 598 | AR            |             |                          |                                     | - Pembentukan Panitia Penilai  |   |   |   |              |                       |                                 |
| 599 | AR            |             |                          |                                     | - Notulen Rapat Panitia  |   |   |   |              |                       |                                 |
| 600 | AR            |             |                          |                                     | - Surat pertimbangan Panitia Penilai   |   |   |   |              |                       |                                 |
| 601 | AR            |             |                          |                                     | - Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan                                      |   |   |   |              |                       |                                 |
| 602 | AR            |             |                          |                                     | - Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta arsip |   |   |   |              |                       |                                 |
| 603 | AR            |             |                          |                                     | - Keputusan Penetapan Penyerahan   |   |   |   |              |                       |                                 |
| 604 | AR            |             |                          |                                     | - Berita Acara Penyerahan Arsip  |   |   |   |              |                       |                                 |
| 605 | AR            |             |                          |                                     | - Daftar arsip yang diserahkan   |   |   |   |              |                       |                                 |
| 606 | AR            |             | 10                       | Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis |  |   |   |   |              |                       |                                 |
| 607 | AR            |             |                          | 1                                   | Data Base Pengelolaan Arsip Aktif  |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 608 | AR            |             |                          | 2                                   | Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif  |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 609 | AR            | 4           | Pengelolaan Arsip Statis |                                     |  |   |   |   |              |                       |                                 |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN       |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                                 |
|-----|---------------|-------------|---|-------------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|
|     |               |             |   | SR                            | R   | T | B |              |                       |                |                                 |
| 1   | 2             | 3           |   | 4                             | 5   | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10             |                                 |
| 610 | AR            |             | 1 | Akuisisi                      |   |   |   |              |                       |                |                                 |
| 611 | AR            |             |   | 1                             | Monitoring fisik dan daftar                     |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 612 | AR            |             |   | 2                             | Verifikasi terhadap daftar arsip                |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 613 | AR            |             |   | 3                             | Menetapkan status arsip statis                  |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 614 | AR            |             |   | 4                             | Persetujuan untuk Penyerahan                    |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 615 | AR            |             |   | 5                             | Penetapan arsip yang diserahkan                 |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 616 | AR            |             |   | 6                             | Berita Acara Penyerahan Arsip                   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 617 | AR            |             |   | 7                             | Daftar arsip yang diserahkan                    |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 618 | AR            |             | 2 | Sejarah Lisan                 |   |   |   |              |                       |                |                                 |
| 619 | AR            |             |   | 1                             | Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan          |   |   | √            |                       |                |                                 |
| 620 | AR            |             |   | 2                             | Hasil Wawancara Sejarah Lisan :                 |   |   | √            | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 621 | AR            |             |   |                               | - Berita Acara wawancara Sejarah Lisan          |   |   |              |                       |                |                                 |
| 622 | AR            |             |   |                               | - Laporan Kegiatan                              |   |   |              |                       |                |                                 |
| 623 | AR            |             |   |                               | - Hasil Wawancara (Kaset atau CD) dan transkrip |   |   |              |                       |                |                                 |
| 624 | AR            |             | 3 | Daftar Pencarian Arsip Statis |   |   |   |              |                       |                |                                 |
| 625 | AR            |             |   | 1                             | Pengumuman                                      |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kearsipan |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                   |
|-----|------------|-------------|---|--|---|---|---|------------|--------------------|---------------------------------|
|     |            |             |   | SR   | R | T | B |            |                    |                                 |
| 1   | 2          | 3           |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                              |
| 626 | AR         |             | 2 | Akuisisi daftar pencarian arsip statis   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 627 | AR         |             | 4 | Penghargaan dan Imbalan  |   |   |   |            |                    |                                 |
| 628 | AR         |             | 5 | Pengolahan   |   |   |   |            |                    |                                 |
| 629 | AR         |             | 1 | Menata Informasi   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 630 | AR         |             | 2 | Menata Fisik   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 631 | AR         |             | 3 | Menyusun Sarana Bantu Temu Balik :Daftar Arsip Statis, Inventaris Arsip Statis dan Guide |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 632 | AR         |             | 6 | Preservasi Preventif   |   |   |   |            |                    |                                 |
| 633 | AR         |             | 1 | Penyimpanan  |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 634 | AR         |             | 2 | Pengendalian hama terpadu  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 635 | AR         |             | 3 | Reproduksi (Alih Media) : Berita Acara Alih Media dan Daftar Arsip yang dialihmediakan   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 636 | AR         |             | 4 | Perencanaan dan Penanggulangan Bencana   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 637 | AR         |             | 7 | Prefentif Kuratif  |   |   |   |            |                    |                                 |
| 638 | AR         |             | 1 | Perawatan Arsip  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 639 | AR         |             | 2 | Laporan hasil Pengujian Mutu Preservasi  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 640 | AR         |             | 8 | Autentikasi Arsip Statis   |   |   |   |            |                    |                                 |
| 641 | AR         |             | 1 | Pembuktian Autentisitas  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 642 | AR         |             | 2 | Pendapat tenaga ahli   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 643 | AR         |             | 3 | Pengujian  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 644 | AR         |             | 4 | Penetapan autentisitas arsip statis/surat  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kearsipan |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                                    |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                   |
|-----|---------------|-------------|------------------------------------|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------------------------|
|     |               |             |                                    |   | SR                      | R | T | B |              |                       |                                 |
| 1   | 2             | 3           |                                    |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                              |
|     |               |             |                                    | pernyataa   |                         |   |   |   |              |                       |                                 |
| 645 | AR            |             | 5                                  | Akses Arsip Statis  |                         |   |   |   |              |                       |                                 |
| 646 | AR            |             |                                    | 1 Layanan Arsip   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 647 | AR            |             |                                    | 2 Administrasi dan proses penyusunan Penerbitan Naskah Sumber                               |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 648 | AR            |             |                                    | 3 hasil naskah sumber arsip   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 649 | AR            |             |                                    | 3 Pameran arsip   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 650 | AR            | 5           | JASA KEARSIPAN                     |   |                         |   |   |   |              |                       |                                 |
| 651 | AR            |             | 1                                  | Konsultasi Kearsipan  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 652 | AR            |             | 2                                  | Manual Kearsipan  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 653 | AR            |             | 3                                  | Penataan Arsip  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 654 | AR            |             | 4                                  | Otomasi Kearsipan   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 655 | AR            |             | 5                                  | Penyimpanan Arsip/Dokumen   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 656 | AR            |             | 6                                  | Perawatan Arsip/Dokumen   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 657 | AR            |             | 7                                  | Data Base Jasa Kearsipan  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 658 | AR            | 7           | Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan |   |                         |   |   |   |              |                       |                                 |
| 659 | AR            |             | 1                                  | Pembinaan Internal  |                         |   |   |   |              |                       |                                 |
| 660 | AR            |             |                                    | 1 Kegiatan pembinaan terhadap Perangkat Daerah  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 661 | AR            |             |                                    | 2 Laporan hasil Pembinaan terhadap Perangkat Daerah   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 662 | AR            |             | 2                                  | Pembinaan Eksternal   |                         |   |   |   |              |                       |                                 |
| 663 | AR            |             |                                    | 1 Kegiatan pembinaan terhadap LKD Kabupaten/Kota, BUMD, Orpol, Ormas, Swasta dan Masyarakat |                         |   |   |   |              |                       |                                 |



| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP                |   |                                 | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |            | HAK AKSES      | DASAR PERTIMBANGAN              | UNIT PENGOLAH                   |
|-----|------------|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|---|------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
|     |            |                            |   |                                 | SR   | R | T | B          |                |                                 |                                 |
| 1   | 2          | 3                          |   |                                 | 4  | 5 | 6 | 7          | 8              | 9                               | 10                              |
| 664 | AR         |                            |   | 2                               | Laporan Hasil Pembinaan Eksternal  |   |   | √          | Staff          | Unit pelaksana urusan kearsipan | Unit pelaksana urusan           |
| 665 | AR         |                            | 3 | Pengawasan Internal             |  |   | √ | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan kearsipan |                                 |
| 666 | AR         |                            |   | 1                               | Kegiatan pengawasan terhadap Perangkat Daerah  |   |   | √          |                |                                 |                                 |
| 667 | AR         |                            |   | 2                               | Laporan Audit Kearsipan Internal terhadap Perangkat Daerah   |   |   | √          | Tk. Eselon     |                                 | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 668 | AR         |                            | 4 | Pengawasan Eksternal            |  |   |   |            |                |                                 |                                 |
| 669 | AR         |                            |   | 1                               | Kegiatan pengawasan Kearsipan Eksternal terhadap LKD Kabupaten/Kota, BUMD, Orpol, Ormas, Swasta dan Masyarakat |   |   | √          | Staff          | Tidak beresiko                  | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 670 | AR         |                            |   | 2                               | Laporan Hasil Audit Kearsipan Eksternal  |   |   | √          | Tk. Eselon     |                                 | Unit pelaksana urusan kearsipan |
| 671 | HM         | <b>HUBUNGAN MASYARAKAT</b> |   |                                 |  |   |   |            |                |                                 |                                 |
| 672 | HM         |                            | 1 | Penerangan dan Publikasi        |  |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan Kemuasan  |                                 |
| 673 | HM         |                            | 2 | Dengar pendapat/ <i>hearing</i> |  |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan Kemuasan  |                                 |
| 674 | HM         |                            | 3 | Hubungan Antar Lembaga          |  |   |   |            |                |                                 |                                 |
| 675 | HM         |                            |   | 1                               | Forkompimda  |   |   | √          | Tk. Eselon     |                                 | Unit pelaksana urusan Kemuasan  |
| 676 | HM         |                            |   | 2                               | Organisasi Kearsipan Nasional dan Internasional  |   |   | √          | Staff          |                                 | Unit pelaksana urusan Kemuasan  |
| 677 | HM         |                            |   | 3                               | Instansi Vertikal  |   |   | √          | Tk. Eselon     |                                 | Unit pelaksana urusan Kemuasan  |
| 678 | HM         |                            |   | 4                               | Organisasi Kemasyarakatan  |   |   | √          | Staff          | Tidak beresiko                  | Unit pelaksana urusan Kemuasan  |
| 679 | HM         |                            |   | 5                               | Perguruan Tinggi/Sekolah   |   |   | √          | Staff          | Tidak beresiko                  | Unit pelaksana urusan Kemuasan  |
| 680 | HM         |                            |   | 6                               | Partai Politik   |   |   | √          | Staff          | Tidak beresiko                  | Unit pelaksana urusan Kemuasan  |
| 681 | HM         |                            |   | 7                               | Swasta   |   |   | √          | Staff          | Tidak beresiko                  | Unit pelaksana urusan Kemuasan  |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP  |   |   |                                      | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                  |
|-----|---------------|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|
|     |               |              |   |   |                                      | SR                      | R | T | B |              |                       |                                |
| 1   | 2             | 3            |   |   |                                      | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                             |
| 682 | HM            |              |   | 8 | Bakohumas                            |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan Kemuasan |
| 683 | HM            |              | 4 |   | Keprotokolan                         |                         |   |   |   |              |                       |                                |
| 684 | HM            |              |   | 1 | Upacara/Acara Kedinasan              |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan Kemuasan |
| 685 | HM            |              |   | 2 | Kunjungan                            |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan Kemuasan |
| 686 | HM            |              |   | 3 | Agenda Pimpinan                      |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan Kemuasan |
| 687 | HM            |              | 5 |   | Dokumentasi dan Penerbitan           |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan Kemuasan |
| 688 | HM            |              | 6 |   | Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan    |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan Kemuasan |
| 689 | HM            |              | 7 |   | Ucapan                               |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan Kemuasan |
| 690 | HM            |              | 8 |   | Dokumen Hosting                      |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan Kemuasan |
| 691 | <b>HK</b>     | <b>HUKUM</b> |   |   |                                      |                         |   |   |   |              |                       |                                |
| 692 | HK            |              | 1 |   | Program Legislasi                    |                         |   |   |   |              |                       |                                |
| 693 | HK            |              |   | 1 | Perencanaan Program Legislasi daerah |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan hukum    |
| 694 | HK            |              |   | 2 | Evaluasi Program Legislasi           |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan hukum    |
| 695 | HK            |              | 2 |   | Produk Hukum                         |                         |   |   |   |              |                       |                                |
| 696 | HK            |              |   | 1 | Proses Penyusunan Peraturan Daerah   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan hukum    |
| 697 | HK            |              |   | 2 | Proses Penyusunan Peraturan Bupati   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan hukum    |
| 698 | HK            |              |   | 3 | Proses Penyusunan Keputusan Bupati   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan hukum    |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   | KLASIFIKASI KEAMANAN          |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |                |                             |                             |
|-----|------------|-------------|---|-------------------------------|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
|     |            |             |   | SR                            | R   | T | B |           |                    |               |                |                             |                             |
| 1   | 2          | 3           |   | 4                             | 5   | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |                |                             |                             |
| 699 | HK         |             | 2 | Perjanjian Kerjasama          |   |   |   |           |                    |               |                |                             |                             |
| 700 | HK         |             |   | 1                             | Kerjasama Dalam Negeri                          |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan hukum |                             |
| 701 | HK         |             |   | 2                             | Kerjasama Luar Negeri                           |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan hukum |                             |
| 702 | HK         |             | 3 | Bantuan Hukum                 |   |   |   |           |                    |               |                |                             |                             |
| 703 | HK         |             |   | 1                             | Bantuan Hukum Kasus Perdata                     |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan hukum |                             |
| 704 | HK         |             |   | 2                             | Bantuan Hukum Kasus Pidana                      |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan hukum |                             |
| 705 | HK         |             |   | 3                             | Bantuan Hukum Kasus Peradilan Tata Usaha Negara |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan hukum |                             |
| 706 | HK         |             | 4 | Telaah Hukum                  |   |   |   |           |                    |               |                |                             |                             |
| 707 | HK         |             |   | 1                             | Telaah Hukum Internal                           |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan hukum |                             |
| 708 | HK         |             |   | 2                             | Telaah Hukum Eksternal                          |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan hukum |                             |
| 709 | HK         |             | 5 | Sosialisasi Hukum             |   |   |   |           |                    | √             | Staff          |                             |                             |
| 710 | HK         |             | 6 | Dokumentasi Hukum             |   |   |   |           |                    |               |                |                             |                             |
| 711 | HK         |             |   | 1                             | Kegiatan Pengembangan Dokumentasi Hukum         |   |   |           |                    |               |                | √                           | Unit pelaksana urusan hukum |
| 712 | HK         |             |   | 2                             | Data Base Dokumentasi HUKum                     |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan hukum |                             |
| 713 | HK         |             | 7 | Hak Atas Kekayaan Intelektual |   |   |   |           |                    | √             | Staff          | Tidak beresiko              |                             |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP                 |   | KLASIFIKASI KEAMANAN          |  |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |                             |                                     |
|-----|------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|---|---|-----------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|     |            |                             |   | SR                            | R                                      | T | B |           |                    |               |                             |                                     |
| 1   | 2          | 3                           |   | 4                             | 5                                      | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |                             |                                     |
| 714 | HK         |                             | 8 | Penegakan Hukum               |  |   |   |           |                    |               |                             |                                     |
| 715 | HK         |                             |   | 1                             | Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah    |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko              | Unit pelaksana urusan hukum         |
| 716 | HK         |                             |   | 2                             | Tindak lanjut Kegiatan Penegakan Hukum |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko              | Unit pelaksana urusan hukum         |
| 718 | HK         |                             | 9 | Penyidik Pegawai Negeri Sipil |  |   |   |           |                    |               |                             |                                     |
| 719 | HK         |                             |   | 1                             | Program Pengembangan PPNS              |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko              | Unit pelaksana urusan hukum         |
| 720 | HK         |                             |   | 2                             | Pembinaan Personal PPNS                |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko              | Unit pelaksana urusan hukum         |
| 721 | <b>TU</b>  | <b>KETATAUSAHAAN</b>        |   |                               |  |   |   |           |                    |               |                             |                                     |
| 722 | TU         |                             | 1 | Persuratan                    |  |   |   |           |                    |               |                             |                                     |
| 723 | TU         |                             |   | 1                             | Pengurusan Surat Masuk                 |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko              | Unit pelaksana urusan ketatausahaan |
| 724 | TU         |                             |   | 2                             | Pengurusan Surat Keluar                |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko              | Unit pelaksana urusan ketatausahaan |
| 725 | TU         |                             |   | 3                             | Korespondensi Internal                 |   |   |           | √                  | Staff         | Unit pelaksana urusan hukum | Unit pelaksana urusan ketatausahaan |
| 726 | TU         |                             | 2 | Penggandaan Surat Masuk       |  |   |   | √         | Staff              |               |                             | Unit pelaksana urusan hukum         |
| 728 | TU         |                             | 3 | Agenda Kegiatan               |  |   |   | √         | Staff              |               |                             | Unit pelaksana urusan hukum         |
| 729 | TU         |                             | 4 | Rapat/Rakor/Rakernis          |  |   |   | √         | Staff              |               |                             | Unit pelaksana urusan hukum         |
| 730 | OT         | ORGANISASI DAN TATA LAKSANA |   |                               |  |   |   |           |                    |               |                             |                                     |
| 731 | OT         |                             | 1 | Organisasi                    |  |   |   |           |                    |               |                             |                                     |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP         |   |                                  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN          |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                       |                                    |
|-----|---------------|---------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|     |               |                     |   |                                  | SR                               | R | T | B |              |                       |                                     |                                    |
| 1   | 2             | 3                   |   |                                  | 4                                | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                                  |                                    |
| 732 | OT            |                     |   | 1                                | Struktur Organisasi              |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan ketatausahaan |                                    |
| 733 | OT            |                     |   | 2                                | Uraian Tugas                     |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan ketatausahaan |                                    |
| 734 | OT            |                     |   | 3                                | Analisis Jabatan dan Beban Kerja |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan ketatausahaan |                                    |
| 735 | OT            |                     | 2 | Hubungan / Mekanisme Kerja       |                                  |   |   | √ | Staff        |                       | Tidak beresiko                      |                                    |
| 736 | OT            |                     | 3 | Ketatalaksanaan                  |                                  |   |   | √ | Staff        |                       | Tidak beresiko                      |                                    |
| 737 | <b>PL</b>     | <b>PERLENGKAPAN</b> |   |                                  |                                  |   |   |   |              |                       |                                     |                                    |
| 738 | PL            |                     | 1 | Analisa Kebutuhan                |                                  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan perlengkapan  |                                    |
| 739 | PL            |                     | 2 | Tata Ruang                       |                                  |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan perlengkapan  |                                    |
| 740 | PL            |                     | 2 | Daftar Perkenalan Mampu          |                                  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan perlengkapan  |                                    |
| 741 | PL            |                     | 3 | Penerimaan / Realisasi Pengadaan |                                  |   |   |   |              |                       |                                     |                                    |
| 742 | PL            |                     |   | 0                                | Alat Tulis Kantor                |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko                      | Unit pelaksana urusan perlengkapan |
| 743 | PL            |                     |   | 1                                | Perlengkapan Kantor              |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko                      | Unit pelaksana urusan perlengkapan |
| 744 | PL            |                     |   | 2                                | Tanah dan Bangunan               |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko                      | Unit pelaksana urusan perlengkapan |
| 745 | PL            |                     |   | 3                                | Kendaraan                        |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko                      | Unit pelaksana urusan perlengkapan |
| 746 | PL            |                     |   | 4                                | Instalasi/Jaringan               |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko                      | Unit pelaksana urusan perlengkapan |
| 747 | PL            |                     |   | 5                                | Peralatan Kearsipan              |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko                      | Unit pelaksana urusan perlengkapan |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP     |                                 | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                        |
|-----|---------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|--------------------------------------|
|     |               |                 |                                 | SR                      | R | T | B |              |                       |                                      |
| 1   | 2             | 3               |                                 | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                                   |
| 748 | PL            | 4               | Penyimpanan/pegudangan          |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan                |
| 749 | PL            | 5               | Distribusi                      |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan                |
| 750 | PL            | 6               | Pemeliharaan                    |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan perlengkapan   |
| 751 | PL            | 7               | Inventarisasi                   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan perlengkapan   |
| 752 | PL            | 8               | Penghapusan                     |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan perlengkapan   |
| 753 | RT            | KERUMAHTANGGAAN |                                 |                         |   |   |   |              |                       |                                      |
| 754 | RT            | 1               | Perjalanan Dinas Pimpinan       |                         |   |   |   |              |                       |                                      |
| 756 | RT            | 1               | Dalam Negeri                    |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |
| 757 | RT            | 2               | Luar Negeri                     |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusankerumahtanggan  |
| 758 | RT            | 2               | Rapat Pimpinan                  |                         |   |   |   |              |                       |                                      |
| 759 | RT            | 1               | Sarana dan Prasarana            |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |
| 760 | RT            | 2               | Jamuan Rapat                    |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |
| 761 | RT            | 3               | Kantor                          |                         |   |   |   |              |                       |                                      |
| 762 | RT            | 1               | Pemeliharaan gedung             |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusankerumahtanggan  |
| 763 | RT            | 2               | Perlengkapan Kantor             |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |
| 764 | RT            | 3               | Air, Listrik dan Telekomunikasi |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                    |                                 | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                        |
|-----|------------|-------------|---|--------------------|---------------------------------|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|--------------------------------------|
|     |            |             |   |                    |                                 | SR                   | R | T | B |            |                    |                                      |
| 1   | 2          | 3           |   |                    |                                 | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                                   |
| 765 | RT         |             |   | 4                  | Keamanan Kantor                 |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |
| 766 | RT         |             |   | 5                  | Kebersihan Kantor               |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |
| 767 | RT         |             |   | 6                  | Jamuan Tamu                     |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |
| 768 | RT         |             |   | 7                  | Halaman dan Taman               |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |
| 769 | RT         |             | 4 | Rumah Dinas        |                                 |                      |   |   |   |            |                    |                                      |
| 770 | RT         |             |   | 1                  | Pemeliharaan gedung             |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |
| 771 | RT         |             |   | 2                  | Perlengkapan Rumah Dinas        |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |
| 772 | RT         |             |   | 3                  | Air, Listrik dan Telekomunikasi |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |
| 773 | RT         |             |   | 4                  | Keamanan Rumah Dinas            |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |
| 774 | RT         |             |   | 5                  | Kebersihan Rumah Dinas          |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |
| 775 | RT         |             |   | 6                  | Jamuan Tamu                     |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |
| 776 | RT         |             |   | 7                  | Halaman dan Taman               |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |
| 777 | RT         |             | 5 | Fasilitas Pimpinan |                                 |                      |   |   |   |            |                    |                                      |
| 778 | RT         |             |   | 1                  | Kendaraan Dinas                 |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |
| 779 | RT         |             |   | 2                  | Pengawasan dan Pengamanan       |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |
| 780 | RT         |             |   | 3                  | Telekomunikasi                  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kerumahtanggan |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   | KLASIFIKASI KEAMANAN                            |  |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                                   |                                   |
|-----|------------|-------------|---|---|--|---|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|     |            |             |   | SR  | R  | T | B |           |                    |                |                                   |                                   |
| 1   | 2          | 3           |   | 4   | 5  | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |                                   |                                   |
| 781 |            | PERENCANAAN |   |   |  |   |   |           |                    |                |                                   |                                   |
| 782 | PR         |             | 1 | Usulan Perencanaan                              |  |   |   |           |                    |                |                                   |                                   |
| 782 | PR         |             |   | 1   | Aspirasi DPRD                                      |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 784 | PR         |             |   | 2   | Usulan langsung Masyarakat On Line dan manual      |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 785 | PR         |             |   | 3   | Usulan Perangkat Daerah                            |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 786 | PR         |             |   | 4   | Usulan Unit Kerja dalam Perangkat Daerah           |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 787 | PR         |             | 3 | Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) |  |   |   |           |                    |                |                                   |                                   |
| 788 | PR         |             |   | 1   | Musrenbang RPJP/RPJM                               |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 789 | PR         |             |   | 2   | Musrenbang RKPD                                    |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 790 | PR         |             |   | 3   | Forum Perangkat Daerah                             |   |   |           |                    |                |                                   |                                   |
| 791 | PR         |             | 2 | Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan  |  |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 792 | PR         |             |   | 1   | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)  |   |   |           | √                  | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan perencanaan | Unit pelaksana urusan             |
| 793 | PR         |             |   | 2   | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) |   |   |           | √                  | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan perencanaan | Unit pelaksana urusan             |
| 794 | PR         |             |   | 3   | Rencana Strategis Perangkat Daerah                 |   |   |           | √                  | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan perencanaan | Unit pelaksana urusan             |
| 795 | PR         |             | 3 | Rencana Kerja Tahunan                           |  |   |   |           |                    |                |                                   | Unit pelaksana urusan perencanaan |



| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                     |                                   |
|-----|------------|-------------|---|--|--|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|     |            |             |   |  | SR   | R | T | B |           |                    |                                   |                                   |
| 1   | 2          | 3           |   |  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                                |                                   |
| 796 | PR         |             |   | 1  | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)                             |   |   |   | √         | Staff              | Unit pelaksana urusan perencanaan | Unit pelaksana urusan             |
| 797 | PR         |             |   | 2  | Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah)            |   |   |   | √         | Staff              | Unit pelaksana urusan perencanaan | Unit pelaksana urusan             |
| 798 | PR         |             |   | 3  | Rencana Kerja Tahunan Unit Kerja pada Perangkat Daerah             |   |   |   | √         | Staff              | Unit pelaksana urusan perencanaan | Unit pelaksana urusan             |
| 799 | PR         |             |   | 4  | Penetapan Kinerja Pimpinan Perangkat Daerah                        |   |   |   | √         | Staff              | Unit pelaksana urusan perencanaan | Unit pelaksana urusan             |
| 800 | PR         |             |   | 5  | Penetapan Kinerja Pejabat Esselon 3 dan Esselon 4                  |   |   |   | √         | Staff              | Unit pelaksana urusan perencanaan | Unit pelaksana urusan             |
| 801 | PR         |             | 4 | Rencana Pembangunan Wilayah Startegis            |  |   |   |   |           |                    |                                   |                                   |
| 802 | PR         |             |   | 1  | Pusat Pertumbuhan Nasional dan Regional                            |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 803 | PR         |             |   | 2  | Metro Politan Bandung dan Bodebekkapur                             |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 804 | PR         |             |   | 3  | Pembangunan Bagian Wilayah   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 805 | PR         |             |   | 4  | Pembangunan Tematik  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 806 | PR         |             |   | 5  | Pembangunan Sektoral   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 807 | PR         |             | 5 | Pembangunan Daerah Perbatasan Kabupaten Kuningan |  |   |   |   |           |                    |                                   |                                   |
| 808 | PR         |             |   | 1  | Kajian Rencana Pembangunan Daerah Perbatasan Prov. Jawa Barat      |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 809 | PR         |             |   | 2  | Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perbatasan Prov. Jawa Barat |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan perencanaan |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN                                      |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |            |                |                                   |
|-----|------------|-------------|---|--|---|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------------------|
|     |            |             |   |  | SR  | R | T | B |           |                    |               |            |                |                                   |
| 1   | 2          | 3           |   |  | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |            |                |                                   |
| 810 | PR         |             |   | 3  | Kerja Sama Pembangunan Daerah Perbatasan Prov. Jawa Barat |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 811 | PR         |             | 6 | Indikator Keberhasilan Pembangunan         |   |   |   |   |           |                    |               |            |                | Unit pelaksana urusan             |
| 812 | PR         |             |   | 1  | Kajian penetapan Indikator Keberhasilan Pembangunan       |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 813 | PR         |             |   | 2  | Evaluasi Capaian Indikator Keberhasilan Pembangunan       |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 814 | PR         |             | 7 | Kerjasama Perencanaan                      |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                                   |
| 815 | PR         |             |   | 1  | Kegiatan Komite Perencanaan                               |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan             |
| 816 | PR         |             |   | 2  | Rekomendasi Komite Perencana                              |   |   |   |           |                    | √             | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 817 | PR         |             |   | 3  | Kerjasama Perencanaan dengan Perguruan Tinggi             |   |   |   |           |                    | √             | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 818 | PR         |             |   | 4  | Kerjasama Perencanaan dengan Pemerintah Daerah            |   |   |   |           |                    | √             | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 819 | PR         |             |   | 5  | Kerjasama Perencanaan dengan Luar Negeri                  |   |   |   |           |                    | √             | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 820 | PR         |             | 8 | Pejabat Fungsional Perencanaan (Perencana) |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                                   |
| 821 | PR         |             |   | 1  | Kajian Pengembangan Perencana                             |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 822 | PR         |             |   | 2  | Pembinaan Perencana                                       |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 823 | PR         |             | 9 | Laporan                                    |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                                   |
| 824 | PR         |             |   | 1  | Laporan Berkala (Laporan Triwulan dan Semesteran)         |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 825 | PR         |             |   | 2  | Laporan Tahunan Esselon 3                                 |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan perencanaan |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |    |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                                   |   |   |       | HAK<br>AKSES   | DASAR<br>PERTIMBANGAN             | UNIT PENGOLAH                     |
|-----|---------------|-------------|----|---|---|---|---|-------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|     |               |             |    |   | SR  | R | T | B     |                |                                   |                                   |
| 1   | 2             | 3           |    |   | 4   | 5 | 6 | 7     | 8              | 9                                 | 10                                |
| 826 | PR            |             |    | 3   | Laporan Tahunan Perangkat Daerah                          |   |   | √     | Staff          | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 827 | PR            |             |    | 4   | Laporan Khusus  |   |   | √     | Tk. Eselon     |                                   | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 828 | PR            |             |    | 5   | Progress Report   |   |   | √     | Staff          | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 829 | PR            |             |    | 6   | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) |   |   | √     | Staff          | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 830 | PR            |             | 10 | Evaluasi Program / Kegiatan   |   |   |   |       |                |                                   |                                   |
| 831 | PR            |             |    | 1   | Unit Kerja  |   |   | √     | Tk. Eselon     |                                   | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 832 | PR            |             |    | 2   | Lembaga/Instansi  |   |   | √     | Tk. Eselon     |                                   | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 833 | PR            |             | 11 | Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan                   |   |   | √ | Staff | Tidak beresiko |                                   |                                   |
| 834 | PR            |             | 12 | Konsultasi perencanaan pembangunan                                    |   |   | √ | Staff | Tidak beresiko |                                   | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 835 | PR            |             | 13 | Pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan |   |   | √ | Staff | Tidak beresiko |                                   | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 836 | PR            |             | 14 | Perencanaan Pendanaan Pembangunan                                     |   |   |   |       |                |                                   | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 837 | PR            |             |    | 1   | Pendanaan Luar Negeri dan Hibah                           |   |   | √     | Staff          | Unit pelaksana urusan perencanaan | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 838 | PR            |             |    | 2   | Pendanaan Dalam Negeri                                    |   |   | √     | Staff          | Unit pelaksana urusan perencanaan | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 839 | PR            |             |    | 3   | Kerjasama Pembangunan Internasional                       |   |   | √     | Staff          | Unit pelaksana urusan perencanaan | Unit pelaksana urusan perencanaan |
| 840 | PR            |             |    | 4   | Surat Berharga Syariah Negara                             |   |   | √     | Staff          | Unit pelaksana urusan             | Unit pelaksana urusan perencanaan |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP                        |   |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES   | DASAR PERTIMBANGAN                | UNIT PENGOLAH                                      |
|-----|------------|------------------------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|-------------|-----------------------------------|--|
|     |            |                                    |   |   |   | SR                   | R | T | B |             |                                   |  |
| 1   | 2          | 3                                  |   |   |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8           | 9                                 | 10   |
|     |            |                                    |   |   |   |                      |   |   |   | perencanaan |                                   |  |
| 841 | PR         |                                    |   | 5 | Pendanaan On Top dan atau Inisiatif Baru                          |                      |   |   | √ | Staff       | Unit pelaksana urusan perencanaan | Unit pelaksana urusan perencanaan                  |
| 842 | PR         |                                    |   | 6 | Corporate Social Responcibility (CSR)                             |                      |   |   | √ | Staff       | Unit pelaksana urusan perencanaan | Unit pelaksana urusan perencanaan                  |
| 843 | <b>PP</b>  | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b> |   |   |   |                      |   |   |   |             |                                   |  |
| 844 | PP         |                                    | 1 |   | Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah                   |                      |   |   |   |             |                                   |  |
| 845 | PP         |                                    |   | 1 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah          |                      |   |   | √ | Staff       | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembaganan |
| 846 | PP         |                                    |   | 2 | Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah     |                      |   | √ |   | Tk. Eselon  |                                   | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembaganan |
| 847 | PP         |                                    | 2 |   | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi                        |                      |   |   |   |             |                                   |  |
| 848 | PP         |                                    |   | 1 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi               |                      |   |   | √ | Staff       | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembaganan |
| 849 | PP         |                                    |   | 2 | Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi          |                      |   | √ |   | Tk. Eselon  |                                   | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembaganan |
| 850 | PP         |                                    | 3 |   | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya                  |                      |   |   |   |             |                                   |  |
| 851 | PP         |                                    |   | 1 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya         |                      |   |   | √ | Staff       | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembaganan |
| 852 | PP         |                                    |   | 2 | Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya    |                      |   | √ |   | Tk. Eselon  |                                   | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembaganan |
| 853 | PP         |                                    | 4 |   | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu pengetahuan dan Teknologi |                      |   |   |   |             |                                   |  |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN   |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                                     |
|-----|---------------|-------------|---|--|---|---|---|---|--------------|-----------------------|---|
|     |               |             |   |  | SR  | R | T | B |              |                       |   |
| 1   | 2             | 3           |   |  | 4   | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10  |
| 854 | PP            |             |   | 1  | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi      |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan |
| 855 | PP            |             |   | 2  | Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan |
| 856 | PP            |             | 5 | Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna |   |   |   |   |              |                       |   |
| 857 | PP            |             |   | 1  | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna                       |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan |
| 858 | PP            |             |   | 2  | Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna                  |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan |
| 859 | PP            |             |   | 3  | Pemasyarakatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna           |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan |
| 860 | PP            |             | 6 | Kerjasama Penelitian dan Pengembangan            |   |   |   |   |              |                       |   |
| 861 | PP            |             |   | 1  | Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Antar Pemerintah Daerah                   |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan |
| 862 | PP            |             |   | 2  | Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Dengan Peguruan Tinggi                    |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan |
| 863 | PP            |             |   | 3  | Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan Swasta dan Masyarakat              |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan |
| 864 | PP            |             |   | 4  | Dewan Research Daerah   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan |
| 865 | PP            |             | 7 | Hasil Penelitian dan Pengembangan                |   |   |   |   |              |                       |   |
| 866 | PP            |             |   | 1  | Data Base Hasil Penelitian dan Pengembangan                                     |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan penelitian dan              |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP       |   |  |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                                     |
|-----|---------------|-------------------|---|--|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|---|
|     |               |                   |   |  |   | SR                      | R | T | B |              |                       |   |
| 1   | 2             | 3                 |   |  |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10  |
|     |               |                   |   |  |   |                         |   |   |   |              |                       | pengembangan                                      |
| 867 | PP            |                   |   | 2  | Publikasi Hasil Penelitian dan Pengembangan                 |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan |
| 868 | PP            |                   |   | 3  | Penerbitan jurnal   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan |
| 869 | PP            |                   | 8 | Pengembangan Inovasi Daerah                    |   |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 870 | PP            |                   |   | 1  | Bantuan Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah          |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan                             |
| 871 | PP            |                   |   | 2  | Penghargaan Inovasi Daerah                                  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan |
| 872 | PP            |                   | 9 | Sumberdaya Manusia Penelitian dan Pengembangan |   |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 873 | PP            |                   |   | 1  | Pengembangan Sumberdaya Manusia Penelitian dan Pengembangan |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan |
| 874 | PP            |                   |   | 2  | Pembinaan Peneliti  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan penelitian dan pengembangan |
| 875 | <b>PW</b>     | <b>PENGAWASAN</b> |   |  |   |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 876 | PW            |                   | 1 | Rencana Kegiatan Pengawasan                    |   |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 877 | PW            |                   |   | 1  | Rencana Kegiatan Pengawasan Tahunan                         |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pengawasan                  |
| 878 | PW            |                   |   | 2  | Rencana Kegiatan Pengawasan Khusus                          |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pengawasan                  |
| 879 | PW            |                   | 2 | Pengawasan Tahunan                             |   |                         |   |   |   | Tk. Eselon   |                       |   |
| 880 | PW            |                   |   | 1  | Kegiatan Audit Keuangan dan Kinerja Tahun Berjalan          |                         |   | √ |   | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan pengawasan                  |

| No. | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                      | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                                |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                                      |
|-----|---------------|-------------|---|----------------------|--|---|---|---|--------------|-----------------------|--|
|     |               |             |   |                      | SR   | R | T | B |              |                       |  |
| 1   | 2             | 3           |   |                      | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10   |
| 881 | PW            |             |   | 2                    | Laporan Hasil Audit Keuangan dan Kinerja Tahu Berjalan |   | √ |   |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan pengawasan                   |
| 882 | PW            |             |   | 3                    | Tindak Lanjut Hasil Audit                              |   |   | √ |              | Staff                 | Unit pelaksana urusan pengawasan                   |
| 883 | PW            |             | 3 | Pengawasan Khusus    |  |   |   |   |              |                       |  |
| 884 | PW            |             |   | 1                    | Kegiatan audit khusus                                  |   | √ |   |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan pengawasan                   |
| 885 | PW            |             |   | 2                    | Laporan Hasil Audit Khusus                             |   | √ |   |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan pengawasan                   |
| 886 | PW            |             |   | 3                    | Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus                       |   | √ |   |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan pengawasan                   |
| 887 | PW            |             | 4 | Pengaduan Masyarakat |  |   |   |   |              |                       |  |
| 888 | PW            |             |   | 1                    | Pusat Pengaduan Masyarakat                             |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan pengawasan                   |
| 889 | PW            |             |   | 2                    | Penanganan / Tindak lanjut atas Pengaduan Masyarakat   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan pengawasan                   |
| 890 | PW            |             |   | 3                    | Evaluasi Penanganan / Tindak Lanjut                    |   |   |   | √            | Staff                 | Unit pelaksana urusan pengawasan                   |
| 891 | PW            |             | 5 | Pengawasan Melekat   |  |   |   |   |              |                       |  |
| 892 | PW            |             |   | 1                    | Sosialisasi  |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan pengawasan |
| 893 | PW            |             |   | 2                    | Kegiatan Pengawasan Melekat                            |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan pengawasan |
| 894 | PW            |             |   | 3                    | Evaluasi Kegiatan Pengawasan Melekat                   |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan pengawasan |
| 895 | PW            |             | 6 | Pemantauan           |  |   |   |   |              |                       |  |
| 896 | PW            |             | 7 | 1                    | Pemantauan pelaksanaan kegiatan/program                |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan pengawasan |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP     |  |  | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|-----|------------|-----------------|--|--|--|---|---|---|------------|--------------------|----------------------------------|
|     |            |                 |  |  | SR   | R | T | B |            |                    |                                  |
| 1   | 2          | 3               |  |  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                               |
| 897 | PW         |                 |  | 2  | Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP)  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengawasan |
| 898 | PW         |                 |  | 3  | Tuntutan Ganti Rugi (TGR)  |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pengawasan |
| 899 | PW         |                 | 8  | Sumberdaya Manusia Pengawasan (Auditor)    |  |   |   |   |            |                    |                                  |
| 900 | PW         |                 |  | 1  | Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengawasan   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengawasan |
| 901 | PW         |                 |  | 2  | Pembinaan Auditor  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengawasan |
| 902 | PW         |                 | 9  | Pengembangan Akuntabilitas Publik          |  |   |   |   |            |                    |                                  |
| 903 | PW         |                 |  | 1  | Desk Akuntabilitas   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengawasan |
| 904 | PW         |                 |  | 2  | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengawasan |
| 905 | PW         |                 |  | 3  | Pemantauan Akuntabilitas Instansi Pemerintah   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengawasan |
| 906 | PW         |                 |  | 4  | Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengawasan |
| 907 | <b>KU</b>  | <b>KEUANGAN</b> |  |  |  |   |   |   |            |                    |                                  |
| 908 | KU         | 1               | RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN |  |  |   |   |   |            |                    |                                  |
| 909 | KU         |                 | 1  | Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) |  |   |   |   |            |                    |                                  |
| 910 | KU         |                 |  | 1  | Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan   |
| 911 | KU         |                 |  | 2  | Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemda |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan   |



| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                  |
|-----|------------|-------------|---|--|---|---|---|------------|--------------------|--------------------------------|
|     |            |             |   | SR   | R | T | B |            |                    |                                |
| 1   | 2          | 3           |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                             |
| 912 | KU         |             | 3 | KUA beserta Nota Kesepakatanny   |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 913 | KU         |             | 4 | Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)   |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 914 | KU         |             | 5 | Nota Kesepakatan PPA   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 915 | KU         |             | 6 | Prioritas Plafon Anggaran  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 916 | KU         |             | 7 | .....  |   |   |   |            |                    |                                |
| 917 | KU         |             | 2 | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)   |   |   |   |            |                    |                                |
| 918 | KU         |             | 1 | Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 919 | KU         |             | 2 | Dokumen RKA-SKPD   |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 920 | KU         |             | 3 | .....  |   |   |   |            |                    |                                |
| 921 | KU         |             | 3 | Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan   |   |   |   |            |                    |                                |
| 922 | KU         |             | 1 | Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD:   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 923 | KU         |             | 2 | Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 924 | KU         |             | 3 | Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 925 | KU         |             | 4 | Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta Lampirannya  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                                |
|-----|------------|-------------|---|--|--|---|---|---|-----------|--------------------|----------------|--------------------------------|
|     |            |             |   |  | SR   | R | T | B |           |                    |                |                                |
| 1   | 2          | 3           |   |  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |                                |
| 926 | KU         |             |   | 5  | Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD beserta penjabarannya  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 927 | KU         |             |   | 6  | Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 928 | KU         |             |   | 7  | Penetapan Perda APBD oleh Bupati/beserta Penjabarannya   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 929 | KU         |             |   | 8  | Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 930 | KU         |             | 4 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)                           |  |   |   |   |           |                    |                |                                |
| 931 | KU         |             |   | 1  | Kebijakan Umum, Strategi, Prioritas dan Renstra Perubahan (RKPD dan Renja Perangkat Daerah)      |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 932 | KU         |             |   | 2  | Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemda |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 933 | KU         |             |   | 3  | KUA Perubahan beserta Nota Kesepakatannya  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 934 | KU         |             |   | 4  | Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan                           |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 935 | KU         |             |   | 5  | Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 936 | KU         |             |   | 6  | Prioritas Plafon Anggaran Perubahan  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 937 | KU         |             | 5 | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan |  |   |   |   |           |                    |                |                                |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                  |
|-----|------------|-------------|---|---|--|---|---|---|------------|--------------------|--------------------------------|
|     |            |             |   |   | SR   | R | T | B |            |                    |                                |
| 1   | 2          | 3           |   |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                             |
| 938 | KU         |             |   | 1   | Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 939 | KU         |             |   | 2   | Dokumen RKA-SKPD Perubahan   |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 940 | KU         |             | 6 | Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan |  |   |   |   |            |                    |                                |
| 941 | KU         |             |   | 1   | Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan : Nota Keuangan Pemerintah dan Materi RAPBD                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 942 | KU         |             |   | 2   | Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 943 | KU         |             |   | 3   | Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang Raperda APBD Perubahan   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 944 | KU         |             |   | 4   | Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta Lampirannya  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 945 | KU         |             |   | 5   | Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD Perubahan beserta penjabarannya  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 946 | KU         |             |   | 6   | Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri tentang RAPBD Perubahan  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 947 | KU         |             |   | 7   | Penetapan Perda APBD Perubahan oleh Bupati/beserta Penjabarannya   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 948 | KU         |             |   | 8   | Peraturan Daerah (PERDA) tentang APBD Perubahan  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP                |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                  |
|-----|------------|----------------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|--------------------------------|
|     |            |                            |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                                |
| 1   | 2          | 3                          |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                             |
| 949 |            | <b>PENYUSUNAN ANGGARAN</b> |  |                      |   |   |   |            |                    |                                |
| 950 | KU         | 1                          | Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan                        |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 951 | KU         | 2                          | Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota                   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 952 | KU         | 3                          | Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 953 | KU         | 4                          | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 954 | KU         | 3                          | <b>PELAKSANAAN ANGGARAN</b>  |                      |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan          |
| 955 | KU         | 1                          | Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS                            |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 956 | KU         | 2                          | Pendapatan Asli Daerah   |                      |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 957 | KU         | 1                          | Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Kendaraan Bermotor                          |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 958 | KU         | 2                          | Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)   |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 959 | KU         | 3                          | Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)      |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 960 | KU         | 4                          | Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Air Permukaan                               |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 961 | KU         | 5                          | Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah Pajak Rokok                                       |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 962 | KU         | 6                          | Surat Ketetapan Retribusi Daerah   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 963 | KU         | 7                          | Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Umum   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                     |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                  |
|-----|------------|-------------|---|-------------------------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|--------------------------------|
|     |            |             |   |                                     |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                                |
| 1   | 2          | 3           |   |                                     |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                             |
| 964 | KU         |             |   | 8                                   | Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Usaha  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 965 | KU         |             |   | 9                                   | Bukti Pembayaran Retribusi Perijinan Tertentu  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 966 | KU         |             |   | 10                                  | Bukti Pembayaran Retribusi Pengendalian Lalu Lintas                                  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 967 | KU         |             |   | 11                                  | Bukti Pembayaran Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 968 | KU         |             |   | 12                                  | Bukti Penerimaan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat                                   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 969 | KU         |             |   | 13                                  | Dokumen Rasionalitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah                               |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 970 | KU         |             |   | 14                                  | Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 971 | KU         |             |   | 15                                  | Bukti Penerimaan dari Pengelolaan Dana Bergulir                                      |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 972 | KU         |             |   | 16                                  | Bukti Penerimaan Bunga dan atau jasa Giro pada bank                                  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 973 | KU         |             | 3 | Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan |  |                      |   |   |   |            |                    |                                |
| 974 | KU         |             |   | 1                                   | Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak dan Bukan Pajak                            |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 975 | KU         |             |   | 2                                   | Dana Bagi Hasil Untuk Kabupaten /Kota  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 976 | KU         |             |   | 3                                   | Dana Alokasi Umum (DAU)  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 977 | KU         |             |   | 4                                   | Daerah yang Menerima DAU   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |

| No. | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |    |  |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES      | DASAR PERTIMBANGAN             | UNIT PENGOLAH                  |
|-----|------------|-------------|----|--|--|----------------------|---|---|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |            |             |    |  |  | SR                   | R | T | B |                |                                |                                |
| 1   | 2          | 3           |    |  |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8              | 9                              | 10                             |
| 978 | KU         |             |    | 5  | Dana Alokasi Khusus (DAK)  |                      |   |   | √ | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 979 | KU         |             | 4  | Dokumen Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah   |  |                      |   |   |   | Staff          |                                |                                |
| 980 | KU         |             |    | 1  | Alokasi Dana Penyesuaian   |                      |   |   | √ | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 981 | KU         |             |    | 2  | Dana Otonomi Khusus dan Bantuan Operasional Sekolah  |                      |   |   | √ | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 982 | KU         |             |    | 3  | Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat   |                      |   |   | √ | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 983 | KU         |             |    | 4  | Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat  |                      |   |   | √ | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 984 | KU         |             |    | 5  | Penerimaan Hibah Yang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah Lainnya atau Sumbangan Pihak Ketiga |                      |   |   | √ | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 985 | KU         |             | 5  | Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)                   |  |                      |   |   | √ | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 986 | KU         |             | 6  | Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) |  |                      |   |   | √ | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 987 | KU         |             | 7  | Dokumen Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah     |  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon     |                                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 988 | KU         |             | 8  | Dokumen Piutang Daerah                             |  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon     |                                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 989 | KU         |             | 9  | Dokumen Pengelolaan Investasi                      |  |                      |   |   | √ | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 990 | KU         |             | 10 | Dokumen Belanja Langsung                           |  |                      |   |   | √ | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 991 | KU         |             |    | 1  | Belanja Pegawai  |                      |   | √ |   | Staff          | Unit pelaksana urusan          | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 992 | KU         |             |    | 2  | Belanja Barang Jasa  |                      |   | √ |   | Staff          | Unit pelaksana urusan          | Unit pelaksana urusan keuangan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                   |                                |                                   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES      | DASAR PERTIMBANGAN    | UNIT PENGOLAH                  |
|------|------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---|---|---|----------------|-----------------------|--------------------------------|
|      |            |             |                   |                                |                                   | SR                   | R | T | B |                |                       |                                |
| 1    | 2          | 3           |                   |                                |                                   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8              | 9                     | 10                             |
| 993  | KU         |             |                   | 3                              | Belanja Modal                     |                      |   | √ |   | Staff          | Unit pelaksana urusan | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 994  | KU         |             | 11                | Dokumen Belanja tidak langsung |                                   |                      |   |   | √ | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan          |
| 995  | KU         |             |                   | 1                              | Pegawai                           |                      |   | √ |   | Tidak beresiko |                       | Unit pelaksana urusan          |
| 996  | KU         |             |                   | 2                              | Hibah                             |                      |   | √ |   | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan          |
| 997  | KU         |             |                   | 3                              | Belanja Bagi Hasil                |                      |   | √ |   | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan          |
| 998  | KU         |             |                   | 4                              | Subsidi                           |                      |   | √ |   | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan          |
| 999  | KU         |             |                   | 5                              | Bunga                             |                      |   | √ |   | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan          |
| 1000 | KU         |             |                   | 6                              | Bantuan Sosial                    |                      |   | √ |   | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan          |
| 1001 | KU         |             |                   | 7                              | Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat |                      |   | √ |   | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan          |
| 1002 | KU         |             |                   | 8                              | Belanja Tidak Terduga             |                      |   | √ |   | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan          |
| 1003 | KU         | 4           | Pembiayaan Daerah |                                |                                   |                      |   |   |   |                |                       |                                |
| 1004 | KU         |             | 1                 | Bukti Penerimaan Pembiayaan    |                                   |                      |   |   |   |                |                       |                                |
| 1005 | KU         |             |                   | 1                              | SiLPA                             |                      |   |   | √ | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan          |
| 1006 | KU         |             |                   | 2                              | Dana Cadangan                     |                      |   |   | √ | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1007 | KU         |             |                   | 3                              | Dana Bergulir                     |                      |   |   | √ | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1008 | KU         |             |                   | 4                              | Pinjaman Daerah                   |                      |   |   | √ | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan keuangan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                                    |                                      | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |            | HAK AKSES      | DASAR PERTIMBANGAN             | UNIT PENGOLAH                  |
|------|------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
|      |            |             |                                    |                                      | SR  | R | T | B          |                |                                |                                |
| 1    | 2          | 3           |                                    |                                      | 4   | 5 | 6 | 7          | 8              | 9                              | 10                             |
| 1009 | KU         |             |                                    | 5                                    | Pengalihan Piutang PBB P2 menjadi PAD                           |   |   | √          | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1010 | KU         |             | 2                                  | Bukti Pengeluaran Pembiayaan         |   |   |   |            |                |                                |                                |
| 1011 | KU         |             |                                    | 1                                    | Investasi Jangka Panjang Dalam Bentuk Dana Bergulir             |   |   | √          | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1012 | KU         |             |                                    | 2                                    | Penyertaan Modal Pada BUMD                                      |   |   | √          | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1013 | KU         |             |                                    | 3                                    | Penambahan Penyertaan Modal pada BUMD                           |   |   | √          | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1014 | KU         |             |                                    | 4                                    | Pengeluaran Dari Dana Cadangan                                  |   |   | √          | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1015 | KU         |             |                                    | 5                                    | Pembiayaan Bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM)      |   |   | √          | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1016 | KU         |             |                                    | 6                                    | Penyertaan Modal Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Milik Pemda |   |   | √          | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1017 | KU         | 5           | Dokumen Penatausahaan Keuangan     |                                      |   |   |   |            |                |                                |                                |
| 1018 | KU         |             | 1                                  | Surat Penyediaan Dana (SPD)          |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |                                |
| 1019 | KU         |             | 2                                  | Surat Permohonan Pembayaran (SPP)    |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |                                |
| 1020 | KU         |             | 3                                  | Surat Perintah Membayar (SPM)        |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |                                |
| 1021 | KU         |             | 4                                  | Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |                                |
| 1022 | KU         | 6           | Pertanggungjawaban Penggunaan Dana |                                      |   |   |   |            |                |                                |                                |
| 1023 | KU         |             | 1                                  | Buku Kas Umum (BKU)                  |   |   | √ | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan keuangan |                                |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |                |                                |
|------|------------|-------------|---|---|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------------|
|      |            |             |   | SR  | R | T | B |           |                    |               |                |                                |
| 1    | 2          | 3           |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |                |                                |
| 1024 | KU         |             | 2   | Buku Kas Pembantu (BKP)   |   |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1025 | KU         |             | 3   | Ringkasan Perincian Pengeluaran Objek   |   |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1026 | KU         |             | 4   | Rekening Koran Bank   |   |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1027 | KU         |             | 5   | Pertanggungjawaban Fungsional dan Administrasi  |   |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1028 | KU         |             | 6   | Bukti Penyetoran Pajak  |   |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1029 | KU         |             | 7   | Register Penutupan Kas  |   |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1030 | KU         |             | 8   | Berita Acara Pemeriksaan  |   |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1031 | KU         |             | 9   | Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), Arsip |   |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1032 | KU         |             | 10  | Laporan Pendapatan Negara   |   |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1033 | KU         |             | 11  | Laporan Keadaan Kredit Anggaran   |   |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1034 | KU         | 7           | Daftar Gaji                               |   |   |   |   | √         |                    |               |                |                                |
| 1035 | KU         | 8           | Kartu Gaji                                |   |   |   |   | √         |                    |               |                |                                |
| 1036 | KU         | 9           | Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) |   |   |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1037 | KU         | 10          | Laporan Keuangan Tahunan                  |   |   |   |   |           |                    |               |                |                                |
| 1038 | KU         |             | 1   | Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1039 | KU         |             | 2   | Neraca  |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                              | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN   |                                   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                                |
|------|---------------|-------------|------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|
|      |               |             |                              | SR  | R                                 | T | B |              |                       |                |                                |
| 1    | 2             | 3           |                              | 4   | 5                                 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10             |                                |
| 1040 | KU            |             | 3                            | Laporan Arus Kas  |                                   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1041 | KU            |             | 4                            | Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)  |                                   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1042 | KU            | 11          | BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI |   |                                   |   |   |              |                       |                |                                |
| 1043 | KU            |             | 1                            | Permohonan Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)   |                                   |   |   | √            | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1044 | KU            |             | 2                            | Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book )                          |                                   |   |   | √            | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1045 | KU            |             | 3                            | Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya                       |                                   |   |   | √            | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1046 | KU            |             | 4                            | Dokumen Loan Agreement (PHLN) seperti : Draft Agreement, Legal Opinion , Surat Menyurat |                                   |   |   | √            | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1047 | KU            |             | 5                            | Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l. : Usulan Luncuran Dana           |                                   |   |   | √            | Staff                 |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1048 | KU            |             | 6                            | Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut Lampirannya   |                                   |   |   |              |                       |                |                                |
| 1049 | KU            |             |                              | 1   | Reimbursement                     |   |   | √            | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1050 | KU            |             |                              | 2   | Direct Payment/Transfer Procedure |   |   | √            | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1051 | KU            |             |                              | 3   | Special Commitment/ L/C Opening   |   |   | √            | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1052 | KU            |             |                              | 4   | Special Account/Imprest Fund      |   |   | √            | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1053 | KU            |             | 7                            | Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)                                       |                                   |   |   | √            | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1054 | KU            |             | 8                            | Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan  |                                   |   |   | √            | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan keuangan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   | KLASIFIKASI KEAMANAN  |                                  |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |                                |                                |
|------|------------|-------------|---|---|----------------------------------|---|---|-----------|--------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
|      |            |             |   | SR  | R                                | T | B |           |                    |               |                                |                                |
| 1    | 2          | 3           |   | 4   | 5                                | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |                                |                                |
| 1055 | KU         |             | 9   | Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi antara lain : No |                                  |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan keuangan |                                |
| 1056 | KU         |             | 10  | Staff Appraisal Report  |                                  |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan keuangan |                                |
| 1057 | KU         |             | 11  | Report/Laporan yang terdiri dari :  |                                  |   |   |           |                    |               |                                |                                |
| 1058 | KU         |             |   | 1   | Progress Report                  |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1059 | KU         |             |   | 2   | Monthly Report                   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1060 | KU         |             |   | 3   | Quarterly Report                 |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1061 | KU         |             | 12  | Laporan Hutang Daerah :   |                                  |   |   |           |                    |               |                                |                                |
| 1062 | KU         |             |   | 1   | Laporan Pembayaran Hutang Daerah |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1063 | KU         |             |   | 2   | Laporan Posisi Hutang Daerah     |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1064 | KU         |             | 13  | Completion Report/Annual Report   |                                  |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                                |                                |
| 1065 | KU         |             | 14  | Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Bantuan/Pinjaman Luar Negeri                      |                                  |   |   |           | √                  |               |                                |                                |
| 1066 | KU         | 12          | PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) |   |                                  |   |   |           |                    |               |                                |                                |
| 1067 | KU         |             | 1   | Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan:  |                                  |   |   |           |                    |               |                                |                                |
| 1068 | KU         |             |   | 1   | Kuasa Pengguna Anggaran          |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1069 | KU         |             |   | 2   | Kuasa Pengguna Barang/Jasa       |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN              |   |   |            | HAK AKSES      | DASAR PERTIMBANGAN             | UNIT PENGOLAH                  |
|------|------------|-------------|---|---|-----------------------------------|---|---|------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
|      |            |             |   |   | SR                                | R | T | B          |                |                                |                                |
| 1    | 2          | 3           |   |   | 4                                 | 5 | 6 | 7          | 8              | 9                              | 10                             |
| 1070 | KU         |             |   | 3   | Pejabat Pembuat Komitmen          |   |   | √          | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1071 | KU         |             |   | 4   | Pejabat Pembuat Daftar Gaji       |   |   | √          | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1072 | KU         |             |   | 5   | Pejabat Penandatanganan SPM       |   |   | √          | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1073 | KU         |             |   | 6   | Bendahara Penerimaan/Pengeluaran  |   |   | √          | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1074 | KU         |             |   | 7   | Pengelola Barang                  |   |   | √          | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1075 | KU         |             |   | 8   | Berita Acara Serah Terima Jabatan |   |   | √          | Staff          | Tidak beresiko                 | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1076 | KU         | 13          | SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) |   |                                   |   |   |            |                |                                |                                |
| 1077 | KU         |             | 1                                       | Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)                             |                                   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |                                |
| 1078 | KU         |             | 2                                       | Kebijakan Akuntansi   |                                   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |                                |
| 1079 | KU         |             | 3                                       | Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi                                       |                                   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |                                |
| 1080 | KU         |             | 4                                       | Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran                     |                                   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |                                |
| 1081 | KU         | 14          | PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN    |   |                                   |   |   |            |                |                                |                                |
| 1082 | KU         |             | 1                                       | Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan   |                                   |   | √ | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan keuangan |                                |
| 1083 | KU         |             | 2                                       | Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya                                      |                                   |   |   |            |                |                                |                                |
| 1084 | KU         |             | 1                                       | SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil |                                   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan keuangan |                                |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                             | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                  |
|------|------------|-------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------|--------------------|--------------------------------|
|      |            |             |                             | SR  | R   | T | B |            |                    |                                |
| 1    | 2          | 3           |                             | 4   | 5   | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                             |
| 1099 | KU         |             | 1                           | Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan Termasuk Dana Sisa atau |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1100 | KU         |             | 2                           | Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPhn, dan Denda        |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1101 | KU         | 16          | PENGELOLAAN ANGGARAN PEMILU |   |   |   |   |            |                    |                                |
| 1102 | KU         |             | 1                           | Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD                      |   |   |   |            |                    |                                |
| 1103 | KU         |             |                             | 1   | Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1104 | KU         |             |                             | 2   | Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu                    |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1105 | KU         |             |                             | 3   | Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kabupaten, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1106 | KU         |             |                             | 4   | Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu  |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1107 | KU         |             |                             | 5   | Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kabupaten   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1108 | KU         |             |                             | 6   | Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kabupaten dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD                              |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1109 | KU         |             |                             | 7   | Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada  |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1110 | KU         |             |                             | 8   | Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu  |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |  |   |           | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                  |
|------|------------|-------------|--|---|-----------|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|--------------------------------|
|      |            |             |  |   |           | SR                   | R | T | B |            |                    |                                |
| 1    | 2          | 3           |  |   |           | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                             |
|      |            |             |  |   | dari APBD |                      |   |   |   |            |                    |                                |
| 1111 | KU         |             | 9  | Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD       |           |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1112 | KU         | 10          | PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU |   |           |                      |   |   |   |            |                    |                                |
| 1113 | KU         |             | 1  | Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda         |           |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1114 | KU         |             | 2  | Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan             |           |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1115 | KU         |             | 3  | Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rabat, |           |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1116 | KU         |             | 4  | Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank                   |           |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1117 | KU         |             | 5  | Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk         |           |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1118 | KU         | 11          | PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU                        |   |           |                      |   |   |   |            |                    |                                |
| 1119 | KU         |             | 1  | Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk                 |           |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1120 | KU         |             | 2  | Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD Kabupaten , Panwasda dan    |           |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1121 | KU         |             | 3  | Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer   |           |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan keuangan |
| 1122 | KU         | 12          | PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH                         |   |           |                      |   |   |   |            |                    |                                |
| 1123 | KU         |             | 1  | Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan        |           |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan keuangan |





| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   | KLASIFIKASI KEAMANAN                      |                            |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                     |                                   |
|------|------------|-------------|---|---|----------------------------|---|---|-----------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|      |            |             |   | SR  | R                          | T | B |           |                    |                                   |                                   |
| 1    | 2          | 3           |   | 4   | 5                          | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                                |                                   |
| 1140 | KP         |             | 1 | Proses Penerimaan Pegawai                 |                            |   |   |           |                    |                                   |                                   |
| 1141 | KP         |             |   | a   | Pengumuman                 |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1142 | KP         |             |   | b   | Seleksi Administrasi       |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1143 | KP         |             |   | c   | Pemanggilan Peserta Test   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1144 | KP         |             |   | d   | Pelaksanaan Ujian Tertulis |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1145 | KP         |             |   | e   | Keputusan Hasil Ujian      |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1146 | KP         |             |   | f   | Wawancara                  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1147 | KP         |             | 2 | Penetapan Pengumuman Kelulusan            |                            |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1148 | KP         |             | 3 | Berkas Lamaran yang tidak diterima        |                            |   |   | √         | Tk. Eselon         |                                   | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1149 | KP         |             | 4 | Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP : |                            |   |   | √         | Tk. Eselon         |                                   | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1150 | KP         |             |   | a   | Surat Lamaran              |   |   |           |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |                                   |
| 1151 | KP         |             |   | b   | Ijazah                     |   |   |           |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |                                   |
| 1152 | KP         |             |   | c   | SKCK                       |   |   |           |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |                                   |
| 1153 | KP         |             |   | d   | Kartu Kuning               |   |   |           |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |                                   |
| 1154 | KP         |             |   | e   | Surat Keterangan Kesehatan |   |   |           |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |                                   |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |  |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES   | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                     |
|------|------------|-------------|--|---|--|----------------------|---|---|---|-------------|--------------------|-----------------------------------|
|      |            |             |  |   |  | SR                   | R | T | B |             |                    |                                   |
| 1    | 2          | 3           |  |   |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8           | 9                  | 10                                |
|      |            |             |  |   |  |                      |   |   |   | kepegawaian |                    |                                   |
| 1155 | KP         |             | 5  | Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun                  |  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon  |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1156 | KP         |             | 6  | SK CPNS/PNS Kolektif  |  |                      |   |   | √ | Staff       | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1157 | KP         | 3           | Pembinaan Karir Pegawai                    |   |  |                      |   |   |   |             |                    |                                   |
| 1158 | KP         |             | 1  | Diklat/Kursus/Magang/Tugas Belajar/Ujian Dinas/Ijin Belajar Pegawai :       |  |                      |   |   | √ | Staff       | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1159 | KP         |             |  | Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Ijin                                    |  |                      |   |   |   |             |                    |                                   |
| 1160 | KP         |             |  | Laporan Kegiatan Pengembangan Diri  |  |                      |   |   |   |             |                    |                                   |
| 1161 | KP         |             | 2  | Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat               |  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon  |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1162 | KP         |             | 3  | Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) Standar Kinerja Pegawai (SKP) |  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon  |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1163 | KP         |             | 4  | Daftar Usul Penetapan Angka Kredit  |  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon  |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1164 | KP         |             | 5  | Disiplin Pegawai :  |  |                      |   |   | √ | Staff       | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1165 | KP         |             |  | Daftar Hadir  |  |                      |   |   |   |             |                    |                                   |
| 1166 | KP         |             |  | Rekapitulasi Daftar Hadir   |  |                      |   |   |   |             |                    |                                   |
| 1167 | KP         |             | 6  | Berkas Hukuman Disiplin   |  |                      | √ |   |   | Tk. Eselon  |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1168 | KP         |             | 7  | Penghargaan dan Tanda Jasa  |  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon  |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1169 | KP         | 4           | Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai |   |  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon  |                    |                                   |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                     |
|------|------------|-------------|----------------|--|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------------------|
|      |            |             |                | SR   | R | T | B |            |                    |                                   |
| 1    | 2          | 3           |                | 4  | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                                |
| 1170 | KP         | 5           | Mutasi Pegawai |  |   |   |   |            |                    |                                   |
| 1171 | KP         |             | 1              | Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1172 | KP         |             | 2              | Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1173 | KP         |             | 3              | Mutasi Keluarga  |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1174 | KP         |             | 4              | Surat Izin Pernikahan/Perceraian   |   |   |   |            |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1175 | KP         |             |                | Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian   |   |   |   |            |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1176 | KP         |             | 5              | Surat Nikah /Cerai   |   |   |   |            |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1177 | KP         |             | 6              | Akte Kelahiran Anak  |   |   |   |            |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1178 | KP         |             | 7              | Surat Keterangan Adopsi Anak   |   |   |   |            |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1179 | KP         |             | 8              | Surat Keterangan Meninggal Dunia   |   |   |   |            |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1180 | KP         |             | 9              | Usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan   |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1181 | KP         |             | 10             | Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional                    |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1182 | KP         |             | 11             | Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai                        |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1183 | KP         |             | 12             | Peninjauan Masa Kerja  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1184 | KP         |             | 13             | Berkas Baperjakat  |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                       | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                                      |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                     |
|------|---------------|-------------|-----------------------|--|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------------------|
|      |               |             |                       | SR   | R | T | B |              |                       |                                   |
| 1    | 2             | 3           |                       | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                                |
| 1185 | KP            | 6           | Administrasi Pegawai  |  |   |   |   |              |                       |                                   |
| 1186 | KP            |             | 1                     | Surat Perintah Dinas/Surat Tugas                             |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1187 | KP            |             | 2                     | Cuti Besar   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1188 | KP            |             | 3                     | Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan                      |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1189 | KP            |             | 4                     | Cuti Alasan Penting  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1190 | KP            |             | 5                     | Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1191 | KP            |             | 6                     | Dokumentasi Identitas  |   |   |   |              |                       |                                   |
| 1192 | KP            |             |                       | 1 Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu                      |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        |                                   |
| 1193 | KP            |             |                       | 2 Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan                   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1194 | KP            |             |                       | 3 Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)                   |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1195 | KP            |             |                       | 4 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1196 | KP            |             | 7                     | Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1197 | KP            |             | 8                     | Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala                      |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1198 | KP            | 7           | Kesejahteraan Pegawai |  |   |   | √ | Staff        |                       |                                   |
| 1199 | KP            |             | 1                     | Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai        |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan kepegawaian |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                                    |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                     |                                   |
|------|---------------|-------------|--|--|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|      |               |             |  | SR   | R | T | B |              |                       |                                   |                                   |
| 1    | 2             | 3           |  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                                |                                   |
| 1200 | KP            |             | 2  | Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/ASKES              |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1201 | KP            |             | 3  | Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan                  |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1202 | KP            |             | 4  | Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial                      |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1203 | KP            |             | 5  | Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas                       |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1204 | KP            |             | 6  | Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1205 | KP            |             | 7  | Berkas tentang Pemberian Tali Kasih                        |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1206 | KP            |             | 8  | Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa |   |   |   | √            | Tk. Eselon            |                                   | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1207 | KP            |             | 9  | Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi               |   |   |   | √            | Staff                 | Unit pelaksana urusan kepegawaian | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1208 | KP            | 8           | Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun  |  |   |   | √ |              | Tk. Eselon            |                                   | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1209 | KP            | 9           | Perselisihan /Sengketa Kepegawaian   |  |   |   | √ |              | Tk. Eselon            |                                   | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1210 | KP            | 10          | Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang Meninggal |  |   |   | √ |              | Tk. Eselon            |                                   | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1211 | KP            | 11          | Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil :   |  |   |   | √ |              | Tk. Eselon            |                                   | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1212 | KP            |             | a  | Berkas Lamaran yang diterima                               |   |   |   | √            | Tk. Eselon            |                                   | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1213 | KP            |             | b  | Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya                      |   |   |   | √            | Tk. Eselon            |                                   | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1214 | KP            |             | c  | Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN                   |   |   |   | √            | Tk. Eselon            |                                   | Unit pelaksana urusan kepegawaian |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                     |
|------|------------|-------------|---|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------------------|
|      |            |             |   |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                                   |
| 1    | 2          | 3           |   |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                                |
| 1215 | KP         |             | d | SK Pengangkatan CPNS  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1216 | KP         |             | e | Hasil Pengujian Kesehatan   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1217 | KP         |             | f | SK Pengangkatan PNS   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1218 | KP         |             | g | SK Peninjauan Masa Kerja  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1219 | KP         |             | h | SK Kenaikkan Pangkat  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1220 | KP         |             | i | Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan                           |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1221 | KP         |             | j | Surat Pernyataan Pelantikan   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1222 | KP         |             | k | SK Pengangkatan dalam Jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1223 | KP         |             | l | SK Perpindahan Wilayah Kerja  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1224 | KP         |             | m | SK Perpindahan Antar Instansi   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1226 | KP         |             | n | SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1227 | KP         |             | o | Berita Acara Pemeriksaan  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1228 | KP         |             | p | SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1229 | KP         |             | q | SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk                                   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |  |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                     |
|------|------------|-------------|--|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------------------|
|      |            |             |  |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                                   |
| 1    | 2          | 3           |  |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                                |
| 1230 | KP         | r           |  | SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan                         |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1231 | KP         | s           |  | SK Pemberian Uang Tunggu  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1232 | KP         | t           |  | SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1233 | KP         | u           |  | SK Pengalihan PNS   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1234 | KP         | v           |  | SK Pemberhentian sebagai PNS  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1235 | KP         | w           |  | SK Pemberhentian Sementara  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1236 | KP         | x           |  | Surat Keterangan Pernyataan Hilang  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1237 | KP         | y           |  | Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang                    |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1238 | KP         | z           |  | SK Penggantian Nama   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1239 | KP         | aa          |  | Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran                                   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1240 | KP         | bb          |  | Akta Nikah/Cerai  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1241 | KP         | cc          |  | Akta Kelahiran  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1242 | KP         | dd          |  | Isian Formulir PUPPNEMSERINTAHAN DAERAH KABUPATEN                         |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1243 | KP         | ee          |  | Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan                     |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1244 | KP         | ff          |  | Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol                                   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                     |
|------|------------|-------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------------------|
|      |            |             |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                                   |
| 1    | 2          | 3           |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                                |
| 1245 | KP         | gg          | Surat Keterangan Mutasi Keluarga   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1246 | KP         | hh          | Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1247 | KP         | ii          | Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1248 | KP         | jj          | Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1249 | KP         | kk          | Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1250 | KP         | ll          | Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala                                       |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1251 | KP         | mm          | Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri                                     |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1252 | KP         | nn          | Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1253 | KP         | oo          | Kartu Daftar Ulang (Kardaf) PNS  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1254 | KP         | pp          | Ijazah/Sertifikat  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1255 | KP         | qq          | SK Penempatan/Penarikan Pegawai  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1256 | KP         | rr          | SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk                              |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1257 | KP         | ss          | Surat Pertimbangan Status PNS  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1258 | KP         | tt          | SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1259 | KP         | uu          | Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |
| 1260 | KP         | vv          | SK Pensiun   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP                                       |                                     | KLASIFIKASI KEAMANAN                                |  |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                     |   |
|------|------------|---|-------------------------------------|---|--|---|---|------------|--------------------|-----------------------------------|---|
|      |            |   |                                     | SR  | R  | T | B |            |                    |                                   |   |
| 1    | 2          | 3   |                                     | 4   | 5  | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                                |   |
| 1261 | KP         | 12  | Berkas Perseorangan Pejabat Negara  |   |  |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |   |
| 1262 | KP         |   | Bupatidan Wakil BupatiKabupaten     |   |  |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusankepegawaian  |   |
| 1263 | KP         | 13  | Berkas Perseorangan Pejabat Lainnya |   |  |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |   |
| 1264 | KP         |   | a                                   | Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD                    |  |   |   | √          | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan kepegawaian |   |
| 1265 | KP         |   | b                                   | Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPUD, dan Panwaslu Kada |  |   |   | √          | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan kepegawaian |   |
| 1266 | KP         |   | c                                   | Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Lainnya          |  |   |   | √          | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan kepegawaian |   |
| 1267 | <b>KK</b>  | <b>URUSAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA</b> |                                     |   |  |   |   | √          | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan kepegawaian |   |
| 1268 | KK         | 1   | Pengendalian Penduduk               |   |  |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian |   |
| 1269 | KK         |   | 1                                   | Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk            |  |   |   | √          | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan kepegawaian |   |
| 1270 | KK         |   |                                     | 1   | Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk ( Pengumpulan dan Pengolahan Data) |   |   | √          | Staff              | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1271 | KK         |   |                                     | 2   | Analisis pemaduan kebijakan pengendalian penduduk ( Evaluasi dan Pelaporan)          |   |   | √          | Staff              | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1272 | KK         |   |                                     | 3   | Penyiapan fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk                         |   |   | √          | Staff              | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1273 | KK         |   |                                     | 4   | Fasilitas pemaduan kebijakan pengendalian penduduk ( Evaluasi dan Pelaporan )        |   |   | √          | Staff              | Tidak beresiko                    | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1274 | KK         |   | 2                                   | Perencanaan pengendalian penduduk                   |  |   |   |            |                    |                                   |   |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                    | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |   |
|------|------------|-------------|---|------------------------------------|---|---|---|---|-----------|--------------------|----------------|---|
|      |            |             |   |                                    | SR  | R | T | B |           |                    |                |   |
| 1    | 2          | 3           |   |                                    | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |   |
| 1275 | KK         |             |   | 1                                  | Data dan Evaluasi data Profil dan Proyeksi Penduduk   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1276 | KK         |             |   | 2                                  | Penetapan parameter pengendalian penduduk ( Penetapan sasaran parameter dan Evaluasi sasaran parameter )  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1277 | KK         |             |   | 3                                  | Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk ( Pemanfaatan profil dan proyeksi, Pemanfaatan Parameter)   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1278 | KK         |             | 3   | Kerja sama pendidikan kependudukan |   |   |   |   |           |                    |                |   |
| 1279 | KK         |             |   | 1                                  | Pengembangan sistem jalur pendidikan formal dan pengembangan jalur pendidikan non formal dan informal.    |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1280 | KK         |             |   | 2                                  | Pengembangan Materi alur pendidikan formal dan pengembangan jalur pendidikan non formal dan informal.     |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1281 | KK         |             |   | 3                                  | Monitoring dan evaluasi alur pendidikan formal dan pengembangan jalur pendidikan non formal dan informal. |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1282 | KK         |             | 4   | Analisis dampak kependudukan       |   |   |   |   |           |                    |                |   |
| 1283 | KK         |             |   | 1                                  | Analisis Sosial   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1284 | KK         |             |   | 2                                  | Analisis Ekonomi  |   |   |   |           |                    |                | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1285 | KK         |             |   | 3                                  | Analisis dampak politik, pertahanan, dan keamanan   |   |   | √ |           | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1286 | KK         |             |   | 4                                  | Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1287 | KK         | 2           | Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi |                                    |   |   |   |   |           |                    |                |   |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |                |   |
|------|------------|-------------|---|--|--|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|----------------|---|
|      |            |             |   |  | SR   | R | T | B |           |                    |               |                |   |
| 1    | 2          | 3           |   |  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |                |   |
| 1288 | KK         |             | 1 | Bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah                 |  |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1289 | KK         |             |   | 1  | Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah  |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1290 | KK         |             |   | 2  | Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana   |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1291 | KK         |             |   | 3  | Kualitas, Standarisasi, Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah                  |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1292 | KK         |             | 2 | Bina kesertaan keluarga berencana jalur swasta                     |  |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1293 | KK         |             |   | 1  | Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta  |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1294 | KK         |             |   | 2  | Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta  |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1295 | KK         |             |   | 3  | Kualitas, Standarisasi, monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta                      |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1296 | KK         |             | 3 | Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Wilayah dan Sasaran khusus |  |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1297 | KK         |             |   | 1  | Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1298 | KK         |             |   | 2  | Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan                     |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1299 | KK         |             |   | 3  | Peningkatan akses dan Partisipasi Kesertaan keluarga berencana pria                                      |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |  |   | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                             |
|------|------------|-------------|--|---|--|---|---|---|-----------|--------------------|---|
|      |            |             |  |   | SR   | R | T | B |           |                    |   |
| 1    | 2          | 3           |  |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10  |
| 1300 | KK         |             | 4  | Kesehatan Reproduksi                      |  |   |   |   |           |                    |   |
| 1301 | KK         |             |  | 1   | Kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1302 | KK         |             |  | 2   | Pencegahan PMS dan HIV/AIDS  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1303 | KK         |             |  | 3   | Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1304 | KK         | 3           | Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga |   |  |   |   |   |           |                    |   |
| 1305 | KK         |             | 1  | Bina keluarga Balita dan Anak             |  |   |   |   |           |                    |   |
| 1306 | KK         |             |  | 1   | Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak ( Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak , Pengembangan Kemitraan Bina Kelurga dan anak) |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1307 | KK         |             |  | 2   | Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1308 | KK         |             | 2  | Bina ketahanan remaja                     |  |   |   |   |           |                    |   |
| 1309 | KK         |             |  | 1   | Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur Pendidikan dan Jalur masyarakat   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1310 | KK         |             |  | 2   | Monitoring dan Pelaporan dan evaluasi bina ketahanan Remaja  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1311 | KK         |             | 3  | Bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan |  |   |   |   |           |                    |   |
| 1312 | KK         |             |  | 1   | Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan keluarga Rentan  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1313 | KK         |             |  | 2   | Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan ( Pengembangan kelompok dan kemitraan Bina Ketahanan                                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                        |  | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                             |
|------|------------|-------------|------------------------|--|---|---|---|---|-----------|--------------------|---|
|      |            |             |                        |  | SR  | R | T | B |           |                    |   |
| 1    | 2          | 3           |                        |  | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10  |
|      |            |             |                        |  |   |   |   |   |           |                    |   |
|      |            |             |                        |  | Keluarga lansia dan Rentan )  |   |   |   |           |                    |   |
| 1314 | KK         |             |                        | 3  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1315 | KK         |             | 4                      | Pemberdayaan Ekonomi Keluarga                  |   |   |   |   |           |                    |   |
| 1316 | KK         |             |                        | 1  | Pengembangan program usaha ekonomi keluarga   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1317 | KK         |             |                        | 2  | Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1318 | KK         |             |                        | 3  | Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga ( Pengembangan Administrasi, Keuangan dan pemasaran Kelompok Usaha Bersama ) |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1319 | KK         |             |                        | 4  | Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1320 | KK         |             | 5                      | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera             |   |   |   |   |           |                    |   |
| 1321 | KK         |             |                        | 1  | Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1322 | KK         |             |                        | 2  | Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga sejahteraan)                         |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1323 | KK         |             |                        | 3  | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1324 | KK         | 4           | Advokasi dan Informasi |  |   |   |   |   |           |                    |   |
| 1325 | KK         |             | 1                      | Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi |   |   |   |   |           |                    | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                             |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                             |
|------|------------|-------------|---|-----------------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|---|
|      |            |             |   |                             |  | SR                   | R | T | B |            |                    |   |
| 1    | 2          | 3           |   |                             |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10  |
| 1326 | KK         |             |   | 1                           | Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi ( Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ) |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1327 | KK         |             |   | 2                           | Advokasi dan pencitraan  |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1328 | KK         |             |   | 3                           | Promosi  |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1329 | KK         |             |   | 4                           | Sarana Produksi Media komunikasi   |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1330 | KK         |             |   | 5                           | Produk media komunikasi  |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1331 | KK         |             | 2 | Bina hubungan antar lembaga |  |                      |   |   |   |            |                    | Unit pelaksana urusan kepegawaian         |
| 1332 | KK         |             |   | 1                           | Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan Kabupaten   |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1333 | KK         |             |   | 2                           | Pengembangan dan Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintahkabupaten dan kota                  |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1334 | KK         |             |   | 3                           | Pengembangan dan Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah                                 |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1335 | KK         |             | 3 | Bina lini lapangan          |  |                      |   |   |   |            |                    |   |
| 1336 | KK         |             |   | 1                           | Pengembangan tenaga lini lapangan  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1337 | KK         |             |   | 2                           | Monitoring dan Evaluasi Tenaga Lini Lapangan   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1338 | KK         |             |   | 3                           | Pengembangan Institusi masyarakat pedesaan   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1339 | KK         |             |   | 4                           | Monitoring dan evaluasi Institusi masyarakat pedesaan  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                     |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                             |
|------|------------|-------------|---|-------------------------------------|---|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|---|
|      |            |             |   |                                     |   | SR                   | R | T | B |           |                    |   |
| 1    | 2          | 3           |   |                                     |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10  |
| 1340 | KK         |             |   | 5                                   | Pengembangan institusi masyarakat pedesaan mekanisme operasional lini lapangan                  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1341 | KK         |             |   | 6                                   | Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan                                     |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1342 | KK         |             | 4 | Pelaporan dan statistik             |   |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1343 | KK         |             |   | 1                                   | Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan (Perumusan pola ,Sistem pencatatan dan pelaporan ) |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1344 | KK         |             |   | 2                                   | Monitoring dan Evaluasi Sistem pencatatan dan pelaporan   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1345 | KK         |             |   | 3                                   | Pengumpulan dan pengolahan data   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1346 | KK         |             |   | 4                                   | Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1347 | KK         |             |   | 5                                   | Analisa dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga  |                      |   |   |   | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1348 | KK         |             | 5 | Teknologi Informasi dan Dokumentasi |   |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1349 | KK         |             |   | 1                                   | Pengembangan sistem aplikasi  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1350 | KK         |             |   | 2                                   | Pengelolaan Bank data   |                      |   |   |   | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1351 | KK         |             |   | 3                                   | Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1352 | KK         |             |   | 4                                   | Pemeliharaan Infrastruktur teknologi informasi  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |
| 1353 | KK         |             |   | 5                                   | Dokumentasi dan Perpustakaan  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan kependudukan dan KB |

| No.  | KODE KLAS.  | JENIS ARSIP                     |                              |                                     |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |                |   |
|------|-------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|----------------|---|
|      |             |                                 |                              |                                     |  | SR                   | R | T | B |           |                    |               |                |   |
| 1    | 2           | 3                               |                              |                                     |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |                |   |
| 1354 | KK          |                                 |                              | 6                                   | Pengelolaan situs BKKBN dan Media konferensi)  |                      |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1355 | <b>KUKM</b> | <b>URUSAN KOPERASI DAN UMKM</b> |                              |                                     |  |                      |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1356 | KUKM        | 1                               | KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM |                                     |  |                      |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1357 | KUKM        |                                 | 0                            | ORGANISASI DAN BADAN HUKUM KOPERASI |  |                      |   |   |   |           |                    | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1358 | KUKM        |                                 |                              | 0                                   | Organisasi Koperasi dan UKM  |                      |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1359 | KUKM        |                                 |                              | 1                                   | Badan Hukum Koperasi ( Penata usahaan badan hukum koperasi, Evaluasi Badan Hukum Koperasi )              |                      |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1360 | KUKM        |                                 |                              | 2                                   | Penelaahan Kasus Hukum ( Kasus hukum Koperasi, kasus hukum UKM )   |                      |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1361 | KUKM        |                                 | 1                            | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN        |  |                      |   |   |   |           |                    | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1362 | KUKM        |                                 |                              | 0                                   | Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Koperasi  |                      |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1363 | KUKM        |                                 |                              | 1                                   | Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan UKM   |                      |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1364 | KUKM        |                                 |                              | 2                                   | Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan ( Produk peraturan Perundang-undangan Pusat, Peraturan Daerah ) |                      |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1365 | KUKM        |                                 | 2                            | TATA LAKSANA KOPERASI DAN UKM       |  |                      |   |   |   |           |                    | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1366 | KUKM        |                                 |                              | 0                                   | Tata Laksana Koperasi (tata laksana Koperasi Primer, Tata laksana Koperasi Sekunder )                    |                      |   |   |   |           |                    |               |                |   |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |          |   | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |   |   |
|------|------------|-------------|----------|---|--|---|---|---|-----------|--------------------|----------------|---|---|
|      |            |             |          |   | SR   | R | T | B |           |                    |                |   |   |
| 1    | 2          | 3           |          |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |   |   |
| 1367 | KUKM       |             |          | 1   | Tata Laksana UKM ( Tata laksana Usaha Kecil, tata Laksana Usaha Menengah ) |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1368 | KUKM       |             |          | 2   | Klasifikasi Koperasi dan UKM   |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1369 | KUKM       |             | 3        | KEANGGOTAAN KOPERASI                            |  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |   |
| 1370 | KUKM       |             |          | 0   | Partisipasi Usaha dan Permodalan   |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1371 | KUKM       |             |          | 1   | Partisipasi Pengawasan ( Rapat Anggota, Pengawasan )                       |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1372 | KUKM       |             |          | 2   | Pengembangan Anggota Kaderisasi, Penyuluhan )                              |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1373 | KUKM       |             | 4        | PENGENDALIAN DAN AKUNTABILITAS KOPERASI DAN UKM |  |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1374 | KUKM       |             |          | 0   | Pengendalian ( pengendalian intern, tindak lanjut hasil pengendalian )     |   |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                          | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1375 | KUKM       |             |          | 1   | Akuntabilitas dan Akuntansi ( Akuntabilitas, Akuntansi dan Audit )         |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1376 | KUKM       |             |          | 2   | Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UKM                                   |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1377 | KUKM       |             |          |   | - Monitoring   |   |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                          | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1378 | KUKM       |             |          |   | - Evaluasi   |   |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                          | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1379 | KUKM       | 2           | PRODUKSI |   |  |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1380 | KUKM       |             | 0        | PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA       |  |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1381 | KUKM       |             |          | 0   | Tanaman Pangan Padi, Palawija )  |   |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                          | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                      |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                           |
|------|---------------|-------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|---|
|      |               |             |   |                                      |   | SR                      | R | T | B |              |                       |   |
| 1    | 2             | 3           |   |                                      |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                                      |
| 1382 | KUKM          |             |   | 1                                    | Hortikultura ( Buah-buahan dan Tanaman Obat, Tanaman Hias dan Sayur ) |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 1383 | KUKM          |             |   | 2                                    | Sarana ( Sarana produksi, Sarana Pengolahan )                         |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 1384 | KUKM          |             | 1 | KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN             |   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1385 | KUKM          |             |   | 0                                    | Kehutanan (Hutan Produksi, Hutan Kemasyarakatan)                      |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 1386 | KUKM          |             |   | 1                                    | Perkebunan (Tanaman semusim dan rempah-rempah, Tanaman keras)         |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 1387 | KUKM          |             |   | 2                                    | Sarana (Sarana produksi, Sarana Pengolahan)                           |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 1388 | KUKM          |             | 2 | PERIKANAN DAN PETERNAKAN             |   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1389 | KUKM          |             |   | 0                                    | Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya)                     |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 1390 | KUKM          |             |   | 1                                    | Peternakan (Ternak besar, Ternak Kecil)                               |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 1391 | KUKM          |             | 3 | INDUSTRI, KERAJINAN DAN PERTAMBANGAN |   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1392 | KUKM          |             |   | 0                                    | Industri (Sandang, Logam dan Elektronik, Pangan, Kimia dan Aneka)     |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 1393 | KUKM          |             |   | 1                                    | Kerajinan (Logam , Non Logam)   |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 1394 | KUKM          |             |   | 2                                    | Pertambangan Umum dan Migas   |                         |   |   |   |              |                       |   |
| 1395 | KUKM          |             | 4 | KETENAGALISTRIKAN DAN ANEKA USAHA    |   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1396 | KUKM          |             |   | 0                                    | Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha ( Listrik , Konstruksi )            |                         |   |   |   |              |                       |   |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |            |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                           |
|------|------------|-------------|------------|---|--|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|---|
|      |            |             |            |   |  | SR                   | R | T | B |           |                    |   |
| 1    | 2          | 3           |            |   |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                                      |
| 1397 | KUKM       |             |            | 1   | Aneka Usaha ( Jasa Umum , Angkutan )                               |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1398 | KUKM       |             |            | 2   | Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi                                 |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1399 | KUKM       | 3           | PEMBIAYAAN |   |  |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1400 | KUKM       |             | 0          | PROGRAM PENDANAAN                           |  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusankoperasi dan UMKM  |
| 1401 | KUKM       |             |            | 0   | Program Pendanaan Jangka Pendek ( Koperasi dan UKM Jangka pendek ) |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1402 | KUKM       |             |            | 1   | Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang                      |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1403 | KUKM       |             |            | 2   | Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir                    |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1404 | KUKM       |             | 1          | PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN SIMPAN PINJAM |  |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1405 | KUKM       |             |            | 0   | Pengembangan dan Pengendalian KSP                                  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1406 | KUKM       |             |            | 1   | Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi                         |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1407 | KUKM       |             |            | 2   | Pengembangan dan Pengendalian USP LKM                              |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1408 | KUKM       |             | 2          | URUSAN PERMODALAN                           |  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1409 | KUKM       |             |            | 0   | Pengembangan Permodalan Sendiri ( Koperasi dan UKM )               |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1410 | KUKM       |             |            | 1   | Pengembangan Permodalan Luar ( Permodalan Bank , Non Bank )        |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1411 | KUKM       |             |            | 2   | Pengembangan Kredit Program ( Bank, Non Bank )                     |                      |   |   |   |           |                    |   |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                              |  | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |                |   |
|------|------------|-------------|------------------------------|--|---|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|----------------|---|
|      |            |             |                              |  | SR  | R | T | B |           |                    |               |                |   |
| 1    | 2          | 3           |                              |  | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |                |   |
| 1412 | KUKM       |             | 3                            | ASURANSI DAN JASA KEUANGAN                 |   |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1413 | KUKM       |             |                              | 0  | Asuransi ( Koperasi, UKM )  |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1414 | KUKM       |             |                              | 1  | Perpajakan ( Koperasi, UKM )  |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1415 | KUKM       |             |                              | 2  | Jasa Keuangan dan Kredit Komersial ( Bank dan Non Komersial Bank )    |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1416 | KUKM       |             | 4                            | PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN KREDIT           |   |   |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1417 | KUKM       |             |                              | 0  | Lembaga Pembiayaan (modal Ventura, Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang ) |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1418 | KUKM       |             |                              | 1  | Penjaminan Kredit ( Penjaminan, Asuransi Kredit )                     |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1419 | KUKM       |             |                              | 2  | Pasar Modal ( Obligasi, Modal Penyertaan )                            |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1420 | KUKM       |             | 5                            | LEMBAGA PENGELOLA DAN BERGULIR KUKM (LPDB) |   |   |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1421 | KUKM       | 4           | PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA |  |   |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1422 | KUKM       |             | 0                            | PERDAGANGAN DALAM NEGERI                   |   |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1423 | KUKM       |             |                              | 0  | Pengadaan Sektor Formal dan informal                                  |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1424 | KUKM       |             |                              | 1  | Distribusi Sektor Formal dan Informal                                 |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1425 | KUKM       |             |                              | 2  | Pengembangan Sektor formal dan in formal                              |   |   |   |           |                    |               |                |   |
| 1426 | KUKM       |             | 1                            | EKSPOR DAN IMPOR                           |   |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                           |
|------|------------|-------------|---|--------------------------------|--|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|---|
|      |            |             |   |                                |  | SR                   | R | T | B |           |                    |   |
| 1    | 2          | 3           |   |                                |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                                      |
| 1427 | KUKM       |             |   | 0                              | Ekspor ( Koperasi dan UKM)   |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1428 | KUKM       |             |   | 1                              | Impor (Koperasi dan UKM)   |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1429 | KUKM       |             |   | 2                              | Hubungan Perdagangan Internasional ( Perdagangan Multilateral, Regional dan Bilateral) |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1430 | KUKM       |             | 2 | SARANA DAN PRASARANA PEMASARAN |  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1431 | KUKM       |             |   | 0                              | Sarana ( Pengembangan Pasar Tradisional dan Sentra Pemasaran)                          |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1432 | KUKM       |             |   | 1                              | Prasarana (Lembaga Perantara dan Fasilitas HAKI)                                       |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1433 | KUKM       |             |   | 2                              | Pengembangan Potensi Pemasaran ( Koperasi dan UKM )                                    |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1434 | KUKM       |             | 3 | KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA   |  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1435 | KUKM       |             |   |                                | Kemitraan ( Koperasi dan UKM)  |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1436 | KUKM       |             |   | 0                              | Jaringan Usaha ( Usaha Koperasi dan UKM)   |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1437 | KUKM       |             |   | 1                              | Pengembangan Kerjasama Kelembagaan Koperasi dan UKM )                                  |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1438 | KUKM       |             | 4 | INFORMASI DAN PUBLIKASI BISNIS |  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1439 | KUKM       |             |   | 0                              | Pengumpulan Informasi Koperasi dan UKM   |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1440 | KUKM       |             |   | 1                              | Pengolahan informasi Koperasi dan UKM  |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1441 | KUKM       |             |   | 2                              | Publikasi dan Informasi ( Koperasi dan UKM)  |                      |   |   |   |           |                    |   |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                           |
|------|------------|-------------|---|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|---|
|      |            |             |   |   | SR                   | R | T | B |            |                    |   |
| 1    | 2          | 3           |   |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                                      |
| 1442 | KUKM       |             | 5 | LEMBAGA LAYANAN PEMASARAN LLP KOPERASI DAN UKM  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1443 | KUKM       | 5           |   | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  |                      |   |   |   |            |                    |   |
| 1444 | KUKM       |             | 0 | PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1445 | KUKM       |             |   | 0 Lembaga Kewirausahaan (Pengembangan Jaringan kewirausahaan dan Peningkatan Sumber daya Kewirausahaan) |                      |   |   |   |            |                    | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1446 | KUKM       |             |   | 1 Penumbuhan Kewirausahaan ( Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan dan Evaluasi Kewirausahaan )           |                      |   |   |   |            |                    | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1447 | KUKM       |             |   | 2 Sosialisasi Kewirausahaan ( Perangkat Lunak dan Promosi Kewirausahaan)                                |                      |   |   |   |            |                    |   |
| 1448 | KUKM       |             | 1 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN KOPERASI DAN UKM   |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1449 | KUKM       |             |   | 0 Diklat Formal dan In Formal   |                      |   |   |   |            |                    |   |
| 1450 | KUKM       |             |   | 1 Diklat Non Formal (Perangkat Lunak , Sarana dan Prasarana)  |                      |   |   |   |            |                    | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1451 | KUKM       |             |   | 2 Kerjasama Lembaga Diklat ( Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah dan Non Pemerintah)                     |                      |   |   |   |            |                    |   |
| 1452 | KUKM       |             | 2 | PERAN SERA MASYARAKAT   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1453 | KUKM       |             |   | 0 Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM  |                      |   |   |   |            |                    |   |
| 1454 | KUKM       |             |   | 1 Peningkatan Dukungan LSM terhadap KUKM  |                      |   |   |   |            |                    |   |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |  |                                     |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                           |
|------|------------|-------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|---|
|      |            |             |  |                                     |  | SR                   | R | T | B |           |                    |   |
| 1    | 2          | 3           |  |                                     |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                                      |
| 1455 |            |             |  | 2                                   | Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi Koperasi dan UKM                                       |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1456 | KUKM       |             | 3                                      | MONITORING DAN EVALUASI DIKLAT KUKM |  |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1457 | KUKM       |             |  | 0                                   | Monitoring dan Evaluasi Diklat KUKM  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1458 | KUKM       |             |  | 1                                   | Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal   |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1459 | KUKM       |             |  | 2                                   | Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat ( Pemerintah dan Non Pemerintah)                        |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1460 | KUKM       |             | 4                                      | ADVOKASI                            |  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1461 | KUKM       |             |  | 0                                   | Advokasi Organisasi dan Manajemen  |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1462 | KUKM       |             |  | 1                                   | Advokasi Kemitraan dan Teknologi   |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1463 | KUKM       |             |  | 2                                   | Advokasi Peraturan Perundang-undangan (Kajian penerangan dan Sosialisasi Perundanga- undangan) |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1464 | KUKM       | 6           | PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA |                                     |  |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1465 | KUKM       |             | 1                                      |                                     | PRODUKTIVITAS DAN MUTU   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1466 | KUKM       |             |  | 0                                   | Produktivitas ( Inkubator Teknologi dan Pengembangan klaster)                                  |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1467 | KUKM       |             |  | 1                                   | Peningkatan Mutu ( Disain dan Standarisasi )   |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1468 | KUKM       |             |  | 2                                   | Sertifikasi Produk ( Sertifikasi , Label dan Merek )   |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1469 | KUKM       |             | 2                                      | RESTRUKTURISASI USAHA               |  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1470 | KUKM       |             |  | 0                                   | Restrukturisasi Manajemen ( Koperasi dan UKM)  |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1471 | KUKM       |             |  | 1                                   | Restrukturisasi Pendanaan ( Koperasi dan UKM)  |                      |   |   |   |           |                    |   |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                           |
|------|------------|-------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|---|
|      |            |             |   |   |   | SR                   | R | T | B |           |                    |   |
| 1    | 2          | 3           |   |   |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                                      |
| 1472 | KUKM       |             |   | 2 | Restrukturisasi Kelembagaan ( Koperasi dan UKM)   |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1473 | KUKM       |             | 3 |   | PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN BISNIS (LPB)  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1474 | KUKM       |             |   | 0 | Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) ( Asosiasi dan Manajemen LPB, Akreditasi LPB) |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1475 | KUKM       |             |   | 1 | Pengembangan Bisnis LPB ( Peningkatan Kerjasama LPB dan Kerja Sama Layanan LPB)             |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1476 | KUKM       |             |   | 2 | Pengembangan Jaringan LPB ( Kerja sama Kelembagaan dan Teknologi)                           |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1477 | KUKM       |             | 4 |   | FASILITASI INVESTASI UKMK   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1478 | KUKM       |             |   | 0 | Investasi Klaster UKMK ( Fasilitasi investasi UKMK Argo Bisnis dan UKMK Non Agro Bisnis     |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1479 | KUKM       |             |   | 1 | Pengembangan Kerjasama Investasi Usaha ( Pangan dan Non Pangan)                             |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1480 | KUKM       |             |   | 2 | Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK  |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1481 | KUKM       |             | 5 |   | PENGEMBANGAN SISTEM BISNIS  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1482 | KUKM       |             |   | 0 | Fasilitasi Transaksi ( Dalam dan Luar negeri)   |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1483 | KUKM       |             |   | 1 | Kerjasama Usaha (Pertukaran Koperasi dan UKM)   |                      |   |   |   |           |                    |   |
| 1484 | KUKM       |             |   | 2 | Jaringan Komunikasi Bisnis ( Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis)                         |                      |   |   |   |           |                    |   |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                             |                             | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |   |   |
|------|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------|--------------------|----------------|---|---|
|      |            |             |                             |                             | SR  | R | T | B |           |                    |                |   |   |
| 1    | 2          | 3           |                             |                             | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |   |   |
| 1485 | KUKM       | 7           | PENGKAJIAN SUMBER DAYA UKMK |                             |   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |   |
| 1486 | KUKM       |             | 0                           | PENELITIAN KOPERASI         |   |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1487 | KUKM       |             |                             | 0                           | Perencanaan dan Pengendalian ( Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan)                    |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1488 | KUKM       |             |                             | 1                           | Penyelenggaraan Kelembagaan ( Koperasi dan Bisnis Koperasi )                            |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1489 | KUKM       |             |                             | 2                           | Tatalaksana Penelitian ( Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi, Sarana dan Prasarana) |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1490 | KUKM       |             | 1                           | PENELITIAN UKM              |   |   |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                          | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1491 | KUKM       |             |                             | 0                           | Perencanaan dan Pengendalian ( Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan)                    |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1492 | KUKM       |             |                             | 1                           | Penyelenggaraan Kelembagaan ( Koperasi dan Bisnis Koperasi )                            |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1493 | KUKM       |             |                             | 2                           | Tatalaksana Penelitian ( Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi, Sarana dan Prasarana) |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1494 | KUKM       |             | 2                           | PENELITIAN SUMBERDAYA       |   |   |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                          | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1495 | KUKM       |             |                             | 0                           | Perencanaan dan Pengendalian ( Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan)                    |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1496 | KUKM       |             |                             | 1                           | Penyelenggaraan Kelembagaan (Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan)                        |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1497 | KUKM       |             |                             | 2                           | Tatalaksana Penelitian ( Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi, Sarana dan Prasarana) |   |   |   |           |                    |                |   |   |
| 1498 | KUKM       |             | 3                           | PENGEMBANGAN PERKADERAN UKM |   |   |   |   |           | √                  | Staff          | Tidak beresiko                          | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP      |                       |  |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |       | HAK AKSES      | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                           |
|------|------------|------------------|-----------------------|--|--|----------------------|---|---|-------|----------------|--------------------|---|
|      |            |                  |                       |  |  | SR                   | R | T | B     |                |                    |   |
| 1    | 2          | 3                |                       |  |  | 4                    | 5 | 6 | 7     | 8              | 9                  | 10                                      |
| 1499 | KUKM       |                  |                       | 0  | Penyuluhan ( Penyelenggara dan Materi Penyuluhan)  |                      |   |   |       |                |                    |   |
| 1500 | KUKM       |                  |                       | 1  | Perkaderan (Penilaian dan Pengembangan)  |                      |   |   |       |                |                    |   |
| 1501 | KUKM       |                  |                       | 2  | Kerjasama Jaringan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah)  |                      |   |   |       |                |                    |   |
| 1502 | KUKM       |                  | 4                     | KERJASAMA INTERNASIONAL DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA |  |                      |   | √ |       | Tk. Eselon     |                    | Unit pelaksana urusan koperasi dan UMKM |
| 1503 |            | <b>PENGADAAN</b> |                       |  |  |                      |   |   |       |                |                    |   |
| 1504 |            | 1                | PELAKSANAAN PENGADAAN |  |  |                      |   |   |       |                |                    |   |
| 1505 |            |                  | 1                     | Penyusunan rencana umum pengadaan                  |  |                      |   |   |       |                |                    |   |
| 1506 |            |                  |                       | 1  | Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa  |                      |   | √ | Staff | Tidak beresiko |                    | Unit pelaksana urusan penagadaan        |
| 1507 |            |                  |                       | 2  | Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan  |                      |   | √ | Staff | Tidak beresiko |                    | Unit pelaksana urusan penagadaan        |
| 1508 |            |                  |                       | 3  | Penetapan Kebijakan Umum   |                      |   | √ | Staff | Tidak beresiko |                    | Unit pelaksana urusan penagadaan        |
| 1509 |            |                  |                       | 4  | Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)  |                      |   | √ | Staff | Tidak beresiko |                    | Unit pelaksana urusan penagadaan        |
| 1510 |            |                  |                       | 5  | Pengumuman Rencana Umum Pengadaan  |                      |   | √ | Staff | Tidak beresiko |                    | Unit pelaksana urusan penagadaan        |
| 1511 |            |                  | 2                     | Pemilihan Penyedia                                 |  |                      |   |   |       |                |                    |   |
| 1512 |            |                  |                       | 1  | Persiapan Pemilihan Penyedia( Kajian ulang pengadaan, menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis, menyusun dan menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menyusun dokumen pengadaan) |                      |   | √ | Staff | Tidak beresiko |                    | Unit pelaksana urusan penagadaan        |
| 1513 |            |                  |                       | 2  | Pelaksanaan Pemilihan Penyedia ( pengumuman, pendaftaran, penjelasan pekerjaan, pemasukan dan pembukaan  |                      |   | √ | Staff | Tidak beresiko |                    | Unit pelaksana urusan penagadaan        |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                                 |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                   |
|------|------------|-------------|---------------------------------|---|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|---------------------------------|
|      |            |             |                                 |   |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                                 |
| 1    | 2          | 3           |                                 |   |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                              |
|      |            |             |                                 |   | penawaran, evaluasi penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang)   |                      |   |   |   |            |                    |                                 |
| 1514 |            |             |                                 | 3   | e- Purchasing   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengadaan |
| 1515 |            |             |                                 | 4   | Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengadaan |
| 1516 |            |             | 3                               | Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak |   |                      |   |   |   |            |                    |                                 |
| 1517 |            |             |                                 | 1   | Penandatanganan Kontrak ( Surat penunjukan penyedia barang/jasa(SPPBJ), Kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pengadaan |
| 1518 |            |             |                                 | 2   | Pelaksanaan Kontrak ( Laporan pelaksanaan, Berita Acara Serah Terima (BAST)                                       |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pengadaan |
| 1519 |            |             | 4                               | Swakelola                                       |   |                      |   |   |   |            |                    |                                 |
| 1520 |            |             |                                 | 1   | Perencanaan   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengadaan |
| 1521 |            |             |                                 | 2   | Pelaksanaan   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengadaan |
| 1522 |            |             |                                 | 3   | Pengawasan dan Evaluasi   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengadaan |
| 1523 |            | 2           | PENGEMBANGAN STRATEGI PENGADAAN |   |   |                      |   |   |   |            |                    |                                 |
| 1524 |            |             | 1                               | Pengembangan Strategi Pengadaan Umum            |   |                      |   |   |   |            |                    |                                 |
| 1525 |            |             |                                 | 1   | Barang dan jasa ( barang dan jasa lainnya, Jasa Konsultasi)   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pengadaan |
| 1526 |            |             |                                 | 2   | Pekerjaan Konstruksi ( Pelaksanaan Kontruksi, Perencanaan dan Pengawas Konstruksi)                                |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pengadaan |
| 1527 |            |             | 2                               | Pengembangan Strategi Pengadaan Khusus          |   |                      |   |   |   |            |                    |                                 |
| 1528 |            |             |                                 | 1   | Kemitraan pemerintah dengan badan   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pengadaan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |  |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|-------------|---|--|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|----------------------------------|
|      |            |             |   |  |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                                  |
| 1    | 2          | 3           |   |  |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                               |
|      |            |             |   |  | usaha ( Kemitraan infrastruktur, Kemitraan non infrastruktur)  |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1529 |            |             | 2   |  | Badan usaha dan keadaan khusus ( Badan Usaha, Bidang pertanahan keamanan dan keadaan khusus)                           |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1530 |            |             | 3   |  | Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional   |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1531 |            |             | 1   |  | Laporan Kegiatan Pengembangan pelaku usaha   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1532 |            |             | 2   |  | Dokumen Kajian pengembangan pelaku usaha   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1533 |            |             | 3   |  | Laporan Kegiatan Pengembangan kesempatan usaha   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1534 |            |             | 4   |  | Dokumen Kajian pengembangan kesempatan usaha   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1535 |            |             | 5   |  | Kerjasama multilateral ( Laporan kerjasama multilateral, dokumen kajian kegiatan kerjasama multilateral)               |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1536 |            |             | 6   |  | Kerjasama bilateral ( Laporan kerjasama bilateral, dokumen kajian kerjasama bilateral)                                 |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1537 |            | 3           | MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI |  |  |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1538 |            |             | 1   |  | Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan   |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1539 |            |             | 1   |  | Perencanaan pengadaan ( Perencanaan Pengadaan kementerian/Lembaga/instansi, perencanaan pengadaan pemerintahan daerah) |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan penagadaan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |  |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                   |
|------|------------|-------------|--|---|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|---------------------------------|
|      |            |             |  |   |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                                 |
| 1    | 2          | 3           |  |   |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                              |
| 1540 |            |             | 2  | Monitoring dan evaluasi ( Pelaksanaan kebijakan pengadaan, kinerja pelaksanaan pengadaan)                                     |  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengadaan |
| 1541 |            |             | 2  | Pengembangan Sistem Katalog   |  |                      |   |   |   |            |                    |                                 |
| 1542 |            |             | 1  | Riset dan kontrak ( Riset pasar dan industri, kontrak payung)   |  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pengadaan |
| 1543 |            |             | 2  | Pengelolaan katalog ( pengendalian pelaksanaan katalog, evaluasi katalog)   |  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengadaan |
| 1544 |            |             | 3  | Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik   |  |                      |   |   |   |            |                    |                                 |
| 1545 |            |             | 1  | Pengembangan aplikasi dan teknologi informasi( Pengembangan aplikasi SPSE, Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE)           |  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pengadaan |
| 1546 |            |             | 2  | Pengelolaan dan pembinaan layanan pengadaan secara elektronik ( Bimbingan Teknis LPSE, Monitoring dan evaluasi LPSE Nasional) |  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pengadaan |
| 1547 |            | 4           | PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA |   |  |                      |   |   |   |            |                    |                                 |
| 1548 |            |             | 1  | Pengembangan pengelola pengadaan  |  |                      |   |   |   |            |                    |                                 |
| 1549 |            |             | 1  | Karir pengelola pengadaan   |  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengadaan |
| 1550 |            |             | 2  | Tata kelola pengelola pengadaan   |  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengadaan |
| 1551 |            |             | 3  | Unit layanan pengadaan  |  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengadaan |
| 1552 |            |             | 4  | Standar kompetensi  |  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pengadaan |
| 1553 |            |             | 2  | Pelatihan Kompetensi  |  |                      |   |   |   |            |                    |                                 |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                     | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                                  |
|------|------------|-------------|---|---------------------|--|---|---|---|-----------|--------------------|----------------|----------------------------------|
|      |            |             |   |                     | SR   | R | T | B |           |                    |                |                                  |
| 1    | 2          | 3           |   |                     | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |                                  |
| 1554 |            |             |   | 1                   | Konsultasi dan Fasilitas Penyelenggaraan diklat kompetensi   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1555 |            |             |   | 2                   | Perencanaan pelatihan kompetensi ( peserta, pengajar, penjadwalan)                                   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1556 |            |             |   | 3                   | Penyelenggara  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1557 |            |             |   | 4                   | Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1558 |            |             |   | 5                   | Monitoring dan Evaluasi  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1559 |            |             |   | 6                   | Sistem informasi   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1560 |            |             |   | 7                   | Alumni   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1561 |            |             |   | 8                   | Seleksi dan pengembangan pengajar/narasumber   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1562 |            |             |   | 9                   | Sertifikasi pengajar/narasumber  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1563 |            |             |   | 10                  | Monitoring dan Evaluasi pengajar/narasumber  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1564 |            |             |   | 11                  | Sistem informasi pengajar /narasumber  |   |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1565 |            |             |   | 12                  | Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan (LPP) Penilaian (Pre Akreditasi, Akreditasi, Surveilen ) |   |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1566 |            |             |   | 13                  | Pembinaan Hubungan Kerjasama dengan LPP  |   |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1567 |            |             |   | 14                  | Kajian Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan (LPP)   |   |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1568 |            |             |   | 15                  | Sistem informasi Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan (LPP)                                   |   |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1569 |            |             | 3 | Sertifikasi Profesi |  |   |   |   |           |                    |                |                                  |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP              |                                |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|--------------------------|--------------------------------|---|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|----------------------------------|
|      |            |                          |                                |   |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                                  |
| 1    | 2          | 3                        |                                |   |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                               |
| 1570 |            |                          |                                | 1                                       | Sistem sertifikasi dokumen ISO  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1571 |            |                          |                                | 2                                       | Sistem sertifikasi kebijakan / reguler  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1572 |            |                          |                                | 3                                       | Sarana sertifikasi dokumen inventaris dan pemeliharaan sarana   |                      |   |   | √ |            |                    |                                  |
| 1573 |            |                          |                                | 4                                       | Sarana master soal  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1574 |            |                          |                                | 5                                       | Tata Kelola sertifikasi dokumen penyelenggaraan ujian   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1575 |            |                          |                                | 6                                       | Evaluasi dan surveilen dokumen evaluasi   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1576 |            |                          |                                | 7                                       | Evaluasi dan surveilen dokumen surveilen  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1577 |            | 5                        | HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH |   |   |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1578 |            |                          | 1                              | Bantuan hukum/konsultasi hukum/advokasi |   |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1579 |            |                          |                                | 1                                       | Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (pidana, perdata, tata usaha negara dan agama)  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1580 |            |                          | 2                              | Penanganan Permasalahan Hukum           |   |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1581 |            |                          |                                | 1                                       | Penanganan permasalahan kontrak ( penanganan permasalahan kontrak barang dan jasa, penanganan permasalahan kontrak pekerjaan kontruksi) |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1582 |            |                          |                                | 2                                       | Keterangan ahli ( Keterangan ahli barang dan jasa, keterangan ahli pekerjaan kontruksi)   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan penagadaan |
| 1583 | <b>UP</b>  | <b>URUSAN PERTAHANAN</b> |                                |   |   |                      |   |   |   |            |                    |                                  |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                     | KLASIFIKASI KEAMANAN                                       |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|-------------|---------------------|--|---|---|---|-----------|--------------------|----------------------------------|
|      |            |             |                     | SR   | R | T | B |           |                    |                                  |
| 1    | 2          | 3           |                     | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                               |
| 1584 |            | 1           | STRATEGI PERTAHANAN |  |   |   |   |           |                    |                                  |
| 1585 |            |             | 1                   | Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara        |   |   |   |           |                    |                                  |
| 1586 |            |             | 1                   | Kebijakan Pengembangan Pertahanan Militer                  |   | √ |   |           | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1587 |            |             | 2                   | Kebijakan Pengembangan Pertahanan Nir Militer              |   | √ |   |           | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1588 |            |             | 2                   | Penyusunan Kebijakan Pembinaan Pertahanan Negara           |   |   |   |           |                    |                                  |
| 1589 |            |             | 1                   | Kebijakan Pembinaan Pertahanan Militer                     |   |   | √ |           |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1590 |            |             | 2                   | Kebijakan Pembinaan Pertahanan Nir Militer                 |   |   | √ |           |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1591 |            |             | 3                   | Kebijakan Pelaksanaan                                      |   |   |   |           |                    |                                  |
| 1592 |            |             | 1                   | Kebijakan Umum   |   |   | √ |           |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1593 |            |             | 2                   | Kebijakan Penyelenggaraan                                  |   |   | √ |           |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1594 |            |             | 3                   | Kaji Ulang Strategis Sistem Pertahanan Negara              |   |   | √ |           | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1595 |            |             | 4                   | Doktrin  |   |   |   |           |                    |                                  |
| 1596 |            |             | 1                   | Doktrin Dasar  |   |   |   | √         |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1597 |            |             | 2                   | Doktrin Induk  |   |   |   | √         |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1598 |            |             | 3                   | Doktrin Pelaksanaan  |   |   |   | √         |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1599 |            |             | 4                   | Petunjuk Operasional                                       |   |   |   | √         |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1600 |            |             | 5                   | Petunjuk Teknis  |   |   |   | √         |                    |                                  |
| 1601 |            |             | 5                   | Pengerahan (Penggunaan Kekuatan, Mobilisasi, Demobilisasi) |   |   |   |           |                    |                                  |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                          |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|-------------|---|--------------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|----------------------------------|
|      |            |             |   |                          |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                                  |
| 1    | 2          | 3           |   |                          |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                               |
| 1602 |            |             |   | 1                        | Organisasi Komponen Pertahanan                         |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1603 |            |             |   | 2                        | Organisasi Susunan Tugas                               |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1604 |            |             |   | 3                        | Penggunaan Pengerahan Komponen Utama                   |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1605 |            |             |   | 4                        | Penggunaan Tata Kelola Komponen Utama                  |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1606 |            |             |   | 5                        | Penggunaan Pengerahan Komponen Cadangan dan Pendukung  |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1607 |            |             |   | 6                        | Penggunaan Tata Kelola Komponen Cadangan dan Pendukung |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1608 |            |             | 6 | Intelijen dan Pengamanan |  |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1609 |            |             |   | 1                        | Intelstrategis   | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1610 |            |             |   | 2                        | Pengamanan LN/DN                                       | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1611 |            |             |   | 3                        | Pengamanan Nubika                                      | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1612 |            |             |   | 4                        | Pengamanan Komunikasi dan Elektronika                  | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1613 |            |             |   | 5                        | Pengamanan Militer                                     | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1614 |            |             |   | 6                        | Pengamanan Sospolekbudhan                              | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1615 |            |             |   | 7                        | SARA   | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1616 |            |             |   | 8                        | Pengamanan Personel                                    | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1617 |            |             |   | 9                        | Pengamanan Materiil                                    | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1618 |            |             | 7 | Operasi Militer          |  |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1619 |            |             |   | 1                        | Pertahanan   | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1620 |            |             |   | 2                        | Keamanan Pertahanan                                    | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan            |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                  |                                    | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|-------------|---|------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|----------------------------------|
|      |            |             |   |                  |                                    | SR                   | R | T | B |            |                    |                                  |
| 1    | 2          | 3           |   |                  |                                    | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                               |
|      |            |             |   |                  |                                    |                      |   |   |   |            |                    | pertanahan                       |
| 1621 |            |             |   | 3                | Intel Strategis                    | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1622 |            |             |   | 4                | Pengamanan Dalam Negeri            | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1623 |            |             |   | 5                | Operasi Darat, Laut dan Udara      | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1624 |            |             |   | 6                | Pemetaan Militer                   | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1625 |            |             |   | 7                | Ops Gabungan                       | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1626 |            |             |   | 8                | Ops Teror                          | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1627 |            |             |   | 9                | Ops Latihan                        | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1628 |            |             |   | 10               | Ops Khusus                         | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1629 |            |             |   | 11               | Evaluasi Ops                       | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1630 |            |             | 8 | Analisa Strategi |                                    |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1631 |            |             |   | 1                | Ideologi dan Politik Dalam Negeri  |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1632 |            |             |   | 2                | Ekonomi dalam negeri               |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1633 |            |             |   | 3                | Sosial Budaya dalam negeri         |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1634 |            |             |   | 4                | Militer dan Keamanan dalam negeri  |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1635 |            |             | 9 | Asia dan Pasifik |                                    |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1636 |            |             |   | 1                | Australia, Oceania, dan Asia Timur |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |    |                           |                                  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|-------------|----|---------------------------|----------------------------------|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|----------------------------------|
|      |            |             |    |                           |                                  | SR                   | R | T | B |            |                    |                                  |
| 1    | 2          | 3           |    |                           |                                  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                               |
| 1637 |            |             |    | 2                         | Asia Tenggara                    |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1638 |            |             |    | 3                         | Asia Tengah dan Selatan          |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1639 |            |             |    | 4                         | Asia Barat                       |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1640 |            |             | 10 | Amerika, Eropa dan Afrika |                                  |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1641 |            |             |    | 1                         | Amerika Utara dan Tengah         |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1642 |            |             |    | 2                         | Amerika Selatan                  |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1643 |            |             |    | 3                         | Eropa Barat dan Timur            |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1644 |            |             |    | 4                         | Afrika                           |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1645 |            |             | 11 | Organisasi Internasional  |                                  |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1646 |            |             |    | 1                         | ASEAN                            |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1647 |            |             |    | 2                         | Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1648 |            |             |    | 3                         | Organisasi Pemerintah            |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1649 |            |             |    | 4                         | Organisasi Non Pemerintah        |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1650 |            |             | 12 | Kawasan Global            |                                  |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1651 |            |             |    | 1                         | Senjata Strategis                | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1652 |            |             |    | 2                         | Elektronika dan Informasi        |                      |   | √ |   |            |                    |                                  |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |    |                                    |                                     | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|-------------|----|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|----------------------------------|
|      |            |             |    |                                    |                                     | SR                   | R | T | B |            |                    |                                  |
| 1    | 2          | 3           |    |                                    |                                     | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                               |
| 1653 |            |             |    | 3                                  | Lingkungan Hidup                    |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1654 |            |             |    | 4                                  | Keamanan Global                     | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1655 |            |             | 13 | Kerja Sama Internasional           |                                     |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1656 |            |             |    | 1                                  | Asia                                |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1657 |            |             |    | 2                                  | Eropa dan Afrika                    |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1658 |            |             |    | 3                                  | Amerika dan Pasifik                 |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1659 |            |             |    | 4                                  | Misi Perdamaian                     | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1660 |            |             |    | 5                                  | Intra Kawasan                       |                      |   | √ |   |            |                    |                                  |
| 1661 |            |             |    | 6                                  | Keamanan Internasional              | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1662 |            |             |    | 7                                  | Bantuan Kemanusiaan                 |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1663 |            |             | 14 | Kerja Sama Pendidikan dan Materiil |                                     |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1664 |            |             |    | 1                                  | Pendidikan Luar Negeri              |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1665 |            |             |    | 2                                  | Pendidikan Dalam Negeri             |                      |   | √ |   |            |                    |                                  |
| 1666 |            |             |    | 3                                  | Materiil                            |                      |   | √ |   |            |                    |                                  |
| 1667 |            |             | 15 | Atase Pertahanan                   |                                     |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1668 |            |             |    | 1                                  | Atase Pertahanan Republik Indonesia | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |    |                          |                              | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|-------------|----|--------------------------|------------------------------|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|----------------------------------|
|      |            |             |    |                          |                              | SR                   | R | T | B |            |                    |                                  |
| 1    | 2          | 3           |    |                          |                              | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                               |
| 1669 |            |             |    | 2                        | Atase Pertahanan Luar negeri | √                    |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1670 |            |             | 16 | Protokoler dan Perijinan |                              |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1671 |            |             |    | 1                        | Protokoler                   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1672 |            |             |    | 2                        | Perijinan dan Konsuler       |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1673 |            |             | 17 | Wilayah Pertahanan       |                              |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1674 |            |             |    | 1                        | Survey                       |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1675 |            |             |    | 2                        | Pemetaan                     |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1676 |            |             |    | 3                        | Bimbingan Teknis             |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1677 |            |             |    | 4                        | Evaluasi dan Dokumentasi     |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1678 |            |             |    | 5                        | Perbatasan Darat Negara      |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1679 |            |             |    | 6                        | Perbatasan Darat Daerah      |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1680 |            |             |    | 7                        | Evaluasi dan Dokumentasi     |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1681 |            |             |    | 8                        | Perbatasan Laut              |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1682 |            |             |    | 9                        | Perbatasan Udara             |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1683 |            |             |    | 10                       | Evaluasi dan Dokumentasi     |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1684 |            |             |    | 11                       | Tata Ruang Pertahanan        |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |  |    |                              | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|-------------|--|----|------------------------------|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|----------------------------------|
|      |            |             |  |    |                              | SR                   | R | T | B |            |                    |                                  |
| 1    | 2          | 3           |  |    |                              | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                               |
| 1685 |            |             |  | 12 | Kawasan Militer              |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1686 |            |             |  | 13 | Sistem Informasi Geografi    |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1687 |            |             |  | 14 | Pembinaan Wilayah Teritorial |                      |   | √ |   |            |                    |                                  |
| 1688 |            |             |  | 15 | Pembinaan Tetitorial         |                      |   | √ |   |            |                    |                                  |
| 1689 |            |             |  | 16 | Pembinaan Massa Teritorial   |                      |   | √ |   |            |                    |                                  |
| 1690 |            |             |  | 17 | Kirka Teritorial             |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1691 |            |             |  | 18 | Operasi Teritorial           |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1692 |            |             |  | 19 | Rehabilitasi Wilayah         |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1693 |            |             |  | 20 | Pengamanan Pembangunan       |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1694 |            |             |  | 21 | Operasi Bhakti TNI/TMMD      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1695 |            |             |  | 22 | Orang Asing                  |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1696 |            |             |  | 23 | Survey                       |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1697 |            |             |  | 24 | Pemetaan                     |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1698 |            |             |  | 25 | Survey Non TNI               |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1699 |            |             |  | 26 | Pemetaan Non TNI             |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1700 |            |             |  | 27 | Meteorologi                  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                        |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|-------------|------------------------|---|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|----------------------------------|
|      |            |             |                        |   |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                                  |
| 1    | 2          | 3           |                        |   |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                               |
| 1701 |            |             |                        | 28  | Geofisika  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1702 |            |             | 18                     | Hukum Strategi Pertahanan                     |  |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1703 |            |             |                        | 1   | Perencanaan Undang-Undang                                      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1704 |            |             |                        | 2   | Peraturan Pelaksanaan  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1705 |            |             |                        | 3   | Program Legislasi Pertahanan                                   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1706 |            |             |                        | 4   | Penelaahan Politik Hukum dan Keamanan                          |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1707 |            |             |                        | 5   | Penelaahaan Kesejahteraan Rakyat                               |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1708 |            |             |                        | 6   | Penelaahaan Ekonomi  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1709 |            |             |                        | 7   | Hukum Humaniter  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1710 |            |             |                        | 8   | Hukum Laut dan Hukum Dirgantara                                |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1711 |            |             |                        | 9   | Perjanjian Internasional                                       |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1712 |            |             |                        | 10  | Jaringan Informasi Hukum                                       |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1713 |            |             |                        | 11  | Dokumentasi dan Publikasi                                      |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1714 |            | 2           | PERENCANAAN PERTAHANAN |   |  |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1715 |            |             | 1                      | Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertahanan |  |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1716 |            |             |                        | 1   | Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |   |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|---------------|-------------|---|---|--|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|----------------------------------|
|      |               |             |   |   |  | SR                      | R | T | B |              |                       |                                  |
| 1    | 2             | 3           |   |   |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                               |
| 1717 |               |             |   | 2 | Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek       |                         |   |   |   |              |                       |                                  |
| 1718 |               |             | 2 |   | Sistem dan Metode                                      |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1719 |               |             |   | 1 | Sistem dan Metode Perencanaan Pembangunan Pertahanan   |                         | √ |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1720 |               |             |   | 2 | Sistem dan Metode Perencanaan Program dan Anggaran     |                         | √ |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1721 |               |             | 3 |   | Analisis dan Evaluasi Pembangunan                      |                         |   |   |   |              |                       |                                  |
| 1722 |               |             |   | 1 | Analisis dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan          |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1723 |               |             |   | 2 | Analisis dan Evaluasi Sistem dan Metode Perencanaan    |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1724 |               |             | 4 |   | Penyerasian Penelitian dan Pengembangan Pembangunan    |                         |   |   |   |              |                       |                                  |
| 1725 |               |             |   | 1 | Perencanaan  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1726 |               |             |   | 2 | Evaluasi dan Pemanfaatan                               |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1727 |               |             | 5 |   | Analisis dan Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran |                         |   |   |   |              |                       |                                  |
| 1728 |               |             |   | 1 | Analisis Perencanaan Program dan Anggaran              |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1729 |               |             |   | 2 | Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran              |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1730 |               |             | 6 |   | Perencanaan Program dan Anggaran A                     |                         |   |   |   |              |                       |                                  |
| 1731 |               |             |   | 1 | Anggaran Kementerian Pertahanan                        |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |



| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                    |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|---------------|-------------|---|------------------------------------|--|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|----------------------------------|
|      |               |             |   |                                    |  | SR                      | R | T | B |              |                       |                                  |
| 1    | 2             | 3           |   |                                    |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                               |
| 1732 |               |             |   | 2                                  | Anggaran Mabes TNI   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1733 |               |             | 7 | Perencanaan Program dan Anggaran B |  |                         |   |   |   |              |                       |                                  |
| 1734 |               |             |   | 1                                  | Anggaran TNI AD  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1735 |               |             |   | 2                                  | Anggaran TNI AL dan TNI AU                                 |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1736 |               |             | 8 | Perencanaan Program dan Anggaran C |  |                         |   |   |   |              |                       |                                  |
| 1737 |               |             |   | 1                                  | Dukungan Operasi dan Industri Pertahanan                   |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1738 |               |             |   | 2                                  | Bantuan Proyek dan Pinjaman                                |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1739 |               |             |   | 3                                  | Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak                  |                         |   |   | √ | Staff        |                       |                                  |
| 1740 |               |             | 9 | Administrasi Pelaksanaan Anggaran  |  |                         |   |   |   |              |                       |                                  |
| 1741 |               |             |   | 1                                  | Analisis Administrasi Pelaksanaan Anggaran                 |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1742 |               |             |   | 2                                  | Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Anggaran                 |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1743 |               |             |   | 3                                  | Administrasi Pelaksanaan Anggaran A Kementerian Pertahanan |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1744 |               |             |   | 4                                  | Administrasi Pelaksanaan Anggaran A Mabes TNI              |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1745 |               |             |   | 5                                  | Administrasi Pelaksanaan Anggaran B TNI AD                 |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1746 |               |             |   | 6                                  | Administrasi Pelaksanaan Anggaran B TNI AL dan TNI AU      |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan pertanahan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |    |                                   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |            | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN               | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|-------------|----|-----------------------------------|--|----------------------|---|---|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
|      |            |             |    |                                   |  | SR                   | R | T | B          |            |                                  |                                  |
| 1    | 2          | 3           |    |                                   |  | 4                    | 5 | 6 | 7          | 8          | 9                                | 10                               |
| 1747 |            |             |    | 7                                 | Administrasi Pelaksanaan Anggaran C Devisa                                 |                      |   |   | √          | Staff      | Tidak beresiko                   | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1748 |            |             |    | 8                                 | Administrasi Pelaksanaan Anggaran C Bantuan Proyek dan Industri Pertahanan |                      |   |   | √          | Staff      | Tidak beresiko                   | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1749 |            |             | 10 | Pengendalian Program dan Anggaran |  |                      |   |   |            |            |                                  |                                  |
| 1750 |            |             |    | 1                                 | Pengumpulan Data Sistem Pengendalian Program dan Anggaran                  |                      |   | √ |            | Tk. Eselon |                                  | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1751 |            |             |    | 2                                 | Sistem Pengendalian dan Keuangan   |                      |   | √ |            | Tk. Eselon |                                  | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1752 |            |             |    | 3                                 | Pengendalian Anggaran A Kementerian Pertahanan                             |                      |   | √ |            | Tk. Eselon |                                  | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1753 |            |             |    | 4                                 | Pengendalian Anggaran A Mabes TNI  |                      |   | √ |            | Tk. Eselon |                                  | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1754 |            |             |    | 5                                 | Pengendalian Anggaran B TNI AD   |                      |   | √ |            | Tk. Eselon |                                  | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1755 |            |             |    | 6                                 | Pengendalian Anggaran B TNI AL dan TNI AU                                  |                      |   | √ |            | Tk. Eselon |                                  | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1756 |            |             |    | 7                                 | Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran                                |                      |   |   |            |            |                                  |                                  |
| 1757 |            |             |    | 8                                 | Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak                                 |                      |   | √ | Tk. Eselon |            |                                  |                                  |
| 1758 |            |             | 11 | Perencanaan Kegiatan              |  |                      |   | √ |            | Tk. Eselon |                                  | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1759 |            |             |    | 1                                 | Rencana Operasi  |                      |   |   | √          | Staff      | Unit pelaksana urusan pertanahan | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1760 |            |             |    | 2                                 | Rencana Personel   |                      |   |   | √          | Staff      | Tidak beresiko                   | Unit pelaksana urusan pertanahan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                    |                   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|-------------|--------------------|-------------------|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|----------------------------------|
|      |            |             |                    |                   |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                                  |
| 1    | 2          | 3           |                    |                   |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                               |
| 1761 |            |             |                    | 3                 | Rencana Materiil dan Logistik               |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1762 |            |             |                    | 4                 | Rencana Inspeksi dan Pengawasan             |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1763 |            |             |                    | 5                 | Rencana Pendidikan dan Pelatihan            |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1764 |            | 3           | POTENSI PERTAHANAN |                   |   |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1765 |            |             | 1                  | Bela Negara       |   |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1766 |            |             |                    | 1                 | Materi dan Metode Lingkungan Pendidikan     |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1767 |            |             |                    | 2                 | Analisis dan Evaluasi Lingkungan Pendidikan |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1768 |            |             |                    | 3                 | Materi dan Metode Lingkungan Pemukiman      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1769 |            |             |                    | 4                 | Analisis dan Evaluasi Lingkungan Pemukiman  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1770 |            |             |                    | 5                 | Materi dan Metode Lingkungan Pekerjaan      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1771 |            |             |                    | 6                 | Analisis dan Evaluasi Lingkungan Pekerjaan  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1772 |            |             | 2                  | Komponen Cadangan |   |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1773 |            |             |                    | 1                 | Sumber Daya Manusia Matra Darat             |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1774 |            |             |                    | 2                 | Sumber Daya Alam dan Buatan Matra Darat     |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1775 |            |             |                    | 3                 | Kekuatan dan Kemampuan Matra Darat          |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                    |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|-------------|---|--------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|----------------------------------|
|      |            |             |   |                    |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                                  |
| 1    | 2          | 3           |   |                    |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                               |
| 1776 |            |             |   | 4                  | Sumber Daya Manusia Matra Udara                        |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1777 |            |             |   | 5                  | Sumber Daya Alam dan Buatan Matra Laut                 |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1778 |            |             |   | 6                  | Kekuatan dan Kemampuan Matra Laut                      |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1779 |            |             |   | 7                  | Sumber Daya Manusia Matra Udara                        |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1780 |            |             |   | 8                  | Sumber Daya Alam dan Buatan Matra Udara                |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1781 |            |             |   | 9                  | Kekuatan dan Kemampuan Matra Udara                     |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1782 |            |             | 3 | Komponen Pendukung |  |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1783 |            |             |   | 1                  | Sumber Daya Manusia Garda Bangsa                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1784 |            |             |   | 2                  | SDM Tenaga Ahli dan Profesi                            |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1785 |            |             |   | 3                  | SDM Warga Negara Lainnya                               |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1786 |            |             |   | 4                  | Sumber Daya Alam dan Buatan Logistik Wilayah           |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1787 |            |             |   | 5                  | Sumber Daya Alam dan Butan Cadangan Materiil Strategis |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1788 |            |             |   | 6                  | Sarana dan Prasarana Matra Darat                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1789 |            |             |   | 7                  | Sarana dan Prasarana Matra Laut                        |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1790 |            |             |   | 8                  | Sarana dan Prasarana Matra Udara                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                   | KLASIFIKASI KEAMANAN                            |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |                                  |                                  |                                  |
|------|------------|-------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|      |            |             |   |                                   | SR  | R | T | B |           |                    |               |                                  |                                  |                                  |
| 1    | 2          | 3           |   |                                   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |                                  |                                  |                                  |
| 1791 |            |             | 4 | Teknologi dan Industri Pertahanan |   |   |   |   |           |                    |               |                                  |                                  |                                  |
| 1792 |            |             |   | 1                                 | Pengembangan Teknologi Pertahanan               |   |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan pertanahan |                                  |                                  |
| 1793 |            |             |   | 2                                 | Penerapan Teknologi Pertahanan                  |   |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan pertanahan |                                  |                                  |
| 1794 |            |             |   | 3                                 | Alat Utama Sistem Persenjataan Pertahanan       |   |   |   |           |                    | √             | Staff                            | Tidak beresiko                   | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1795 |            |             |   | 4                                 | Non Alat Utama Sistem Persenjataan Pertanahan   |   |   |   |           |                    | √             | Staff                            | Tidak beresiko                   | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1796 |            |             |   | 5                                 | Industri Pertahanan                             |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |                                  |
| 1797 |            |             |   | 6                                 | Optimasi dan Improvisasi Pendayagunaan Industri |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |                                  |
| 1798 |            |             |   | 7                                 | Promosi dan Kerja Sama Pendayagunaan Industri   |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |                                  |
| 1799 |            |             |   | 8                                 | Tata Kelola                                     |   |   |   |           |                    | √             | Staff                            | Unit pelaksana urusan pertanahan |                                  |
| 1800 |            |             |   | 9                                 | Pengembangan Sistem                             |   |   | √ |           |                    |               | Tk. Eselon                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |                                  |
| 1801 |            |             | 5 | Veteran                           |   |   |   |   |           |                    |               |                                  |                                  |                                  |
| 1802 |            |             |   | 1                                 | Pengembangan Komunikasi Sosial Veteran          |   |   |   |           |                    | √             | Tk. Eselon                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |                                  |
| 1803 |            |             |   | 2                                 | Kerja Sama Komunikasi Sosial Veteran            |   |   |   |           |                    | √             | Tk. Eselon                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |                                  |
| 1804 |            |             |   | 3                                 | Fasilitasi Administrasi Veteran                 |   |   |   |           |                    | √             | Tk. Eselon                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |                                  |
| 1805 |            |             |   | 4                                 | Moril Veteran                                   |   |   |   |           |                    | √             | Tk. Eselon                       | Unit pelaksana urusan pertanahan |                                  |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                     |                     |                                  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|----------------------------------|
|      |            |             |                     |                     |                                  | SR                   | R | T | B |            |                    |                                  |
| 1    | 2          | 3           |                     |                     |                                  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                               |
| 1806 |            |             |                     | 5                   | Data Inventarisasi               |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1807 |            |             |                     | 6                   | Data Dokumentasi                 |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1808 |            |             | 6                   | Sistem              |                                  |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1809 |            |             |                     | 1                   | Sistem Ops                       |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1810 |            |             |                     | 2                   | Sistem Pembinaan                 |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1811 |            |             |                     | 3                   | Sistem Persenjataan Teknologi    |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1812 |            |             |                     | 4                   | Sistem Persenjataan Sosial       |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1813 |            |             |                     | 5                   | Sistem Informasi Militer         |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1814 |            |             |                     | 6                   | Sistem Informasi Pembinaan       |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1815 |            | 3           | KEKUATAN PERTAHANAN |                     |                                  |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1816 |            |             | 1                   | Sumber Daya Manusia |                                  |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1817 |            |             |                     | 1                   | Perencanaan Penyediaan Tenaga    |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1818 |            |             |                     | 2                   | Perencanaan Penyediaan Perawatan |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1819 |            |             |                     | 3                   | Pemisahan                        |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1820 |            |             |                     | 4                   | Penyaluran                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1821 |            |             |                     | 5                   | Gelar Kehormatan dan Tanda Jasa  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                    |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|-------------|---|--------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|----------------------------------|
|      |            |             |   |                    |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                                  |
| 1    | 2          | 3           |   |                    |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                               |
| 1822 |            |             |   | 6                  | Tunjangan                                    |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1823 |            |             |   | 7                  | Pengembangan dan Pendidikan Militer          |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1824 |            |             |   | 8                  | Pengembangan dan Pendidikan Non Militer      |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1825 |            |             | 2 | Materiil           |  |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1826 |            |             |   | 1                  | Pengadaan Inventuri                          |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1827 |            |             |   | 2                  | Pengendalian Inventuri                       |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1828 |            |             |   | 3                  | Penghapusan Inventuri                        |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1829 |            |             |   | 4                  | Standarisasi                                 |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1830 |            |             |   | 5                  | Kelaikan                                     |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1831 |            |             |   | 6                  | Kodifikasi                                   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1832 |            |             |   | 7                  | Sistem dan Metode Tata Kelola Materiil       |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1833 |            |             |   | 8                  | Pengelolaan Materiil dan Barang Milik Negara |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1834 |            |             |   | 9                  | Pemeliharaan Alutsista                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1835 |            |             |   | 10                 | Pemeliharaan Non Alutsista                   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1836 |            |             | 3 | Fasilitas dan Jasa |  |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1837 |            |             |   | 1                  | Sistem dan Metode Fasilitas Komponen         |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |    |  |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|-------------|----|--|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|----------------------------------|
|      |            |             |    |  |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                                  |
| 1    | 2          | 3           |    |  |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                               |
|      |            |             |    |  | Utama   |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1838 |            |             | 2  |  | Pengendalian Fasilitas Inventori Komponen Utama   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1839 |            |             | 3  |  | Sistem dan Metode Listrik., gas dan Air           |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1840 |            |             | 4  |  | Pengendalian Inventori Listrik, Gas dan Air       |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1841 |            |             | 5  |  | Sistem dan Metode BBM dan Pelumas                 |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1842 |            |             | 6  |  | Pengendalian Inventori BBM dan Pelumas            |                      |   | √ |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1843 |            |             | 7  |  | Sistem dan Metode Komunikasi                      |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1844 |            |             | 8  |  | Sisitem dan Metode Elektronik                     |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1845 |            |             | 9  |  | Pengendalian Inventori Komunikasi dan Elektronik  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1846 |            |             | 10 |  | Inventori Barang Tidak Bergerak                   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1847 |            |             | 11 |  | Pemanfaatan Barang Tidak Bergerak                 |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1848 |            |             | 12 |  | Pemindahtanganan Barang Tidak Bergerak            |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1849 |            |             | 4  |  | Kesehatan   |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1850 |            |             | 1  |  | Kekuatan Kesehatan Geomedik                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1851 |            |             | 2  |  | Pengembangan Kekuatan Kesehatan Kesehatan Militer |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1852 |            |             | 3  |  | Pengembangan Kekuatan Kesehatan Kesehatan Umum    |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                   |           |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|-------------|-------------------|-----------|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|----------------------------------|
|      |            |             |                   |           |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                                  |
| 1    | 2          | 3           |                   |           |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                               |
| 1853 |            |             |                   | 4         | Profesi Tenaga Kesehatan                    |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1854 |            |             |                   | 5         | Pengembangan Kemampuan Tenaga Kesehatan     |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1855 |            |             |                   | 6         | Materiil Fasilitas Kesehatan                |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1856 |            |             |                   | 7         | Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan            |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1857 |            |             |                   | 8         | Pengembangan Fasilitas Kesehatan            |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1858 |            |             |                   | 9         | Dukungan Bantuan Kesehatan                  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1859 |            |             |                   | 10        | Kerjasama bantuan Kesehatan                 |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1860 |            |             |                   | 11        | Bantuan Kesehatan Nuklir, Biologi dan Kimia |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1861 |            | 4           | SARANA PERTAHANAN |           |   |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1862 |            |             | 1                 | Pengadaan |   |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1863 |            |             |                   | 1         | Pengadaan Dalam Negeri Matra Darat          |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1864 |            |             |                   | 2         | Pengadaan Luar Negeri Matra Darat           |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1865 |            |             |                   | 3         | Pengawasan Pengendalian Matra Darat         |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1866 |            |             |                   | 4         | Pengadaan Dalam Negeri Matra Laut           |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1867 |            |             |                   | 5         | Pengadaan Luar Negeri Matra Laut            |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1868 |            |             |                   | 6         | Pengawasan Pengendalian Matra Laut          |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |            |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|-------------|---|------------|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|----------------------------------|
|      |            |             |   |            |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                                  |
| 1    | 2          | 3           |   |            |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                               |
| 1869 |            |             |   | 7          | Pengadaan Dalam Negeri Matra Udara          |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1870 |            |             |   | 8          | Pengadaan Luar Negeri Matra Udara           |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1871 |            |             |   | 9          | Pengawasan Pengendalian Matra Udara         |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1872 |            |             | 2 | Konstruksi |   |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1873 |            |             |   | 1          | Perencanaan Konstruksi                      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1874 |            |             |   | 2          | Analisis dan Estimasi Perencanaan Kontruksi |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1875 |            |             |   | 3          | Administrasi Kontrak                        |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1876 |            |             |   | 4          | Pelaksana Lelang                            |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1877 |            |             |   | 5          | Administrasi Permintaan Pembayaran          |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1878 |            |             |   | 6          | Pengendalian Konstruksi                     |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1879 |            |             |   | 7          | Pengawasan Konstruksi                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1880 |            |             | 3 | Kelaikan   |   |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1881 |            |             |   | 1          | Kelaikan Rancang Bangun Darat               |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan            |
| 1882 |            |             |   | 2          | Kelaikan Produksi dan Pemeliharaan          |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan            |
| 1883 |            |             |   | 3          | Subbidang Kelaikan Konstruksi Bangunan      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan            |
| 1884 |            |             |   | 4          | Kelaikan Rancang Bangun laut                |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan            |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                            |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                    |
|------|------------|-------------|---|----------------------------|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|----------------------------------|
|      |            |             |   |                            |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                                  |
| 1    | 2          | 3           |   |                            |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                               |
| 1885 |            |             |   | 5                          | Kelaikan Fasilitas dan Produksi                     |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan            |
| 1886 |            |             |   | 6                          | Kelaikan Pemeliharaan                               |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan            |
| 1887 |            |             |   | 7                          | Kelaikan Rancang Bangun Udara                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan            |
| 1888 |            |             |   | 8                          | Kelaikan Fasilitas dan Produksi                     |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan            |
| 1889 |            |             |   | 9                          | Kelaikan Pemeliharaan                               |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan            |
| 1890 |            |             |   | 10                         | Kelaikan Produksi dan Pemeliharaan                  |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1891 |            |             | 4 | Kodifikasi                 |   |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1892 |            |             |   | 1                          | Tata Kelola Perencanaan Administrasi Kodifikasi     |                      |   |   |   |            |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1893 |            |             |   | 2                          | Pengembangan Kodifikasi                             |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1894 |            |             |   | 3                          | Sistem Informasi Kodifikasi                         |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1895 |            |             |   | 4                          | Nomenklatur Operasional Kodifikasi dan Klasifikasi  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1896 |            |             |   | 5                          | Identifikasi dan Kodifikasi                         |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1897 |            |             |   | 6                          | Validasi Data Kodifikasi                            |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |
| 1898 |            |             | 5 | Dukungan Teknis Kodifikasi |   |                      |   |   |   |            |                    |                                  |
| 1899 |            |             |   | 1                          | Kerja Sama Dukungan Teknis dan Pelatihan Kodifikasi |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan pertanahan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP                          |                              |                            |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |                                      |                              |                            |  | SR                   | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3                                    |                              |                            |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
| 1900 |            |                                      |                              | 2                          | Publikasi Katalog Materiil Teknis Kodifikasi |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1901 |            |                                      | 6                            | Barang Milik Negara        |  |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 1902 |            |                                      |                              | 1                          | Barang Milik Negara I A                      |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1903 |            |                                      |                              | 2                          | Barang Milik Negara I B                      |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1904 |            |                                      |                              | 3                          | Barang Milik Negara I C                      |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1905 |            |                                      |                              | 4                          | Barang Milik Negara II A                     |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1906 |            |                                      |                              | 5                          | Barang Milik Negara II B                     |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1907 |            |                                      |                              | 6                          | Barang Milik Negara II C                     |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1908 |            |                                      |                              | 7                          | Barang Milik Negara III A                    |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1909 |            |                                      |                              | 8                          | Barang Milik Negara III B                    |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1910 |            |                                      |                              | 9                          | Barang Milik Negara III C                    |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1911 | PB         | <b>URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA</b> |                              |                            |  |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 1912 | PB         | 1                                    | PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN |                            |  |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 1913 | PB         |                                      | 1                            | Pengurangan Resiko Bencana |  |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 1914 | PB         |                                      |                              | 1                          | Pencegahan Pengkajian Resiko                 |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1915 | PB         |                                      |                              | 2                          | Pencegahan Pengelolaan Resiko                |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                         |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                         |   | SR                   | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                         |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
| 1916 | PB         |             |   | 3                       | Mitigasi Struktur                             |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1917 | PB         |             |   | 4                       | Mitigasi Non Struktur                         |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1918 | PB         |             | 2 | Pemberdayaan Masyarakat |   |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 1919 | PB         |             |   | 1                       | Peran Lembaga Usaha Padat Modal               |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1920 | PB         |             |   | 2                       | Peran Lembaga Usaha Padat Karya               |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1921 | PB         |             |   | 3                       | Peran Organisasi Internasional                |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1922 | PB         |             |   | 4                       | Peran Organisasi Sosial Masyarakat Nasional   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1923 | PB         |             |   | 5                       | Peran Peningkatan Kesadaran Masyarakat        |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1924 | PB         |             |   | 6                       | Peran Peningkatan Ketahanan Masyarakat        |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1925 | PB         |             | 3 | Kesiapsiagaan           |   |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 1926 | PB         |             |   | 1                       | Peringatan Pemaduan Sistem Jaringan           |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1927 | PB         |             |   | 2                       | Pemantauan dan Peringatan                     |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1928 | PB         |             |   | 3                       | Perencanaan Kebutuhan dan Potensi Sumber Daya |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1929 | PB         |             |   | 4                       | Perencanaan Penerapan Rencana Strategis       |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1930 | PB         |             |   | 5                       | Penyediaan dan Penyiapan Sumber Daya          |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1931 | PB         |             |   | 6                       | Penyiapan Pengendalian Sumber Daya            |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                    |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                       |
|------|------------|-------------|--------------------|---|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|
|      |            |             |                    |   | SR                   | R | T | B |           |                    |                |                       |
| 1    | 2          | 3           |                    |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |                       |
| 1932 | PB         | 2           | PENANGANAN DARURAT |   |                      |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 1933 | PB         |             | 1                  | Tanggap Darurat                           |                      |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 1934 | PB         |             | 1                  | Perencanaan Pendataan Darurat             |                      |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 1935 | PB         |             | 2                  | Perencanaan Operasi                       |                      |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 1936 | PB         |             | 3                  | Pengendalian Pengorganisasian Pos Komando |                      |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 1937 | PB         |             | 4                  | Pengendalian Sarana dan Prasarana         |                      |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 1938 | PB         |             | 5                  | Penyelamatan                              |                      |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 1939 | PB         |             | 6                  | Evakuasi                                  |                      |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 1940 | PB         |             | 2                  | Bantuan Darurat                           |                      |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 1941 | PB         |             | 1                  | Bantuan Sandang                           |                      |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 1942 | PB         |             | 2                  | Bantuan Pangan                            |                      |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 1943 | PB         |             | 3                  | Bantuan Kesehatan                         |                      |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 1944 | PB         |             | 4                  | Bantuan Air Bersih                        |                      |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 1945 | PB         |             | 5                  | Bantuan Pembangunan Hunian Sementara      |                      |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 1946 | PB         |             | 6                  | Bantuan Pendukung Hunian Sementara        |                      |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 1947 | PB         |             | 3                  | Perbaikan Darurat                         |                      |   |   |   |           |                    |                |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                               |                                 |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |                               |                                 |  | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |                               |                                 |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 1948 | PB            |             |                               | 1                               | Penyiapan Peralatan                    |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1949 | PB            |             |                               | 2                               | Angkutan                               |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1950 | PB            |             |                               | 3                               | Perbaikan Prasarana Sosial             |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1951 | PB            |             |                               | 4                               | Perbaikan Prasarana Ekonomi            |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1952 | PB            |             |                               | 5                               | Pemantauan                             |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1953 | PB            |             |                               | 6                               | Pelaporan                              |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1954 | PB            | 3           | REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI |                                 |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 1955 | PB            |             | 1                             | Penilaian Kerusakan             |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 1956 | PB            |             |                               | 1                               | Inventarisasi Kerusakan Fisik          |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1957 | PB            |             |                               | 2                               | Inventarisasi Kerusakan Sosial Ekonomi |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1958 | PB            |             |                               | 3                               | Estimasi Pembiayaan Pembangunan        |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1959 | PB            |             |                               | 4                               | Estimasi Pembiayaan Sosial Ekonomi     |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1960 | PB            |             | 2                             | Pemulihan dan Peningkatan Fisik |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 1961 | PB            |             |                               | 1                               | Rehabilitasi Fasilitas Umum            |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1962 | PB            |             |                               | 2                               | Rekonstruksi Fasilitas Umum            |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1963 | PB            |             |                               | 3                               | Rehabilitasi Fasilitas Sosial          |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |  |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|--|--|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |  |  | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |  |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 1964 | PB            |             |   | 4  | Rekonstruksi Fasilitas Sosial              |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1965 | PB            |             |   | 5  | Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan Berat  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1966 | PB            |             |   | 6  | Rehabilitasi Rekonstruksi Perumahan Ringan |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1967 | PB            |             | 3 | Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 1968 | PB            |             |   | 1  | Pemulihan dan Peningkatan Sosial Budaya    |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1969 | PB            |             |   | 2  | Pemulihan dan Peningkatan Kesehatan        |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1970 | PB            |             |   | 3  | Pemulihan Ekonomi                          |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1971 | PB            |             |   | 4  | Peningkatan Ekonomi                        |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1972 | PB            |             | 4 | Penanganan Pengungsi                     |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 1973 | PB            |             |   | 1  | Perlindungan Pengungsi                     |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1974 | PB            |             |   | 2  | Pemberdayaan Pengungsi                     |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1975 | PB            |             |   | 3  | Kompensasi Pengungsi                       |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1976 | PB            |             |   | 4  | Pengembalian Hak Pengungsi                 |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1977 | PB            |             |   | 5  | Pemulangan dan Repatriasi Pengungsi        |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1978 | PB            |             |   | 6  | Relokasi/Pengalihan Pengungsi              |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP             |                        |                       | KLASIFIKASI KEAMANAN             |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |                         |                        |                       | SR                               | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3                       |                        |                       | 4                                | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
| 1979 | PB         | 4                       | LOGISTIK DAN PERALATAN |                       |                                  |   |   |   |           |                    |                       |
| 1980 | PB         |                         | 1                      | Logistik              |                                  |   |   |   |           |                    |                       |
| 1981 | PB         |                         |                        | 1                     | Inventarisasi Analisis Kebutuhan |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1982 | PB         |                         |                        | 2                     | Inventarisasi Pengadaan          |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1983 | PB         |                         |                        | 3                     | Penyimpanan                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1984 | PB         |                         |                        | 4                     | Distribusi                       |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1985 | PB         |                         | 2                      | Peralatan             |                                  |   |   |   |           |                    |                       |
| 1986 | PB         |                         |                        | 1                     | Inventarisasi Analisis Kebutuhan |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1987 | PB         |                         |                        | 2                     | Inventarisasi Pengadaan          |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1988 | PB         |                         |                        | 3                     | Penyimpanan                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1989 | PB         |                         |                        | 4                     | Pemeliharaan                     |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1990 | PB         |                         |                        | 5                     | Pengerahan                       |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1991 | PB         |                         |                        | 6                     | Distribusi                       |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 1992 | KS         | <b>URUSAN KESEHATAN</b> |                        |                       |                                  |   |   |   |           |                    |                       |
| 1993 | KS         | 1                       | UPAYA KESEHATAN        |                       |                                  |   |   |   |           |                    |                       |
| 1994 | KS         |                         | 1                      | Upaya Kesehatan Dasar |                                  |   |   |   |           |                    |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                         |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                         |   | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                         |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 1995 | KS            |             |   | 1                       | Pelayanan Kedokteran Keluarga   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1996 | KS            |             |   | 2                       | Praktik Klinis Bagi Dokter di Fanyaskes Primer                            |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1997 | KS            |             |   | 3                       | Pelaksanaan Kesehatan Primer  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1998 | KS            |             |   | 4                       | Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas                                     |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 1999 | KS            |             |   | 5                       | Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit                                   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2000 | KS            |             |   | 6                       | ICD 10, Destistry & Stomatology   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2001 | KS            |             |   | 7                       | Infeksi Menular Lewat Tranfusi Darah                                      |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2002 | KS            |             |   | 8                       | Penyakit Mulut di Tingkat Primer  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2003 | KS            |             |   | 9                       | Pembiayaan Darah  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2004 | KS            |             |   | 10                      | Penggunaan Darah Rasional   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2005 | KS            |             |   | 11                      | Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Darah |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2006 | KS            |             |   | 12                      | Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan kepulauan   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2007 | KS            |             |   | 13                      | Akreditasi Puskesmas  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2008 | KS            |             |   | 14                      | Puskesmas Berprestasi   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2009 | KS            |             | 2 | Upaya Kesehatan Rujukan |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |  |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|--|---|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |  |   |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |  |   |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2010 | KS         |             |  | 1 | Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Bergerak, Pratama, Publik, Priovat dan Kusus)  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2011 | KS         |             |  | 2 | Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2012 | KS         |             |  | 3 | Pelayanan Rumah Sakit Privat (SPGDT Call 119, Rekeyasa Jaringan, Geriartri, Medical tourism, Hyperbarik)   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2013 | KS         |             |  | 4 | Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain (Pelayanan Kanker, Rujukan Regional dan Pencegahan Froud)   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2014 | KS         |             |  | 5 | Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit pendidikan (Keselamatan Pasien, Jantung dan pembuluh darah, Ginjal, HIV/AIDS, Tim Reproduksi Penguatan Rumah sakit Vertikal dan PPDSBK)                   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2015 | KS         |             |  | 6 | Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan (Biaya Klaim )  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2016 | KS         |             |  | 7 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Asing dan Perdagangan Jasa   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2017 | KS         |             |  | 8 | Badan Pengawas di Rumah Sakit  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2018 | KS         |             |  | 9 | Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan Penanaman Modal Asing (Usulan penetapan, Rekomendasi, Profil dan Data Rumah Sakit, Self Instrumen Assesment, Keputusan dan Sertifikat) |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |    |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|----|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |    |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |    |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2019 | KS         |             |   | 10 | Akreditasi Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lain (Standar Nasional, Standar Internasional, Rumah Sakit Oasca Akreditasi Nasional dan Surveyor) |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2020 | KS         |             | 3 |    | Keperawatan dan Keteknisian Medik   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2021 | KS         |             |   | 1  | Pelayanan Keperawatan Dasar   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2022 | KS         |             |   | 2  | Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2023 | KS         |             |   | 3  | Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2024 | KS         |             |   | 4  | Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2025 | KS         |             |   | 5  | Bina Pelayanan Kebidanan  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2026 | KS         |             |   | 6  | Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2027 | KS         |             | 4 |    | Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2028 | KS         |             |   | 1  | Mikrobiologi dan Imunologi (Laboratorium Kesehatan, Klinik, Puskesmas dan Moikrobiologi Kultur)   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2029 | KS         |             |   | 2  | Patologi dan Toksikologi (PNPME, Sarana Kesehatan)  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2030 | KS         |             |   | 3  | Radiologi (Pelayanan, dosis Radiasi Nasional, Radioterapi, Telemedicine, radiologi Diagnostik, Teleradiologi)                                     |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                        |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|------------------------|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                        |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                        |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2031 | KS         |             |   | 4                      | Perijinan dan Sertifikasi   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2032 | KS         |             |   | 5                      | Sarana dan Prasarana Kesehatan (Bangunan Rumah Sakit Kelas A,B,C, Ruang Gawat darurat, Ruang Operasi,Ruang Perawatan Intensif                                   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2033 | KS         |             |   | 6                      | Peralatan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kalibrasi BPFK/LPFK/UPFK, Rumah Sakit, Puskesmas, Pemeliharaan Peralatan Kesehatan Rumah sakit dan Puskesmas) |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2034 | KS         |             |   | 7                      | Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK Rumah Sakit, Puskesmas dan Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota)   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2035 | KS         |             | 5 | Kesehatan Jiwa         |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2036 | KS         |             |   | 1                      | Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Kesehatan Jiwa, Kegawatdaruratan dan Promosi Kesehatan)  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2037 | KS         |             |   | 2                      | Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2038 | KS         |             | 6 | Etikolegal dan Asesmen |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2039 | KS         |             |   | 1                      | Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah Lainnya   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2040 | KS         |             |   | 2                      | Terhadap Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |  |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|--|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |  |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |  |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2041 | KS         |             |   | 3  | Visum Et Repertum   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2042 | KS         |             | 7   | Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Rokok, dan |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2043 | KS         |             |   | 1  | Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     |                       |
| 2044 | KS         |             |   | 2  | Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol               |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2045 | KS         |             |   | 3  | Wajib Lapori Pecandu Narkotika  |                      |   | √ |   |            |                    |                       |
| 2046 | KS         |             |   | 4  | Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau                                   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2047 | KS         |             | 8   | Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko   |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2048 | KS         |             |   | 1  | Kesehatan Jiwa Di Sekolah   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2049 | KS         |             |   | 2  | Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial -Penanggulangan Bencana                 |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2050 | KS         |             |   | 3  | Penanggulangan Autisme  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2051 | KS         |             |   | 4  | Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2052 | KS         |             |   | 5  | Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana                                 |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2053 | KS         | 2           | PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN |  |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2054 | KS         |             | 1   | Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra                                    |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2055 | KS         |             |   | 1  | Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB)(difteri, polio, penyelenggaraan |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |  |    |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|--|----|--|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |  |    |  | SR                   | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |  |    |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
|      |            |             |  |    | kegiatan survei pre TAS filariasis, sur eilans influenza, keracunan pangan)                          |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 2056 | KS         |             |  | 2  | Pekan Imunisasi Nasional   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2057 | KS         |             |  | 3  | Coldchain Bagi Petugas Imunisasi   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2058 | KS         |             |  | 4  | Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2059 | KS         |             |  | 5  | Imunisasi bagi Petugas Kesehatan   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2060 | KS         |             |  | 6  | Imunisasi di Daerah Sulit  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2061 | KS         |             |  | 7  | Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS)   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2062 | KS         |             |  | 8  | Imunisasi bagi masyarakat umum   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2063 | KS         |             |  | 9  | Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanaan vaksin baru DPT-HIB-Hib                                |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2064 | KS         |             |  | 10 | Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/ Haemophilis Influenza tipe B |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2065 | KS         |             |  | 11 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2066 | KS         |             |  | 12 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Pemberian ICV (International Certificate Vaccinate)      |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2067 | KS         |             |  | 13 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Hapus Serangga dan Hapus Tikus                           |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |  |    |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|--|----|---|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |  |    |   | SR                   | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |  |    |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
| 2068 | KS         |             |  | 14 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Teknis Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan/Bandara/Pos Lintas Batas |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2069 | KS         |             |  | 15 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Vaksinasi Meningitis pada RS, KKP, dan Poliklinik                                     |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2070 | KS         |             |  | 16 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Kekarantinaan Kesehatan dan Upaya Kesehatan Pelabuhan                                 |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2071 | KS         |             |  | 17 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Obat dan P3K Kapal  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2072 | KS         |             |  | 18 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Kesehatan Nakoda/Pilot dan ABK/Pesawat  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2073 | KS         |             |  | 19 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Air Bersih di Kapal   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2074 | KS         |             |  | 20 | Karantina Kesehatan dan Kesehatan Pelabuhan Fumigasi di kapal   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2075 | KS         |             |  | 21 | Kesehatan Matra Mudik Sehat   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2076 | KS         |             |  | 22 | Kesehatan Matra bagi Penumpang Darat, Penumpang Kapal Laut dan Penumpang Pesawat Udara  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2077 | KS         |             |  | 23 | Kesehatan Matra Migran  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|---|---|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |   | SR  | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
| 2078 | KS         |             |   | 24  | Kesehatan Matra Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2079 | KS         |             |   | 25  | Kesehatan matra Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas                                  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2080 | KS         |             |   | 26  | Kesehatan Matra Transmigrasi bagi tenaga kesehatan  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2081 | KS         |             | 2 | Pengendalian Penyakit Menular Langsung                    |   |   |   |   |           |                    |                       |
| 2082 | KS         |             |   | 1   | Pengendalian Tuberkulosis/pengendalian penyakit TB  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2083 | KS         |             |   | 2   | Pengendalian TB Multi Drug Resitance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB.         |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2084 | KS         |             |   | 3   | Laboratorium TB   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2085 | KS         |             | 3 | Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual            |   |   |   |   |           |                    | Tidak beresiko        |
| 2086 | KS         |             |   | 1   | Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) / <i>Integrated Bio-Behavioural Surveillance</i> (IBBS) |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2087 | KS         |             |   | 2   | <i>Human Immuno Deficiency Virus</i> (HIV)  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2088 | KS         |             |   | 3   | Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Test         |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2089 | KS         |             |   | 4   | Obat <i>Anti Retro Viral</i> (ARV) dan reagen tes HIV   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2090 | KS         |             | 4 | Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut |   |   |   |   |           |                    |                       |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |   |   | SR                   | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
| 2091 | KS         |             |   | 1   | <i>Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS CoV)</i>                                 |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2092 | KS         |             |   | 2   | Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2093 | KS         |             | 5 | Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan |   |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 2094 | KS         |             |   | 1   | Diare   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2095 | KS         |             |   | 2   | Tifoid  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2096 | KS         |             |   | 3   | Hepatitis   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2097 | KS         |             | 6 | Pengendalian Kusta dan Frambusia                  |   |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 2098 | KS         |             |   | 1   | Kusta   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2099 | KS         |             |   | 2   | Frambusia   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2100 | KS         |             |   | 3   | Alliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK)  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2101 | KS         |             | 7 | Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang          |   |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 2102 | KS         |             |   | 1   | Pengendalian Malaria ( kelmbu berinsektisida (LLINs), Malaria, Crosscheker mikroskopis malaria) |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2103 | KS         |             |   | 2   | Pengendalian Arbovirolesi ( DBD, Chikungunya, Ebola)  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2104 | KS         |             | 8 | Pengendalian Zoonosis                             |   |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 2105 | KS         |             |   | 1   | Penyakit flu burung   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |    |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN   |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|----|--|---|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |    |  | SR  | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |    |  | 4   | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 2106 | KS            |             |    | 2  | Vaksin Anti Rabies (VAR) baru   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2107 | KS            |             |    | 3  | Penyakit Pes  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2108 | KS            |             |    | 4  | Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1) |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2109 | KS            |             | 9  | Pengendalian Filariasis dan Kecacingan               |   |   |   |   |              |                       |                       |
| 2110 | KS            |             |    | 1  | Filariasis  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2111 | KS            |             |    | 2  | Kecacingan  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2112 | KS            |             |    | 3  | Schistosomiasis   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2113 | KS            |             | 10 | Pengendalian Vektor                                  |   |   | √ |   |              |                       |                       |
| 2114 | KS            |             | 11 | Pengendalian Penyakit Tidak Menular                  |   |   |   |   |              |                       |                       |
| 2115 | KS            |             | 12 | Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah     |   |   |   |   |              |                       |                       |
| 2116 | KS            |             |    | 1  | Penyakit Jantung  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2117 | KS            |             |    | 2  | Penyakit Pembuluh darah   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2118 | KS            |             |    | 3  | Penyakit Hipertensi   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2119 | KS            |             |    | 4  | Penyakit Stroke   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2120 | KS            |             | 13 | Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik |   |   |   |   |              |                       |                       |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |    |  | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|----|--|---|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |    |  | SR  | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |    |  | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
| 2121 | KS         |             |    | 1  | Penyakit Diabetes Mellitus                                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2122 | KS         |             |    | 2  | Penyakit gangguan Metabolik                                     |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2123 | KS         |             |    | 3  | Penyakit gangguan Tiroid  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2124 | KS         |             |    | 4  | Gangguan Obesitas   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2125 | KS         |             |    | 5  | Pengendalian Penyakit Kanker                                    |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2126 | KS         |             | 14 | Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif                   |   |   |   |   |           |                    |                       |
| 2127 | KS         |             |    |  |   |   |   |   |           |                    |                       |
| 2128 | KS         |             |    | 1  | Penyakit Akibat produk tembakau                                 |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2129 | KS         |             |    | 2  | Asma, Lupus, Thalassemia  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2130 | KS         |             | 15 | Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan |   |   |   |   |           |                    |                       |
| 2131 | KS         |             |    | 1  | Pengendalian Cidera   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2132 | KS         |             |    | 2  | Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas                             |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2133 | KS         |             |    | 3  | Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan                    |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2134 | KS         |             | 16 | Penyehatan Lingkungan  |   |   |   |   |           |                    |                       |
| 2135 | KS         |             |    | 1  | Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar Pengawasan Kualitas Air Minum |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |    |   | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|----|---|---|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |    |   | SR  | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |    |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
| 2136 | KS         |             |    | 2   | Sanitasi Total Berbasis Masyarakat                                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2137 | KS         |             | 17 | Penyehatan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum |   |   |   |   |           |                    |                       |
| 2138 | KS         |             |    | 1   | Higiene sanitasi dan Bangunan Umum                                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2139 | KS         |             |    | 2   | Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan                               |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2140 | KS         |             |    | 3   | Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum                     |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2141 | KS         |             | 18 | Penyehatan kawasan dan sanitasi darurat     |   |   |   |   |           |                    |                       |
| 2142 | KS         |             |    | 1   | Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan                  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2143 | KS         |             |    | 2   | Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2144 | KS         |             |    | 3   | Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat                            |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2145 | KS         |             |    | 4   | Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar                                   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2146 | KS         |             | 19 | Higiene Sanitasi Pangan                     |   |   |   |   |           |                    |                       |
| 2147 | KS         |             |    | 1   | Makanan Jajanan   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2148 | KS         |             |    | 2   | Restoran / Rumah Makan  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2149 | KS         |             |    | 3   | Jasa Boga   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2150 | KS         |             |    | 4   | Depot Air Minum   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |    |  | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|----|--|---|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |    |  | SR  | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |    |  | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
| 2151 | KS         |             | 20 | Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi  |   |   |   |   |           |                    |                       |
| 2152 | KS         |             |    | 1  | Medis Fasyankes   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2153 | KS         |             |    | 2  | Limbah Medis (Free Mercury)   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2154 | KS         |             |    | 3  | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)                               |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2155 | KS         |             |    | 4  | Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pengion                           |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2156 | KS         |             | 21 | Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan |   |   |   |   |           |                    |                       |
| 2157 | KS         |             |    | 1  | Pengembangan Teknologi dan Laboratorium                                   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2158 | KS         |             |    | 2  | Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Laboratorium Pengendali Penyakit  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2159 | KS         |             |    | 3  | Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Laboratorium Kesehatan Lingkungan |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2160 | KS         |             |    | 4  | Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Laboratorium Kesehatan Matra      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2161 | KS         |             |    | 5  | Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Model dan Teknologi Tepat Guna    |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2162 | KS         |             |    | 6  | Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Uji kendali mutu dan kalibrasi    |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                                 |  | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |                                 |  | SR   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |                                 |  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2163 | KS         |             |                                 | 7  | Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2164 | KS         |             | 22                              | Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan |  |   |   |   |            |                    |                       |
| 2165 | KS         |             |                                 | 1  | Ship Sanitation Control Exemption of Certificate (SSCEC)   |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2166 | KS         |             |                                 | 2  | Ship Sanitation Control of Certificate (SSCC)  |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2167 | KS         |             |                                 | 3  | Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal  |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2168 | KS         |             | 23                              | Sertifikat   |  |   |   |   |            |                    |                       |
| 2169 | KS         |             |                                 | 1  | Health Certificate   |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2170 | KS         |             |                                 | 2  | International Certificate of Vaccination   |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2171 | KS         |             |                                 | 3  | Surat Keretangan Pengujian Kesehatan Nahkoda/Pilot dan Anak Buah                                 |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2172 | KS         |             |                                 | 4  | Kapal/Pesawat Udara  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2173 | KS         |             |                                 | 5  | Sertifikat Air Bersih  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2174 | KS         |             |                                 | 6  | Sertifikat Penyelenggaraan Perusahaan Fumigasi di Kapal  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2175 | KS         |             |                                 | 7  | Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2176 | KS         | 3           | GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK |  |  |   |   |   |            |                    |                       |
| 2177 | KS         |             | 1                               | Gizi Makro   |  |   |   |   |            |                    |                       |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                   | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                       |
|------|------------|-------------|---|-----------------------------------|--|---|---|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                                   | SR   | R | T | B |           |                    |                |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                                   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |                       |
| 2178 | KS         |             |   | 1                                 | Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting)  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2179 | KS         |             |   | 2                                 | Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu)   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2180 | KS         |             | 2 | Gizi Mikro                        |  |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 2181 | KS         |             |   | 1                                 | Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), KVA (Kekurangan Vitamin A), AGB (Anemia Gizi Besi)) |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2182 | KS         |             |   | 2                                 | Manajemen Taburia  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2183 | KS         |             |   | 3                                 | Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2184 | KS         |             | 3 | Gizi Klinik dan Dietetik          |  |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 2185 | KS         |             |   | 1                                 | Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2186 | KS         |             |   | 2                                 | Tatalaksana Anak Gizi Buruk  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2187 | KS         |             |   | 3                                 | Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2188 | KS         |             | 4 | Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan |  |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 2189 | KS         |             |   | 1                                 | Makanan Pendamping ASI   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2190 | KS         |             |   | 2                                 | ASI Eksklusif  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2191 | KS         |             |   | 3                                 | Pedoman Gizi Seimbang  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |               |                                  |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |               |                                  |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |               |                                  |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2192 | KS         |             |               | 4                                | Makanan Bayi dan Anak  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2193 | KS         |             |               | 5                                | Buffer Stock Makanan Pendamping ASI  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2194 | KS         |             |               | 6                                | Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang g Makanan Tambahan Anak Sekolah |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2195 | KS         |             | 5             | Kewaspadaan Gizi                 |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2196 | KS         |             |               | 1                                | Surveilans Gizi  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2197 | KS         |             |               | 2                                | Epidemiologi Kasus Gizi Buruk  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2198 | KS         |             |               | 3                                | Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2199 | KS         |             |               | 4                                | Jejaring Informasi Pangan dan Gizi   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2200 | KS         | 4           | KESEHATAN IBU |                                  |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2201 | KS         |             | 1             | Kesehatan Ibu Hamil              |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2202 | KS         |             |               | 1                                | Pelayanan Antenatal Terpadu  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2203 | KS         |             |               | 2                                | Pelayanan Kelas Ibu Hamil  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2204 | KS         |             |               | 3                                | Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2205 | KS         |             | 2             | Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2206 | KS         |             |               | 1                                | Kemitraan Bidan dan Dukun  |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                       |
|------|------------|-------------|---|---|---|---|---|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|
|      |            |             |   |   | SR  | R | T | B |           |                    |                |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |                       |
| 2207 | KS         |             |   | 2   | Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2208 | KS         |             |   | 3   | Supervisi Fasilitatif   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2209 | KS         |             | 3 | Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi |   |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 2210 | KS         |             |   | 1   | Audit Maternal Perinatal  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2211 | KS         |             |   | 2   | Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan Masyarakat    |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2212 | KS         |             |   | 3   | Tanda Bahaya pada Kehamilan   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2213 | KS         |             |   | 4   | Surveilans Kematian Ibu   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2214 | KS         |             | 4 | Keluarga Berencana                              |   |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 2215 | KS         |             |   | 1   | Pelayanan KB Pasca Persalinan   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2216 | KS         |             |   | 2   | Pelatihan KB Pasca Persalinan   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2217 | KS         |             | 5 | Perlindungan Kesehatan Reproduksi               |   |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 2218 | KS         |             |   | 1   | Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT)   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2219 | KS         |             |   | 2   | Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kespro) |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2220 | KS         |             |   | 3   | Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan                                    |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                |  |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|----------------|--|---|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |                |  |   | SR                   | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |                |  |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
| 2221 | KS         |             |                | 4  | Pengarus Utama Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)                      |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2222 | KS         | 5           | KESEHATAN ANAK |  |   |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 2223 | KS         |             | 1              | Kelangsungan Hidup Bayi                        |   |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 2224 | KS         |             |                | 1  | Pelayanan Kesehatan Neonatal  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2225 | KS         |             |                | 2  | Manajemen Asfeksia  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2226 | KS         |             |                | 3  | Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah)                            |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2227 | KS         |             |                | 4  | Pencegahan Infeksi  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2228 | KS         |             | 2              | Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah |   |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 2229 | KS         |             |                | 1  | Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang) |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2230 | KS         |             |                | 2  | Rujukan Tumbuh Kembang  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2231 | KS         |             |                | 3  | Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT)            |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2232 | KS         |             | 3              | Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko         |   |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 2233 | KS         |             |                | 1  | Screening Hypotheroid Congenital                                    |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2234 | KS         |             |                | 2  | Surveillance Kesehatan Anak   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2235 | KS         |             |                | 3  | Surveillance Kesehatan Bawaan                                       |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN                                      |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|---|---|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |   | SR  | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2236 | KS         |             | 4   | Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 2237 | KS         |             |   | 1   | Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit         |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2238 | KS         |             |   | 2   | Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja                         |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2239 | KS         |             |   | 3   | Usaha Kesehatan Sekolah                                   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2240 | KS         |             | 5   | Perlindungan Kesehatan Anak                 |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 2241 | KS         |             |   | 1   | Korban kekerasan terhadap anak                            |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2242 | KS         |             |   | 2   | Anak dengan disabilitas                                   |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2243 | KS         |             |   | 3   | Anak terlantar/anak jalanan di panti                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2244 | KS         |             |   | 4   | Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan          |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2245 | KS         |             |   | 5   | Anak kelompok terasing/kelompok minoritas                 |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2246 | KS         | 6           | KESEHATAN TRADISIONAL ALTERNATIF DAN KOMPLEMENTER |   |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 2247 | KS         |             | 1   | Kesehatan Tradisional Keterampilan          |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 2248 | KS         |             |   | 1   | Akupresure  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2249 | KS         |             |   | 2   | Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2250 | KS         |             |   | 3   | Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                       | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN  |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|---------------------------------------|--|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                                       | SR   | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                                       | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 2251 | KS            |             |   | 4                                     | Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya                                 |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2252 | KS            |             | 2 | Kesehatan Tradisional Ramuan          |  |   | √ |   |              |                       |                       |
| 2253 | KS            |             |   | 1                                     | Health Tourism   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2254 | KS            |             |   | 2                                     | Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA)                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2255 | KS            |             |   | 3                                     | Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2256 | KS            |             |   | 4                                     | Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional                                       |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2257 | KS            |             |   | 5                                     | Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes                        |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2258 | KS            |             | 3 | Kesehatan Alternatif dan Komplementer |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 2259 | KS            |             |   | 1                                     | Akupunktur   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2260 | KS            |             |   | 2                                     | Obat Herbal / Obat Tradisional   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2261 | KS            |             |   | 3                                     | Integrasi Yankestrad   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2262 | KS            |             |   | 4                                     | Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya                                  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2263 | KS            |             | 4 | Penapisan dan Kemitraan               |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 2264 | KS            |             |   | 1                                     | Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T)            |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2265 | KS            |             |   | 2                                     | Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                               |                           | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |            |                |                       |
|------|------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|
|      |            |             |                               |                           | SR  | R | T | B |           |                    |               |            |                |                       |
| 1    | 2          | 3           |                               |                           | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |            |                |                       |
| 2266 | KS         |             |                               | 3                         | Penapisan Pengobat Tradisional Asing                          |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2267 | KS         |             |                               | 4                         | Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2268 | KS         |             |                               | 5                         | Pengobat Tradisional (Lokal)                                  |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2269 | KS         |             |                               | 6                         | Asosiasi Pengobat Tradisional                                 |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2270 | KS         | 7           | KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA |                           |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 2271 | KS         |             | 1                             | Pelayanan Kesehatan Kerja |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 2272 | KS         |             |                               | 1                         | Penyakit Akibat Kerja   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2273 | KS         |             |                               | 2                         | Pemeriksaan Kesehatan Pekerja                                 |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2274 | KS         |             |                               | 3                         | Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)               |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2275 | KS         |             | 2                             | Kapasitas Kerja           |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 2276 | KS         |             |                               | 1                         | Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif                     |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2277 | KS         |             |                               | 2                         | Kapasitas Kesehatan Kerja                                     |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2278 | KS         |             |                               | 3                         | TP ASI  |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2279 | KS         |             | 3                             | Lingkungan Kerja          |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 2280 | KS         |             |                               | 1                         | a. Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP                           |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2281 | KS         |             |                               | 2                         | b. K3 Perkantoran   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                           | KLASIFIKASI KEAMANAN                            |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|---------------------------|---|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                           | SR  | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                           | 4   | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2282 | KS         |             |   | 3                         | c. K3 Rumah Sakit                               |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2283 | KS         |             |   | 4                         | d. Biomonitoring Efek Kesehatan                 |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2284 | KS         |             |   | 5                         | e. K3 Puskesmas                                 |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2285 | KS         |             |   | 6                         | f. Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2286 | KS         |             | 4 | Kemitraan Kesehatan Kerja |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 2287 | KS         |             |   | 1                         | Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2288 | KS         |             |   | 2                         | Kesehatan Nelayan                               |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2289 | KS         |             |   | 3                         | Integrasi Pos UKK                               |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2290 | KS         |             |   | 4                         | Kabupaten/Kota Percontohan                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2291 | KS         |             |   | 5                         | Penguatan Profesi                               |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2292 | KS         |             | 5 | Kesehatan Perkotaan       |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 2293 | KS         |             |   | 1                         | a. Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan           |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2294 | KS         |             |   | 2                         | b. Forum Kota                                   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2295 | KS         |             | 6 | Kesehatan Olahraga        |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 2296 | KS         |             |   | 1                         | Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja         |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2297 | KS         |             |   | 2                         | Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji        |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                                |   | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |                                |   | SR  | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |                                |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2298 | KS         |             |                                | 3   | Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah                         |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2299 | KS         |             |                                | 4   | Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas                          |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2300 | KS         |             |                                | 5   | Olahraga Bagi Usia Lanjut                                   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2301 | KS         |             |                                | 6   | Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat                     |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2302 | KS         | 8           | KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN |   |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 2303 | KS         |             | 1                              | Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyediaan, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan & |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 2304 | KS         |             |                                | 1   | Harga Jual Obat Generik                                     |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2305 | KS         |             |                                | 2   | Harga Jual Obat Generik Berdagang                           |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2306 | KS         |             |                                | 3   | Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2307 | KS         |             | 2                              | Pengadaan Obat  |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 2308 | KS         |             |                                | 1   | Pengadaan Vaksin Reguler                                    |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2309 | KS         |             |                                | 2   | Obat <i>Esensial</i>  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2310 | KS         |             |                                | 3   | Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten Kota dan Nasional |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2311 | KS         |             |                                | 4   | Obat Program Malaria  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2312 | KS         |             |                                | 5   | Obat Program Kesehatan Anak                                 |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                      | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|----------------------|---|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                      | SR  | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                      | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
| 2313 | KS         |             |   | 6                    | Obat Program Kesehatan Ibu  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2314 | KS         |             |   | 7                    | Obat Program Gizi   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2315 | KS         |             |   | 8                    | Obat Anti Tuberkulosis  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2316 | KS         |             |   | 9                    | Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan Tanah Papua (P2KTP) |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2317 | KS         |             |   | 10                   | Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia                            |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2318 | KS         |             |   | 11                   | Obat Penderita <i>Thalassemia</i>                                 |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2319 | KS         |             |   | 12                   | Obat Psikotropika Generik   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2320 | KS         |             |   | 13                   | Obat <i>Anti Retro Viral</i>                                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2321 | KS         |             | 3 | Perbekalan Kesehatan |   |   |   |   |           |                    |                       |
| 2322 | KS         |             |   | 1                    | Gudang Farmasi  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2323 | KS         |             |   | 2                    | Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan                  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2324 | KS         |             |   | 3                    | Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan         |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2325 | KS         |             |   | 4                    | Pengadaan Reagen Screening Darah                                  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2326 | KS         |             |   | 5                    | Obat <i>Buffer Stock</i>  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2327 | KS         |             |   | 6                    | Hasil <i>Stock Opname</i> Obat                                    |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |  |   | KLASIFIKASI KEAMANAN                      |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|--|---|---|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |  |   | SR  | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |  |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
| 2328 | KS         | 9           | PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN |   |   |   |   |   |           |                    |                       |
| 2329 | KS         |             | 1                                      | Alat Kesehatan  |   |   |   |   |           |                    |                       |
| 2330 | KS         |             |  | 1   | Alat Kesehatan                            |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2331 | KS         |             |  | 2   | Kopendum Alat Kesehatan                   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2332 | KS         |             |  | 3   | Pelabelan Alat Kesehatan Dan PKRT         |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2333 | KS         |             |  | 4   | Post Market & Surveillance Alat Kesehatan |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2334 | KS         |             |  | 5   | Produk Alat Kesehatan Elektromedik        |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2335 | KS         |             |  | 6   | Produk Alat Kesehatan Non Elektromedik    |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2336 | KS         |             | 2                                      | Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat                        |   |   |   |   |           |                    |                       |
| 2337 | KS         |             |  | 1   | Industri Farmasi                          |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2338 | KS         |             |  | 2   | Pedagang Besar Farmasi                    |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2339 | KS         |             |  | 3   | Pedagang Eceran Obat                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2340 | KS         |             |  | 4   | Penyalur Alat Kesehatan                   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2341 | KS         |             |  | 5   | Toko Alat Kesehatan                       |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2342 | KS         |             |  | 6   | Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan    |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2343 | KS         |             | 3                                      | Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) |   |   |   |   |           |                    |                       |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                       | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|-----------------------|---|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                       | SR  | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                       | 4   | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2344 | KS         |             |   | 1                     | Produk Diagnostik In Vitro  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2345 | KS         |             |   | 2                     | Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)                              |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2346 | KS         |             |   | 3                     | PKRT Klas III   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2347 | KS         |             |   | 4                     | PKRT Klas I dan II  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2348 | KS         |             |   | 5                     | Perusahaan Rumah Tangga PKRT  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2349 | KS         |             |   | 6                     | Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga                                  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2350 | KS         |             |   | 7                     | Post Market & Surveillance PKRT                                       |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2351 | KS         | 10          | KEFARMASIAN ( Standarisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional) |                       |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 2352 | KS         |             | 1   | Pelayanan Kefarmasian |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 2353 | KS         |             |   | 1                     | Visite untuk Apoteker   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2354 | KS         |             |   | 2                     | Tanggung Jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien (Patient Safety ) |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2355 | KS         |             |   | 3                     | Penulisan Resep   |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2356 | KS         |             | 2   | Farmasi Klinik        |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 2357 | KS         |             |   | 1                     | Pharmaceutical Care untuk Penyakit Arthritis Rematik                  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2358 | KS         |             |   | 2                     | Pharmaceutical Care untuk Penyakit Asma                               |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                   | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|-------------------|--|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                   | SR   | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
| 2359 | KS         |             |   | 3                 | Pharmaceutical Care untuk Penyakit Flu Burung  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2360 | KS         |             |   | 4                 | Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hati  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2361 | KS         |             |   | 5                 | Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus                                     |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2362 | KS         |             |   | 6                 | Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan                            |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2363 | KS         |             |   | 7                 | Pharmaceutical Care untuk Penyakit Tuberculosis  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2364 | KS         |             |   | 8                 | Pharmaceutical Care Lainnya  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2365 | KS         |             |   | 9                 | Dispensing Sediaan Steril  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2366 | KS         |             |   | 10                | Pencampuran Obat Suntikan Penanganan Sediaan Sitostatika                                 |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2367 | KS         |             |   | 11                | Pharmaceutical Care untuk Pasien Penyakit Jantung Koroner : Fokus Sindrom, koronwer akut |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2368 | KS         |             | 3 | Farmasi Komunitas |  |   |   |   |           |                    |                       |
| 2369 | KS         |             |   | 1                 | Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2370 | KS         |             |   | 2                 | Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care)  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2371 | KS         |             |   | 3                 | Kefarmasian untuk Pasien Pediatri  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2372 | KS         |             |   | 4                 | Kefarmasian untuk Penyakit Malaria   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2373 | KS         |             |   | 5                 | Farmasi di Rumah Sakit   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                                     |                          | KLASIFIKASI KEAMANAN                    |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |                                     |                          | SR                                      | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |                                     |                          | 4                                       | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2374 | KS         |             | 4                                   | Penggunaan Obat Rasional |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 2375 | KS         |             |                                     | 1                        | Obat Rasional                           |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2376 | KS         |             |                                     | 2                        | Informasi Obat                          |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2377 | KS         |             |                                     | 3                        | Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik     |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2378 | KS         |             |                                     | 4                        | Pemantauan Terapi Obat                  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2379 | KS         | 11          | PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN |                          |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 2380 | KS         |             | 1                                   | Obat Tradisional         |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 2381 | KS         |             |                                     | 1                        | Farmakope Indonesia                     |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2382 | KS         |             |                                     | 2                        | Farmakope Herbal Indonesia              |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2383 | KS         |             |                                     | 3                        | Suplemen I Farmakope Indonesia          |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2384 | KS         |             |                                     | 4                        | Suplemen II Farmakope Indonesia         |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2385 | KS         |             |                                     | 5                        | Suplemen II Farmakope Indonesia         |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2386 | KS         |             |                                     | 6                        | Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia   |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2387 | KS         |             |                                     | 7                        | Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia  |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2388 | KS         |             |                                     | 8                        | Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2389 | KS         |             |                                     | 9                        | Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)     |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |            |                |                       |
|------|------------|-------------|---|---|---|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|
|      |            |             |   |   | SR  | R | T | B |           |                    |               |            |                |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |            |                |                       |
| 2390 | KS         |             |   | 10  | Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT)                        |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2391 | KS         |             |   | 11  | Usaha Jamu Gendong (UJG)                                      |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2392 | KS         |             |   | 12  | Usaha Jamu Racik (UJR)  |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2393 | KS         |             |   | 13  | Farmakope Herbal Indonesia & Suplemennya Versi Bahasa Inggris |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2394 | KS         |             | 2 | Kosmetik dan Makanan  |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 2395 | KS         |             |   | 1   | a.Keamanan Pangan   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2396 | KS         |             |   | 2   | b.Kosmetika bagi Petugas                                      |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2397 | KS         |             |   | 3   | c.Industri Rumah Tangga bagi Petugas                          |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2398 | KS         |             |   | 4   | d.Makanan Jajanan Anak Sekolah                                |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2399 | KS         |             |   | 5   | e.Kodeks Kosmetika Indonesia                                  |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2400 | KS         |             |   | 6   | f.Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia                      |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2401 | KS         |             | 3 | Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 2402 | KS         |             |   | 1   | Narkotika dan Psikotropika                                    |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2403 | KS         |             |   | 2   | Prekursor Farmasi   |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2404 | KS         |             |   | 3   | Sediaan Farmasi Khusus  |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2405 | KS         |             |   | 4   | Persetujuan Impor dan Ekspor                                  |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                  |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|------------------|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                  |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                  |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2406 | KS         |             |   | 5                | Pelaksanaan Perizinan Import dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor farmasi |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2407 | KS         |             | 4   |                  | Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2408 | KS         |             |   | 1                | Indonesian Pharmaceutical Industry Directory  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2409 | KS         | 12          | SURAT KETERANGAN, SERTIFIKASI DAN PERIJINAN |                  |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2410 | KS         |             | 1   | Surat Keterangan |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2411 | KS         |             |   | 1                | Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS)   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2412 | KS         |             |   | 2                | Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS)   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2413 | KS         |             |   | 3                | Surat Keterangan Alat Kesehatan   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2414 | KS         |             |   | 4                | Sertifikasi Produksi PKRT   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2415 | KS         |             |   | 5                | Surat Keterangan PKRT   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2416 | KS         |             |   | 6                | Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2417 | KS         |             |   | 7                | Sertifikasi Sarana Distribusi Alat Kesehatan  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2418 | KS         |             |   | 8                | Perijinan Dan Pengawasan Alat Kesehatan   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2419 | KS         |             |   | 9                | Perijinan Penyalur Alat Kesehatan   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2420 | KS         |             |   | 10               | Surat Keterangan Alat Kesehatan   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                                    |                                     | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |            |                |                       |
|------|------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|
|      |            |             |                                    |                                     | SR  | R | T | B |           |                    |               |            |                |                       |
| 1    | 2          | 3           |                                    |                                     | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |            |                |                       |
| 2421 | KS         |             |                                    | 11                                  | Sertifikasi Produksi PKRT   |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2422 | KS         |             |                                    | 12                                  | Surat Keterangan PKRT   |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2423 | KS         | 13          | PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN    |                                     |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 2424 | KS         |             | 1                                  | Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 2425 | KS         |             |                                    | 1                                   | Pencegahan dan Mitigasi   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2426 | KS         |             |                                    | 2                                   | Kesiapsiagaan   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2427 | KS         |             | 2                                  | Tanggap Darurat dan Pemulihan       |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 2428 | KS         |             |                                    | 1                                   | Tanggap Darurat   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2429 | KS         |             |                                    | 2                                   | Pemulihan   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2430 | KS         |             | 3                                  | Pemantauan dan Informasi            |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 2431 | KS         |             |                                    | 1                                   | Pemantauan  |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2432 | KS         |             |                                    | 2                                   | Informasi   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2433 | KS         |             |                                    | 4                                   | Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                |                       |
| 2434 | KS         |             |                                    | 5                                   | Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana                                    |   |   |   |           |                    | √             | Staff      |                |                       |
| 2435 | KS         | 14          | PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN |                                     |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 2436 | KS         |             | 1                                  | Tersedianya data NHA Setiap Tahun   |   |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |



| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                        |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN  |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|------------------------|--|--|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |                        |  | SR   | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |                        |  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 2437 | KS            |             | 2                      | Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN           |  |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2438 | KS            | 15          | INTELIGENSIA KESEHATAN |  |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 2439 | KS            |             | 1                      | Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelligensia Kesehatan |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 2440 | KS            |             |                        | 1  | Intelligensia Anak   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2441 | KS            |             |                        | 2  | Intelligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia                    |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2442 | KS            |             | 2                      | Penanggulangan Masalah Intelligensia Kesehatan                 |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 2443 | KS            |             |                        | 1  | Intelligensia Akibat Gangguan Bawaan                             |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2444 | KS            |             |                        | 2  | Intelligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2445 | KS            | 16          | KESEHATAN HAJI         |  |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 2446 | KS            |             | 1                      | Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji         |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 2447 | KS            |             |                        | 1  | Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji                                |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2448 | KS            |             |                        | 2  | Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2449 | KS            |             |                        | 3  | Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debarkasi atau KKP        |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2450 | KS            |             |                        | 4  | Pelayanan Kesehatan Embarkasi                                    |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2451 | KS            |             |                        | 5  | Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)               |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                   |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|-------------------|---|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |                   |   |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |                   |   |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2452 | KS         |             |                   | 6   | Rekrutmen Tenaga Musiman                                   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2453 | KS         |             | 2                 | Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2454 | KS         |             |                   | 1   | Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji            |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2455 | KS         |             |                   | 2   | Kesehatan Haji di Kab/kota                                 |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2456 | KS         |             |                   | 3   | Kesehatan Haji Terpadu                                     |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2457 | KS         |             |                   | 4   | Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji                 |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2458 | KS         |             |                   | 5   | Vaksinasi jamaah Haji                                      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2459 | KS         |             |                   | 6   | Sanitasi Asrama Haji                                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2460 | KS         |             |                   | 7   | Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2461 | KS         | 17          | PROMOSI KESEHATAN |   |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2462 | KS         |             | 1                 | Sarana Promosi Kesehatan  |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2463 | KS         |             |                   | 1   | Booklet  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2464 | KS         |             |                   | 2   | Poster   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2465 | KS         |             |                   | 3   | Leaflet  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2466 | KS         |             |                   | 4   | Pamflet  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|---|--|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |   |  | SR                   | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
| 2467 | KS         |             |   | 5   | Lembar Balik   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2468 | KS         |             |   | 6   | Selebaran  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2469 | KS         |             |   | 7   | Buletin  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2470 | KS         |             |   | 8   | Festival   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2471 | KS         |             |   | 9   | Lomba  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2472 | KS         |             |   | 10  | Pameran  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2473 | KS         |             |   | 11  | Seminar  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2474 | KS         |             |   | 12  | Iklan Layanan Masyarakat                                     |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2475 | KS         |             |   | 13  | Film   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2476 | KS         |             |   | 14  | Radio Spot   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2477 | KS         |             | 2 | Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran |  |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 2478 | KS         |             |   | 1   | Saka Bhakti Husada   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2479 | KS         |             |   | 2   | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga                      |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2480 | KS         |             |   | 3   | Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2481 | KS         |             |   | 4   | Kawasan Tanpa Rokok  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2482 | KS         |             |   | 5   | Kerjasama dengan Swasta dibidang                             |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                             |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|-----------------------------|---|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |                             |   |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |                             |   |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
|      |            |             |                             |   | Kesehatan  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2483 | KS         |             |                             | 6   | Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan                   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2484 | KS         |             |                             | 7   | Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan                |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2485 | KS         |             |                             | 8   | Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung Kesehatan Ibu dan Anak |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2486 | KS         |             | 3                           | Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan                |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2487 | KS         |             |                             | 1   | Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan                                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2488 | KS         |             |                             | 2   | Kampanye Promosi Kesehatan   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2489 | KS         |             |                             | 3   | Video Animasi Promosi Kesehatan  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2490 | KS         |             | 4                           | Hari Kesehatan                                      |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2491 | KS         |             |                             | 1   | Hari Kesehatan Nasional  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2492 | KS         |             |                             | 2   | Hari Kesehatan Dunia   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2493 | KS         |             |                             | 3   | Hari tanpa Tembakau se-Dunia   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2494 | KS         |             |                             | 4   | Hari-hari Besar Kesehatan  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2495 | KS         | 18          | KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA |   |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2496 | KS         |             | 1                           | Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi |  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2497 | KS         | 19          | DATA DAN INFORMASI          |   |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP                   |                             |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |                       |
|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |                               |                             |  | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |                       |
| 1    | 2             | 3                             |                             |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |                       |
| 2498 | KS            |                               | 1                           | Statistik Kesehatan  |                         |   |   |   |              |                       |                       |                       |
| 2499 | KS            |                               | 1                           | Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan                        |                         |   |   |   | √            | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2500 | KS            |                               | 2                           | Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan               |                         |   |   |   | √            | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2501 | KS            |                               | 2                           | Analisis dan Diseminasi Informasi                            |                         |   |   |   |              |                       |                       |                       |
| 2502 | KS            |                               | 1                           | Analisis Data Kesehatan                                      |                         |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2503 | KS            |                               | 2                           | Diseminasi Informasi Kesehatan                               |                         |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2504 | KS            |                               | 3                           | Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan        |                         |   |   |   |              |                       |                       |                       |
| 2505 | KS            |                               | 1                           | Pengembangan Sistem Informasi                                |                         |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2506 | KS            |                               | 2                           | Bank Data  |                         |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2507 | PM            | <b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b> |                             |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |                       |
| 2508 | PM            | 1                             | PERENCANAAN PENANAMAN MODAL |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |                       |
| 2509 | PM            |                               | 1                           | Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya |                         |   |   |   |              |                       |                       |                       |
| 2510 | PM            |                               | 1                           | Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan                     |                         |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2511 | PM            |                               | 2                           | Kelautan, Perikanan dan Peternakan                           |                         |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2512 | PM            |                               | 3                           | Energi Terbarukan  |                         |   |   |   | √            | Tk. Eselon            |                       | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                 |                                   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                                 |                                   | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                                 |                                   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 2513 | PM            |             |   | 4                               | Energi Tak Terbarukan             |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2514 | PM            |             |   | 5                               | Sumber Daya Mineral Logam         |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2515 | PM            |             |   | 6                               | Sumber Daya Mineral Non Logam     |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2516 | PM            |             | 2 | Perencanaan Industri Manufaktur |                                   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 2517 | PM            |             |   | 1                               | Industri Logam dan Mesin          |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2518 | PM            |             |   | 2                               | Industri Tekstil dan Aneka        |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2519 | PM            |             |   | 3                               | Industri Kimia Dasar              |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2520 | PM            |             |   | 4                               | Industri Barang Kimia dan Farmasi |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2521 | PM            |             |   | 5                               | Industri Alat Transportasi        |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2522 | PM            |             |   | 6                               | Industri Telematika               |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2523 | PM            |             | 3 | Perencanaan Jasa dan Kawasan    |                                   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 2524 | PM            |             |   | 1                               | Jasa Perdagangan                  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2525 | PM            |             |   | 2                               | Jasa Pariwisata                   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2526 | PM            |             |   | 3                               | Kawasan Ekonomi                   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2527 | PM            |             |   | 4                               | Kawasan Ekonomi Khusus            |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2528 | PM            |             |   | 5                               | Kawasan Ekonomi Lainnya           |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                                    |                            |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |                                    |                            |  | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |                                    |                            |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 2529 | PM            |             | 4                                  |                            | Perencanaan Infrastruktur  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 2530 | PM            |             |                                    | 1                          | Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkertaapian                 |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2531 | PM            |             |                                    | 2                          | Infrastruktur Jalan dan Jembatan                                   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2532 | PM            |             |                                    | 3                          | Infrastruktur Energi   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2533 | PM            |             |                                    | 4                          | Infrastruktur Sumber Daya Air                                      |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2534 | PM            |             |                                    | 5                          | Infrastruktur Transportasi Laut                                    |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2535 | PM            |             |                                    | 6                          | Infrastruktur Transportasi Udara dan Infrastruktur Lainnya         |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2536 | PM            | 2           | PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL |                            |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 2537 | PM            |             | 1                                  | Deregulasi Penanaman Modal |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 2538 | PM            |             |                                    | 1                          | Sektor Primer Pertanian, Kelautan dan Perikanan                    |                         | √ |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2539 | PM            |             |                                    | 2                          | Sektor Primer Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan            |                         | √ |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2540 | PM            |             |                                    | 3                          | Sektor Sekunder Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika |                         | √ |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2541 | PM            |             |                                    | 4                          | Sektor Sekunder Industri Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka            |                         | √ |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2542 | PM            |             |                                    | 5                          | Sektor Tersier Pariwisata, Perdagangan dan Telekomunikasi          |                         | √ |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2543 | PM            |             |                                    | 6                          | Sektor Tersier Perhubungan, Pekerjaan Umum dan Jasa Lainnya        |                         | √ |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                         | KLASIFIKASI KEAMANAN                |  |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |                |                       |
|------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-----------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------|
|      |            |             |                         | SR                                  | R  | T | B |           |                    |               |                |                       |
| 1    | 2          | 3           |                         | 4                                   | 5  | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |                |                       |
| 2544 | PM         |             | 2                       | Pengembangan Peluang Potensi Daerah |  |   |   |           |                    |               |                |                       |
| 2545 | PM         |             |                         | 1                                   | Sektor Primer  |   |   | √         |                    | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2546 | PM         |             |                         | 2                                   | Sektor Tersier   |   |   | √         |                    | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2547 | PM         |             |                         | 3                                   | Sektor Sekunder Industri Logam, Mesin, Transportasi dan Telematika |   | √ |           |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan |
| 2548 | PM         |             |                         | 4                                   | Sektor Sekunder Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka                     |   | √ |           |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan |
| 2549 | PM         |             | 3                       | Pemberdayaan Usaha                  |  |   |   |           |                    |               |                |                       |
| 2550 | PM         |             |                         | 1                                   | Pembinaan  |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan |
| 2551 | PM         |             |                         | 2                                   | Penyuluhan   |   |   |           | √                  |               |                |                       |
| 2552 | PM         |             |                         | 3                                   | Sektor Primer dan Tersier  |   |   |           | √                  |               |                |                       |
| 2553 | PM         |             |                         | 4                                   | Sektor Sekunder  |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan |
| 2554 | PM         |             |                         | 5                                   | Pelayanan Usaha Sektor Primer dan Tersier                          |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2555 | PM         |             |                         | 6                                   | Pelayanan Usaha Sektor Sekunder                                    |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2556 | PM         |             |                         | 7                                   | Workshop dan Sosialisasi   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko |                       |
| 2557 | PM         | 3           | PROMOSI PENANAMAN MODAL |                                     |  |   |   |           |                    |               |                |                       |
| 2558 | PM         |             | 1                       | Pengembangan Promosi                |  |   |   |           |                    |               |                |                       |
| 2559 | PM         |             |                         | 1                                   | Analisis Target Strategi Promosi                                   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|---|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |   |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2560 | PM         |             |   | 2   | Analisis Strategi Daya Saing Promosi                                     |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2561 | PM         |             |   | 3   | Fasilitaslayah Promosi Wilayah Pasifik dan Afrika                        |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2562 | PM         |             |   | 4   | Fasilitasi Fromosi Wilayah Jawa Barat                                    |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2563 | PM         |             | 2 | Promosi Sektoral                                      |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2564 | PM         |             |   | 1   | Promosi Industri Sumber Daya Alam  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2565 | PM         |             |   | 2   | Industri Logam, Barang Logam, Mesin dan Elektronik                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2566 | PM         |             |   | 3   | Industri Manufaktur Lainnya  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2567 | PM         |             |   | 5   | Promosi Infrastruktur Transportasi, Jalan, dan Jembatan                  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2568 | PM         |             |   | 6   | Promosi Infrastruktur Energi, Sumber Daya Air, dan Infrastruktur Lainnya |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2569 | PM         |             | 3 | Fasilitasi Promosi Wilayah Jawa Barat, DKI dan Banten |  |                      |   |   | √ | Staff      |                    |                       |
| 2570 | PM         |             | 4 | Pameran dan Sarana Promosi                            |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2571 | PM         |             |   | 1   | Pameran Dalam Penyusunan Program dan Monitoring                          |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2572 | PM         |             |   | 2   | Pameran Dalam Penyelenggaraan dan Evaluasi                               |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2573 | PM         |             |   | 3   | Media Cetak  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2574 | PM         |             |   | 4   | Materi Promosi Media Cetak   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                            |                                       |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |                            |                                       |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |                            |                                       |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2575 | PM         |             |                            | 5                                     | Publikasi dan Distribusi Media cetak                  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2576 | PM         |             |                            | 6                                     | Pameran Luar Negeri Publikasi dan Distribusi          |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2577 | PM         |             |                            | 7                                     | Materi Promosi Media Elektronik                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2578 | PM         |             |                            | 8                                     | Pelayanan Informasi Media Elektronik                  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2579 | PM         | 4           | KERJA SAMA PENANAMAN MODAL |                                       |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2580 | PM         |             | 1                          | Kerja Sama Bilateral dan Multilateral |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2581 | PM         |             |                            | 1                                     | Kerja Wilayah Amerika                                 |                      |   | √ |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2582 | PM         |             |                            | 2                                     | Kerja Sama Wilayah Eropa                              |                      |   | √ |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2583 | PM         |             |                            | 3                                     | Kerja Sama Wilayah Asia                               |                      |   | √ |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2584 | PM         |             |                            | 4                                     | Kerja Sama Wilayah Pasifik dan Afrika                 |                      |   | √ |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2585 | PM         |             |                            | 5                                     | Kerja Sama Organisasi PBB                             |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2586 | PM         |             |                            | 6                                     | Kerja Sama Organisasi Non PBB                         |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2587 | PM         |             | 2                          | Kerja Sama Regional ASEAN             |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2588 | PM         |             |                            | 1                                     | Kerja Sama ASEAN                                      |                      |   | √ |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2589 | PM         |             |                            | 2                                     | Kerja Sama Sub Regional ASEAN                         |                      |   | √ |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2590 | PM         |             |                            | 3                                     | Kerja Sama Sub Regional ASEAN Wilayah Barat Indonesia |                      |   |   |   |            | Tidak beresiko     |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                           |                                      |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |                           |                                      |   | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |                           |                                      |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 2591 | PM            |             |                           | 4                                    | Kerja Sama Sub Regional ASEAN Wilayah Timur Indonesia |                         |   | √ |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2592 | PM            |             |                           | 5                                    | Kerja Sama APEC                                       |                         |   | √ |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2593 | PM            |             |                           | 6                                    | Kerja Sama ASEM dan Kawasan Lainnya                   |                         |   | √ |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2594 | PM            |             |                           | 7                                    | Kerja Sama ASEM dan Kawasan Lainnya                   |                         |   | √ |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2595 | PM            |             | 3                         | Kerja Sama Dunia Usaha Internasional |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 2596 | PM            |             |                           | 1                                    | Asosiasi Bisnis                                       |                         |   | √ |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2597 | PM            |             |                           | 2                                    | Lembaga Bisnis  |                         |   | √ |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2598 | PM            |             |                           | 3                                    | Lembaga Perbankan                                     |                         |   | √ |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2599 | PM            |             |                           | 4                                    | Lembaga Non Perbankan                                 |                         |   | √ |   | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2600 | PM            | 5           | PELAYANAN PENANAMAN MODAL |                                      |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 2601 | PM            |             | 1                         | Pelayanan Aplikasi                   |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 2602 | PM            |             |                           | 1                                    | Aplikasi Baru Sektor Primer dan Tersier               |                         |   | √ |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2603 | PM            |             |                           | 2                                    | Aplikasi Perluasan Sektor Primer dan Tersier          |                         |   | √ |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2604 | PM            |             |                           | 3                                    | Aplikasi Perubahan Sektor Primer dan Tersier          |                         |   | √ |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2605 | PM            |             |                           | 4                                    | Aplikasi Baru Sektor Sekunder                         |                         |   | √ |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2606 | PM            |             |                           | 5                                    | Aplikasi Perluasan Sektor Sekunder                    |                         |   | √ |   | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                     |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|---------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                     |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                     |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2607 | PM         |             |   | 6                   | Aplikasi Perubahan Sektor Sekunder   |                      |   | √ |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2608 | PM         |             |   | 7                   | Aplikasi Sektor Tersier  |                      |   | √ |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2609 | PM         |             |   | 8                   | Pengolahan Data Penanaman Modal  |                      |   | √ |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2610 | PM         |             |   | 9                   | Laporan PMPTSP   |                      |   | √ |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2611 | PM         |             | 2 | Pelayanan Perizinan |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2612 | PM         |             |   | 1                   | Perizinan Sektor Primer dan TersierPertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2613 | PM         |             |   | 2                   | Perizinan Sektor Primer dan Tersier Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi       |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2614 | PM         |             |   | 3                   | Perizinan Sektor Primer dan TersierPertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa        |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2615 | PM         |             |   | 4                   | Perizinan Sektor Sekunder Industri Mesin, Logam dan Barang Logam                               |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2616 | PM         |             |   | 5                   | Perizinan Sektor Sekunder Industri Kimia dan Barang Kimia                                      |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2617 | PM         |             |   | 6                   | Perizinan Sektor Sekunder Industri Aneka   |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2618 | PM         |             |   | 7                   | Verifikasi/Validasi  |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2619 | PM         |             |   | 8                   | Pertimbangan Teknis  |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |  |                                | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                       |
|------|------------|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|
|      |            |             |  |                                | SR  | R | T | B |           |                    |                |                       |
| 1    | 2          | 3           |  |                                | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |                       |
| 2620 | PM         |             |  | 9                              | Tim Teknis  |   |   | √ |           | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2621 | PM         |             |  | 10                             | Penerbitan Naskah Izin  |   |   | √ |           | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2622 | PM         |             |  | 11                             | BKPRD   |   |   | √ |           | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2623 | PM         |             | 3  | Pelayanan Fasilitas            |   |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 2624 | PM         |             |  | 1                              | Pelayanan Sektor Primer dan Tersier Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Prasarana |   |   | √ |           | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2625 | PM         |             |  | 2                              | Pelayanan Sektor Primer dan Tersier Kehutanan, Perikanan, Perhubungan dan Telekomunikasi        |   |   | √ |           | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2626 | PM         |             |  | 3                              | Pelayanan Sektor Sektor Primer dan Tersier Pertambangan dan Energi, Pertambangan dan Aneka Jasa |   |   | √ |           | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2627 | PM         |             |  | 4                              | Perizinan Sektor Sekunder Industri Mesin, Logam dan Barang Logam                                |   |   | √ |           | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan |
| 2628 | PM         |             |  | 5                              | Perizinan Sektor Sekunder Industri Kimia dan Barang Kimia                                       |   |   | √ |           | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan |
| 2629 | PM         |             |  | 6                              | Perizinan Sektor Sekunder Industri Aneka  |   |   | √ |           | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan |
| 2630 | PM         | 6           | PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL |                                |   |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 2631 | PM         |             | 1  | BAP Pemantauan Penanaman Modal |   |   |   |   | √         |                    | Tk. Eselon     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 2632 | PM            | 2           | Laporan Triwulan/Semester<br>Pemantauan Penanaman Modal       |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2633 | PM            | 3           | Helpdesk Pemantauan Penanaman Modal                           |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2634 | PM            | 4           | Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman<br>Modal dan PTSP   |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2635 | PM            | 5           | Saksi Fasilitas Penyelesaian PMPTSP                           |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2636 | PM            | 6           | Pembelaan Fasilitas Penyelesaian PMPTSP                       |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       |                       |
| 2637 | PM            | 7           | Pemberi Keterangan FSP  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2638 | PM            | 8           | Analisis PMPTSP   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2639 | PM            | 9           | Pengawasan Penanaman Modal 5 Tahun Musnah                     |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2640 | PM            | 10          | Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman<br>Modal            |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2641 | PM            | 11          | Naskah dan Dokumen Izin                                       |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2642 | PM            | 12          | Naskah dan Dokumen Izin Kadaluarsa                            |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2643 | PM            | 13          | Izin Investasi Strategis Penanaman Modal                      |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2644 | PM            | 14          | Perizinan lainnya sesuai jenisnya                             |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2645 | PM            | 15          | Pencabutan /Pembatalan/Perbaikan Perizinan<br>Penanaman Modal |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2646 | PM            | 16          | Administrasi PMPTSP   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP                              |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |                       |
|------|------------|--|---|---|--|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |            |  |   |   | SR   | R | T | B |            |                    |                       |                       |
| 1    | 2          | 3  |   |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |                       |
| 2647 | PM         |  | 17  | Kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal |  |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2648 | PM         |  | 18  | Workshop/Bintek/Diklat PMPTSP   |  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2649 | KOM        | <b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |   |   |  |   |   |   |            |                    |                       |                       |
| 2650 | KOM        | 1  | SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA |   |  |   |   |   |            |                    |                       |                       |
| 2651 | KOM        |  | 1   | PENATAAN SUMBER DAYA  |  |   |   |   |            |                    |                       |                       |
| 2652 | KOM        |  |   | 1   | Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap,                               |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2653 | KOM        |  |   | 2   | Penataan Alokasi Spektrum Dinas Bergerak Darat,                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2654 | KOM        |  |   | 3   | Alokasi Dinas Bergerak Darat   |   |   |   | √          |                    |                       |                       |
| 2655 | KOM        |  |   | 4   | Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Penyiaran                        |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2656 | KOM        |  |   | 5   | Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2657 | KOM        |  |   | 6   | Pengelolaan Orbit Satelit Notifikasi dan Penataan Filing Satelit     |   |   |   | √          | Staff              | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2658 | KOM        |  |   | 7   | Pengelolaan Orbit Satelit Tata Kelola Hubungan Antarpenyelenggara    |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2659 | KOM        |  |   | 8   | Ekonomi Sumber Daya Analisa Industri dan Ekonomi                     |   |   |   | √          | Staff              | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2660 | KOM        |  |   | 9   | Ekonomi Sumber Dya Penanganan Izin Pita                              |   |   |   | √          | Staff              | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2661 | KOM        |  |   | 10  | Harmonisasi Teknik Spektrum Teknik Spektrum Antar lembaga            |   |   |   | √          | Staff              | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |  |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|--|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |  |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |  |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2662 | KOM        |             |   | 11   | Harmonisasi Teknik Spektrum Harmonisasi dan Notifikasi                               |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2663 | KOM        |             | 2 | OPERASI SUMBER DAYA  |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2664 | KOM        |             |   | 1  | Pelayanan Alokasi Spektrum Dinas Tetap   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2665 | KOM        |             |   | 2  | Pelayanan Alokasi Spektrum Dinas Bergerak Darat                                      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2666 | KOM        |             |   | 3  | Pelayanan Alokasi Spektrum Non Dinas Penyiaran                                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2667 | KOM        |             |   | 4  | PelayananAlokasi Spektrum Non Dinas Penerbangan, Maritim, dan Satelit                |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2668 | KOM        |             |   | 5  | Sertifikasi Operator Radio Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antarpenduduk |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2669 | KOM        |             |   | 6  | Sertifikasi Operator Radio Pelayanan Operator Radio                                  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2670 | KOM        |             |   | 7  | Penanganan Biaya Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio                        |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2671 | KOM        |             |   | 8  | Penanganan Biaya Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio           |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2672 | KOM        |             |   | 9  | Konsultasi Dan Informasi Data Operasi Sumber Daya                                    |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2673 | KOM        |             |   | 10   | Konsultasi Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya                                      |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2674 | KOM        |             | 3 | PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |            |  |                       |
|------|------------|-------------|---|---|--|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|------------|--|-----------------------|
|      |            |             |   |   | SR   | R | T | B |           |                    |               |            |  |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |            |  |                       |
| 2675 | KOM        |             |   | 1   | Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum Rancang Bangun Teknologi Monitoring Spektrum                |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |
| 2676 | KOM        |             |   | 2   | Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum Pemeliharaan Sistem Informasi Monitoring Spektrum           |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |
| 2677 | KOM        |             |   | 3   | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Spektrum |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |
| 2678 | KOM        |             |   | 4   | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum   |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |
| 2679 | KOM        |             |   | 5   | Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Bergerak Terrestrial                   |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |
| 2680 | KOM        |             |   | 6   | Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap dan Bergerak Terrestrial               |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |
| 2681 | KOM        |             |   | 7   | Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika   |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |
| 2682 | KOM        |             |   | 8   | Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika   |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |
| 2683 | KOM        |             |   | 9   | Monitoring Frekuensi Radio   |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |
| 2684 | KOM        |             | 4 | STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA |  |   |   |   |           |                    |               |            |  |                       |
| 2685 | KOM        |             |   | 1   | Teknik Pos Dan Telekomunikasi  |   |   |   | √         |                    |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |
| 2686 | KOM        |             |   | 2   | Teknik Komunikasi Radio  |   |   |   | √         |                    |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                                     |     |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|-------------------------------------|-----|--|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |                                     |     |  | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |                                     |     |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 2687 | KOM           |             |                                     | 3   | Penerapan Standar Pos Dan Telekomunikasi         |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2688 | KOM           |             |                                     | 4   | Kualitas Pelayanan Dan Harmonisasi Standar       |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2689 | KOM           |             |                                     | 5   | Standar Dan Audit Perangkat Lunak                |                         | √ |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2690 | KOM           |             |                                     | 6   | Pengujian Perangkat Telekomunikasi               |                         |   |   | √ |              |                       |                       |
| 2691 | KOM           | 2           | PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA |     |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 2692 | KOM           |             | 1                                   | POS |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 2693 | KOM           |             |                                     | 1   | Layanan Pos Universal                            |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2694 | KOM           |             |                                     | 2   | Penerapan Layanan Pos Universal                  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2695 | KOM           |             |                                     | 3   | Layanan Pos Komersial Tata Kelola Layanan        |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2696 | KOM           |             |                                     | 4   | Layanan Pos Komersial Data dan Informasi Layanan |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2697 | KOM           |             |                                     | 5   | Prangko  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2698 | KOM           |             |                                     | 6   | Filateli   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2699 | KOM           |             |                                     | 7   | Iklm Usaha Pos Universal                         |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2700 | KOM           |             |                                     | 8   | Iklm Usaha Pos Komersial                         |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2701 | KOM           |             |                                     | 9   | Pentarifan Pos Layanan Pos Universal             |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN   |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|----------------|---|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                | SR  | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                | 4   | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 2702 | KOM           |             |   | 10             | Pentarifan Pos Komersial  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2703 | KOM           |             | 2 | TELEKOMUNIKASI |   |   |   |   |              |                       |                       |
| 2704 | KOM           |             |   | 1              | Layanan Jaringan Telekomunikasi Akses   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2705 | KOM           |             |   | 2              | Layanan Jaringan Telekomunikasi Backbone  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2706 | KOM           |             |   | 3              | Layanan Jasa Telekomunikasi Teleponi Dasar, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2707 | KOM           |             |   | 5              | Penomoran Telekomunikasi  |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2708 | KOM           |             |   | 6              | Penomoran Informatika   |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2709 | KOM           |             |   | 7              | Tarif Telekomunikasi  |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2710 | KOM           |             |   | 8              | Interkoneksi Telekomunikasi   |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2711 | KOM           |             |   | 9              | Kelayakan Sistem Telekomunikasi Jaringan dan Jasa                                       |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2712 | KOM           |             |   | 10             | Kelayakan Penerapan Sistem Teknologi Telekomunikasi                                     |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2713 | KOM           |             | 3 | PENYIARAN      |   |   |   |   |              |                       |                       |
| 2714 | KOM           |             |   | 1              | Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2715 | KOM           |             |   | 2              | Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi   |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2716 | KOM           |             |   | 3              | Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                       |
|------|------------|-------------|---|---|--|---|---|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|
|      |            |             |   |   | SR   | R | T | B |           |                    |                |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |                       |
| 2717 | KOM        |             |   | 4   | Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi  |   |   | √ |           | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2718 | KOM        |             |   | 5   | Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Asing Radio                                    |   |   | √ |           | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2719 | KOM        |             |   | 6   | Lembaga Penyiaran Swasta Radio   |   |   | √ |           | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan |
| 2720 | KOM        |             |   | 7   | Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Televisi       |   |   | √ |           | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan |
| 2721 | KOM        |             |   | 8   | Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi |   |   | √ |           | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan |
| 2722 | KOM        |             |   | 9   | Lembaga Penyiaran Swasta Televisi  |   |   | √ |           | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan |
| 2723 | KOM        |             |   | 10  | Iklm Usaha Penyiaran Penyusunan dan Evaluasi Regulasi Penyiaran                                  |   |   |   | √         | Staff              |                | Unit pelaksana urusan |
| 2724 | KOM        |             |   | 11  | Iklm Usaha Penyiaran Penerapan Kewajiban Lembaga Penyiaran                                       |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2725 | KOM        |             | 4 | TELEKOMUNIKASI KHUSUS PENYIARAN PUBLIK DAN KEWAIBAN UNIVERSAL |  |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 2726 | KOM        |             |   | 1   | Analisa Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Pemerintah   |   |   | √ |           | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan |
| 2727 | KOM        |             |   | 2   | Pelayanan Telekomunikasi Khusus Pemerintah   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2728 | KOM        |             |   | 3   | Analisa Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah                                     |   |   | √ |           | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan |
| 2729 | KOM        |             |   | 4   | Pelayanan Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2730 | KOM        |             |   | 5   | Layanan Khusus Penyiaran Publik Radio  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                  |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|----------------------------------|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                                  |   | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                                  |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 2731 | KOM           |             |   | 6                                | Layanan Khusus Penyiaran Publik Televisi              |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2732 | KOM           |             |   | 7                                | Perencanaan Pembangunan Pelayanan Kewajiban Universal |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2733 | KOM           |             |   | 8                                | Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kewajiban Universal |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2734 | KOM           |             |   | 9                                | Perencanaan Pengembangan Infrastruktur                |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2735 | KOM           |             |   | 10                               | Analisa Ekonomis Pengembangan Infrastruktur           |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2736 | KOM           |             | 5 | PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 2737 | KOM           |             |   | 1                                | Monitoring Pos  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2738 | KOM           |             |   | 2                                | Evaluasi Pos  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2739 | KOM           |             |   | 3                                | Analisa Ekonomis Infrastruktur                        |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2740 | KOM           |             |   | 4                                | Monitoring Jasa Telekomunikasi                        |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2741 | KOM           |             |   | 5                                | Evaluasi Jasa telekomunikasi                          |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2742 | KOM           |             |   | 6                                | Monitoring Penyiaran                                  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2743 | KOM           |             |   | 7                                | Evaluasi Penyiaran                                    |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2744 | KOM           |             |   | 8                                | Pencegahan  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2745 | KOM           |             |   | 9                                | Penertiban  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                      |              | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |                       |                |                       |
|------|---------------|-------------|----------------------|--------------|--|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|      |               |             |                      |              | SR                                     | R | T | B |              |                       |               |                       |                |                       |
| 1    | 2             | 3           |                      |              | 4                                      | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10            |                       |                |                       |
| 2746 | KOM           | 3           | APLIKASI INFORMATIKA |              |  |   |   |   |              |                       |               |                       |                |                       |
| 2747 | KOM           |             | 1                    | E-GOVERNMENT |  |   |   |   |              |                       |               |                       |                |                       |
| 2748 | KOM           |             |                      | 1            | Tata Kelola Program e-Government       |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                |                       |
| 2749 | KOM           |             |                      | 2            | Tata Kelola Evaluasi e-Government      |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                |                       |
| 2750 | KOM           |             |                      | 3            | Teknologi e-Government                 |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                |                       |
| 2751 | KOM           |             |                      | 4            | Infrastruktur e-Government             |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                |                       |
| 2752 | KOM           |             |                      | 5            | Interoperabilitas e-Government         |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                |                       |
| 2753 | KOM           |             |                      | 6            | Interkonektivitas e-Governmen          |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                |                       |
| 2754 | KOM           |             |                      | 7            | Aplikasi Layanan Kepemerintahan Pusat  |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                |                       |
| 2755 | KOM           |             |                      | 8            | Aplikasi Layanan Kepemerintahan Daerah |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                |                       |
| 2756 | KOM           |             |                      | 9            | Inisiasi Aplikasi Layanan Publik       |   |   |   |              |                       | √             | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2757 | KOM           |             |                      | 10           | Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik     |   |   |   |              |                       | √             | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2758 | KOM           |             | 2                    | E- BUSINESS  |  |   |   |   |              |                       |               |                       |                |                       |
| 2759 | KOM           |             |                      | 1            | Tata Kelola Program e-Business         |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                |                       |
| 2760 | KOM           |             |                      | 2            | Tata Kelola Evaluasi e-Business        |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                |                       |
| 2761 | KOM           |             |                      | 3            | Teknologi e-Business                   |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                |                       |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                    |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|--------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                    |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                    |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2776 | KOM        |             |   | 1                  | Pemberdayaan Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika     |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2777 | KOM        |             |   | 2                  | Promosi Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika          |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2778 | KOM        |             |   | 3                  | Pemberdayaan Industri Perangkat Informatika Pengguna                     |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2779 | KOM        |             |   | 4                  | Pengembangan Produk Industri Perangkat Informatika Pengguna              |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2780 | KOM        |             |   | 5                  | Pemberdayaan Industri Perangkat Lunak                                    |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2781 | KOM        |             |   | 6                  | Pengembangan Produk Industri Perangkat Lunak                             |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2782 | KOM        |             |   | 7                  | Pemberdayaan Industri Konten Multimedia                                  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2783 | KOM        |             |   | 8                  | Pengembangan Produk Industri Konten Multimedia                           |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2784 | KOM        |             | 5 | KEAMANAN INFORMASI |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2785 | KOM        |             |   | 1                  | Tata Kelola Keamanan Informasi Kelembagaan                               |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2786 | KOM        |             |   | 2                  | Tata Kelola Keamanan Informasi Manajemen Risiko                          |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2787 | KOM        |             |   | 3                  | Teknologi Keamanan Informasi Infrastruktur                               |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2788 | KOM        |             |   | 4                  | Teknologi Keamanan Informasi Aplikasi                                    |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2789 | KOM        |             |   | 5                  | Monitoring, Evaluasi Dan Tanggap Darurat Kemanan Informasi Infrastruktur |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2790 | KOM        |             |   | 6                  | Monitoring, Evaluasi Dan Tanggap Darurat Kemanan Informasi Aplikasi      |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                                 |                                     |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |                                 |                                     |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |                                 |                                     |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2791 | KOM        |             |                                 | 7                                   | Penyidikan Dan Penindakan Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2792 | KOM        |             |                                 | 8                                   | Penyidikan Dan Penindakan Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2793 | KOM        |             |                                 | 9                                   | Penyidikan Budaya Keamanan Informasi                                   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2794 | KOM        |             |                                 | 10                                  | Penindakan Budaya Keamanan Informasi                                   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2795 | KOM        | 4           | INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK |                                     |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2796 | KOM        |             | 1                               | KOMUNIKASI PUBLIK                   |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2797 | KOM        |             |                                 | 1                                   | Tata Kelola Program Komunikasi Publik                                  |                      |   | √ |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2798 | KOM        |             |                                 | 2                                   | Tata Kelola Monitoring dan Evaluasi                                    |                      |   | √ |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2799 | KOM        |             |                                 | 3                                   | Pengelolaan Pengumpulan Opini Publik                                   |                      |   | √ |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2800 | KOM        |             |                                 | 4                                   | Pengelolaan Pengolahan Opini Publik                                    |                      |   | √ |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2801 | KOM        |             |                                 | 5                                   | Pengumpulan Data Layanan Komunikasi Publik                             |                      |   | √ |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2802 | KOM        |             |                                 | 6                                   | Pengolahan Data Layanan Komunikasi Publik                              |                      |   | √ |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2803 | KOM        |             | 2                               | PENGOLAHAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2804 | KOM        |             |                                 | 1                                   | Informasi Politik dan Kemanan  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2805 | KOM        |             |                                 | 2                                   | Informasi Hukum dan Hak Asasi Manusia                                  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                          | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN   |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|--------------------------|---|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                          | SR  | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                          | 4   | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 2806 | KOM           |             |   | 3                        | Informasi Perekonomian Keuangan, Perbankan, dan Jasa                |   | √ |   |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 2807 | KOM           |             |   | 4                        | Informasi Perekonomian Industri dan Perdagangan                     |   | √ |   |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 2808 | KOM           |             |   | 5                        | Informasi Kesejahteraan Agama, Sosial, dan Budaya                   |   | √ |   |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 2809 | KOM           |             |   | 6                        | Informasi Kesejahteraan Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan       |   | √ |   |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 2810 | KOM           |             | 3 | PENGELOLAAN MEDIA PUBLIK |   |   |   |   |              |                       |                       |
| 2811 | KOM           |             |   | 1                        | Media Cetak   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2812 | KOM           |             |   | 2                        | Media Online  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2813 | KOM           |             |   | 3                        | Media Audio Visual dan Luar Ruang                                   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2814 | KOM           |             | 4 | KEMITRAAN KOMUNIKASI     |   |   |   |   |              |                       |                       |
| 2815 | KOM           |             |   | 1                        | Program Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara                     |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2816 | KOM           |             |   | 2                        | Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Pemerintah Dan Lembaga Negara     |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2817 | KOM           |             |   | 3                        | Program Kemitraan Media dan Dunia Usaha                             |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2818 | KOM           |             |   | 4                        | Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Media Dan Dunia Usaha             |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2819 | KOM           |             |   | 5                        | Program Kemitraan Organisasi Masyarakat dan Profesi                 |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2820 | KOM           |             |   | 6                        | Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Organisasi Masyarakat Dan Profesi |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                                   |                                 | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |                |                       |
|------|------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------|
|      |            |             |                                   |                                 | SR  | R | T | B |           |                    |               |                |                       |
| 1    | 2          | 3           |                                   |                                 | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |                |                       |
| 2821 | KOM        |             | 5                                 | LAYANAN INFORMASI INTERNASIONAL |   |   |   |   |           |                    |               |                |                       |
| 2822 | KOM        |             |                                   | 1                               | Program Layanan Informasi Media Asing   |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2823 | KOM        |             |                                   | 2                               | Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Media Asing                               |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2824 | KOM        |             |                                   | 3                               | Program Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional         |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2825 | KOM        |             |                                   | 4                               | Monitoring dan Evaluasi Informasi Perwakilan Negara Asing Dan Lembaga Internasional |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2826 | KOM        |             |                                   | 5                               | Program Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri                                    |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2827 | KOM        |             |                                   | 6                               | Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Masyarakat Luar Negeri                    |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2828 | KOM        | 5           | PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA |                                 |   |   |   |   |           |                    |               |                |                       |
| 2829 | KOM        |             | 1                                 | Infrastruktur Informatika       |   |   |   |   |           |                    |               |                |                       |
| 2830 | KOM        |             |                                   | 1                               | Jaringan Infrastruktur Informatika  |   |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan |
| 2831 | KOM        |             |                                   | 2                               | Piranti Teknologi Infrastruktur Informatika   |   |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan |
| 2832 | KOM        |             |                                   | 3                               | Keamanan Infrastruktur Informatika  |   |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan |
| 2833 | KOM        |             | 2                                 | Sistem dan Data                 |   |   |   |   |           |                    |               |                |                       |
| 2834 | KOM        |             |                                   | 1                               | Sistem Portal dan Konten  |   |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan |
| 2835 | KOM        |             |                                   | 2                               | Sistem Pengumpulan dan Pengolahan Data  |   |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                               | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN  |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |            |  |                       |
|------|---------------|-------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------|------------|--|-----------------------|
|      |               |             |   |                               | SR   | R | T | B |              |                       |               |            |  |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                               | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10            |            |  |                       |
| 2836 | KOM           |             |   | 3                             | Sistem Pengembangan Aplikasi   |   |   |   | √            |                       |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |
| 2837 | KOM           |             | 3 | Pusat Kerjasama Internasional |  |   |   |   |              |                       |               |            |  |                       |
| 2838 | KOM           |             |   | 1                             | Kerjasama Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Multilateral |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |
| 2839 | KOM           |             |   | 2                             | Kerjasama Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Multilateral    |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |
| 2840 | KOM           |             |   | 3                             | Kerjasama Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Multilateral  |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |
| 2841 | KOM           |             |   | 4                             | Kerjasama Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional     |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |
| 2842 | KOM           |             |   | 5                             | Kerjasama Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Regional        |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |
| 2843 | KOM           |             |   | 6                             | Kerjasama Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Regional  |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |
| 2844 | KOM           |             |   | 7                             | Kerjasama Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bilateral    |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |            |                |                       |
|------|------------|-------------|---|---|--|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|
|      |            |             |   |   | SR   | R | T | B |           |                    |               |            |                |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |            |                |                       |
| 2845 | KOM        |             |   | 8                                       | Kerjasama Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Bilateral   |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2846 | KOM        |             | 4 | Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat |  |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 2847 | KOM        |             |   | 1                                       | Pelayanan Informasi Media Baru   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2848 | KOM        |             |   | 2                                       | Pelayanan Informasi Media Konvensional   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2849 | KOM        |             |   | 3                                       | Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Perpustakaan   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2850 | KOM        |             |   | 4                                       | Publikasi Hubungan Masyarakat  |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2851 | KOM        |             |   | 5                                       | Analisis Berita Hubungan masyarakat dan Pengelolaan Opini Publik   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2852 | KOM        |             |   | 6                                       | Hubungan Masyarakat Internal dan Eksternal   |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2853 | KOM        |             |   | 7                                       | Bimbingan Teknis Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos  |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2854 | KOM        |             |   | 8                                       | Bimbingan Teknis Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas  |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2855 | KOM        |             |   | 9                                       | Evaluasi Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik, Data dan Sarana informatika, Informasi dan Humas |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP                          |                           |   | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |                       |                       |
|------|------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|      |            |                                      |                           |   | SR  | R | T | B |           |                    |               |                       |                       |
| 1    | 2          | 3                                    |                           |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |                       |                       |
| 2856 | PDT        | URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL |                           |   |   |   |   |   |           |                    |               |                       |                       |
| 2857 | PDT        | 1                                    | Pengembangan Sumber Daya  |   |   |   |   |   |           |                    |               |                       |                       |
| 2858 | PDT        |                                      | 1                         | Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya                        |   |   |   |   |           |                    |               |                       |                       |
| 2859 | PDT        |                                      |                           | 1   | Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya Pendidikan dan Ketrampilan           |   |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2860 | PDT        |                                      |                           | 2   | Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya Kesehatan                            |   |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2861 | PDT        |                                      |                           | 3   | Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya Hayati                               |   |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2862 | PDT        |                                      |                           | 4   | Fasilitasi Pengembangan Sumberdaya Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup |   |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2863 | PDT        |                                      |                           | 5   | Teknologi dan Inovasi   |   |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2864 | PDT        |                                      | 2                         | Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya |   |   |   |   |           | √                  | Staff         |                       |                       |
| 2865 | PDT        |                                      | 3                         | Pemantauan dan evaluasi                                   |   |   |   |   |           | √                  | Staff         | Tidak beresiko        |                       |
| 2866 | PDT        | 2                                    | Peningkatan Infrastruktur |   |   |   |   |   |           |                    |               |                       |                       |
| 2867 | PDT        |                                      | 1                         | Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur                      |   |   |   |   |           |                    | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2868 | PDT        |                                      |                           | 1   | Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Transportasi                       |   |   |   |           |                    |               | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2869 | PDT        |                                      |                           | 2   | Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Informasi dan Telekomunikasi       |   |   |   |           |                    |               | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2870 | PDT        |                                      |                           | 3   | Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Sosial                             |   |   |   |           |                    |               | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                                     |  | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |                       |                       |
|------|------------|-------------|-------------------------------------|--|---|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |            |             |                                     |  | SR  | R | T | B |           |                    |                       |                       |                       |
| 1    | 2          | 3           |                                     |  | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |                       |                       |
| 2871 | PDT        |             |                                     | 4  | Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Ekonomi                       |   |   |   |           | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |                       |                       |
| 2872 | PDT        |             |                                     | 5  | Fasilitas Peningkatan Infrastruktur Energi                        |   |   |   |           | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |                       |                       |
| 2873 | PDT        |             | 2                                   | Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur         |   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2874 | PDT        |             | 3                                   | Pemantauan dan evaluasi  |   |   |   |   | √         | Tk. Eselon         |                       | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2875 | PDT        | 3           | Pembinaan Ekonomi Dan Dunia Usaha   |  |   |   |   |   |           |                    |                       |                       |                       |
| 2876 | PDT        |             | 1                                   | Fasilitas Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha                        |   |   |   |   |           |                    |                       | Unit pelaksana urusan |                       |
| 2877 | PDT        |             |                                     | 1  | Investasi Fasilitas Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha             |   |   |   |           | √                  | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2878 | PDT        |             |                                     | 2  | Pembinaan Kelembagaan Ekonomi dan Dunia Usaha                     |   |   |   |           | √                  | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2879 | PDT        |             |                                     | 3  | Pembinaan Ekonomi Dan Dunia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah       |   |   |   |           | √                  | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2880 | PDT        |             |                                     | 4  | Kemitraan Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha                       |   |   |   |           | √                  | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2881 | PDT        |             |                                     | 5  | Pembinaan Ekonomi Dan Dunia Usaha Pengembangan Komoditas Unggulan |   |   |   |           | √                  | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2882 | PDT        |             | 2                                   | Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha |   |   |   |   | √         | Staff              |                       | Tidak beresiko        |                       |
| 2883 | PDT        |             | 3                                   | Pemantauan dan evaluasi  |   |   |   |   | √         | Staff              |                       | Tidak beresiko        |                       |
| 2884 | PDT        | 4           | Pembinaan Lembaga Sosial Dan Budaya |  |   |   |   |   |           |                    |                       |                       |                       |
| 2885 | PDT        |             | 1                                   | Fasilitas Pembinaan  |   |   |   |   |           | Staff              | Tidak beresiko        |                       |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                            |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN  |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|----------------------------|--|--|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |                            |  | SR   | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |                            |  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 2886 | PDT           |             |                            | 1  | Fasilitasi Pembinaan Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal                   |   |   |   |              | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2887 | PDT           |             |                            | 2  | Fasilitasi Pembinaan Penguatan Organisasi Masyarakat                     |   |   |   |              | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2888 | PDT           |             |                            | 3  | Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat                             |   |   |   |              | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2889 | PDT           |             |                            | 4  | Fasilitasi Pembinaan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya           |   |   |   |              | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2890 | PDT           |             |                            | 5  | Fasilitasi Pembinaan Ketenagakerjaan                                     |   |   |   |              | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2891 | PDT           |             | 2                          | Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya |  |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        |
| 2892 | PDT           |             | 3                          | Pemantauan dan evaluasi  |  |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        |
| 2893 | PDT           | 5           | Pengembangan Daerah Khusus |  |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 2894 | PDT           |             | 1                          | Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus                                |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 2895 | PDT           |             |                            | 1  | Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus Perbatasan                         |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 2896 | PDT           |             |                            | 2  | Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus Daerah Rawan Konflik dan Bencana   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 2897 | PDT           |             |                            | 3  | Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus Perdesaan                          |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 2898 | PDT           |             |                            | 4  | Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus Daerah Pulau Terpencil dan Terluar |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 2899 | PDT           |             |                            | 5  | Fasilitasi Pengembangan Daerah Khusus Wilayah Strategis                  |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 2900 | PDT           |             | 2                          | Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus          |  |   |   |   | √            |                       |                       |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP                                 |                          |                                | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |            |                       |
|------|------------|---|--------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|
|      |            |   |                          |                                | SR  | R | T | B |           |                    |               |            |                       |
| 1    | 2          | 3   |                          |                                | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |            |                       |
| 2901 | PDT        |   | 3                        | Pemantauan dan evaluasi        |   |   |   |   | √         |                    | Tk. Eselon    |            |                       |
| 2902 | TK         | <b>URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b> |                          |                                |   |   |   |   |           |                    |               |            |                       |
| 2903 | TK         | 1   | PERENCANAAN TENAGA KERJA |                                |   |   |   |   |           |                    |               |            |                       |
| 2904 | TK         |   | 1                        | Perencanaan Tenaga Kerja Makro |   |   |   |   |           |                    |               |            |                       |
| 2905 | TK         |   |                          | 1                              | Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional                         |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon | Unit pelaksana urusan |
| 2906 | TK         |   |                          | 2                              | Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional                      |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon | Unit pelaksana urusan |
| 2907 | TK         |   |                          | 3                              | Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional              |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon | Unit pelaksana urusan |
| 2908 | TK         |   |                          | 4                              | Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah                           |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon | Unit pelaksana urusan |
| 2909 | TK         |   |                          | 5                              | Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah                        |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon | Unit pelaksana urusan |
| 2910 | TK         |   |                          | 6                              | Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah                |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon | Unit pelaksana urusan |
| 2911 | TK         |   | 2                        | Perencanaan Tenaga Kerja Mikro |   |   |   |   |           |                    |               |            |                       |
| 2912 | TK         |   |                          | 1                              | Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Pemerintah Daerah                |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon | Unit pelaksana urusan |
| 2913 | TK         |   |                          | 2                              | Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah         |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon | Unit pelaksana urusan |
| 2914 | TK         |   |                          | 3                              | Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon | Unit pelaksana urusan |
| 2915 | TK         |   |                          | 4                              | Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta                |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|---|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |   |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 2916 | TK         |             |   | 5                                       | Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta                  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2917 | TK         |             |   | 6                                       | Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta          |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2918 | TK         |             | 3 | PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS   |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2919 | TK         |             |   | 1                                       | Penerapan Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Pogram Pelatihan                  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2920 | TK         |             |   | 2                                       | Bimbingan Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan ketenagakerjaan |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2921 | TK         |             |   | 3                                       | Program Pengembangan Standarisasi Kompetensi Pelatihan Ketenagakerjaan               |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2922 | TK         |             |   | 4                                       | Penyusunan Materi Peltihan Pengembangan Standarisasi Kompetensi Ketenagakerjaan      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2923 | TK         |             |   | 5                                       | Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2924 | TK         |             |   | 6                                       | Pengembangan Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan             |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2925 | TK         |             |   | 7                                       | Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian                                      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2926 | TK         |             |   | 8                                       | Pengembangan Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian                            |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2927 | TK         |             | 4 | Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 2928 | TK         |             |   | 1                                       | Akreditasi Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja                                   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 2929 | TK         |             |   | 2                                       | Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                      | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN  |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |            |                |                       |
|------|---------------|-------------|---|--------------------------------------|--|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                                      | SR   | R | T | B |              |                       |               |            |                |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                                      | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10            |            |                |                       |
| 2930 | TK            |             |   | 3                                    | Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan                |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2931 | TK            |             |   | 4                                    | Pengembangan Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas            |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2932 | TK            |             |   | 5                                    | Pengembangan Standar Mutu Lembaga Pelatihan                        |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2933 | TK            |             |   | 6                                    | Pengembangan Bimbingan Penerapan Standar Mutu                      |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2934 | TK            |             |   | 7                                    | Sistem Pendanaan Pelatihan   |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2935 | TK            |             |   | 8                                    | Kerjasama Antar Lembaga  |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2936 | TK            |             | 5 | Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan |  |   |   |   |              |                       |               |            |                |                       |
| 2937 | TK            |             |   | 1                                    | Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan        |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2938 | TK            |             |   | 2                                    | Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2939 | TK            |             |   | 3                                    | Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta         |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2940 | TK            |             |   | 4                                    | Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta             |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2941 | TK            |             |   | 5                                    | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan                            |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2942 | TK            |             |   | 6                                    | Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan                                |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2943 | TK            |             |   | 7                                    | Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan                   |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2944 | TK            |             |   | 8                                    | Penyebaran Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga                   |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                 | KLASIFIKASI KEAMANAN                                   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|---------------------------------|--|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                                 | SR   | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                                 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
| 2945 | TK         |             | 6 | Pelatihan 4 Bina Pemagangan     |  |   |   |   |           |                    |                       |
| 2946 | TK         |             |   | 1                               | Bina Program Pemagangan Dalam Negeri                   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2947 | TK         |             |   | 2                               | Bina Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Dalam Negeri  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2948 | TK         |             |   | 3                               | Bina Program Pemagangan Luar Negeri                    |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2949 | TK         |             |   | 4                               | Bina Bimbingan dan Penyuluhan Pemagangan Luar Negeri   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2950 | TK         |             |   | 5                               | Perizinan dan Rekomendasi                              |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2951 | TK         |             |   | 6                               | Advokasi dan Perlindungan                              |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2952 | TK         |             |   | 7                               | Promosi dan Sistem Informasi Pemagangan                |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2953 | TK         |             |   | 8                               | Pemagangan Jejaring Pemagangan                         |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2954 | TK         |             | 7 | Produktivitas dan Kewirausahaan |  |   |   |   |           |                    |                       |
| 2955 | TK         |             |   | 1                               | Pengembangan Promisi Produktivitas dan Kewirausahaan   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2956 | TK         |             |   | 2                               | Kerjasama Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2957 | TK         |             |   | 3                               | Pengembangan Sistem dan Metode Produktivitas           |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2958 | TK         |             |   | 4                               | Pengembangan Alat dan Teknik Peningkatan Produktivitas |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 2959 | TK         |             |   | 5                               | Pengembangan Pengukuran Produktivitas                  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                                   |                                      |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |                                   |                                      |  | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |                                   |                                      |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 2960 | TK            |             |                                   | 6                                    | Kajian Produktivitas   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2961 | TK            |             |                                   | 7                                    | Pengembangan Pelatihan Manajemen Kewirausahaan                                   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2962 | TK            |             |                                   | 8                                    | Pengembangan Bimbingan Konsultasi  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2963 | TK            | 2           | PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA |                                      |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 2964 | TK            |             | 1                                 | Pengembangan Pasar Kerja             |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 2965 | TK            |             |                                   | 1                                    | Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2966 | TK            |             |                                   | 2                                    | Informasi Pasar Kerja Luar Negeri  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2967 | TK            |             |                                   | 3                                    | Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2968 | TK            |             |                                   | 4                                    | Analisis Pasar Kerja Luar Negeri   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2969 | TK            |             |                                   | 5                                    | Bursa Kerja Dalam Negeri   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2970 | TK            |             |                                   | 6                                    | Bursa Kerja Luar Negeri  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2971 | TK            |             |                                   | 7                                    | Analisis dan Informasi Jabatan   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2972 | TK            |             |                                   | 8                                    | Pengembangan Sistem Analisis Jabatan   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2973 | TK            |             | 2                                 | Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 2974 | TK            |             |                                   | 1                                    | Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) /Antar Kerja Lokal (AKL) |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                     | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                                    |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|-------------------------------------|--|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                                     | SR   | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                                     | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 2975 | TK            |             |   | 2                                   | Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja                        |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2976 | TK            |             |   | 3                                   | Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita             |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2977 | TK            |             |   | 4                                   | Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2978 | TK            |             |   | 5                                   | Penyuluhan Jabatan   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2979 | TK            |             |   | 6                                   | Bimbingan Jabatan  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2980 | TK            |             |   | 7                                   | Pengembangan pemberdayaan Kompetensi Pengantar Kerja       |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2981 | TK            |             |   | 8                                   | Kerjasama antar Lembaga                                    |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 2982 | TK            |             | 3 | Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 2983 | TK            |             |   | 1                                   | Perizinan Kelembagaan                                      |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2984 | TK            |             |   | 2                                   | Evaluasi Kinerja   |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2985 | TK            |             |   | 3                                   | Penyiapan dan Dokumen Penempatan TKI                       |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2986 | TK            |             |   | 4                                   | Fasilitasi Penyediaan TKI                                  |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2987 | TK            |             |   | 5                                   | Perlindungan Advokasi dan Kepulangan TKI                   |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2988 | TK            |             |   | 6                                   | Sarana dan Perlindungan                                    |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 2989 | TK            |             |   | 7                                   | Kerjasama Bilateral  |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN  |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |            |                |                       |
|------|---------------|-------------|---|--|--|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|
|      |               |             |   |  | SR   | R | T | B |              |                       |               |            |                |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10            |            |                |                       |
| 2990 | TK            |             |   | 8  | Kerjasama Regional dan Multilateral                            |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 2991 | TK            |             | 4 | Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal |  |   |   |   |              |                       |               |            |                |                       |
| 2992 | TK            |             |   | 1  | Tenaga Kerja Mandiri   |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2993 | TK            |             |   | 2  | Tenaga Kerja Sektor Informal                                   |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2994 | TK            |             |   | 3  | Pengembangan Padat Karya Perdesaan                             |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2995 | TK            |             |   | 4  | Pengembangan Padat Karya Perkotaan                             |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2996 | TK            |             |   | 5  | Pengembangan Terapan Teknologi Tepat Guna                      |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2997 | TK            |             |   | 6  | Penyebarnya Terapan Teknologi Tepat Guna                       |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2998 | TK            |             |   | 4  | Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga          |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 2999 | TK            |             |   | 7  | Pemberdayaan Pendampingan                                      |   |   |   |              |                       | √             | Staff      |                | Unit pelaksana urusan |
| 3000 | TK            |             |   | 8  | Kerjasama Antar Lembaga  |   |   |   |              |                       | √             | Staff      |                | Unit pelaksana urusan |
| 3001 | TK            |             | 5 | Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing                               |  |   |   |   |              |                       |               |            |                |                       |
| 3002 | TK            |             |   | 1  | Analisis Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3003 | TK            |             |   | 2  | Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri          |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3004 | TK            |             |   | 3  | Analisis Rencana Pembangunan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa    |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |   |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |   |   | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |   |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3005 | TK            |             |   | 4   | Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3006 | TK            |             |   | 5   | Pengendalian  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3007 | TK            |             |   | 6   | Kerjasama Kelembagaan   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3008 | TK            |             | 6   | Standardisasi Profesi                                       |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3009 | TK            |             |   | 1   | Dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi dan registrasi                             |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3010 | TK            |             |   | 2   | Dokumen yang berhubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja                                |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3011 | TK            |             |   | 3   | Pembakuan Dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sertifikasi |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3012 | TK            |             |   | 4   | Pembakuan Dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan konvensi dan persidangan          |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3013 | TK            | 3           | PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA |   |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3014 | TK            |             | 1   | Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3015 | TK            |             |   | 1   | Peraturan Perusahaan  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3016 | TK            |             |   | 2   | Perjanjian Kerja Bersama  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3017 | TK            |             |   | 3   | Perjanjian Kerja  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3018 | TK            |             |   | 4   | Program Kesejahteraan   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |



| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |  |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|--|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |  |   | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |  |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3019 | TK            |             |   | 5  | Fasilitas Kesejahteraan   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3020 | TK            |             |   | 6  | Penanggulangan Diskriminasi Syarat Kerja                              |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3021 | TK            |             |   | 7  | Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja                                    |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3022 | TK            |             | 2 | Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial           |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3023 | TK            |             |   | 1  | Organisasi Pekerja  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3024 | TK            |             |   | 2  | Organisasi Pengusaha  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3025 | TK            |             |   | 3  | Lembaga Kerjasama BIPARTIT  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3026 | TK            |             |   | 4  | Lembaga Kerjasama TRIPARTIT   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3027 | TK            |             |   | 3  | Pemasyarakatan Hubungan Industrial                                    |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3028 | TK            |             |   | 5  | Penyiapan Masyarakat Materi Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3029 | TK            |             |   | 6  | Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial             |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3030 | TK            |             | 3 | Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3031 | TK            |             |   | 1  | Penerapan Standar Pengupahan  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3032 | TK            |             |   | 2  | Pengurusan Pengupahan   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3033 | TK            |             |   | 3  | Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja                             |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                                      |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN  |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|--------------------------------------|---|--|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |                                      |   | SR   | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |                                      |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3034 | TK            |             |                                      | 4   | Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3035 | TK            |             | 4                                    | Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial                       |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 3036 | TK            |             |                                      | 1   | Pencegahan Dini Perselisihan Hubungan Industrial                                     |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3037 | TK            |             |                                      | 2   | Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan  |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3038 | TK            |             | 5                                    | Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial                     |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 3039 | TK            |             |                                      | 1   | Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial  |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3040 | TK            |             |                                      | 2   | Evaluasi dan Pelaporan   |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3041 | TK            |             | 6                                    | Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 3042 | TK            |             |                                      | 1   | Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3043 | TK            |             |                                      | 2   | Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan                   |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3044 | TK            | 4           | PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN |   |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 3045 | TK            |             | 1                                    | Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                            |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 3046 | TK            |             |                                      | 1   | Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3047 | TK            |             |                                      | 2   | Pengawasan Norma Pengupahan  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN  |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|--|--|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |  | SR   | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3048 | TK            |             |   | 3  | Pengawasan Norma Hubungan Kerja  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3049 | TK            |             |   | 4  | Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat                                 |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3050 | TK            |             |   | 5  | Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri       |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3051 | TK            |             |   | 6  | Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek                                     |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3052 | TK            |             | 2 | Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak        |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 3053 | TK            |             |   | 1  | Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi                                |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3054 | TK            |             |   | 2  | Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan                     |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3055 | TK            |             |   | 3  | Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3056 | TK            |             |   | 4  | Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak                          |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3057 | TK            |             |   | 5  | Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3058 | TK            |             |   | 6  | Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak                              |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3059 | TK            |             |   | 7  | Advokasi Tenaga Kerja Perempuan  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3060 | TK            |             |   | 8  | Advokasi Tenaga Kerja Anak   |   |   | √ |              |                       |                       |
| 3061 | TK            |             | 3 | Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 3062 | TK            |             |   | 1  | Pengawasan Norma Mekanik   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                               |   |   |            | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|--|---|---|---|------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |  | SR  | R | T | B          |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |  | 4   | 5 | 6 | 7          | 8            | 9                     | 10                    |
| 3063 | TK            |             |   | 2  | Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan         |   |   | √          | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3064 | TK            |             |   | 3  | Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan                  |   |   | √          | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3065 | TK            |             |   | 4  | Pengawasan Norma Listrik dan Penanggulangan Kebakaran |   |   | √          | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3066 | TK            |             |   | 5  | Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja            |   |   | √          | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3067 | TK            |             |   | 6  | Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja  |   |   | √          | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3068 | TK            |             |   | 7  | Pengawasan Norma Lingkungan Kerja                     |   |   | √          | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3069 | TK            |             |   | 8  | Pengawasan Norma Bahan Berbahaya                      |   |   | √          | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3070 | TK            |             |   | 9  | Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3          |   |   | √          | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3071 | TK            |             |   | 10                                       | Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3                  |   |   | √          | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3072 | TK            |             | 4 | Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan |   |   | √ | Tk. Eselon |              |                       |                       |
| 3073 | TK            |             | 5 | Bina Penegakan Hukum                     |   |   |   |            |              |                       |                       |
| 3074 | TK            |             |   | 1  | Teknis Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan              |   |   | √          | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3075 | TK            |             |   | 2  | Penindakan Norma Ketenagakerjaan                      |   |   | √          | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3076 | TK            |             |   | 3  | Teknis Penyidikan Norma Ketenagakerjaan               |   |   | √          | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3077 | TK            |             |   | 4  | Administrasi Penyidikan Norma Ketenagakerjaan         |   |   | √          | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                                 |  | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---------------------------------|--|---|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |                                 |  | SR  | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |                                 |  | 4   | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 3078 | TK         |             |                                 | 5  | Pengembangan Pemg Pemberdayaan PPNS                                       |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3079 | TK         |             |                                 | 6  | Pengembangan Sarana dan Prasarana PPNS                                    |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3080 | TK         |             |                                 | 7  | Kerjasama Lembaga Penegakan Hukum   |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3081 | TK         |             |                                 | 8  | Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan                                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3082 | TK         | 5           | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA |  |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 3083 | TK         |             | 1                               | Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 3084 | TK         |             |                                 | 1  | Analisis dan Standardisasi bidang K3                                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3085 | TK         |             |                                 | 2  | Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3  |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3086 | TK         |             |                                 | 3  | Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3                                |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3087 | TK         |             | 2                               | Pengembangan SDM dan Kompetensi K3   |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 3088 | TK         |             |                                 | 1  | Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3    |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3089 | TK         |             |                                 | 2  | Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3               |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3090 | TK         |             |                                 | 3  | Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3091 | TK         |             |                                 | 4  | Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3092 | TK         |             |                                 | 5  | Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3          |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP                             |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                |                                |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |                       |                       |                       |
|------|---------------|---|---|--|--------------------------------|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |   |   | SR                                     | R                              | T | B |              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1    | 2             | 3                                       |   | 4                                      | 5                              | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |                       |                       |                       |
| 3093 | PSM           | <b>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b> |   |  |                                |   |   |              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3094 | PSM           | 1                                       | Pengembangan program dan pembinaan diklat |  |                                |   |   |              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3095 | PSM           |   | 1   | Standarisasi                           |                                |   |   | √            | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |                       |                       |
| 3096 | PSM           |   | 2   | Akreditasi                             |                                |   |   |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |                       |                       |
| 3097 | PSM           |   |   | 1                                      | Institusi Penilai Akreditasi   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |                       |
| 3098 | PSM           |   |   | 2                                      | Program/Institusi yang dinilai |   |   |              | √                     | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |                       |
| 3099 | PSM           |   | 3   | Kurikulum dan Modul                    |                                |   |   | √            | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |                       |                       |
| 3100 | PSM           |   | 4   | Sistem Informasi                       |                                |   |   | √            | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |                       |                       |
| 3101 | PSM           |   | 5   | Monitoring dan evaluasi                |                                |   |   | √            | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |                       |                       |
| 3102 | PSM           |   | 6   | Konsultasi, advokasi, asistensi diklat |                                |   |   |              | √                     | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3103 | PSM           | 2                                       | Pembinaan Widyaiswara                     |  |                                |   |   |              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3104 | PSM           |   | 1   | Seleksi dan pengembangan               |                                |   |   |              |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3105 | PSM           |   |   | 1                                      | Seleksi Widyaiswara1           |   |   |              |                       | √                     | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3106 | PSM           |   |   | 2                                      | Pengembangan Widyaiswara       |   |   |              |                       | √                     | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3107 | PSM           |   | 2   | Sertifikasi Widyaiswara                |                                |   |   | √            | Tk. Eselon            |                       |                       |                       |                       |
| 3108 | PSM           |   | 3   | Monitoring dan Evaluasi                |                                |   |   |              |                       |                       |                       |                       |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |   |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|---|--|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |   |  | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |   |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3109 | PSM           |             |   | 1 | Monitoring Widyaiswara                                 |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3110 | PSM           |             |   | 2 | Evaluasi Widyaiswara                                   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3111 | PSM           |             | 4 |   | Penilaian Widyaiswara                                  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3112 | PSM           |             | 5 |   | Konsultasi, advokasi dan asistensi                     |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3113 | PSM           |             | 6 |   | Sistem Informasi                                       |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3114 | PSM           | 3           |   |   | Penyelenggaraan Diklat                                 |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3115 | PSM           |             | 1 |   | Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan            |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3116 | PSM           |             | 2 |   | Penyelenggaraan  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3117 | PSM           |             | 3 |   | Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3118 | PSM           |             | 4 |   | Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran    |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3119 | PSM           |             |   | 1 | Pengembangan bahan ajar diklat                         |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3120 | PSM           |             |   | 2 | Pengembangan metodologi pembelajaran diklat            |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3121 | PSM           |             | 5 |   | Sistem informasi diklat                                |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Tidak beresiko        |
| 3122 | PSM           |             | 6 |   | Monitoring dan Evaluasi                                |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3123 | PSM           |             |   | 1 | Penyelenggara  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP  |                              |   |              | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|--|------------------------------|---|--------------|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |  |                              |   |              | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3  |                              |   |              | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 3124 | PSM        |  |                              | 2   | Pasca diklat |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3125 | PSM        |  | 7                            |   | Alumni       |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Tidak beresiko        |
| 3126 | PA         | <b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b> |                              |   |              |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3127 | PA         | 1  | PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) |   |              |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3128 | PA         |  | 1                            | Penyiapan, Perumusan dan Penyusunan Kebijakan PUG                               |              |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3129 | PA         |  | 2                            | Data Gender   |              |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3130 | PA         |  | 3                            | Sosialisasi Kebijakan PUG   |              |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3131 | PA         |  | 4                            | Advokasi Pelaksanaan PUG  |              |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3132 | PA         |  | 5                            | Fasilitasi dan Koordinasi PUG   |              |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3133 | PA         |  | 6                            | Monitoring , Evaluasi dan Analisa Kebijakan PUG                                 |              |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3134 | PA         | 2  | PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN   |   |              |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3135 | PA         |  | 1                            | Penyiapan, Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan |              |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3136 | PA         |  | 2                            | Sosialisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Hak Perempuan                         |              |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3137 | PA         |  | 3                            | Data Perlindungan Perempuan   |              |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3138 | PA         |  | 4                            | Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan   |              |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan |



| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                   |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|-------------------|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |                   |   | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |                   |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3139 | PA            |             | 5                 | Penanganan Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus             |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3140 | PA            |             | 6                 | Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan                                       |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3141 | PA            |             | 7                 | Advokasi Perlindungan Perempuan   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3142 | PA            |             | 1                 | Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan                          |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3143 | PA            |             | 2                 | Advokasi Penanganan Masalah Sosial Perempuan                              |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3144 | PA            |             | 3                 | Advokasi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan                              |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3145 | PA            |             | 8                 | Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perlindungan Hak Perempuan               |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3146 | PA            |             | 1                 | Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perlindungan Hak Perempuan                 |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3147 | PA            |             | 9                 | Sistem Aplikasi dan Jaringan Informasi Gender                             |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3148 | PA            |             | 10                | Analisis dan penyajian informasi gender                                   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3149 | PA            | 3           | PERLINDUNGAN ANAK |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3150 | PA            |             | 1                 | Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA) |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3151 | PA            |             | 1                 | Penyiapan, Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Perlindungan Anak           |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       |                       |
| 3152 | PA            |             | 2                 | Penyiapan, Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Tumbuh Kembang Anak         |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3153 | PA            |             | 3                 | Data Perlindungan Anak  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                              |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |                       |
|------|---------------|-------------|---|---|--|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |   | SR   | R | T | B |              |                       |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |                       |
| 3154 | PA            |             |   | 4   | Data Tumbuh Kembang Anak                             |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3155 | PA            |             | 2 | Sosialisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA)     |  |   |   |   |              |                       |                       |                       |
| 3156 | PA            |             |   | 1   | Sosialisasi Kebijakan PA                             |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3157 | PA            |             |   | 2   | Sosialisasi Kebijakan TKA                            |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3158 | PA            |             | 3 | Advokasi Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang                                    |  |   |   |   |              |                       |                       |                       |
| 3159 | PA            |             |   | 1   | Advokasi PA  |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3160 | PA            |             |   | 2   | Advokasi TKA   |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3161 | PA            |             | 4 | Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA) |  |   |   |   |              |                       |                       |                       |
| 3162 | PA            |             |   | 1   | Fasilitasi dan koordinasi Bidang Perlindungan Anak   |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3163 | PA            |             |   | 2   | Fasilitasi dan koordinasi Bidang Tumbuh Kembang Anak |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3164 | PA            |             | 5 | Monitoring dan Evaluasi Bidang Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA)   |  |   |   |   |              |                       |                       |                       |
| 3165 | PA            |             |   | 1   | Monev Bidang Perlindungan Anak                       |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3166 | PA            |             |   | 2   | Monev Bidang Tumbuh Kembang Anak                     |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3167 | PA            |             | 6 | Pemetaan Perlindungan Anak (PA) dan Tumbuh Kembang Anak (TKA)                         |  |   |   |   |              |                       |                       |                       |
| 3168 | PA            |             |   | 1   | Pemetaan Perlindungan Anak                           |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP        |   |   |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|--------------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |                    |   |   |   | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3                  |   |   |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3169 | PA            |                    |   | 2   | Pemetaan Perlindungan Tumbuh Kembang Anak |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3170 | PA            | 4                  | PARTISIPASI MASYARAKAT                                      |   |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3171 | PA            |                    | 1   | Penyusunan Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat      |   |                         |   | √ |   |              |                       |                       |
| 3172 | PA            |                    | 2   | Sosialisasi Kebijakan Bidang Partisipasi Masyarakat     |   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3173 | PA            |                    | 3   | Advokasi Bidang Partisipasi Masyarakat                  |   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3174 | PA            |                    | 4   | Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Partisipasi Masyarakat |   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3175 | PA            |                    | 5   | Monitoring dan Evaluasi Bidang Partisipasi Masyarakat   |   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3176 | PA            | 5                  | KAJIAN TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |   |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3177 | PA            |                    | 1   | Telaah dan Kajian                                       |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3178 | PA            |                    | 1   | Bidang Pembangunan Keluarga                             |   |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3179 | PA            |                    | 2   | Bidang Hubungan Antar Lembaga                           |   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3180 | PA            |                    | 3   | Bidang Penanggulangan Kemiskinan                        |   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3181 | PA            |                    | 4   | Bidang Komunikasi Pembangunan                           |   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3182 | PA            |                    | 2   | Forum Analisis Kebijakan dan Pemantauan                 |   |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Tidak beresiko        |
| 3183 | DG            | URUSAN PERDAGANGAN |   |   |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |    |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|----|--|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |    |  | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |    |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3184 | DG            | 1           |   |    | PERDAGANGAN DALAM NEGERI                             |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3185 | DG            |             | 1 |    | Bina Usaha   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3186 | DG            |             |   | 1  | Kelembagaan  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3187 | DG            |             |   | 2  | Penguatan usaha                                      |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3188 | DG            |             |   | 3  | Jasa Perdagangan berbasis elektronik                 |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3189 | DG            |             |   | 4  | Jasa Perdagangan berbasis jasa distribusi dan bisnis |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3190 | DG            |             |   | 5  | Usaha dagang asing                                   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3191 | DG            |             |   | 6  | Keagenan   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3192 | DG            |             |   | 7  | Informasi Pendaftaran perusahaan                     |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3193 | DG            |             |   | 8  | Informasi Seksi analisa LKTP                         |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3194 | DG            |             |   | 9  | Pelaku pasar Pengecer                                |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3195 | DG            |             |   | 10 | Pelaku pasar Pemasok                                 |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3196 | DG            |             | 2 |    | Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri        |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3197 | DG            |             |   | 1  | iklim usaha  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3198 | DG            |             |   | 2  | bimbingan teknis                                     |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3199 | DG            |             |   | 3  | fasilitasi usah produktif                            |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|---|--|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |   | SR   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 3200 | DG         |             |   | 4 | fasilitasi usaha dan pemasaran   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3201 | DG         |             |   | 5 | Penelaahan potensi produk dalam rangka pengembangan produk lokal                     |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3202 | DG         |             |   | 6 | Fasilitasi penguatan produk dalam rangka pengembangan potensi produk                 |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3203 | DG         |             |   | 7 | kerja sama peningkatan penggunaan produk dalam negeri pencitraan produk dalam negeri |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3204 | DG         |             |   | 8 | peningkatan promosi pencitraan produk dalam negeri                                   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3205 | DG         |             | 3 |   | Logistik dan Sarana Distribusi   |   |   |   |            |                    |                       |
| 3206 | DG         |             |   | 1 | Perencanaan Pengembangan sarana distribusi   |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3207 | DG         |             |   | 2 | Bimbingan teknis Pengembangan sarana distribusi                                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3208 | DG         |             |   | 3 | Bimbingan teknis pengelolaan sarana distribusi                                       |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3209 | DG         |             |   | 4 | Evaluasi pengelolaan sarana distribusi   |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3210 | DG         |             |   | 5 | kerja sama pengembangan sistem logistik dengan Pemerintah                            |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3211 | DG         |             |   | 6 | kerja sama pengembangan sistem logistik dengan lembaga non pemerintah                |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3212 | DG         |             |   | 7 | Informasi logistik   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3213 | DG         |             |   | 8 | bimbingan teknis penyedia jasa logistik  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3214 | DG         |             | 4 |   | Bahan Pokok dan Barang Strategis   |   |   |   |            |                    |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |   |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |   |   | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |   |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3215 | DG            |             |   | 1 | Informasi Harga (Pengumpulan, Pengolahan, Penyiapan, Penyajian Informasi, Analisis)     |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3216 | DG            |             |   | 2 | Informasi Non Harga (Pengumpulan, Pengolahan, Penyiapan, Penyajian Informasi, Analisis) |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3217 | DG            |             |   | 3 | Hasil Industri berupa gula dan tepung   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3218 | DG            |             |   | 4 | Hasil industri berupa minyak goreng dan garam   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3219 | DG            |             |   | 5 | Barang strategis hasil agro   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3220 | DG            |             |   | 6 | Barang strategis hasil industri   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3221 | DG            |             |   | 7 | Barang pokok agro serelia   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3222 | DG            |             |   | 8 | Barang pokok agro hewan dan non serelia   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3223 | DG            | 2           |   |   | STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3224 | DG            |             | 1 |   | Standardisasi   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3225 | DG            |             |   | 1 | hubungan kelembagaan  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3226 | DG            |             |   | 2 | informasi standar   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3227 | DG            |             |   | 3 | kerjasama standarisasi regional   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3228 | DG            |             |   | 4 | kerjasama standarisasi bilateral dan multilateral                                       |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |    |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|----|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |    |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |    |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 3229 | DG         |             |   | 5  | Penetapan standar   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3230 | DG         |             |   | 6  | Perumusan Standar   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3231 | DG         |             |   | 7  | Tata Usaha kepegawaian  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3232 | DG         |             |   | 8  | Tata usaha keuangan   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3233 | DG         |             |   | 9  | tata usaha perencanaan dan program                                      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3234 | DG         |             |   | 10 | Tata usaha inventaris kantor/BMAN                                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3235 | DG         |             | 2 |    | Pemberdayaan Konsumen   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3236 | DG         |             |   | 1  | kerjasama   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3237 | DG         |             |   | 2  | informasi, dan publikasi  |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3238 | DG         |             |   | 3  | konsultasi hukum analisa penyelenggara perlindungan konsumen            |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3239 | DG         |             |   | 4  | analisis penyelenggara perlindungan konsumen                            |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3240 | DG         |             |   | 5  | bimbingan konsumen  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3241 | DG         |             |   | 6  | bimbingan pelaku usaha  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3242 | DG         |             |   | 7  | fasilitas pemberdayaan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3243 | DG         |             |   | 8  | fasilitas pemberdayaan badan penyelesaian sengketa konsumen             |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |   |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 3244 | DG         |             | 4 |   | Pengawasan Barang Beredar dan Jasa      |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3245 | DG         |             |   | 1 | produk pertambangan dan olahan          |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3246 | DG         |             |   | 2 | produk aneka industri                   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3247 | DG         |             |   | 3 | produk pertanian dan kehutanan          |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3248 | DG         |             |   | 4 | produk kimia dan olahan                 |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3249 | DG         |             |   | 5 | jasa distribusi                         |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3250 | DG         |             |   | 6 | jasa bisnis                             |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3251 | DG         |             |   | 7 | kerjasama lembaga pemerintah            |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3252 | DG         |             |   | 8 | kerjasama lembaga non pemerintah        |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3253 | DG         |             | 5 |   | Metrologi                               |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3254 | DG         |             |   | 1 | Sarana metrologi legal                  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3255 | DG         |             |   | 2 | Kerjasama metrologi legal               |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3256 | DG         |             |   | 3 | Kelembagaan metrologi legal             |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3257 | DG         |             |   | 4 | Penilaian metrologi legal               |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3258 | DG         |             |   | 5 | Bsaran massa, listrik, tekanan dan suhu |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3259 | DG         |             |   | 6 | Besaran arus, panjang dan volume        |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |



| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |    | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN  |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |                       |
|------|---------------|-------------|---|----|--|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |    | SR   | R | T | B |              |                       |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |    | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |                       |
| 3260 | DG            |             |   | 7  | Pengawasan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya                 |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3261 | DG            |             |   | 8  | Pengawasan barang dalam keadaan terbungkus dan satuan internasional      |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3262 | DG            |             |   | 9  | Bimbingan Mutu Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)   |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3263 | DG            |             |   | 10 | Pelayanan Teknis Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3264 | DG            |             |   | 11 | Bimbingan Mutu Balai Pengujian UTTP                                      |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3265 | DG            |             |   | 12 | Pelayanan Teknis Balai Pengujian UTTP                                    |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3266 | DG            |             |   | 13 | Bimbingan Kemetrolagian Bali SML Regional 1 Medan                        |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3267 | DG            |             |   | 14 | Pelayanan Kemetrolagian Bali SML Regional 1 Medan                        |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3268 | DG            |             |   | 15 | Bimbingan Kemetrolagian Bali SML Regional 1 Jogjakarta                   |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3269 | DG            |             |   | 16 | Pelayanan Kemetrolagian Bali SML Regional 1 Jogjakarta                   |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3270 | DG            |             |   | 17 | Bimbingan Kemetrolagian Bali SML Regional 1 Makassar                     |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3271 | DG            |             |   | 18 | Pelayanan Kemetrolagian Bali SML Regional 1 Makassar                     |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3272 | DG            | 3           |   |    | PERDAGANGAN LUAR NEGERI  |   |   |   |              |                       |                       |                       |
| 3273 | DG            |             | 1 |    | Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan                                    |   |   |   |              |                       |                       |                       |
| 3274 | DG            |             |   | 1  | Ekspor produk tanaman pangan   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                  |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |            |                |                       |
|------|---------------|-------------|---|---|--|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|
|      |               |             |   |   | SR                                       | R | T | B |              |                       |               |            |                |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10            |            |                |                       |
| 3275 | DG            |             |   | 2 | Ekspor produk perikanan, dan peternakan  |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3276 | DG            |             |   | 3 | Tanaman Perkebunan Tahunan               |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3277 | DG            |             |   | 4 | Tanaman Perkebunan Musiman               |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3278 | DG            |             |   | 5 | Hortikultura                             |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3279 | DG            |             |   | 6 | Rempah-rempah dan tanaman obat           |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3280 | DG            |             |   | 7 | Hasil hutan berupa kayu dan produk kayu  |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3281 | DG            |             |   | 8 | Hasil hutan bukan kayu                   |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3282 | DG            |             | 2 |   | Ekspor Produk Industri dan Pertambangan  |   |   |   |              |                       |               |            |                |                       |
| 3283 | DG            |             |   | 1 | Produk TPT (Tekstil dan Produk Tekstil)  |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3284 | DG            |             |   | 2 | Produk Aneka dan jasa                    |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3285 | DG            |             |   | 3 | Produk Logam dan mesin                   |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3286 | DG            |             |   | 4 | Produk alat transportasi dan elektronika |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3287 | DG            |             |   | 5 | Produk industri agro                     |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3288 | DG            |             |   | 6 | Produk kimia                             |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3289 | DG            |             |   | 7 | Produk migas                             |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3290 | DG            |             |   | 8 | Produk pertambangan                      |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |    |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|----|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |    |   | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |    |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3291 | DG            |             | 3 |    | Impor   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3292 | DG            |             |   | 1  | Impor Barang Modal Mesin dan peralatan mesin            |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3293 | DG            |             |   | 2  | Impor Barang Modal alat angkut                          |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3294 | DG            |             |   | 3  | Barang pertanian dan kehutanan                          |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3295 | DG            |             |   | 4  | Barang kelautan, dan perikanan                          |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3296 | DG            |             |   | 5  | Barang aneka industri                                   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3297 | DG            |             |   | 6  | Barang bahan baku industri                              |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3298 | DG            |             |   | 7  | Barang konsumsi tahan lama                              |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3299 | DG            |             |   | 8  | Barang konsumsi tidak tahan lama                        |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3300 | DG            |             |   | 9  | Barang kimia dan bahan berbahaya                        |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3301 | DG            |             |   | 10 | Barang tambang dan limbah                               |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3302 | DG            |             | 4 |    | Fasilitas Ekspor dan Impor                              |                         |   |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3303 | DG            |             |   | 1  | Kerjasama multilateral dan regional, termasuk bilateral |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3304 | DG            |             |   | 2  | Pembiayaan perdagangan dalam kerjasama internasional    |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3305 | DG            |             |   | 3  | Sumber pembiayaan dan sistem pembayaran                 |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                                  |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|---|--|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |   | SR   | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3306 | DG            |             |   | 4 | Prosedur ekspor dan impor                                |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3307 | DG            |             |   | 5 | Dokumen ekspor dan impor                                 |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3308 | DG            |             |   | 6 | Sarana dan prasarana Penunjang Perdagangan Internasional |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3309 | DG            |             |   | 7 | Regulasi Penunjang Perdagangan Internasional             |   |   |   | √            | Staff                 | Unit pelaksana urusan |
| 3310 | DG            |             |   | 8 | Analisa pelayanan perdagangan                            |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3311 | DG            |             |   | 9 | Fasilitasi pelayanan perdagangan                         |   |   |   | √            | Staff                 | Unit pelaksana urusan |
| 3312 | DG            |             | 5 |   | Pengamanan Perdagangan                                   |   |   |   |              |                       |                       |
| 3313 | DG            |             |   | 1 | Monitoring Hambatan Perdagangan                          |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3314 | DG            |             |   | 2 | Evaluasi Monitoring Hambatan Perdagangan                 |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3315 | DG            |             |   | 3 | Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan                   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3316 | DG            |             |   | 4 | Penanganan Tuduhan Dumping                               |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3317 | DG            |             |   | 5 | Penanganan Tuduhan Subsidi                               |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3318 | DG            |             |   | 6 | Penanganan Tuduhan Safeguard                             |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3319 | DG            | 4           |   |   | KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL                      |   |   |   |              |                       |                       |
| 3320 | DG            |             | 1 |   | Multilateral   |   |   |   |              |                       |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |    |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|----|--|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |    |  | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |    |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3321 | DG            |             |   | 1  | Tarif barang pertanian                                   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3322 | DG            |             |   | 2  | Non Tarif barang pertanian                               |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3323 | DG            |             |   | 3  | Tarif barang non pertanian                               |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3324 | DG            |             |   | 4  | Non Tarif barang non pertanian                           |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3325 | DG            |             |   | 5  | Akses pasar barang non pertanian                         |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3326 | DG            |             |   | 6  | Aturan perdagangan                                       |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3327 | DG            |             |   | 7  | Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan investasi             |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3328 | DG            |             |   | 8  | Lingkungan dan isu baru                                  |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3329 | DG            |             |   | 9  | Tinjauan Ketentuan perdagangan                           |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3330 | DG            |             |   | 10 | Notifikasi   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3331 | DG            |             | 2 |    | ASEAN  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3332 | DG            |             |   | 1  | Perdagangan barang Masyarakat Ekonomi ASEAN I            |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3333 | DG            |             |   | 2  | Fasilitas perdagangan barang Masyarakat Ekonomi ASEAN I  |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3334 | DG            |             |   | 3  | Perdagangan barang Masyarakat Ekonomi ASEAN II           |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3335 | DG            |             |   | 4  | Fasilitas perdagangan barang Masyarakat Ekonomi ASEAN II |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|---|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |   |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 3336 | DG         |             |   | 5 | ASEAN mitra dialog   |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3337 | DG         |             |   | 6 | Kerjasama antar dan sub regional                           |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3338 | DG         |             | 3 |   | APEC dan Organisasi Internasional Lainnya                  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3339 | DG         |             |   | 1 | Akses perdagangan Barang APEC                              |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3340 | DG         |             |   | 2 | Akses investasi APEC                                       |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3341 | DG         |             |   | 3 | Fasilitasi perdagangan APEC                                |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3342 | DG         |             |   | 4 | Fasilitasi investasi APEC                                  |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3343 | DG         |             |   | 5 | Badan-badan PBB dan Non PBB                                |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3344 | DG         |             |   | 6 | Organisasi komoditi internasional                          |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3345 | DG         |             | 4 |   | Bilateral  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3346 | DG         |             |   | 1 | Kerja sama bilateral dengan berbagai negara-negara         |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3347 | DG         |             | 5 |   | Perundingan Perdagangan Jasa                               |                      |   |   |   | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3348 | DG         |             |   | 1 | Jasa bisnis dan distribusi                                 |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3349 | DG         |             |   | 2 | Jasa keuangan  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3350 | DG         |             |   | 3 | Jasa konstruksi, pariwisata, rekreasi budaya dan olah raga |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3351 | DG         |             |   | 4 | Jasa transportasi  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |    | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN   |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |                       |
|------|---------------|-------------|---|----|---|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |    | SR  | R | T | B |              |                       |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |    | 4   | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |                       |
| 3352 | DG            |             |   | 5  | Jasa pendidikan   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3353 | DG            |             |   | 6  | Jasa kesehatan  |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3354 | DG            |             |   | 7  | Jasa komunikasi   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3355 | DG            |             |   | 8  | Jasa lingkungan dan jasa lainnya  |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3356 | DG            |             |   | 9  | Rules dan peraturan domestik  |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3357 | DG            |             |   | 10 | Penyusunan analisis informasi   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3358 | DG            | 5           |   |    | PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL  |   |   |   |              |                       |                       |                       |
| 3359 | DG            |             | 1 |    | Pasar dan Informasi Ekspor  |   |   |   |              |                       |                       |                       |
| 3360 | DG            |             |   | 1  | Pengembangan pasar  |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3361 | DG            |             |   | 2  | Pengelolaan data pada sistem informasi ekspor                             |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3362 | DG            |             |   | 3  | Pengembangan sistem informasi ekspor                                      |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3363 | DG            |             |   | 4  | Pelayanan pelaku usaha ekspor   |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3364 | DG            |             |   | 5  | Publikasi informasi ekspor  |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3365 | DG            |             | 2 |    | Produk ekspor dan ekonomi kreatif   |   |   |   |              |                       |                       |                       |
| 3366 | DG            |             |   | 1  | Hasil industri manufaktur berupa Mesin, logam, elektronika dan telematika |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3367 | DG            |             |   | 2  | Hasil industri manufaktur berupa Pangan,                                  |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                              |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                       |
|------|---------------|-------------|---|---|--|---|---|---|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|      |               |             |   |   | SR   | R | T | B |              |                       |                |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10             |                       |
|      |               |             |   |   | tekstil dan produk tekstil, alat kesehatan dan aneka |   |   |   |              |                       |                |                       |
| 3368 | DG            |             |   | 3 | Produk agro berupa kehutanan dan perkebunan          |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3369 | DG            |             |   | 4 | Produk agro berupa pertanian dan perikanan           |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3370 | DG            |             |   | 5 | Jasa bisnis dan profesi                              |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3371 | DG            |             |   | 6 | jasa konstruksi dan distribusi                       |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3372 | DG            |             |   | 7 | media dan iptek Ekonomi kreatif                      |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3373 | DG            |             |   | 8 | seni budaya dan desain ekonomi kreatif               |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3374 | DG            |             | 3 |   | Kerja Sama Pengembangan Ekspor                       |   |   |   |              |                       |                |                       |
| 3375 | DG            |             |   | 1 | Pemerintah luar negeri                               |   |   |   | √            | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan |
| 3376 | DG            |             |   | 2 | Non pemerintah luar negeri                           |   |   |   | √            | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan |
| 3377 | DG            |             |   | 3 | Pemerintah dalam negeri                              |   |   |   | √            | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan |
| 3378 | DG            |             |   | 4 | Non pemerintah dalam negeri                          |   |   |   | √            | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan |
| 3379 | DG            |             | 4 |   | Promosi dan Citra                                    |   |   |   |              |                       |                |                       |
| 3380 | DG            |             |   | 1 | promosi  |   |   |   | √            |                       |                |                       |
| 3381 | DG            |             |   | 2 | Perencanaan citra                                    |   |   |   | √            | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan |



| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |   | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3382 | DG            |             |   | 3 |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3383 | DG            |             |   | 4 |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3384 | DG            | 6           |   |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3385 | DG            |             | 1 |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3386 | DG            |             |   | 1 |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3387 | DG            |             |   | 2 |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3388 | DG            |             |   | 3 |                         |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3389 | DG            |             |   | 4 |                         |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3390 | DG            |             |   | 5 |                         |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3391 | DG            |             |   | 6 |                         |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3392 | DG            |             | 2 |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3393 | DG            |             |   | 1 |                         |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3394 | DG            |             |   | 2 |                         |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3395 | DG            |             |   | 3 |                         |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3396 | DG            |             |   | 4 |                         |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP             |   |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |                         |   |   |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3                       |   |   |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 3397 | DG         |                         |   | 5 | Teknologi Informasi pada Sistem informasi                                   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3398 | DG         |                         |   | 6 | Data pada Sistem Informasi  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3399 | DG         |                         | 3 |   | Pasar Fisik dan Jasa  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3400 | DG         |                         |   | 1 | Pembinaan penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang                           |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3401 | DG         |                         |   | 2 | Pembinaan pelaku sistem resi gudang   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3402 | DG         |                         |   | 3 | Pengawasan transaksi pasar lelang   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3403 | DG         |                         |   | 4 | Pengawasan penyelenggara dan pelaku pasar lelang                            |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3404 | DG         |                         |   | 5 | Pengawasan pengelola agunan dan lembaga sertifikasi pada sistem resi gudang |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3405 | DG         |                         |   | 6 | Pengawasan lembaga penjamin dan agen penjual pada sistem resi gudang        |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3406 | DG         | 7                       |   |   | BIMBINGAN TEKNIS  |                      |   |   | √ |            |                    |                       |
| 3407 | DG         | 8                       |   |   | EVALUASI  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3408 | BP         | <b>BINA PEMBANGUNAN</b> |   |   |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3409 | BP         | 1                       |   |   | PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3410 | BP         |                         | 1 |   | Musyawahar Perencanaan Pembangunan/Musrenbang                               |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3411 | BP         |                         |   | 1 | Musrenbang nasional   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |   |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |   |   | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |   |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3412 | BP            |             |   | 2 | Musrenbang Kabupaten  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3413 | BP            |             | 2 |   | Perencanaan Pembangunan<br>Kementerian/Lembaga  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3414 | BP            |             |   | 1 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah<br>/Renstra-KL  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3415 | BP            |             |   | 2 | Rencana Pembangunan Tahunan<br>Kementerian/Lembaga ( Renja-KL)                                      |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3416 | BP            |             |   | 3 | Usulan Unit Kerja beserta data<br>pendukungnya  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3417 | BP            |             |   | 4 | Program kerja tahunan Unit Kerja  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3418 | BP            |             |   | 5 | Program Kerja Tahunan Lembaga   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3419 | BP            |             |   | 6 | Penetapan/Kontrak Kinerja Pimpinan Unit<br>Kerja  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3420 | BP            |             |   | 7 | Penetapan/Kontrak Kinerja<br>Ketua/Menteri/Kepala Lembaga Negara da<br>Badan<br>Pemerintah/Instansi |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3421 | BP            |             | 3 |   | Laporan   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3422 | BP            |             |   | 1 | Laporan Triwulan  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3423 | BP            |             |   | 2 | Laporan Semesteran  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3424 | BP            |             |   | 3 | Laporan Tahunan Unit Kerja  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3425 | BP            |             |   | 4 | Laporan Tahunan Lembaga/Instansi  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN   |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                       |
|------|---------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|      |               |             |   |   | SR  | R | T | B |              |                       |                |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10             |                       |
| 3426 | BP            |             |   | 5 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                     |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3427 | BP            |             |   | 6 | Laporan Insidental  |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3428 | BP            |             | 4 |   | Evaluasi Program  |   |   |   |              |                       |                |                       |
| 3429 | BP            |             |   | 1 | Unit Kerja  |   |   | √ |              | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan |
| 3430 | BP            |             |   | 2 | Lembaga/Instansi  |   |   | √ |              | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan |
| 3431 | BP            |             | 5 |   | Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan                   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan |
| 3432 | BP            |             | 6 |   | Konsultasi perencanaan pembangunan                                    |   |   | √ |              | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan |
| 3433 | BP            |             | 7 |   | Pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan |   |   | √ |              | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan |
| 3434 | BP            |             | 8 |   | Aksi Strategis Nasional   |   |   |   |              |                       |                |                       |
| 3435 | BP            |             |   | 1 | Rancangan awal perencanaan aksi strategis nasional                    |   |   | √ |              | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan |
| 3436 | BP            |             |   | 2 | Rapat pembahasan rancangan awal dengan K/L                            |   |   | √ |              | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan |
| 3437 | BP            |             |   | 3 | Sosialisasi dengan K/L  |   |   |   | √            |                       |                |                       |
| 3438 | BP            |             |   | 4 | Rancangan akhir perencanaan aksi strategis nasional                   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan |
| 3439 | BP            |             |   | 5 | Penetapan perencanaan aksi strategis nasional                         |   |   | √ |              | Tk. Eselon            |                | Unit pelaksana urusan |
| 3440 | BP            |             | 9 |   | Perencanaan Pendanaan Pembangunan                                     |   |   |   |              |                       |                |                       |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP                 |                           |                     | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |            |                |                       |
|------|------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|
|      |            |                             |                           |                     | SR   | R | T | B |           |                    |               |            |                |                       |
| 1    | 2          | 3                           |                           |                     | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |            |                |                       |
| 3441 | BP         |                             |                           | 1                   | Pendanaan Luar Negeri dan Hibah  |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3442 | BP         |                             |                           | 2                   | Pendanaan Dalam Negeri   |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3443 | BP         |                             |                           | 3                   | Kerjasama Pembangunan Internasional  |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3444 | BP         |                             |                           | 4                   | Surat Berharga Syariah Negara  |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3445 | BP         |                             |                           | 5                   | Pendanaan On Top dan atau Inisiatif Baru   |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3446 | PI         | <b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b> |                           |                     |  |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 3447 | PI         | 1                           | Iklim Usaha Dan Kerjasama |                     |  |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 3448 | PI         |                             | 1                         | Industri Manufaktur |  |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 3449 | PI         |                             |                           | 1                   | Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya)                        |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3450 | PI         |                             |                           | 2                   | Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya)                         |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3451 | PI         |                             |                           | 3                   | Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya)                         |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3452 | PI         |                             |                           | 4                   | Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka) |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3453 | PI         |                             | 2                         | Industri Agro       |  |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 3454 | PI         |                             |                           | 1                   | Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan  |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                  |   | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|------------------|---|---|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |                  |   | SR  | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |                  |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 3455 | PI         |             |                  | 2   | Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan                               |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3456 | PI         |             |                  | 3   | Industri Minuman Dan Tembakau   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3457 | PI         |             | 3                | Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi |   |   |   |   | Staff      |                    |                       |
| 3458 | PI         |             |                  | 1   | Alat Transportasi Darat   |   |   | √ |            |                    |                       |
| 3459 | PI         |             |                  | 2   | Industri Maritim, Kedirgantaraan, Dan Alat Pertahanan                     |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3460 | PI         |             |                  | 3   | Elektronika Dan Telematika  |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3461 | PI         |             |                  | 4   | Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian                                       |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3462 | PI         |             | 4                | Industri Kecil Dan Menengah                 |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 3463 | PI         |             |                  | 1   | Industri Pangan, Kimia Dan Bahan Bangunan                                 |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3464 | PI         |             |                  | 2   | Industri Kerajinan Dan Sandang  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3465 | PI         |             |                  | 3   | Industri Produk Logam, Alat Angkut Dan Kreatif Telematika                 |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3466 | PI         | 2           | Promosi Industri |   |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 3467 | PI         |             | 1                | Industri Manufaktur                         |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 3468 | PI         |             |                  | 1   | Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya) |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3469 | PI         |             |                  | 2   | Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya)  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|---|--|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |   | SR   | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
| 3470 | PI         |             |   | 3   | Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya)                         |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3471 | PI         |             |   | 4   | Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka) |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3472 | PI         |             | 2 | Industri Agro                               |  |   |   |   |           |                    |                       |
| 3473 | PI         |             |   | 1   | Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3474 | PI         |             |   | 2   | Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3475 | PI         |             |   | 3   | Industri Minuman Dan Tembakau  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3476 | PI         |             | 3 | Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi |  |   |   |   |           |                    |                       |
| 3477 | PI         |             |   | 1   | Alat Transportasi Darat  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3478 | PI         |             |   | 2   | Industri Maritim, Kedirgantaraan, Dan Alat Pertahanan  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3479 | PI         |             |   | 3   | Industri Elektronika Dan Telematika  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3480 | PI         |             |   | 4   | Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3481 | PI         |             | 4 | Industri Kecil Dan Menengah                 |  |   |   |   |           |                    |                       |
| 3482 | PI         |             |   | 1   | Industri Pangan, Kimia Dan Bahan Bangunan  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3483 | PI         |             |   | 2   | Industri Kerajinan Dan Sandang   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3484 | PI         |             |   | 3   | Industri Produk Logam, Alat Angkut Dan Kreatif Telematika  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                            | KLASIFIKASI KEAMANAN                        |  |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                       |
|------|------------|-------------|----------------------------|---|--|---|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|
|      |            |             |                            | SR  | R  | T | B |           |                    |                |                       |
| 1    | 2          | 3           |                            | 4   | 5  | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |                       |
| 3485 | PI         | 3           | Standarisasi Dan Teknologi |   |  |   |   |           |                    |                |                       |
| 3486 | PI         |             | 1                          | Industri Manufaktur                         |  |   |   |           |                    |                |                       |
| 3487 | PI         |             |                            | 1   | Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya)                        |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3488 | PI         |             |                            | 2   | Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya)                         |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3489 | PI         |             |                            | 3   | Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya)                         |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3490 | PI         |             |                            | 4   | Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka) |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3491 | PI         |             | 2                          | Industri Agro                               |  |   |   |           |                    |                |                       |
| 3492 | PI         |             |                            | 1   | Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3493 | PI         |             |                            | 2   | Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3494 | PI         |             |                            | 3   | Industri Minuman Dan Tembakau  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3495 | PI         |             | 3                          | Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi |  |   |   |           |                    |                |                       |
| 3496 | PI         |             |                            | 1   | Alat Transportasi Darat  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3497 | PI         |             |                            | 2   | Industri Maritim, Kedirgantaraan, Dan Alat Pertahanan  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3498 | PI         |             |                            | 3   | Elektronika Dan Telematika   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3499 | PI         |             |                            | 4   | Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian  |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                              |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|------------------------------|---|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |                              |   |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |                              |   |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 3500 | PI         |             | 4                            |   | Industri Kecil Dan Menengah  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3501 | PI         |             |                              | 1   | Industri Pangan, Kimia Dan Bahan Bangunan  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3502 | PI         |             |                              | 2   | Industri Kerajinan Dan Sandang   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3503 | PI         |             |                              | 3   | Industri Produk Logam, Alat Angkut Dan Kreatif Telematika  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3504 | PI         | 4           | Hak dan Kekayaan Intelektual |   |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3505 | PI         |             | 1                            | Industri Manufaktur                         |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3506 | PI         |             |                              | 1   | Industri Material Logam (Logam Besi, Logam Bukan Besi, dan Logam Lainnya)                        |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3507 | PI         |             |                              | 2   | Industri Kimia Dasar (Anorganik Dasar, Organik dasar, dan dasar lainnya)                         |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3508 | PI         |             |                              | 3   | Industri Kimia Hilir (Kimia Anorganik, Organik, dan Kimia hilir lainnya)                         |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3509 | PI         |             |                              | 4   | Industri Tekstil dan Aneka (Tekstil, Pakaian jadi, tekstil lainnya, alas kaki, kulit, dan aneka) |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3510 | PI         |             | 2                            | Industri Agro                               |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3511 | PI         |             |                              | 1   | Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3512 | PI         |             |                              | 2   | Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3513 | PI         |             |                              | 3   | Industri Minuman Dan Tembakau  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3514 | PI         |             | 3                            | Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |



| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                                      |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                                   |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |                       |                |                       |
|------|---------------|-------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|      |               |             |                                      |   | SR  | R | T | B |              |                       |               |                       |                |                       |
| 1    | 2             | 3           |                                      |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10            |                       |                |                       |
| 3530 | PI            |             |                                      | 1   | Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan                       |   |   |   |              |                       |               |                       |                |                       |
| 3531 | PI            |             |                                      | 2   | Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan               |   |   |   |              |                       |               |                       |                |                       |
| 3532 | PI            |             |                                      | 3   | Industri Minuman Dan Tembakau                             |   |   |   |              |                       |               |                       |                |                       |
| 3533 | PI            |             | 3                                    | Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi |   |   |   |   |              |                       |               |                       |                |                       |
| 3534 | PI            |             |                                      | 1   | Alat Transportasi Darat                                   |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                |                       |
| 3535 | PI            |             |                                      | 2   | Industri Maritim, Kedirgantaraan, Dan Alat Pertahanan     |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                |                       |
| 3536 | PI            |             |                                      | 3   | Elektronika Dan Telematika                                |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                |                       |
| 3537 | PI            |             |                                      | 4   | Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian                       |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                |                       |
| 3538 | PI            |             | 4                                    | Industri Kecil Dan Menengah                 |   |   |   |   |              |                       |               |                       |                |                       |
| 3539 | PI            |             |                                      | 1   | Industri Pangan, Kimia Dan Bahan Bangunan                 |   |   |   |              |                       | √             | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3540 | PI            |             |                                      | 2   | Industri Kerajinan Dan Sandang                            |   |   |   |              |                       | √             | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3541 | PI            |             |                                      | 3   | Industri Produk Logam, Alat Angkut Dan Kreatif Telematika |   |   |   |              |                       | √             | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3542 | PI            | 5           | Analisis Industri Unggulan Kabupaten |   |   |   |   |   |              |                       |               |                       |                |                       |
| 3543 | PI            |             | 1                                    | Kerjasama Industri Unggulan Kabupaten       |   |   |   |   |              |                       |               |                       |                |                       |
| 3544 | PI            |             |                                      | 1   | Kerjasama Industri Unggulan Kabupaten Wilayah Industri I  |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN  |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |            |  |  |
|------|---------------|-------------|---|---|--|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------|------------|--|--|
|      |               |             |   |   | SR   | R | T | B |              |                       |               |            |  |  |
| 1    | 2             | 3           |   |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10            |            |  |  |
| 3545 | PI            |             |   | 2   | Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten Wilayah Industri II       |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan  |
| 3546 | PI            |             |   | 3   | Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten Wilayah Industri III      |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan  |
| 3547 | PI            | 6           | Monitoring Dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Kabupaten Dan Kab/Kota) |   |  |   |   |   |              |                       |               |            |  |  |
| 3548 | PI            |             | 1   | Kerjasama Industri Unggulan Kabupaten       |  |   |   |   |              |                       |               |            |  |  |
| 3549 | PI            |             |   | 1   | Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten Wilayah Industri I        |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan  |
| 3550 | PI            |             |   | 2   | Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten Wilayah Industri II       |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan  |
| 3551 | PI            |             |   | 3   | Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten Wilayah Industri III      |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan  |
| 3552 | PI            |             | 2   | Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota |  |   |   |   |              |                       |               |            |  |  |
| 3553 |               |             |   |   |  |   |   |   |              | √                     | PI            |            |  | Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota Wilayah Industri |
| 3554 | PI            |             |   | 2   | Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota Wilayah Industri II  |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan  |
| 3555 | PI            |             |   | 3   | Kerja sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota Wilayah Industri III |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan  |
| 3556 | PI            | 7           | Pengembangan Infrastruktur Pendukung                                      |   |  |   |   |   |              |                       |               |            |  |  |
| 3557 | PI            |             | 1   | Kawasan Industri Wilayah Industri I         |  |   |   |   | √            |                       |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan  |
| 3558 | PI            |             | 2   | Kawasan Industri Wilayah Industri II        |  |   |   |   | √            |                       |               | Tk. Eselon |  | Unit pelaksana urusan  |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |  |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN   |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|--|--|---|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |  |  | SR  | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |  |  | 4   | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3559 | PI            |             | 3  |  | Kawasan Industri Wilayah Industri III                                   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3560 | PI            | 8           | Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri |  |   |   |   |   |              |                       |                       |
| 3561 | PI            |             | 1  |  | Kawasan Industri Wilayah Industri I                                     |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3562 | PI            |             | 2  |  | Kawasan Industri Wilayah Industri II                                    |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3563 | PI            |             | 3  |  | Kawasan Industri Wilayah Industri III                                   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3564 | PI            | 9           | Kerja sama Industri Internasional        |  |   |   |   |   |              |                       |                       |
| 3565 | PI            |             | 1  | Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I<br>(Amerika, Eropa, Timur Tengah, Dan Fora<br>Multilatera      |   |   |   |   |              |                       |                       |
| 3566 | PI            |             |  | 1  | Akses Industri Wilayah Amerika  |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3567 | PI            |             |  | 2  | Akses Industri Wilayah Eropa dan Timur<br>Tengah                        |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3568 | PI            |             |  | 3  | Kerjasama Teknik dan Promosi Industri<br>Wilayah Amerika                |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3569 | PI            |             |  | 4  | Kerjasama Teknik dan Promosi Industri<br>Wilayah Eropa dan Timus Tengah |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3570 | PI            |             |  | 5  | Kerjasama Multilateral dengan WTO dan<br>Organisasi Komoditas           |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3571 | PI            |             |  | 6  | Fora Multilateral Lainnya   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 3572 | PI            |             | 2  | Industri Internasional Wilayah Asia Timur, Asia<br>Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika,<br>Dan |   |   |   |   |              |                       |                       |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                    |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|--------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                    |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                    |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 3573 | PI         |             |   | 1                  | Akses Industri Wilayah Asia Timur, Pasifik dan Australia   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3574 | PI         |             |   | 2                  | Akses Industri Wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3575 | PI         |             |   | 3                  | Kerja sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Asia Timur, Pasifik dan Australia   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3576 | PI         |             |   | 4                  | Kerja sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3577 | PI         |             |   | 5                  | Kerjasama Regional APEC dan Regional Lainnya   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3578 | PI         |             |   | 6                  | Kerjasama Regional ASEAN dan Mitra Dialog  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3579 | PI         |             | 3 | Ketahanan Industri |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3580 | PI         |             |   | 1                  | Penanganan Hambatan Industri Wilayah I (Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Fora Multilateral)                                     |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3581 | PI         |             |   | 2                  | Penanganan Hambatan Industri Wilayah I (Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Multilateral) |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3582 | PI         |             |   | 3                  | Pengamanan Basis Industri Manufaktur   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3583 | PI         |             |   | 4                  | Pengamanan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3584 | PI         |             |   | 5                  | Pengamanan Industri Agro   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3585 | PI         |             |   | 6                  | Pengamanan Industri Kecil dan Menengah   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                       | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                    |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |                |                       |
|------|---------------|-------------|---|-----------------------|--|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                       | SR   | R | T | B |              |                       |               |                |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                       | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10            |                |                       |
| 3586 | PI            | 10          | Standarisasi                                  |                       |  |   |   |   |              |                       |               |                |                       |
| 3587 | PI            |             | 1   | Standar               |  |   |   |   |              |                       |               |                |                       |
| 3588 | PI            |             |   | 1                     | Standar Industri Manufaktur                |   |   |   |              | √                     | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3589 | PI            |             |   | 2                     | Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi |   |   |   |              | √                     | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3590 | PI            |             | 2   | Penyiapan Penerapan   |  |   |   |   |              |                       |               |                |                       |
| 3591 | PI            |             |   | 1                     | Penyiapan Penerapan Standar                |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan |
| 3592 | PI            |             |   | 2                     | Kerja sama Standarisasi                    |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan |
| 3593 | PI            |             | 3   | Infrastruktur Standar |  |   |   |   |              |                       |               |                |                       |
| 3594 | PI            |             |   | 1                     | Pengembangan Infrastruktur Standar         |   |   |   |              | √                     | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3595 | PI            |             |   | 2                     | Pengawasan Lembaga Penilaian Kesuaian      |   |   |   |              | √                     | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3596 | PI            | 11          | Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri |                       |  |   |   |   |              |                       |               |                |                       |
| 3597 | PI            |             |   | 1                     | Kebijakan Industri                         |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan |
| 3598 | PI            |             |   | 1                     | Kebijakan Sektoral                         |   |   |   |              | √                     | Tk.<br>Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3599 | PI            |             |   | 2                     | Kebijakan Kewilayahan                      |   |   |   |              |                       |               |                |                       |
| 3600 | PI            |             | 2   | Perpajakan dan Tarif  |  |   |   |   |              |                       |               |                |                       |
| 3601 | PI            |             |   | 1                     | Perpajakan dan Tarif                       |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |  |   | KLASIFIKASI KEAMANAN                                  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |            |                |                       |
|------|------------|-------------|--|---|---|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|
|      |            |             |  |   | SR  | R | T | B |           |                    |               |            |                |                       |
| 1    | 2          | 3           |  |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |            |                |                       |
| 3602 | PI         |             |  | 2 | Tarif dan Non Tarif                                   |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3603 | PI         |             |  | 3 | Pengembangan Model Industrial                         |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 3604 | PI         |             |  | 1 | Pemrograman Model                                     |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3605 | PI         |             |  | 2 | Aplikasi Model  |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3606 | PI         | 12          | Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup |   |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 3607 | PI         |             |  | 1 | Industri Hijau  |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 3608 | PI         |             |  | 1 | Pengembangan Industri Hijau                           |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3609 | PI         |             |  | 2 | Kerja Sama Industri Hijau                             |   |   |   |           | √                  |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 3610 | PI         |             |  | 2 | Lingkungan Hidup                                      |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 3611 | PI         |             |  | 1 | Lingkungan Global                                     |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3612 | PI         |             |  | 2 | Pengendalian Lingkungan Hidup                         |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3613 | PI         |             |  | 3 | Energi  |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 3614 | PI         |             |  | 1 | Konservasi Energi                                     |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3615 | PI         |             |  | 2 | Diversifikasi Energi                                  |   |   |   |           |                    | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3616 | PI         | 13          | Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual         |   |   |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |
| 3617 | PI         |             |  | 1 | Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri |   |   |   |           |                    |               |            |                |                       |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP             |                                |                   | KLASIFIKASI KEAMANAN                                |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |                       |
|------|------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|---|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |            |                         |                                |                   | SR  | R | T | B |           |                    |                       |                       |
| 1    | 2          | 3                       |                                |                   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |                       |
| 3618 | PI         |                         |                                | 1                 | Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri             |   |   | √ |           | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3619 | PI         |                         |                                | 2                 | Penerapan Kebijakan Teknologi Industri              |   |   | √ |           | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3620 | PI         |                         | 2                              |                   | Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri |   |   |   |           |                    |                       |                       |
| 3621 | PI         |                         |                                | 1                 | Pengkajian Inovasi Teknologi Industri               |   |   | √ |           | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3622 | PI         |                         |                                | 2                 | Penerapan Inovasi Teknologi Industri                |   |   | √ |           | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3623 | PI         |                         | 3                              |                   | Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual               |   |   |   |           |                    |                       |                       |
| 3624 | PI         |                         |                                | 1                 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                 |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3625 | PI         |                         |                                | 2                 | Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual             |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3626 | PT         | <b>URUSAN PERTANIAN</b> |                                |                   |   |   |   |   |           |                    |                       |                       |
| 3627 | PT         | 1                       | PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |                   |   |   |   |   |           |                    |                       |                       |
| 3628 | PT         |                         | 1                              | Perbibitan Ternak |   |   |   |   |           |                    |                       |                       |
| 3628 | PT         |                         |                                | 1                 | Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar              |   |   |   | √         | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3630 | PT         |                         |                                | 2                 | Produksi Bibit Ternak Ruminansia Kecil              |   |   |   | √         | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3631 | PT         |                         |                                | 3                 | Produksi Bibit Ternak Unggas                        |   |   |   | √         | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3632 | PT         |                         |                                | 4                 | Produksi Bibit Aneka Ternak                         |   |   |   | √         | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3633 | PT         |                         |                                | 5                 | Penilaian Bibit ternak                              |   |   | √ |           | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |              |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|--------------|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |              |   | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |              |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3634 | PT            |             |   | 6            | Pelepasan Bibit ternak                                |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3635 | PT            |             |   | 7            | Sertifikasi Bibit Ternak                              |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3636 | PT            |             |   | 8            | Pengawasan Mutu Bibit Ternak                          |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3637 | PT            |             |   | 9            | Analisis Pengembangan Bibit Ternak                    |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3638 | PT            |             |   | 10           | Kelembagaan Pengembangan Bibit Ternak                 |                         |   |   | √ |              |                       |                       |
| 3639 | PT            |             |   | 11           | Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3640 | PT            |             | 2 | Pakan Ternak |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3641 | PT            |             |   | 1            | Bahan Pakan Asal Hewan                                |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3642 | PT            |             |   | 2            | Bahan Pakan Asal Tumbuhan                             |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3643 | PT            |             |   | 3            | Budidaya Pakan Hijauan                                |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3644 | PT            |             |   | 4            | Kawasan Pengembalaan dan Integrasi Ternak             |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3645 | PT            |             |   | 5            | Produksi Pakan Olahan                                 |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3646 | PT            |             |   | 6            | Pengolahan Pakan Olahan                               |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3647 | PT            |             |   | 7            | Sertifikasi Pakan                                     |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3648 | PT            |             |   | 8            | Pengawasan Pakan                                      |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3649 | PT            |             |   | 9            | Surat Rekomendasi & Persetujuan                       |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                 | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                                    |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |                |                       |
|------|---------------|-------------|---|-----------------|--|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                 | SR   | R | T | B |              |                       |               |                |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10            |                |                       |
|      |               |             |   |                 | Pemasukan/Pengeluaran                                      |   |   |   |              |                       |               |                |                       |
| 3650 | PT            |             | 3 | Budidaya Ternak |  |   |   |   |              |                       |               |                |                       |
| 3651 | PT            |             |   | 1               | Ternak Sapi dan Kerbau Potong                              |   |   |   |              | √                     | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3652 | PT            |             |   | 2               | Ternak Kambing dan Domba Potong                            |   |   |   |              | √                     | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3653 | PT            |             |   | 3               | Ternak Sapi dan Kerbau Perah                               |   |   |   |              | √                     | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3654 | PT            |             |   | 4               | Ternak Kambing Perah                                       |   |   |   |              | √                     | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3655 | PT            |             |   | 5               | Ternak Unggas  |   |   |   |              | √                     | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3656 | PT            |             |   | 6               | Aneka Ternak dan Monogastrik                               |   |   |   |              | √                     | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3657 | PT            |             |   | 7               | Pemberdayaan masyarakat/lembaga (LM3)                      |   |   |   |              | √                     | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3658 | PT            |             |   | 8               | Sarjana Membangun Desa (SMD)                               |   |   |   |              | √                     | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3659 | PT            |             | 4 | Kesehatan Hewan |  |   |   |   |              |                       |               |                |                       |
| 3660 | PT            |             |   | 1               | Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner                         |   |   |   |              | √                     |               |                |                       |
| 3661 | PT            |             |   | 2               | Penyidikan Penyakit Hewan                                  |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan |
| 3662 | PT            |             |   | 3               | Pencegahan Penyakit Hewan                                  |   |   |   |              | √                     | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3663 | PT            |             |   | 4               | Pemberantasan Penyakit Hewan                               |   |   |   |              | √                     | Staff         | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3664 | PT            |             |   | 5               | Perlindungan Hewan dengan Analisis Risiko Penyakit Ekstrik |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    |                | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|---|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |   |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 3665 | PT         |             |   | 6   | Perlindungan Hewan dengan Kesiagaan Darurat Penyakit Hewan |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3666 | PT         |             |   | 7   | Kelembagaan Kesehatan Hewan                                |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3667 | PT         |             |   | 8   | Sumber Daya Kesehatan Hewan                                |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3668 | PT         |             |   | 9   | Laporan THL  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3669 | PT         |             |   | 10  | Proposal Poskeswan   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3670 | PT         |             |   | 11  | Mutu Obat Hewan  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3671 | PT         |             |   | 12  | Peredaran Obat Hewan                                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3672 | PT         |             |   | 13  | Pendaftaran Obat Hewan                                     |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3673 | PT         |             |   | 14  | Rekomendasi Obat Hewan                                     |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3674 | PT         |             | 5 | Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3675 | PT         |             |   | 1   | Teknologi Pascapanen                                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3676 | PT         |             |   | 2   | Sarana Pascapanen  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3677 | PT         |             |   | 3   | Penerapan Higiene Sanitasi                                 |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3678 | PT         |             |   | 4   | Inspeksi Higiene Sanitasi                                  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3679 | PT         |             |   | 5   | Pengawasan Sanitary  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3680 | PT         |             |   | 6   | Pengawasan Keamanan Produk Hewan                           |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |            |                 |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|------------|-----------------|--|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |            |                 |  | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |            |                 |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3681 | PT            |             |            | 7               | Zoonosis   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3682 | PT            |             |            | 8               | Kesejahteraan Hewan                                    |                         |   |   | √ |              |                       |                       |
| 3683 | PT            |             |            | 9               | Pengujian Produk Hewan                                 |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3684 | PT            |             |            | 10              | Sertifikasi Produk Hewan                               |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3685 | PT            |             |            | 11              | Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3686 | PT            | 2           | PERKEBUNAN |                 |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3687 | PT            |             | 1          | Tanaman Semusim |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3688 | PT            |             |            | 1               | Identifikasi Sumber Daya Tanaman Semusim               |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3689 | PT            |             |            | 2               | Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim              |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3690 | PT            |             |            | 3               | Penyiapan Perbenihan Tanaman Semusim                   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3691 | PT            |             |            | 4               | Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Semusim              |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3692 | PT            |             |            | 5               | Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim           |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3693 | PT            |             |            | 6               | Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Semusim           |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3694 | PT            |             |            | 7               | Pemberdayaan Tanaman Semusim                           |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3695 | PT            |             |            | 8               | Kelembagaan Tanaman Semusim                            |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                           | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                                |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |                       |                |                       |                       |
|------|---------------|-------------|---|---------------------------|--|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                           | SR   | R | T | B |              |                       |               |                       |                |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                           | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10            |                       |                |                       |                       |
| 3696 | PT            |             | 2 | Tanaman Rempah & Penyegar |  |   |   |   |              |                       |               |                       |                |                       |                       |
| 3697 | PT            |             |   | 1                         | Identifikasi Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar     |   |   |   |              | √                     | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                |                       |                       |
| 3698 | PT            |             |   | 2                         | Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar    |   |   |   |              |                       | √             | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |                       |
| 3699 | PT            |             |   | 3                         | Penyiapan Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar         |   |   |   |              |                       |               | √                     | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3700 | PT            |             |   | 4                         | Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Rempah & Penyegar    |   |   |   |              |                       |               | √                     | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3701 | PT            |             |   | 5                         | Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar |   |   |   |              |                       |               | √                     | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3702 | PT            |             |   | 6                         | Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar |   |   |   |              |                       |               | √                     | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3703 | PT            |             |   | 7                         | Pemberdayaan Tanaman Rempah & Penyegar                 |   |   |   |              |                       |               | √                     | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3704 | PT            |             |   | 8                         | Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar                  |   |   |   |              |                       |               | √                     | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3705 | PT            |             | 3 | Tanaman Tahunan           |  |   |   |   |              |                       |               |                       |                |                       |                       |
| 3706 | PT            |             |   | 1                         | Identifikasi Sumber Daya Tanaman Tahunan               |   |   |   |              |                       | √             | Tk. Eselon            |                |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3707 | PT            |             |   | 2                         | Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Tahunan              |   |   |   |              |                       |               | √                     | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3708 | PT            |             |   | 3                         | Penyiapan Perbenihan Tanaman Tahunan                   |   |   |   |              |                       |               | √                     | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3709 | PT            |             |   | 4                         | Bimbingan Peredaran Benih Tanaman Tahunan              |   |   |   |              |                       |               | √                     | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3710 | PT            |             |   | 5                         | Penyiapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan           |   |   |   |              |                       |               | √                     | Staff          | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|--------------------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                                |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                                |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 3711 | PT         |             |   | 6                              | Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Tahunan                           |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3712 | PT         |             |   | 7                              | Pemberdayaan Tanaman Tahunan   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3713 | PT         |             |   | 8                              | Kelembagaan Tanaman Tahunan  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3714 | PT         |             | 4 | Perlindungan Perkebunan        |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3715 | PT         |             |   | 1                              | Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim             |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3716 | PT         |             |   | 2                              | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim             |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3717 | PT         |             |   | 3                              | Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3718 | PT         |             |   | 4                              | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3719 | PT         |             |   | 5                              | Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman                     |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3720 | PT         |             |   | 6                              | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman                     |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3721 | PT         |             |   | 7                              | Dampak Perubahan Iklim   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3722 | PT         |             |   | 8                              | Pencegahan Kebakaran   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3723 | PT         |             | 5 | Pascapanen dan Pembinaan Usaha |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3724 | PT         |             |   | 1                              | Teknologi Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar              |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3725 | PT         |             |   | 2                              | Penerapan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar              |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |              |                           | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN  |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|--------------|---------------------------|--|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |              |                           | SR   | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |              |                           | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3726 | PT            |             |              | 3                         | Teknologi Pascapanen Tanaman Tahunan                             |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3727 | PT            |             |              | 4                         | Penerapan Pascapanen Tanaman Tahunan                             |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3728 | PT            |             |              | 5                         | Bimbingan Usaha Perkebunan                                       |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3729 | PT            |             |              | 6                         | Bimbingan Perkebunan Berkelanjutan                               |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3730 | PT            |             |              | 7                         | Gangguan Usaha   |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3731 | PT            |             |              | 8                         | Penanganan Konflik   |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3732 | PT            | 3           | HORTIKULTURA |                           |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 3733 | PT            |             | 1            | Perlindungan hortikultura |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 3734 | PT            |             |              | 1                         | Teknologi Perlindungan Tanaman Buah                              |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3735 | PT            |             |              | 2                         | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan                       |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3736 | PT            |             |              | 3                         | Teknologi Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat          |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3737 | PT            |             |              | 4                         | Pengendalian Organisme Tumbuhan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3738 | PT            |             |              | 5                         | Teknologi Perlindungan Tanaman Florikultura                      |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3739 | PT            |             |              | 6                         | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Florikultura          |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3740 | PT            |             |              | 7                         | Pengelolaan Dampak iklim dan Lingkungan                          |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                                |                                 | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |                                |                                 | SR  | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |                                |                                 | 4   | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 3741 | PT         |             |                                | 8                               | Informasi dan Persyaratan Teknis  |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3742 | PT         |             | 2                              | Perbenihan Hortikultura         |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 3743 | PT         |             |                                | 1                               | Bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Seksi Penilaian Varietas                                |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3744 | PT         |             |                                | 2                               | Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan di Bidang Penilaian Varietas                             |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3745 | PT         |             |                                | 3                               | Bahan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Teknis di Bidang Penilaian Varietas                               |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3746 | PT         |             |                                | 4                               | Bahan Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Penilaian Varietas |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3747 | PT         |             |                                | 5                               | Bahan Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis di Bidang Penilaian Varietas                       |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3748 | PT         |             |                                | 6                               | Bahan Penyiapan Bahan Evaluasi di Bidang Penilaian Varietas   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3749 | PT         |             |                                | 7                               | Bahan Tugas Kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan baik lisan maupun tertulis                |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3750 | PT         |             |                                | 8                               | Bahan Penyusunan dan penyajian laporan kegiatan serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan        |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3751 | PT         |             |                                | 9                               | Bahan Penyiapan dan pemeliharaan dokumen seksi Penilaian Varietas                                   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3752 | PT         | 4           | PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN |                                 |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 3753 | PT         |             | 1                              | Perluasan dan Pengelolaan Lahan |   |   |   |   |            |                    |                       |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                         |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                         |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                         |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 3754 | PT         |             |   | 1                       | Identifikasi Lahan untuk Basis Data Lahan   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3755 | PT         |             |   | 2                       | Analisis dan Penyajian Data Lahan   |                      |   |   | √ |            |                    |                       |
| 3756 | PT         |             |   | 3                       | Identifikasi dan Analisis Pengeadalian Lahan  |                      |   |   | √ |            |                    |                       |
| 3757 | PT         |             |   | 4                       | Rekomendasi Teknis pengendalian lahan   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3758 | PT         |             |   | 5                       | Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.                  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3759 | PT         |             |   | 6                       | Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi lahan.                           |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3760 | PT         |             |   | 7                       | Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman pangan.                             |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3761 | PT         |             |   | 8                       | Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan tanaman pangan.                         |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3762 | PT         |             |   | 9                       | Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan     |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3763 | PT         |             |   | 10                      | Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3764 | PT         |             | 2 | Pengelolaan Air Irigasi |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3765 | PT         |             |   | 1                       | Pengembangan Sumber Air Permukaan   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3766 | PT         |             |   | 2                       | Pengembangan Sumber Air Tanah   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3767 | PT         |             |   | 3                       | Pengembangan Jaringan   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3768 | PT         |             |   | 4                       | Optimasi Air  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                      |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|----------------------|--|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                      |  | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                      |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3769 | PT            |             |   | 5                    | Iklm   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3770 | PT            |             |   | 6                    | Konservasi Air dan Lingkungan Hidup                  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3771 | PT            |             |   | 7                    | Identifikasi Kelembagaan                             |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3772 | PT            |             |   | 8                    | Pengembangan Kelembagaan                             |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3773 | PT            |             | 3 | Pembiayaan Pertanian |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3774 | PT            |             |   | 1                    | Data dan Informasi pembiayaan program                |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3775 | PT            |             |   | 2                    | Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan program |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3776 | PT            |             |   | 3                    | Pembiayaan Syariah                                   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3777 | PT            |             |   | 4                    | Kerja Sama Pembiayaan Syariah                        |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3778 | PT            |             |   | 5                    | Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis          |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3779 | PT            |             |   | 6                    | Fasilitasi dan Pemantauan pembiayaan agribisnis      |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3780 | PT            |             |   | 7                    | Kelembagaan Agribisnis                               |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3781 | PT            |             |   | 8                    | Pemberdayaan Agribisnis                              |                         |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3782 | PT            |             | 4 | Pupuk Pesticida      |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 3783 | PT            |             |   | 1                    | Pupuk Organik dan Pembenah Tanah Tanaman Pangan      |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                |                          | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN   |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|----------------|--------------------------|---|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |                |                          | SR  | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |                |                          | 4   | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3784 | PT            |             |                | 2                        | Pupuk Organik dan Pembenah Tanah Hortikultura dan Perkebunan                      |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3785 | PT            |             |                | 3                        | Pupuk Anorganik Tanaman Pangan  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3786 | PT            |             |                | 4                        | Pupuk Anorganik Hortikultura dan Perkebunan                                       |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3787 | PT            |             |                | 5                        | Pestisida Kimia   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3788 | PT            |             |                | 6                        | Pestisida Hayati  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3789 | PT            |             |                | 7                        | Pengawasan Pupuk  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3790 | PT            |             |                | 8                        | Pengawasan Pestisida  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3791 | PT            |             | 5              | Alat dan Mesin Pertanian |   |   |   |   |              |                       |                       |
| 3792 | PT            |             |                | 1                        | Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura             |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3793 | PT            |             |                | 2                        | Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Perkebunan dan Peternakan                   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3794 | PT            |             |                | 3                        | Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3795 | PT            |             |                | 4                        | Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Perkebunan dan Peternakan       |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3796 | PT            |             |                | 5                        | Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3797 | PT            |             |                | 6                        | Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3798 | PT            | 5           | TANAMAN PANGAN |                          |   |   |   |   |              |                       |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                           | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN         |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|---------------------------|---------------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                           | SR                              | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                           | 4                               | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3799 | PT            |             | 1 | Perbenihan Tanaman Pangan |                                 |   |   |   |              |                       |                       |
| 3800 | PT            |             |   | 1                         | Penilaian Varietas              |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3801 | PT            |             |   | 2                         | Pengawasan Mutu Benih           |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3802 | PT            |             |   | 3                         | Produksi Benih Serealia Padi    |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3803 | PT            |             |   | 4                         | Produksi Benih Serelia Non Padi |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3804 | PT            |             |   | 5                         | Produksi Benih Aneka Kacang     |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3805 | PT            |             |   | 6                         | Produksi Benih Umbi             |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3806 | PT            |             |   | 7                         | Kelembagaan Produksi            |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3807 | PT            |             |   | 8                         | Kelembagaan Pengawasan          |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3808 | PT            |             | 2 | Budidaya Serealia         |                                 |   |   |   |              |                       |                       |
| 3809 | PT            |             |   | 1                         | Padi Irigasi                    |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3810 | PT            |             |   | 2                         | Padi Rawa                       |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3811 | PT            |             |   | 3                         | Padi Tadah Hujan                |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3812 | PT            |             |   | 4                         | Padi Tadah Lahan Kering         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3813 | PT            |             |   | 5                         | Intensifikasi Jagung            |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3814 | PT            |             |   | 6                         | Pengembangan Jagung             |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                                    |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|--------------------------------|--|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                                | SR   | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                                | 4  | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3815 | PT            |             |   | 7                              | Intensifikasi Serealia Lain                                |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3816 | PT            |             |   | 8                              | Pengembangan Serealia Lain                                 |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3817 | PT            |             | 3 | Budidaya Aneka Kacang dan Umbi |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 3818 | PT            |             |   | 1                              | Intensifikasi Kedelai                                      |   |   | √ | Staff        |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3819 | PT            |             |   | 2                              | Pengembangan Kedelai                                       |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3820 | PT            |             |   | 3                              | Intensifikasi Ubi Kayu                                     |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3821 | PT            |             |   | 4                              | Pengembangan Ubi Kayu                                      |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3822 | PT            |             |   | 5                              | Intensifikasi Aneka Kacang                                 |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3823 | PT            |             |   | 6                              | Pengembangan Aneka Kacang                                  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3824 | PT            |             |   | 7                              | Intensifikasi Aneka Umbi                                   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3825 | PT            |             |   | 8                              | Pengembangan Aneka Umbi                                    |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3826 | PT            |             | 4 | Perlindungan Tanaman Pangan    |  |   |   |   |              |                       |                       |
| 3827 | PT            |             |   | 1                              | Monitoring dan Analisis Data organisme pengganggu tumbuhan |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3828 | PT            |             |   | 2                              | Evaluasi dan Pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3829 | PT            |             |   | 3                              | Adaptasi Dampak Perubahan Iklim                            |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                           | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN   |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|---------------------------|---|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                           | SR  | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                           | 4   | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3830 | PT            |             |   | 4                         | Mitigasi dampak perubahan iklim   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3831 | PT            |             |   | 5                         | Identifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan                               |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3832 | PT            |             |   | 6                         | Verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan                                 |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3833 | PT            |             |   | 7                         | Pemasyarakatan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3834 | PT            |             |   | 8                         | Kelembagaan pengelolaan pengendalian hama terpadu, serta analisis mengenai dampak lingkungan    |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3835 | PT            |             | 5 | Pascapanen Tanaman Pangan |   |   |   |   |              |                       |                       |
| 3836 | PT            |             |   | 1                         | Teknologi pascapanen padi.  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3837 | PT            |             |   | 2                         | Sarana pascapanen padi.   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3838 | PT            |             |   | 3                         | Teknologi pascapanen jagung dan serealia lain.  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3839 | PT            |             |   | 4                         | Sarana pascapanen jagung dan serealia lain.   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3840 | PT            |             |   | 5                         | Teknologi pascapanen kedelai dan aneka kacang.  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3841 | PT            |             |   | 6                         | Sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang.   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3842 | PT            |             |   | 7                         | Teknologi pascapanen aneka umbi.  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3843 | PT            |             |   | 8                         | Sarana pascapanen aneka umbi.   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |  |                            | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN   |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|--|----------------------------|---|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |  |                            | SR  | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |  |                            | 4   | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3844 | PT            | 6           | PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN |                            |   |   |   |   |              |                       |                       |
| 3845 | PT            |             | 1  | Pengolahan Hasil Pertanian |   |   |   |   |              |                       |                       |
| 3846 | PT            |             |  | 1                          | Tanaman Pangan Serelia  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3847 | PT            |             |  | 2                          | Tanaman Pangan Aneka Kacang dan Aneka Umbi                            |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3848 | PT            |             |  | 3                          | Tanaman Buah dan Sayuran  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3849 | PT            |             |  | 4                          | Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat                                 |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3850 | PT            |             |  | 5                          | Tanaman Perkebunan Semusim  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3851 | PT            |             |  | 6                          | Tanaman Perkebunan Tahunan  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3852 | PT            |             |  | 7                          | Peternakan Ruminansia   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3853 | PT            |             |  | 8                          | Peternakan Non Ruminansia   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3854 | PT            |             | 2  | Mutu dan Standarasi        |   |   |   |   |              |                       |                       |
| 3855 | PT            |             |  | 1                          | Standardisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3856 | PT            |             |  | 2                          | Standardisasi Perkebunan dan Peternakan                               |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3857 | PT            |             |  | 3                          | Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3858 | PT            |             |  | 4                          | Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu Perkebunan dan Peternakan       |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                  |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|----------------------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                                  |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                                  |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 3859 | PT         |             |   | 5                                | Akreditasi dan Kelembagaan Tanaman Pangan dan Hortikultura |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3860 | PT         |             |   | 6                                | Akreditasi dan Kelembagaan Perkebunan dan Peternakan       |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3861 | PT         |             |   | 7                                | Kerjasama dan Harmonisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3862 | PT         |             |   | 8                                | Kerjasama dan Harmonisasi Perkebunan dan Peternakan        |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3863 | PT         |             | 3 | Pengembangan Usaha dan Investasi |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3864 | PT         |             |   | 1                                | Kemitraan  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3865 | PT         |             |   | 2                                | Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif                          |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3866 | PT         |             |   | 3                                | Investasi Tanaman Pangan dan Hortikultura                  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3867 | PT         |             |   | 4                                | Investasi Perkebunan dan Peternakan                        |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3868 | PT         |             |   | 5                                | Daya Saing Promosi Dalam Negeri                            |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3869 | PT         |             |   | 6                                | Eksibisi dan Ekspo Promosi Dalam Negeri                    |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3870 | PT         |             |   | 7                                | Daya Saing Promosi Luar Negeri                             |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3871 | PT         |             |   | 8                                | Eksibisi dan Ekspo Promosi Luar Negeri                     |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3872 | PT         |             | 4 | Pemasaran Domestik               |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 3873 | PT         |             |   | 1                                | Analisis Informasi Pasar                                   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                         | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                       |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|-------------------------|---|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                         | SR  | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                         | 4   | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3874 | PT            |             |   | 2                       | Deseminasi Informasi Pasar                    |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3875 | PT            |             |   | 3                       | Pemantauan Pasar                              |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3876 | PT            |             |   | 4                       | Stabilisasi Harga                             |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3877 |               |             |   | 5                       | Sarana Pasar                                  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3878 | PT            |             |   | 6                       | Kelembagaan Pasar                             |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3879 | PT            |             |   | 7                       | Akses Pasar untuk Jaringan Pemasaran          |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3880 | PT            |             |   | 8                       | Sarana Pemasaran untuk Jaringan Pemasaran     |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3881 | PT            |             | 5   | Pemasaran Internasional |   |   |   |   |              |                       |                       |
| 3882 | PT            |             |   | 1                       | Analisis Ekspor                               |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3883 | PT            |             |   | 2                       | Pengembangan Ekspor                           |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3884 | PT            |             |   | 3                       | Pemasaran Bilateral                           |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3885 | PT            |             |   | 4                       | Pemasaran Regional                            |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3886 | PT            |             |   | 5                       | Pemasaran Multilateral                        |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3887 | PT            |             |   | 6                       | Kerjasama Komoditi Regional                   |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3888 | PT            |             |   | 7                       | Kerjasama Komoditi Multilateral dan Bilateral |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       |                       |
| 3889 | PT            | 7           | PENELITIAN , PENGKAJIAN ,DAN PENGEMBANGAN |                         |   |   |   |   |              |                       |                       |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |           | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                       |
|------|------------|-------------|-----------|--|---|---|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|
|      |            |             |           | SR   | R | T | B |           |                    |                |                       |
| 1    | 2          | 3           |           | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |                       |
|      |            |             | PERTANIAN |  |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 3890 | PT         |             | 1         | Administrasi   |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 3891 | PT         |             | 1         | Rencana Kerja  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3892 | PT         |             | 2         | TOR/ Proposal  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3893 | PT         |             | 3         | Pembentukan Tim Kerja  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3894 | PT         |             | 4         | Surat menyurat   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3895 | PT         |             | 2         | Hasil Penelitian,Pengkajian, dan Pengembangan                                      |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 3896 | PT         |             | 1         | Hasil Penelitian dan Pengembangan  |   |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan |
| 3897 | PT         |             | 2         | Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi  |   |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan |
| 3898 | PT         |             | 3         | Diseminasi   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko |                       |
| 3899 | PT         |             | 4         | Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian   |   |   |   |           | Staff              | Tidak beresiko |                       |
| 3900 | PT         |             | 1         | Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop |   |   |   |           | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3901 | PT         |             | 2         | Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya                        |   |   |   |           | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3902 | PT         |             | 5         | Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan                          |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko |                       |
| 3903 | PT         |             | 6         | Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan                                       |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                                     |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN             |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |                |                |                       |
|------|---------------|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|
|      |               |             |                                     |  | SR                                  | R | T | B |              |                       |               |                |                |                       |
| 1    | 2             | 3           |                                     |  | 4                                   | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10            |                |                |                       |
| 3904 | PT            |             | 7                                   | Data Penelitian dan Pengembangan                 |                                     |   |   |   | √            |                       | Tk. Eselon    |                |                |                       |
| 3905 | PT            |             | 8                                   | Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan |                                     |   |   |   |              | √                     | Staff         |                |                |                       |
| 3906 | PT            | 8           | HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) |  |                                     |   |   |   |              |                       |               |                |                |                       |
| 3907 | PT            |             |                                     | 1  | Hak Cipta                           |   |   |   |              |                       | √             | Staff          | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3908 | PT            |             |                                     | 2  | Hak Paten Sederhana                 |   |   |   |              |                       | √             | Staff          | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3909 | PT            |             |                                     | 3  | Hak Paten Biasa                     |   |   |   |              |                       | √             | Staff          | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3910 | PT            |             |                                     | 4  | Hak Merek                           |   |   |   |              |                       | √             | Staff          | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3911 | PT            |             |                                     | 5  | Pendaftaran Varietas Tanaman        |   |   |   |              |                       | √             | Staff          | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3912 | PT            |             |                                     | 6  | Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim |   |   |   |              |                       | √             | Staff          | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3913 | PT            |             |                                     | 7  | Permohonan Hak PVTT Tanaman Tahunan |   |   |   |              |                       | √             | Staff          | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3914 | PT            |             |                                     | 8  | Permohonan HKI yang ditolak         |   |   |   |              |                       | √             | Staff          | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3915 | PT            |             | 9                                   | Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan     |                                     |   |   |   |              | √                     | Staff         |                | Tidak beresiko |                       |
| 3916 | PT            |             | 10                                  | Data Penelitian dan Pengembangan                 |                                     |   |   |   |              | √                     | Staff         | Tidak beresiko |                |                       |
| 3917 | PT            | 9           | KETAHANAN PANGAN                    |  |                                     |   |   |   |              |                       |               |                |                |                       |
| 3918 | PT            |             | 1                                   | Ketersediaan dan Kerawanan Pangan                |                                     |   |   |   |              |                       |               |                |                |                       |
| 3919 | PT            |             |                                     | 1  | Analisis Ketersediaan Pangan        |   |   |   |              |                       | √             |                |                | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN         |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|--|---------------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |  | SR                              | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |  | 4                               | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3920 | PT            |             |   | 2  | Sumberdaya Pangan               |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3921 | PT            |             |   | 3  | Analisis Akses Pangan           |   |   | √ |              |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3922 | PT            |             |   | 4  | Pengembangan Akses Pangan       |   |   | √ |              |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3923 | PT            |             |   | 5  | Analisis Kerawanan Pangan       |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3924 | PT            |             |   | 6  | Penanggulangan Kerawanan Pangan |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3925 | PT            |             | 2 | Distribusi dan Cadangan Pangan                 |                                 |   |   |   |              |                       |                       |
| 3926 | PT            |             |   | 1  | Analisis Distribusi Pangan      |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3927 | PT            |             |   | 2  | Kelembagaan Distribusi Pangan   |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3928 | PT            |             |   | 3  | Analisis Harga Pangan Produsen  |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3929 | PT            |             |   | 4  | Analisis Harga Pangan Konsumen  |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3930 | PT            |             |   | 5  | Cadangan Pangan Pemerintah      |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3931 | PT            |             |   | 6  | Cadangan Pangan Masyarakat      |   |   | √ | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 3932 | PT            |             | 3 | Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan |                                 |   |   |   |              |                       |                       |
| 3933 | PT            |             |   | 1  | Pola Konsumsi Pangan            |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3934 | PT            |             |   | 2  | Kebutuhan Konsumsi Pangan       |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3935 | PT            |             |   | 3  | Pengembangan Pangan Lokal       |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                     |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN              |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |                     |  | SR                                   | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |                     |  | 4                                    | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 3936 | PT            |             |                     | 4                                      | Promosi Penganekaragaman Pangan      |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3937 | PT            |             |                     | 5                                      | Pengawasan Keamanan Pangan Segar     |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3938 | PT            |             |                     | 6                                      | Kelembagaan Keamanan Pangan Segar    |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3939 | PT            |             | 4                   | Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan |                                      |   |   |   |              |                       |                       |
| 3940 | PT            |             |                     | 1                                      | Pengelolaan Lembaga Ketahanan Pangan |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3941 | PT            |             |                     | 2                                      | Dewan Ketahanan Pangan               |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3942 | PT            |             |                     | 3                                      | SOLID                                |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3943 | PT            |             |                     | 4                                      | Penghargaan Ketahan Pangan           |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3944 | PT            | 10          | KARANTINA PERTANIAN |  |                                      |   |   |   |              |                       |                       |
| 3945 | PT            |             | 1                   | Data karantina Hewan                   |                                      |   |   |   |              |                       |                       |
| 3946 | PT            |             |                     | 1                                      | Data Penyakit Hewan                  |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3947 | PT            |             |                     | 2                                      | Teknik dan Metode                    |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3948 | PT            |             |                     | 3                                      | Data Kualitatif dan Kuantitatif      |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3949 | PT            |             |                     | 4                                      | Data Sarana/Laboratorium/Lokasi      |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3950 | PT            |             |                     | 5                                      | Laporan                              |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 3951 | PT            |             | 2                   | Data Karantina Tumbuhan                |                                      |   |   |   |              |                       |                       |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                 | KLASIFIKASI KEAMANAN                                     |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                       |
|------|------------|-------------|---|---------------------------------|--|---|---|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                                 | SR   | R | T | B |           |                    |                |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                                 | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |                       |
| 3952 | PT         |             |   | 1                               | Data Penyakit Tumbuhan                                   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3953 | PT         |             |   | 2                               | Teknik dan Metode  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3954 | PT         |             |   | 3                               | Data Kualitatif dan Kuantitatif                          |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3955 | PT         |             |   | 4                               | Data Sarana/Laboratorium/Lokasi                          |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3956 | PT         |             |   | 5                               | Laporan  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3957 | PT         |             | 3 | Inventarisasi Penyakit Hewan    |  |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 3958 | PT         |             |   | 1                               | Survei   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3959 | PT         |             |   | 2                               | Determinasi Penyakit/Daerah Pencar                       |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3960 | PT         |             |   | 3                               | pengamatan Penyakit di laboratorium/kandang uji diagnosa |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3961 | PT         |             | 4 | Inventarisasi Penyakit Tumbuhan |  |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 3962 | PT         |             |   | 1                               | Survei   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3963 | PT         |             |   | 2                               | Determinasi Penyakit/Daerah Pencar                       |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3964 | PT         |             |   | 3                               | pengamatan Penyakit di laboratorium/kandang uji diagnosa |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3965 | PT         |             | 5 | Tindakan Karantina Hewan        |  |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 3966 | PT         |             |   | 1                               | Pemeriksaan  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3967 | PT         |             |   | 2                               | Pengasingan  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                 | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                       |
|------|---------------|-------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                                 | SR                      | R | T | B |              |                       |                |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                                 | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10             |                       |
| 3968 | PT            |             |   | 3                               | Pengamatan              |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3969 | PT            |             |   | 4                               | Perlakuan               |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3970 | PT            |             |   | 5                               | Penahanan               |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3971 | PT            |             |   | 6                               | Penolakan               |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3972 | PT            |             |   | 7                               | Pemusnahan              |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3973 | PT            |             |   | 8                               | Pembebasan              |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3974 | PT            |             | 6 | Tindakan Karantina Tumbuhan     |                         |   |   |   |              |                       |                |                       |
| 3975 | PT            |             |   | 1                               | Pemeriksaan             |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3976 | PT            |             |   | 2                               | Pengasingan             |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3977 | PT            |             |   | 3                               | Pengamatan              |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3978 | PT            |             |   | 4                               | Perlakuan               |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3979 | PT            |             |   | 5                               | Penahanan               |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3980 | PT            |             |   | 6                               | Penolakan               |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3981 | PT            |             |   | 7                               | Pemusnahan              |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3982 | PT            |             |   | 8                               | Pembebasan              |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 3983 | PT            |             | 7 | Sertifikasi Pelepasan Karantina |                         |   |   |   |              |                       |                |                       |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |    |                                    | KLASIFIKASI KEAMANAN                                  |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|----|------------------------------------|---|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |    |                                    | SR  | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |    |                                    | 4   | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 3984 | PT         |             |    | 1                                  | Sertifikasi Pelepasan Karantina Hewan                 |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3985 | PT         |             |    | 2                                  | Sertifikasi Pelepasan Karantina Tumbuhan              |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3986 | PT         |             | 8  | Pemberantasan Penyakit Hewan       |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 3987 | PT         |             |    | 1                                  | Penutupan Satu Daerah                                 |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3988 | PT         |             |    | 2                                  | Pembatasan Gerak HPHK                                 |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3989 | PT         |             |    | 3                                  | Pembinaan HPHK  |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3990 | PT         |             | 9  | Pemberantasan Penyakit Tumbuhan    |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 3991 | PT         |             |    | 1                                  | Penutupan Satu Daerah                                 |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3992 | PT         |             |    | 2                                  | Pembatasan Gerak OPHK                                 |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3993 | PT         |             |    | 3                                  | Pembinaan OPHK  |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 3994 | PT         |             | 10 | Keamanan Pangan                    |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 3995 | PT         |             |    | 1                                  | Pengawasan Keamanan PSAH (Pangan Segar Asal Hewan)    |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3996 | PT         |             |    | 2                                  | Pengawasan Keamanan PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3997 | PT         |             | 11 | Tertib Operasional Karantina Hewan |   |   |   |   |            |                    |                       |
| 3998 | PT         |             |    | 1                                  | Penelitian Data Laporan Operasional                   |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 3999 | PT         |             |    | 2                                  | Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS)                       |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                                    |
|------|------------|-------------|---|---|--|---|---|---|-----------|--------------------|--|
|      |            |             |   |   | SR   | R | T | B |           |                    |  |
| 1    | 2          | 3           |   |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10   |
| 4000 | PT         |             | 12  | Tertib Operasional Karantina Tumbuhan   |  |   |   |   |           |                    |  |
| 4001 | PT         |             |   | 1                                       | Penelitian Data Laporan Operasional  |   |   |   |           | √                  | Staff<br>Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan |
| 4002 | PT         |             |   | 2                                       | Polisi Khusus/Ketertiban (PPNS)  |   |   |   |           | √                  | Staff<br>Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan |
| 4003 | PT         | 11          | PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN |   |  |   |   |   |           |                    |  |
| 4004 | PT         |             | 1   | Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman |  |   |   |   |           |                    |  |
| 4005 | PT         |             |   | 1                                       | Permohonan Perlindungan Varietas Tananm  |   |   |   |           | √                  | Staff<br>Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan |
| 4006 | PT         |             |   | 2                                       | Pengujian Perlindungan Varietas Tananm   |   |   |   |           | √                  | Staff<br>Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan |
| 4007 | PT         |             |   | 3                                       | Pendaftaran Varietas Sumber Daya Genetik Tanaman   |   |   |   |           | √                  | Staff<br>Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan |
| 4008 | PT         |             | 2   | Pelayanan Perijinan Pertanian           |  |   |   |   |           |                    |  |
| 4009 | PT         |             |   | 1                                       | Sarana I ( bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian )   |   |   |   |           | √                  | Staff<br>Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan |
| 4010 | PT         |             |   | 2                                       | Sarana II ( bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhn, teknis pengalihan saham perkebunan ) |   |   |   |           | √                  | Staff<br>Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan |
| 4011 | PT         |             |   | 3                                       | Sarana III ( bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak )    |   |   |   |           | √                  | Staff<br>Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan |
| 4012 | PT         |             | 3   | Pelayanan Hukum                         |  |   |   |   |           |                    |  |
| 4013 | PT         |             |   | 1                                       | Sertifikasi  |   |   |   |           | √                  | Staff<br>Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP             |                  |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES             | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------------------|------------------|---|---|----------------------|---|---|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |                         |                  |   |   | SR                   | R | T | B |                       |                    |                       |
| 1    | 2          | 3                       |                  |   |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8                     | 9                  | 10                    |
| 4014 | PT         |                         |                  | 2 | Pertimbangan Hukum                              |                      |   | √ |   | Tk. Eselon            |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4015 | PT         | 12                      | BIMBINGAN TEKNIS |   |   |                      |   |   | √ | Staff                 | Tidak beresiko     |                       |
| 4016 | PT         | 13                      | EVALUASI         |   |   |                      |   |   | √ | Staff                 | Tidak beresiko     |                       |
| 4017 | ST         | <b>URUSAN STATISTIK</b> |                  |   |   |                      |   |   |   |                       |                    |                       |
| 4018 | ST         | 1                       |                  |   | Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi         |                      |   |   |   |                       |                    |                       |
| 4019 | ST         |                         | 1                |   | Perencanaan                                     |                      |   |   |   |                       |                    |                       |
| 4020 | ST         |                         |                  | 1 | Master Plan dan Network planing                 |                      |   | √ |   | Tk. Eselon            |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4021 | ST         |                         |                  | 2 | Penyiapan bahan penyusunan rancangan sensus     |                      |   | √ |   | Tk. Eselon            |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4022 | ST         |                         |                  | 3 | Penyusunan metode pencacahan sensus             |                      |   | √ |   | Tk. Eselon            |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4023 | ST         |                         |                  | 4 | Penentuan volume sensus                         |                      |   | √ |   | Unit pelaksana urusan |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4024 | ST         |                         |                  | 5 | Penyusunan desain penarikan sampel              |                      |   | √ |   | Tk. Eselon            |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4025 | ST         |                         |                  | 6 | Penyusunan kerangka sampel                      |                      |   | √ |   | Tk. Eselon            |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4026 | ST         |                         |                  | 7 | Studi pendahuluan ( <i>desk study</i> )         |                      |   | √ |   | Tk. Eselon            |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4027 | ST         |                         | 2                |   | Persiapan                                       |                      |   |   |   | Tk. Eselon            |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4028 | ST         |                         |                  | 1 | Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus |                      |   | √ |   | Tk. Eselon            |                    | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |  |    | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN   |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|--|----|---|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |  |    | SR  | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |  |    | 4   | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 4029 | ST            |             |  | 2  | Penyusunan Kuesioner  |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 4030 | ST            |             |  | 3  | Penyusunan konsep dan definisi  |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 4031 | ST            |             |  | 4  | Inventarisasi, penyusunan dan pengembangan ukuran-ukuran yang digunakan dalam sensus                |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 4032 | ST            |             |  | 5  | Inventarisasi, penyusunan dan pengembangan lapangan usaha, jabatan, komoditas, perdesaan, perkotaan |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 4033 | ST            |             |  | 6  | Penyusunan daftar nama dan kode pembagian wilayahadministrasi                                       |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 4034 | ST            |             |  | 7  | Penyusunan buku pedoman pencacahan  |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 4035 | ST            |             |  | 8  | Penyusunan buku pedoman pengawasan  |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 4036 | ST            |             |  | 9  | Penyusunan buku pedoman pengolahan  |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 4037 | ST            |             |  | 10 | Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 4038 | ST            |             |  | 11 | Penyusunan pedoman sosialisasi  |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 4039 | ST            |             |  | 12 | Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan)                |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 4040 | ST            |             |  | 13 | Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan eksterm)   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 4041 | ST            |             |  | 14 | Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT)  |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |
| 4042 | ST            |             |  | 15 | Pelaksanaan pelatihan petugas   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |    |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|----|--|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |    |  | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |    |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 4043 | ST            |             |   | 16 | Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi)  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4044 | ST            |             |   | 17 | Pelatihan petugas pengolahan   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4045 | ST            |             |   | 18 | Perancangan tabel  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4046 | ST            |             |   | 19 | Pelaksanaan Ujicoba kuesioner sensus (meliputi reliabilitas kuesioner dan sistem pengolahan)                           |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4047 | ST            |             |   | 20 | Pelaksanaan Ujicoba metodologi sensus (meliputi ujicoba pelaksanaan pencacahan, organisasi lapangan dan jumlah sampel) |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4048 | ST            |             | 3 |    | Pelaksanaan Lapangan   |                         |   |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4049 | ST            |             |   | 1  | Pelaksanaan listing  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4050 | ST            |             |   | 2  | Pemilihan sampel   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4051 | ST            |             |   | 3  | Pengumpulan data   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4052 | ST            |             |   | 4  | Pemeriksaan  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4053 | ST            |             |   | 5  | Pengawasan Lapangan  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4054 | ST            |             |   | 6  | Monitoring kualitas  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4055 | ST            |             | 4 |    | Pengolahan   |                         |   |   |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4056 | ST            |             |   | 1  | Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/Batching)  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN                             |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH                           |
|------|---------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--------------|-----------------------|---|
|      |               |             |   |   | SR  | R | T | B |              |                       |   |
| 1    | 2             | 3           |   |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                                      |
| 4057 | ST            |             |   | 2 | Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding) |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan                   |
| 4058 | ST            |             |   | 3 | Perekaman data (entri, scanner)                     |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan                   |
| 4059 | ST            |             |   | 4 | Tabulasi Data                                       |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan                   |
| 4060 | ST            |             |   | 5 | Pemeriksaan tabulasi                                |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan                   |
| 4061 | ST            |             |   | 6 | Laporan konsistensi tabulasi                        |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan                   |
| 4062 | ST            |             | 5 |   | Analisis dan Penyajian Hasil Sensus                 |   |   |   |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan                   |
| 4063 | ST            |             |   | 1 | Pembahasan angka hasil pengolahan                   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan                   |
| 4064 | ST            |             |   | 2 | Penyusunan angka sementara                          |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan                   |
| 4065 | ST            |             |   | 3 | Penyusunan angka tetap                              |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan                   |
| 4066 | ST            |             |   | 4 | Penyusunan/pembahasan draft publikasi               |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan                   |
| 4067 | ST            |             |   | 5 | Analisis data                                       |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan                   |
| 4068 | ST            |             |   | 6 | Penyusunan publikasi hasil sensus                   |   |   | √ |              | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan                   |
| 4069 | ST            |             | 6 |   | Diseminasi hasil sensus                             |   |   |   |              |                       |   |
| 4070 | ST            |             |   | 1 | Penyusunan bahan diseminasi berupa leaflet, booklet |   |   |   |              |                       |   |
| 4071 | ST            |             |   | 2 | Penyusunan bahan diseminasi berupa website          |   |   |   | √            | Staff                 | Tidak beresiko<br>Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |   |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|---|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |   |   | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |   |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 4072 | ST            |             |   | 3 | Penyusunan bahan diseminasi berupa penyusunan CD dan sejenisnya |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4073 | ST            |             |   | 4 | Sosialisasi hasil sensus melalui berbagai media                 |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4074 | ST            |             |   | 5 | Layanan dan promosi statistik                                   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4075 | ST            | 2           |   |   | Survei  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 4076 | ST            |             | 1 |   | Perencanaan   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 4077 | ST            |             |   | 1 | Master Plan dan Network planing                                 |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4078 | ST            |             |   | 2 | Penyiapan bahan penyusunan rancangan survei                     |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4079 | ST            |             |   | 3 | Penyusunan metode pencacahan survei                             |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4080 | ST            |             |   | 4 | Penentuan volume survei   |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4081 | ST            |             |   | 5 | Penyusunan desain penarikan sampel                              |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4082 | ST            |             |   | 6 | Penyusunan kerangka sampel                                      |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4083 | ST            |             |   | 7 | Studi pendahuluan (desk study)                                  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4084 | ST            |             | 2 |   | Persiapan   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 4085 | ST            |             |   | 1 | Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus                 |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4086 | ST            |             |   | 2 | Penyusunan Koesioner  |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |  |    | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |                       |
|------|------------|-------------|--|----|--|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |            |             |  |    | SR   | R | T | B |           |                    |                       |                       |
| 1    | 2          | 3           |  |    | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |                       |
| 4087 | ST         |             |  | 3  | Penyusunan konsep dan definisi   |   |   | √ |           | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |
| 4088 | ST         |             |  | 4  | Inventarisasi , penyusunan dan pengembangan ukuran-ukuran yang digunakan dalam sensus                |   |   | √ |           | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |
| 4089 | ST         |             |  | 5  | Inventarisasi , penyusunan dan pengembangan lapangan usaha, jabatan, komoditas, perdesaan, perkotaan |   |   | √ |           | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |
| 4090 | ST         |             |  | 6  | Penyusunan daftar nama dan kode pembagian wilayah administrasi                                       |   |   | √ |           | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |
| 4091 | ST         |             |  | 7  | Penyusunan buku pedoman pencacahan   |   |   | √ |           | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |
| 4092 | ST         |             |  | 8  | Penyusunan buku pedoman pengawasan   |   |   | √ |           | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |
| 4093 | ST         |             |  | 9  | Penyusunan buku pedoman pengolahan   |   |   | √ |           | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |
| 4094 | ST         |             |  | 10 | Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah  |   |   | √ |           | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |
| 4095 | ST         |             |  | 11 | Penyusunan pedoman sosialisasi   |   |   | √ |           | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |
| 4096 | ST         |             |  | 12 | Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan)                 |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4097 | ST         |             |  | 13 | Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan eksterm)  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4098 | ST         |             |  | 14 | Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT)   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4099 | ST         |             |  | 15 | Pelaksanaan pelatihan petugas  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4100 | ST         |             |  | 16 | Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi)                      |   |   | √ |           | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |                       |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |    |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|----|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |    |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |    |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 4101 | ST         |             |   | 17 | Pelatihan petugas pengolahan   |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4102 | ST         |             |   | 18 | Perancangan tabel  |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4103 | ST         |             |   | 19 | Pelaksanaan Ujicoba koesioner survei (meliputi reliabilitas koesioner dan sistem pengolahan)                           |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4104 | ST         |             |   | 20 | Pelaksanaan Ujicoba metodologi sensus (meliputi ujicoba pelaksanaan pencacahan, organisasi lapangan dan jumlah sampel) |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4105 | ST         |             | 3 |    | Pelaksanaan Lapangan   |                      |   |   |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4106 | ST         |             |   | 1  | Pelaksanaan listing  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4107 | ST         |             |   | 2  | Pemilihan sampel   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4108 | ST         |             |   | 3  | Pengumpulan data   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4109 | ST         |             |   | 4  | Pemeriksaan  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4110 | ST         |             |   | 5  | Pengawasan Lapangan  |                      |   |   | √ |            |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4111 | ST         |             |   | 6  | Monitoring kualitas  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4112 | ST         |             | 4 |    | Pengolahan   |                      |   |   |   |            |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4113 | ST         |             |   | 1  | Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/Batching)  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4114 | ST         |             |   | 2  | Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding)  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN   |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |            |                |                       |
|------|---------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--------------|-----------------------|---------------|------------|----------------|-----------------------|
|      |               |             |   |   | SR  | R | T | B |              |                       |               |            |                |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10            |            |                |                       |
| 4115 | ST            |             |   | 3 | Perekaman data (entri, scanner)                                 |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 4116 | ST            |             |   | 4 | Tabulasi Data   |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 4117 | ST            |             |   | 5 | Pemeriksaan tabulasi  |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 4118 | ST            |             |   | 6 | Laporan konsistensi tabulasi                                    |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4119 | ST            |             | 5 |   | Analisis dan Penyajian Hasil Survei                             |   |   |   |              |                       |               |            |                |                       |
| 4120 | ST            |             |   | 1 | Pembahasan angka hasil pengolahan                               |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 4121 | ST            |             |   | 2 | Penyusunan angka sementara                                      |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 4122 | ST            |             |   | 3 | Penyusunan angka tetap  |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 4123 | ST            |             |   | 4 | Penyusunan/pembahasan draft publikasi                           |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 4124 | ST            |             |   | 5 | Analisis data   |   |   |   |              | √                     |               | Tk. Eselon |                | Unit pelaksana urusan |
| 4125 | ST            |             |   | 6 | Penyusunan publikasi  |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4126 | ST            |             | 6 |   | Diseminasi hasil survei   |   |   |   |              |                       |               | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4127 | ST            |             |   | 1 | Penyusunan bahan diseminasi berupa leaflet, booklet             |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4128 |               |             |   | 2 | Penyusunan bahan diseminasi berupa penyusunan website           |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4129 | ST            |             |   | 3 | Penyusunan bahan diseminasi berupa penyusunan CD dan sejenisnya |   |   |   |              |                       | √             | Staff      | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP          |                     |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|----------------------|---------------------|---|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |                      |                     |   |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3                    |                     |   |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 4130 | ST         |                      |                     | 4   | Sosialisasi hasil survei melalui berbagai media                      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4131 | ST         | 3                    |                     |   | Konsolidasi Data Statistik   |                      |   |   |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4132 | ST         |                      | 1                   |   | Kompilasi Data   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4133 | ST         |                      | 2                   |   | Analisis data  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4134 | ST         |                      | 3                   |   | Penyusunan Publikasi   |                      |   |   | √ |            |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4135 | ST         | 4                    |                     |   | Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei dan Konsolidasi data statistik |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4136 | <b>SS</b>  | <b>URUSAN SOSIAL</b> |                     |   |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4137 | SS         | 1                    | Rehabilitasi Sosial |   |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4138 | SS         |                      | 1                   | Kesejahteraan sosial anak                         |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4139 | SS         |                      |                     | 1   | Pengangkatan Kesejahteraan Anak Balita                               |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4140 | SS         |                      |                     | 2   | Kesejahteraan Pengasuhan Anak Balita                                 |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4141 | SS         |                      | 2                   | Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar               |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4142 | SS         |                      |                     | 1   | Kesejahteraan Pengasuhan Anak dalam Keluarga                         |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4143 | SS         |                      |                     | 2   | Kesejahteraan Pengasuhan Anak dalam Lembaga                          |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4144 | SS         |                      | 3                   | Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |  |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES  | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|--|--|-------------------------|---|---|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |  |  | SR                      | R | T | B |               |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |  |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8             | 9                     | 10                    |
| 4145 | SS            |             |   | 1  | Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum  |                         |   | √ |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4146 | SS            |             |   | 2  | Pengembangan Remaja  |                         |   | √ |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4147 | SS            |             | 4 | Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan                     |  |                         |   |   |   |               |                       |                       |
| 4148 | SS            |             |   | 1  | Kelembagaan dan Penguatan Keluarga   |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4149 | SS            |             |   | 2  | Akselerasi anak dengan kecacatan   |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4150 | SS            |             | 5 | Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus |  |                         |   |   |   |               |                       |                       |
| 4151 | SS            |             |   | 1  | Kelembagaan Perlindungan Anak  |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4152 | SS            |             |   | 2  | Advokasi dan Perlindungan Khusus   |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4153 | SS            |             | 6 | Rehabilitasi Sosial  |  |                         |   |   |   |               |                       |                       |
| 4154 | SS            |             |   | 1  | Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental dalam panti |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4155 | SS            |             |   | 2  | Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental luar panti  |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4156 | SS            |             |   | 3  | Kelembagaan dan advokasi sosial  |                         |   | √ |   | Tk.<br>Eselon |                       |                       |
| 4157 | SS            |             |   | 4  | Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial  |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |                                 |   | KLASIFIKASI KEAMANAN   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---------------------------------|---|--|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |                                 |   | SR   | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |                                 |   | 4  | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
| 4158 | SS         |             | 7                               | Rehabilitasi sosial tuna sosial                 |  |   |   |   |           |                    |                       |
| 4159 | SS         |             |                                 | 1   | Gelandangan, pengemis dan pemulung   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4160 | SS         |             |                                 | 2   | Tuna susila dan korban trafficking perempuan                                       |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4161 | SS         |             |                                 | 3   | Penyiapan Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan                                |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4162 | SS         |             |                                 | 4   | Reintegrasi Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan                              |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4163 | SS         |             |                                 | 5   | Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4164 | SS         |             | 8                               | Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA |  |   |   |   |           |                    |                       |
| 4165 | SS         |             |                                 | 1   | Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat                  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4166 | SS         |             |                                 | 2   | Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4167 | SS         |             | 9                               | Pelayanan sosial lanjut usia                    |  |   |   |   |           |                    |                       |
| 4168 | SS         |             |                                 | 1   | Pelayanan sosial dalam dan luar panti  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4169 | SS         |             |                                 | 2   | Pembinaan Pengembangan kelembagaan   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4170 | SS         |             |                                 | 3   | Kerjasama Pengembangan Lembaga   |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4171 | SS         |             |                                 | 4   | Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan  |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4172 | SS         | 2           | Perlindungan dan Jaminan Sosial |   |  |   |   |   |           |                    |                       |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                       |
|------|------------|-------------|---|--|---|---|---|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|
|      |            |             |   |  | SR  | R | T | B |           |                    |                |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |  | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |                       |
| 4173 | SS         |             | 1 | Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial         |   |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 4174 | SS         |             |   | 1  | Bimbingan dan standardisasi   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4175 | SS         |             |   | 2  | Perizinan dan pengumpulan   |   |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan |
| 4176 | SS         |             | 2 | Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran |   |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 4177 | SS         |             |   | 1  | Perlindungan dan pemulihan sosial korban tindak kekerasan               |   |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan |
| 4178 | SS         |             |   | 2  | Pemulangan dan Reintegrasi sosial korban tindak kekerasan               |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4179 | SS         |             |   | 3  | Perlindungan penampungan dan pemulihan sosial pekerja migran            |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4180 | SS         |             |   | 4  | Pemulangan dan Reintegrasi pekerja migran                               |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4181 | SS         |             | 3 | Evaluasi dan pelaporan   |   |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 4182 | SS         |             |   | 1  | Evaluasi dan pelaporan Kerjasama  |   |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan |
| 4183 | SS         |             |   | 2  | Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan                                      |   |   |   | √         | Tk. Eselon         |                | Unit pelaksana urusan |
| 4184 | SS         |             | 4 | Perlindungan sosial korban bencana sosial                      |   |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 4185 | SS         |             |   | 1  | Ketahanan sosial masyarakat ( Keserasian sosial, penguatan sumber daya) |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4186 | SS         |             |   | 2  | Tanggap Darurat ( Bantuan darurat, Advokasi sosial)                     |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4187 | SS         |             |   | 3  | Pemulihan sosial ( penguatan sosial, advokasi sosial)                   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |   |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 4188 | SS         |             |   | 4 | Kerja samapemerintah dan non pemeintah                          |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4189 | SS         |             | 5 |   | Perlindungan sosial korban bencana alam                         |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4190 | SS         |             |   | 1 | Kesiapsiagaan dan mitigasi                                      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4191 | SS         |             |   | 2 | Bantuan Tanggap darurat   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4192 | SS         |             |   | 3 | Advokasi Sosial Tanggap Darurat                                 |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4193 | SS         |             |   | 4 | Pemulihan sosial dan penguatan sosial                           |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4194 | SS         |             |   | 5 | Kerja sama pemerintahan dan non pemerintahan                    |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4195 | SS         |             | 5 |   | Jaminan sosial  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4196 | SS         |             |   | 1 | Seleksi dan verifikasi  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4197 | SS         |             |   | 2 | Asuransi kesejahteraan sosial kelembagaan dan pengelolaan premi |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4198 | SS         |             |   | 3 | Pendampingan Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4199 | SS         |             |   | 4 | Penyaluran Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan         |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4200 | SS         |             |   | 5 | Kerja sama pemerintah dan non pemerintah                        |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4201 | SS         | 3           |   |   | Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan               |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4202 | SS         |             | 1 |   | Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial                    |                      |   |   |   |            |                    |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                       |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES  | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------|---|---|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                                       |  | SR                      | R | T | B |               |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                                       |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8             | 9                     | 10                    |
| 4203 | SS            |             |   | 1                                     | Bimbingan kesejahteraan sosial ketahanan keluarga            |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4204 | SS            |             |   | 2                                     | Konsultasi dan advokasi ketahanan keluarga                   |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4205 | SS            |             |   | 3                                     | Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan                |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4206 | SS            |             |   | 4                                     | Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4207 | SS            |             |   | 5                                     | Kerja sama Kemitraan dunia usaha                             |                         |   | √ |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4208 | SS            |             |   | 6                                     | Kerja sama Bimbingan Sosial                                  |                         |   | √ |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4209 | SS            |             |   | 7                                     | Kelembagaan Karang Taruna                                    |                         |   |   | √ | Staff         |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4210 | SS            |             |   | 8                                     | Pengembangan Kapasitas Karang taruna                         |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4211 | SS            |             | 2 | Pemberdayaan komunitas adat terpencil |  |                         |   |   |   |               |                       |                       |
| 4212 | SS            |             |   | 1                                     | Identitas Persiapan pemberdayaan                             |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4213 | SS            |             |   | 2                                     | Analisis Persiapan pemberdayaan                              |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4214 | SS            |             | 3 | Pemberdayaan sumber daya manusia      |  |                         |   |   |   |               |                       |                       |
| 4215 | SS            |             |   | 1                                     | Pemberdayaan sumber daya manusia adat terpencil              |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4216 | SS            |             |   | 2                                     | Pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil      |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4217 | SS            |             | 4 | Penggalian dan pengembangan potensi   |  |                         |   |   |   |               |                       |                       |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |  |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|--|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |  |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |  |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 4218 | SS         |             |   | 1  | Penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan                                |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4219 | SS         |             |   | 2  | Pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan                              |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4220 | SS         |             |   | 3  | Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil ( keserasian sosial, penguatan sosial) |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4221 | SS         |             |   | 3  | Kerja sama kelembagaan   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4222 | SS         |             |   | 4  | Kerja sama Pemantauan, evaluasi dan pelaporan  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4223 | SS         |             | 5 | Penanggulangan kemiskinan perkotaan dan perdesaan    |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4224 | SS         |             |   | 1  | Identifikasi dan analisis  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4225 | SS         |             |   | 2  | Pengembangan kapasitas sumber daya manusia   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4226 | SS         |             |   | 3  | Pengembangan kapasitas usaha   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4227 | SS         |             |   | 4  | Bimbingan Penataan sosial lingkungan kumuh   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4228 | SS         |             |   | 5  | Pengembangan Penataan sosial lingkungan kumuh  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4229 | SS         |             |   | 6  | Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4230 | SS         |             |   | 7  | Pengembangan aksesibilitas   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4231 | SS         |             | 6 | Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4232 | SS         |             |   | 1  | Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan ( pengangkatan, penghargaan,             |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP              |                                   |  |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |                       |                       |
|------|------------|--------------------------|-----------------------------------|--|---|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |            |                          |                                   |  |   | SR                   | R | T | B |           |                    |                       |                       |                       |
| 1    | 2          | 3                        |                                   |  |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |                       |                       |
|      |            |                          |                                   |  | kesejahteraan)  |                      |   |   |   |           |                    |                       |                       |                       |
| 4233 | SS         |                          | 2                                 |  | Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan( identifikasi, pendayagunaan) |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |                       |                       |
| 4234 | SS         |                          | 3                                 |  | Pengembangan kesetiakawanan sosial (penggalan nilai, pelestarian nilai)             |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |                       |                       |
| 4235 | SS         |                          | 4                                 |  | Pengelolaan taman makam pahlawan nasional utama                                     |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |                       |                       |
| 4236 | SS         |                          | 5                                 |  | Standardisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional                      |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |                       |                       |
| 4237 | PAR        | <b>URUSAN PARIWISATA</b> |                                   |  |   |                      |   |   |   |           |                    |                       |                       |                       |
| 4238 | PAR        | 1                        | PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA |  |   |                      |   |   |   |           |                    |                       |                       |                       |
| 4239 | PAR        |                          | 1                                 | Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata                               |   |                      |   |   |   |           |                    | Tk. Eselon            | Unit pelaksana urusan |                       |
| 4240 | PAR        |                          | 1                                 | Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata)             |   |                      |   |   |   |           |                    | Staff                 | Unit pelaksana urusan |                       |
| 4241 | PAR        |                          | 2                                 | Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata) |   |                      |   |   |   |           |                    | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4242 | PAR        |                          | 3                                 | Pengembangan Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya                           |   |                      |   |   |   |           |                    | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4243 | PAR        |                          | 4                                 | Pengembangan Zona Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK                   |   |                      |   |   |   |           |                    | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4244 | PAR        |                          | 5                                 | Pengembangan Potensi dan Promosi Investasi Pariwisata                        |   |                      |   |   |   |           |                    | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4245 | PAR        |                          | 2                                 | Pengembangan Daya Tarik Wisata   |   |                      |   |   |   |           |                    |                       |                       |                       |
| 4246 | PAR        |                          | 1                                 | Bimtek Daya Tarik Wisata 5 Tahun   |   |                      |   |   |   |           |                    | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                     |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|---------------------|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                     |   | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                     |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 4247 | PAR           |             |   | 2                   | Fasilitas Pengembangan Daya Tarik Wisata                            |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4248 | PAR           |             |   | 3                   | Pengembangan daya tarik wisata kota pusaka                          |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4249 | PAR           |             |   | 4                   | Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan                                |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4250 | PAR           |             |   | 5                   | Penghargaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award)             |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4251 | PAR           |             | 3 | Industri Pariwisata |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 4252 | PAR           |             |   | 1                   | Sarana Pariwisata   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4253 | PAR           |             |   |                     | usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata                      |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4254 | PAR           |             |   |                     | penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4255 | PAR           |             |   | 2                   | Jasa Pariwisata   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 4256 | PAR           |             |   |                     | - jasa transportasi wisata  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4257 | PAR           |             |   |                     | - jasa informasi pariwisata   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4258 | PAR           |             |   |                     | - penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi                     |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4259 | PAR           |             |   |                     | - jasa perjalanan wisata  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4260 | PAR           |             |   |                     | - jasa konsultan pariwisata   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4261 | PAR           |             |   |                     | - jasa pramuwisata dan penyelenggaraan pertemuan                    |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |                      |  |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES  | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|----------------------|--|---|-------------------------|---|---|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |                      |  |   | SR                      | R | T | B |               |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |                      |  |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8             | 9                     | 10                    |
| 4262 | PAR           |             |                      |  | - insentif  |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4263 | PAR           |             |                      |  | konvensi  |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4264 | PAR           |             |                      |  | pameran   |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4265 | PAR           |             |                      | 3  | Pengembangan Produk dan Pelayanan                     |                         |   |   |   |               |                       |                       |
| 4266 | PAR           |             | 4                    | Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata                       |   |                         |   |   |   |               |                       |                       |
| 4267 | PAR           |             |                      | 1  | Perancangan dan Pemantauan<br>Pemberdayaan Pariwisata |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4268 | PAR           |             |                      | 2  | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa                 |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4269 | PAR           |             |                      | 3  | Kemitraan dan Kelembagaan Masyarakat                  |                         |   |   | √ |               |                       |                       |
| 4270 | PAR           |             | 5                    | Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi,<br>Insentif, dan Event |   |                         |   | √ |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4271 | PAR           |             |                      | 1  | Pengembangan Wisata Kulier dan Belanja                |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4272 | PAR           |             |                      | 2  | Pengembangan Rekreasi dan Hiburan                     |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4273 | PAR           |             |                      | 3  | Pengembangan Wisata Alam dan Budaya                   |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4274 | PAR           |             |                      | 4  | Pengembangan Wisata Konvensi, Insentif<br>dan Event   |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4275 | PAR           | 2           | PEMASARAN PARIWISATA |  |   |                         |   |   |   |               |                       |                       |
| 4276 | PAR           |             | 1                    | Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata                        |   |                         |   |   |   |               |                       |                       |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                 |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES  | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|---|---|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                                 |  | SR                      | R | T | B |               |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                                 |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8             | 9                     | 10                    |
| 4277 | PAR           |             |   | 1                               | Informasi Pasar Dalam Negeri   |                         | √ |   |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4278 | PAR           |             |   |                                 | Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri  |                         | √ |   |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4279 | PAR           |             |   | 2                               | Informasi Pasar Luar Negeri  |                         | √ |   |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4280 | PAR           |             |   | 3                               | Hubungan Lembaga Pariwisata dan Widya Wisata   |                         | √ |   |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4281 | PAR           |             |   | 4                               | Perancangan Pemasaran Pariwisata   |                         | √ |   |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4282 | PAR           |             | 2 | Promosi Pariwisata Luar Negeri  |  |                         |   |   |   |               |                       |                       |
| 4283 | PAR           |             |   | 1                               | Wilayah ASEAN  |                         | √ |   |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4284 | PAR           |             |   | 2                               | Wilayah Asia   |                         | √ |   |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4285 | PAR           |             |   | 3                               | Wilayah Timur Tengah dan Afrika  |                         | √ |   |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4286 | PAR           |             |   | 4                               | Wilayah Amerika dan Pasifik  |                         | √ |   |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4287 | PAR           |             |   | 5                               | Wilayah Eropa  |                         | √ |   |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4288 | PAR           |             | 3 | Promosi Pariwisata Dalam Negeri |  |                         | √ |   |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4289 | PAR           |             | 4 | Pencitraan Indonesia            |  |                         | √ |   |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4290 | PAR           |             |   | 1                               | Strategi Pencitraan Indonesia ( Perencanaan Pencitraan Indonesia, Pemantauan dan evaluasi pencitraan Indonesia | √                       |   |   |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP                                     |   |   |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES  | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|---|---|---|---|-------------------------|---|---|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |   |   |   |   | SR                      | R | T | B |               |                       |                       |
| 1    | 2             | 3   |   |   |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8             | 9                     | 10                    |
| 4291 | PAR           |   |   | 2 | Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang       |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4292 | PAR           |   |   |   | Promosi Media   |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4293 | PAR           |   |   |   | Sarana dan Distribusi Media   |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4294 | PAR           |   |   | 3 | Kerjasama dan Kemitraan Antar lembaga Pemerintah dan non Lembaga Pemerintah |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4295 | PAR           |   | 5 |   | Promosi Konvensi, Insentif, Event, dan Minat Khusus                         |                         |   |   |   |               |                       |                       |
| 4296 | PAR           |   |   | 1 | Promosi KIE Korporasi   |                         |   |   |   |               |                       |                       |
| 4297 | PAR           |   |   |   | Korporasi Dalam Negeri  |                         | √ |   |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4298 | PAR           |   |   |   | Korporasi Luar Negeri   |                         | √ |   |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4299 | PAR           |   |   | 2 | Promosi KIE Pemerintah dan Non Pemerintah                                   |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4300 | PAR           |   |   | 3 | Promosi Minat Khusus wisata bahari dan wisata non bahari                    |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4301 | EKSB          | <b>EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA</b> |   |   |   |                         |   |   |   |               |                       |                       |
| 4302 | EKSB          |   | 1 |   | Pengembangan industri Perfilman   |                         |   |   |   |               |                       |                       |
| 4303 | EKSB          |   |   | 1 | Fasilitasi Industri Perfilman   |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4304 | EKSB          |   |   | 2 | Festival dan Eksibisi Film  |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4305 | EKSB          |   |   | 3 | Produksi  |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |  |  |   | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|--|--|---|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |  |  |   | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |  |  |   | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
| 4306 | EKSB          |             |  | 4  | Pemasaran Film  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4307 | EKSB          |             | 2  | Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 4308 | EKSB          |             |  | 1  | Pengembangan Seni Pertunjukan                                     |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4309 | EKSB          |             |  | 2  | Pengembangan Industri Musik                                       |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4310 | EKSB          |             |  | 3  | Pemasaran Seni Pertunjukan dan Industri Musik                     |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4311 | EKSB          |             |  | 4  | Infrastruktur dan Dokumentasi Seni Pertunjukan dan Industri Musik |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4312 | EKSB          |             | 3  | Pengembangan Seni Rupa                           |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 4313 | EKSB          |             |  | 1  | Pengembangan Seni Rupa Murni, Seni Rupa Terapan, Fotografi        |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 4314 | EKSB          |             |  |  | Kreasi dan Produksi Karya Seni                                    |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4315 | EKSB          |             |  |  | Fasilitasi Pengembangan Seni                                      |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4316 | EKSB          |             |  | 2  | Pemasaran dan Pengembangan Apresiasi                              |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 4317 | EKSB          |             |  |  | Distribusi dan Komersialisasi Karya Seni Rupa                     |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4318 | EKSB          |             |  |  | Apresiasi Karya Seni Rupa   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4319 | EKM           |             | <b>EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN, DAN IPTEK</b> |  |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 4320 | EKM           |             | 1  | Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media      |   |                         |   |   |   |              |                       |                       |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |  |                         |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|--|-------------------------|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |  |                         |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |  |                         |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 4321 | EKM        |             |  | 1                       | Pengembangan Film Animasi dan Komik                                 |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4322 | EKM        |             |  | 2                       | Pengembangan Tulisan Fiksi dan Non Fiksi                            |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4323 | EKM        |             |  | 3                       | Pengembangan Karya Kreatif Audio dan Video                          |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4324 | EKM        |             |  | 4                       | Pengembangan Karya Kreatif Periklanan iklan cetak dan elektronik    |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4325 | EKM        |             | 2  | Desain dan Arsitektur   |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4326 | EKM        |             |  | 1                       | Arsitektur dan Desain Interior                                      |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4327 | EKM        |             |  | 2                       | Komunikasi Visual   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4328 | EKM        |             |  | 3                       | Desain Produk dan Kemasan   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4329 | EKM        |             |  | 4                       | Mode  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4330 | EKM        |             | 3  | Kerjasama dan Fasilitas |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4331 | EKM        |             |  | 1                       | Lisensi Teknologi, pengembangan teknologi dan pemanfaatan teknologi |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4332 | EKM        |             |  | 2                       | Sentra Inovasi dan Inkubator bisnis                                 |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4333 | EKM        |             |  | 3                       | Pengembangan Sentra Kreatif dan pengelolaan sentra kreatif          |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4334 | EKM        |             |  | 4                       | Akses Pembiayaan bank dan non bank                                  |                      | √ |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4335 | PSDP       |             | <b>PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b> |                         |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP              |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN  |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH  |                       |
|------|------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|
|      |            |                          |   |   | SR  | R | T | B |           |                    |                |                       |
| 1    | 2          | 3                        |   |   | 4   | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10             |                       |
| 4336 | PSDP       |                          | 1 | Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata    |   |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 4337 | PSDP       |                          |   | 1   | Program dan Evaluasi  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4338 | PSDP       |                          |   | 2   | Data dan Publikasi  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4339 | PSDP       |                          | 2 | Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif |   |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 4340 | PSDP       |                          |   | 1   | Program dan Evaluasi  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4341 | PSDP       |                          |   | 2   | Data dan Publikasi  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4342 | PSDP       |                          | 3 | Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif     |   |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 4343 | PSDP       |                          |   | 1   | Program dan Evaluasi  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4344 | PSDP       |                          |   | 2   | Penyelenggaraan dan Kerjasama   |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4345 | PSDP       |                          | 4 | Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif           |   |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 4346 | PSDP       |                          |   | 1   | Program dan Evaluasi  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4347 | PSDP       |                          |   | 2   | Evaluasi dan Kerjasama  |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |
| 4348 | IT         | <b>PERIKANAN TANGKAP</b> |   |   |   |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 4349 | IT         |                          | 1 | Sumber Daya Ikan                                      |   |   |   |   |           |                    |                |                       |
| 4350 | IT         |                          |   | 1   | Data dan Statistik Perikanan Tangkap ( pengumpulan dan pengolahan, analisis dan penyajian ) |   |   |   | √         | Staff              | Tidak beresiko | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                     |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN    | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|---------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|-----------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                     |  | SR                   | R | T | B |            |                       |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                     |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                     | 10                    |
| 4351 | IT         |             |   | 2                   | Sumber Daya Ikan Perairan Umum Pemulihan sumber daya ikan perairan umum, tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan )   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4352 | IT         |             |   | 3                   | Sumber Daya Ikan Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan ( pemulihan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan, tata kelola sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan ) |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4353 | IT         |             |   | 4                   | Sumber Daya Ikan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4354 | IT         |             |   |                     | 01. identifikasi sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4355 | IT         |             |   |                     | 02. tata kelola sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4356 | IT         |             |   | 5                   | Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan (Evaluasi pengelolaan data sumber daya ikan, analisis pengelolaan sumber daya ikan )   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4357 | IT         |             | 2 | Pelabuhan Perikanan |  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4358 | IT         |             |   | 1                   | Identifikasi dan Penyiapan Pelabuhan Perikanan ( identifikasi dan analisis, penyiapan bangunan )   |                      |   |   | √ | Staff      | Unit pelaksana urusan |                       |
| 4359 | IT         |             |   | 2                   | Tata Operasional Pelabuhan Perikanan ( tata laksana pelabuhan perikanan, pengusaha dan pelayanan )   |                      |   |   |   | Staff      | Unit pelaksana urusan |                       |
| 4360 | IT         |             |   | 3                   | Pengendalian Pembangunan Pelabuhan Perikanan ( bimbingan pembangunan PPS, PPN, dan PPP, bimbingan pembangunan PPI dan Pelabuhan swasta )   |                      |   |   | √ | Staff      | Unit pelaksana urusan |                       |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|---|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |   |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 4361 | IT         |             |   | 4                                       | Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan ( tata laksana dan sarana, keselamatan pelayaran )  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4362 | IT         |             |   | 5                                       | Pemantauan dan Evaluasi Pelabuhan Perikanan ( pemantauan dan evaluasi PPS, PPN, dan PPP, pemantauan dan evaluasi PPI dan peabuhan swasta ) |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4363 | IT         |             | 3 | Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4364 | IT         |             |   | 1                                       | Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan rancang bangun kapal perikanan, kelaikan kapal perikanan )                                     |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4365 | IT         |             |   | 2                                       | Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Penangkapan Ikan  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4366 | IT         |             |   | 3                                       | Pendaftaran Kapal Perikanan ( identifikasi dan pengukuran, pencatatan dan dokumentasi )  |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4367 | IT         |             |   | 4                                       | Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4368 | IT         |             |   | 5                                       | Pemantauan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dan pelaporan  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4369 | IT         |             | 4 | Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan        |  |                      |   |   | √ | Staff      |                    |                       |
| 4370 | IT         |             |   | 1                                       | Alokasi Usaha Penangkapan Ikan (verifikasi alokasi usaha penangkapan ikan, pelayanan alokasi usaha penangkapan ikan)                       |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4371 | IT         |             |   | 2                                       | Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan (verifikasi pengusahaan penangkapan  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|--------------------------------|---|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                                |   | SR                   | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                                |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
|      |            |             |   |                                | ikan, administrasi perusahaan penangkapan ikan)   |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 4372 | IT         |             |   | 3                              | Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan (verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan berbadan hukum, verifikasi dokumen penangkapan ikan perusahaan perorangan dan koperasi, pemantauan dan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan, pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan, evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan) |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4373 | IT         |             |   | 4                              | Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan (pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan, evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan)   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4374 | IT         |             |   | 5                              | Pemantauan dan evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan (pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan, evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan)   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4375 | IT         |             | 5 | Pengembangan Usaha Penangkapan |   |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 4376 | IT         |             |   | 1                              | Kelembagaan Usaha (tata laksana kelembagaan, kerja sama usaha)  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4377 | IT         |             |   | 2                              | Investasi dan Pemodalannya (tata laksana investasi dan pemodalannya, imbingan investasi dan pemodalannya)   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4378 | IT         |             |   | 3                              | Kenelayanan (identifikasi dan kapasitas nelayan, bimbingan nelayan)   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP               |   |                               |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES  | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|---------------------------|---|-------------------------------|--|-------------------------|---|---|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |                           |   |                               |  | SR                      | R | T | B |               |                       |                       |
| 1    | 2             | 3                         |   |                               |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8             | 9                     | 10                    |
| 4379 | IT            |                           |   | 4                             | Pembinaan pengelolaan usaha (bimbingan pengelolaan usaha, bimbingan diversifikasi usaha)                       |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4380 | IT            |                           |   | 5                             | Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan   |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4381 | <b>IB</b>     | <b>PERIKANAN BUDIDAYA</b> |   |                               |  |                         |   |   |   |               |                       |                       |
| 4382 | IB            |                           | 1 | Prasarana dan Sarana Budidaya |  |                         |   |   |   |               |                       |                       |
| 4383 | IB            |                           |   | 1                             | Lahan dan Air (identifikasi potensi, penataan)   |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4384 | IB            |                           |   | 2                             | Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar (standarisasi, pemantauan dan evaluasi)                                |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4385 | IB            |                           |   | 3                             | Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau (standarisasi, pemantauan dan evaluasi)                                |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4386 | IB            |                           |   | 4                             | Prasarana dan Sarana Budidaya Air Laut (standarisasi, pemantauan dan evaluasi)                                 |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4387 | IB            |                           |   | 5                             | Minapolitan Budidaya (identifikasi potensi, pemanfaatan potensi)   |                         |   | √ |   | Tk.<br>Eselon |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4388 | IB            |                           | 2 | Perbenihan                    |  |                         |   |   |   |               |                       |                       |
| 4389 | IB            |                           |   | 1                             | Induk (pengelolaan induk ikan air tawar, pengelolaan induk ikan air payau dan laut)                            |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4390 | IB            |                           |   | 2                             | Perbenihan Skala Kecil ikan air tawar dan ikan air laut  |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4391 | IB            |                           |   | 3                             | Perbenihan Skala Besar (perbenihan skala besar ikan air tawar, perbenihan skala besar ikan air payau dan laut) |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4392 | IB            |                           |   | 4                             | Standarisasi dan Sertifikasi Perbenihan  |                         |   |   | √ | Staff         | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                               |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|-------------------------------|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                               |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                               |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 4393 | IB         |             |   | 5                             | Informasi dan Distribusi Perbenihan   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4394 | IB         |             | 3 | Produksi                      |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4395 | IB         |             |   | 1                             | budidaya air tawar (standarisasi dan penerapan teknologi budidaya air tawar)  |                      |   | √ |   | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4396 | IB         |             |   | 2                             | budidaya air payau dan laut (standarisasi, penerapan teknologi budidaya air payau dan laut)                                 |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4397 | IB         |             |   | 3                             | budidaya ikan hias (standarisasi, penerapan teknologi budidaya ikan hias)   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4398 | IB         |             |   | 4                             | sertifikasi ( monitoring dan evaluasi sertifikasi)  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4399 | IB         |             |   | 5                             | data dan statistik perikanan budidaya ( pengumpulan dan pengolahan data, analisa dan penyajian data statistik )             |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4400 | IB         |             | 4 | Kesehatan Ikan dan Lingkungan |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4401 | IB         |             |   | 1                             | Hama dan penyakit ikan ( metode dan sistem pengendalian hama dan penyakit, monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan ) |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4402 | IB         |             |   | 2                             | perlindungan lingkungan budidaya ( pengendalian lingkungan budaya, rehabilitasi lingkungan budidaya )                       |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4403 | IB         |             |   | 3                             | Standarisasi dan kesehatan dan lingkungan ( dan standarisasi mode uji kesehatan ikan dan lingkungan )                       |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4404 | IB         |             |   | 4                             | Obat ikan, kimia, dan bahan biologi ( monitoring dan evaluasi obat ikan kimia   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP                              |   |                  |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|--|---|------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |  |   |                  |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3  |   |                  |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
|      |            |  |   |                  | dan bahan biologi )  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4405 | IB         |  |   | 5                | Pengendalian residu ( Perencanaan dan tindak lanjut pengendalian residu )  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4406 | IB         |  | 5 | Usaha Budidaya   |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4407 | IB         |  |   | 1                | investasi dan permodalan   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4408 | IB         |  |   | 2                | kewirausahaan ( bimbingan usaha dan kemitraan )  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4409 | IB         |  |   | 3                | pelayanan usaha ( perizinan, pemantauan dan evaluasi )   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4410 | IB         |  |   | 4                | kelembagaan dan ketenagakerjaan  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4411 | IB         |  |   | 5                | infomasi usaha dan promosi   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4412 | IB         | PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |   |                  |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4413 | IB         |  | 1 | Pengolahan Hasil |  |                      |   |   | √ |            | Tk. Eselon         | Unit pelaksana urusan |
| 4414 | IB         |  |   | 1                | Standarisasi (analisis standar, penerapan standar)   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4415 | IB         |  |   | 2                | Pengembangan produk (skala mikro, kecil, menengah, pengembangan produk skala besar)  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4416 | IB         |  |   | 3                | Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (bimbingan teknis usaha mikro, kecil dan menengah, kerja sama usaha mikro, kecil dan menengah) |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4417 | IB         |  |   | 4                | Industri pengolahan (bimbingan teknis industri pengolahan, kerjasama asosiasi  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                                  |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|----------------------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                                  |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                                  |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
|      |            |             |   |                                  | dan industri penolahan)  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4418 | IB         |             |   | 5                                | Sarana dan prasarana   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4419 | IB         |             | 2 | Pengembangan Produk Non Konsumsi |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4420 | IB         |             |   | 1                                | standarisasi ( analisis standar, penerapan standar )   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4421 | IB         |             |   | 2                                | promosi dan jaringan pasar ikan hias   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4422 | IB         |             |   | 3                                | pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah ( bimbingan teknis usaha mikro, kecil dan menengah, identifikasi dan evaluasi sentra pengolahan produk ) |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4423 | IB         |             |   | 4                                | pengembangan industri ( kerja sama industri )  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4424 | IB         |             |   | 5                                | sarana dan prasarana   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4425 | IB         |             | 3 | Pemasaran Dalam Negeri           |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4426 | IB         |             |   | 1                                | Kelembagaan ( kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan, kelembagaan pasar hasil perikanan )  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4427 | IB         |             |   | 2                                | Analisis dan informasi pasar dalam negeri  |                      |   |   | √ | Staff      |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4428 | IB         |             |   | 3                                | Jaringan distribusi dan kemitraan  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4429 | IB         |             |   | 4                                | Promosi dan kerja sama   |                      |   |   |   |            |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4430 | IB         |             |   |                                  | 1. Promosi   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |



| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                       |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|-----------------------|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                       |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                       |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 4431 | IB         |             |   |                       | 2. Kerjasama   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4432 | IB         |             |   | 5                     | Sarana dan prasarana   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4433 | IB         |             | 4 | Pemasaran Luar Negeri |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4434 | IB         |             |   | 1                     | Kelembagaan (analisis kelembagaan, kerjasama kelembagaan)                            |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4435 | IB         |             |   | 2                     | Analisis dan informasi pasar luar negeri dan kebutuhan import                        |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4436 | IB         |             |   | 3                     | Pengembangan ekspor peningkatan akses pasar, pengamanan dan perlindungan akses pasar |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4437 | IB         |             |   | 4                     | Pengendalian impor, analisis kebutuhan impor, pemantauan evaluasi impor              |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4438 | IB         |             |   | 5                     | Promosi dan kerjasama  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4439 | IB         |             |   |                       | 1. Promosi   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4440 | IB         |             |   |                       | 2. Kerjasama   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4441 | IB         |             | 5 | Usaha dan investasi   |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4442 | IB         |             |   | 1                     | Pelayanan usaha ( mikro, kecil dan menengah, pelayanan usaha besar )                 |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4443 | IB         |             |   | 2                     | Kemitraan usaha ( usaha kecil dan menengah, kemitraan usaha besar )                  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4444 | IB         |             |   | 3                     | Ketenagakerjaan pengolahan dan pemasaran   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4445 | IB         |             |   | 4                     | Investasi dan permodalan   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP                                     |   |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|---|---|---|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |   |   |   |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3   |   |   |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
| 4446 | IB         |   |   | 5   | Informasi dan promosi   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4447 | <b>KL</b>  | <b>KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL</b> |   |   |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4448 | KL         |   | 1 | Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil |   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4449 | KL         |   |   | 1   | Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi (rencana tata ruang laut nasional, rencana tata ruang laut lintas wilayah dan perairan ) |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4450 | KL         |   |   | 2   | Rencana tata ruang dan zona wilayah I Jawa, sumatera dan leuseur sunda  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4451 | KL         |   |   | 3   | Rencana tata ruang dan zona wilayah II ( kalimantan dan maluku, zonasi wilayah sulawesi dan papua )   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4452 | KL         |   |   | 4   | Informasi dan evaluasi spasial  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4453 | KL         |   | 2 | Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan               |   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    |                       |
| 4454 | KL         |   |   | 1   | Jejaring, data, dan informasi konservasi  |                      |   |   |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4455 | KL         |   |   | 2   | Konservasi wawasan (perancangan konservasi kawasan, perlindungan dan pelestarian kawasan)   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4456 | KL         |   |   | 3   | Konservasi jenis ikan (perancangan konservasi jenis ikan, perlindungan dan plestarian jenis ikan)   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4457 | KL         |   |   | 4   | Pemanfaatan kawasan dan jenis ikan (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jenis  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |   |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |   |   | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |   |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
|      |            |             |   |   | ikan)   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4458 | KL         |             | 3 |   | Pesisir dan Lautan  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4459 | KL         |             |   | 1 | Mitigasi bencana lingkungan (mitigasi encana psisir dan lautan, adaptasi dampak perubahan iklim)  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4460 | KL         |             |   | 2 | Pendayagunaan sumber daya kelautan (benda muatan kapal tenggelam, jasa kelautan)  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4461 | KL         |             |   | 3 | penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir dan laut (penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir, penanggulangan pencemaran sumer daya laut) |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4462 | KL         |             | 4 |   | rehabilitasi dan reklamasi  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4463 | KL         |             |   | 1 | Identifikasi pulau-pulau terkecil   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4464 | KL         |             |   | 2 | Pengelolaan ekosistem pulau-pulau terkecil (rehailitasi, mitigasi dan adaptasi )  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4465 | KL         |             |   | 3 | Investasi dan promosi pulau-pulau terkecil  |                      |   |   | √ |            |                    |                       |
| 4466 | KL         |             |   | 4 | Sarana dan prasarana pulau-pulau terkecil   |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4467 | KL         |             | 5 |   | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4468 | KL         |             |   | 1 | Akses permodalan ( akses perbankan, akses non Bank )  |                      |   | √ |   | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |
| 4469 | KL         |             |   | 2 | Akses ilmu pengetahuan dan teknologi ( identifikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan implementasi ilmu  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS.  | JENIS ARSIP |  |                                  |   | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|-------------|-------------|--|----------------------------------|---|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |             |             |  |                                  |   | SR                   | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2           | 3           |  |                                  |   | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
|      |             |             |  |                                  | pengetahuan dan teknologi )   |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 4470 | KL          |             |  | 3                                | Sosial budaya masyarakat ( penguatan kelembagaan dan peningkatan peran serta masyarakat )   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4471 | KL          |             |  | 4                                | Pengembangan usaha ( pelayanan usaha, usaha mikro )   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4472 | <b>PSDK</b> |             | <b>PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> |                                  |   |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 4473 | PSDK        |             | 1  | Pengawasan Sumber Daya Perikanan |   |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 4474 | PSDK        |             |  | 1                                | Pengawasan penangkapan wilayah Barat (pengawasan penangkapan ikan wilayah barat I, pengawasan penangkapan ikan wilayah barat II)  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4475 | PSDK        |             |  | 2                                | Pengawasan penangkapan ikan wilayah Timur (pengawasan penangkapan ikan wilayah timur I dan II)  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4476 | PSDK        |             |  | 3                                | Pengawasan pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran (pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan dan pemasaran wilayah barat, pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan dan pemasaran wilayah timur) |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4477 | PSDK        |             |  | 4                                | Pengawasan usaha budidaya wilayah barat dan wilayah timur   |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4478 | PSDK        |             | 2  | Pengawasan Sumber Daya Kelautan  |   |                      |   |   | √ |           |                    |                       |
| 4479 | PSDK        |             |  | 1                                | pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4480 | PSDK        |             |  | 2                                | pengawasan pencemaran perairan (pengawasan pencemaran pesisir laut dan  |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |  |  | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|--|--|----------------------|---|---|---|------------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |  |  | SR                   | R | T | B |            |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |  |  | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8          | 9                  | 10                    |
|      |            |             |   |  | pesisir pantai, pengawasan pencemaran perairan umum dan pedalaman)   |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4481 | PSDK       |             |   | 3  | pengawasan pesisir dan pulau-pulau terkecil  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4482 | PSDK       |             |   | 4  | pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4483 | PSDK       |             | 3 | Kapal Pengawas   |  |                      |   |   |   |            |                    |                       |
| 4484 | PSDK       |             |   | 1  | Logistik dan operasional wilayah Barat   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4485 | PSDK       |             |   | 2  | Logistik operasional wilayah Timur   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4486 | PSDK       |             |   | 3  | Perawatan kapal pengawas (wilayah barat dan timur)   |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4487 | PSDK       |             |   | 4  | Pengawakan kapal pengawas ( wilayah barat dan timur )  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4488 | PSDK       |             | 4 | Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur |  |                      |   |   |   |            |                    | Tidak beresiko        |
| 4489 | PSDK       |             |   | 1  | Sistem pemantauan ( pengembangan sistem pemantauan, kerja sama pemantauan )  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4490 | PSDK       |             |   | 2  | Pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan (opersional sistem pemantauan pemanfaatan sumber , analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan) |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4491 | PSDK       |             |   | 3  | Pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan (analisis hasil pemantauan pemanfaatan sumber daya ikan)  |                      |   |   | √ | Staff      | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4492 | PSDK       |             |   | 4  | Pengembangan infrastruktur pengawasan (penyiapan infrastruktur, evaluasi   |                      |   |   | √ | Tk. Eselon |                    | Unit pelaksana urusan |

| No.  | KODE<br>KLAS. | JENIS ARSIP |   |                       |  | KLASIFIKASI<br>KEAMANAN |   |   |   | HAK<br>AKSES | DASAR<br>PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|---------------|-------------|---|-----------------------|--|-------------------------|---|---|---|--------------|-----------------------|-----------------------|
|      |               |             |   |                       |  | SR                      | R | T | B |              |                       |                       |
| 1    | 2             | 3           |   |                       |  | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8            | 9                     | 10                    |
|      |               |             |   |                       | infrastruktur)   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 4493 | PSDK          |             | 5 |                       | Penanganan pelanggaran   |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 4494 | PSDK          |             |   | 1                     | Penyidikan (wilayah barat dan timur)                             |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4495 | PSDK          |             |   | 2                     | Penanganan barang bukti dan awak kapal (wilayah barat dan timur) |                         |   | √ |   | Tk. Eselon   |                       | Unit pelaksana urusan |
| 4496 | PSDK          |             |   | 3                     | Kerjasama penegakan hukum dan fasilitas PPNS perikanan           |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4497 | PSDK          |             |   | 4                     | Pemantauan dan evaluasi  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4498 | <b>KI</b>     |             |   | <b>KARANTINA IKAN</b> |  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 4499 | KI            |             | 1 |                       | Tindak Karantina Ikan  |                         |   |   |   |              |                       |                       |
| 4500 | KI            |             |   | 1                     | Pemeriksaan ikan   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4501 | KI            |             |   | 2                     | Penahanan  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4502 | KI            |             |   | 3                     | Pengasingan  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4503 | KI            |             |   | 4                     | Pengamatan   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4504 | KI            |             |   | 5                     | Pengamatan   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4505 | KI            |             |   | 6                     | Penolakan  |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4506 | KI            |             |   | 7                     | Pemusnahan   |                         |   |   | √ | Staff        | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4507 | KI            |             |   | 8                     | Pelepasan/pembebasan   |                         |   |   | √ |              |                       |                       |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |                           | KLASIFIKASI KEAMANAN                 |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH |                       |                       |                       |
|------|------------|-------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---|---|---|-----------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |                           | SR                                   | R | T | B |           |                    |               |                       |                       |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |                           | 4                                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10            |                       |                       |                       |
| 4508 | KI         |             | 2 | Tertib Operasional        |                                      |   |   |   |           |                    |               |                       |                       |                       |
| 4509 | KI         |             |   |                           |                                      |   |   |   |           |                    |               |                       |                       |                       |
| 4510 | KI         |             |   | 1                         | Persyaratan lalu lintas pemasukan    |   |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                       |                       |
| 4511 | KI         |             |   | 2                         | Persyaratan lalu lintas pengeluaran  |   |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    | Unit pelaksana urusan |                       |                       |
| 4512 | KI         |             |   | 3                         | Permohonan sertifikat                |   |   |   |           |                    | √             | Staff                 | Unit pelaksana urusan |                       |
| 4513 | KI         |             |   | 4                         | Pemasukan formulir                   |   |   |   |           |                    | √             | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4514 | KI         |             |   | 5                         | Pemasukan sertifikat                 |   |   |   |           |                    | √             | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4515 | KI         |             |   | 6                         | Evaluasi dan monitoring sertifikat   |   |   |   |           |                    | √             | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4516 | KI         |             |   | 7                         | Surat perintah                       |   |   |   |           |                    | √             | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4517 | KI         |             |   | 8                         | Rekomendasi                          |   |   |   |           |                    | √             | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4518 | KI         |             | 3 | Pencegahan Penyakit       |                                      |   |   |   |           | √                  | Tk. Eselon    |                       |                       |                       |
| 4519 | KI         |             |   | 1                         | Penutupan suatu area                 |   |   |   |           |                    |               |                       |                       |                       |
| 4520 | KI         |             |   | 2                         | Pelanggaran lalu lintas ikan         |   |   |   |           |                    |               |                       |                       |                       |
| 4521 | KI         |             | 4 | Pengawasan Karantina Ikan |                                      |   |   |   |           |                    | √             | Staff                 | Tidak beresiko        | Unit pelaksana urusan |
| 4522 | KI         |             |   | 1                         | Pengawasan peraturan perkarantinaaan |   |   |   |           |                    |               |                       |                       |                       |
| 4523 | KI         |             |   | 2                         | Pengawasan pelaksanaan operasional   |   |   |   |           |                    |               |                       |                       |                       |

| No.  | KODE KLAS. | JENIS ARSIP |   |           |                               | KLASIFIKASI KEAMANAN |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN | UNIT PENGOLAH         |
|------|------------|-------------|---|-----------|-------------------------------|----------------------|---|---|---|-----------|--------------------|-----------------------|
|      |            |             |   |           |                               | SR                   | R | T | B |           |                    |                       |
| 1    | 2          | 3           |   |           |                               | 4                    | 5 | 6 | 7 | 8         | 9                  | 10                    |
| 4524 | KI         |             | 5 | Instalasi |                               |                      |   |   | √ | Staff     | Tidak beresiko     | Unit pelaksana urusan |
| 4525 | KI         |             |   | 1         | Instalasi karantina sementara |                      |   |   |   |           |                    |                       |
| 4526 | KI         |             |   | 2         | Lokasi karantina              |                      |   |   |   |           |                    |                       |


  
**BUPATI KUNINGAN**
  

  
**H. ACEP PURNAMA, SH, MH**



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor .....15 Tahun

Nomor 15

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor .....15..... Tahun

Tanggal 16 Mei 2018



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

IWA KARNIWA